

SERI 1



KISAH DARI KAMPUNG

TANGGUH DI TENGAH KRISIS



SERI 1

KISAH DARI KAMPUNG

TANGGUH DI TENGAH KRISIS

Tim Penulis, ***Kisah dari Kampung***, Jakarta: AMAN, 2022.

xvi, 458 hlm.: ill. (16,5 cm x 21 cm)

Penanggung Jawab	: Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi
Pimpinan Umum	: Deputi I Sekjen AMAN Bidang Organisasi Eustobio R. Renggi
Tim Koordinasi	: Abdi Akbar, Titi Pangestu, & Giat Perwangsa
Koordinator	: Evi Mariani
Wakil Koordinator	: Nurdiyansah Dalidjo
Mentor	: Nestor Rico Tambunan, Brigitta Isworo Laksmi, Evi Mariani, Sapariah Saturi, Caroline Jasintha Monteiro, dan Mardiyah Chamim
Penyelaras Bahasa	: Brigitta Isworo Laksmi dan Nurdiyansah Dalidjo
Penyunting Foto	: Ricky Yudhistira
Desain dan Tata Letak	: Kidal Studio
Penulis Kader AMAN	: Adrianus Lawe, Aldio Parante, Ardi Pratama Syahputra, Baso Gandangsurra, Debora Rambu Kasuatu, Fitriyani, Fransiskus Mado, Haeruddin, Henriana Hatra, Ilham Saifulloh, Jomima Ihalawey, Lastri, Lidong Sarungallo, Mahyuni, Mika Ganobal, Munira, Mustaqim, Odih Kustiandi, Pipi Supeni, Pliriwisma, Rasmiyanti Umar, Ririn Mesi Noviana, Rosa'adah, Supriadi, Susiati Ningsih, Susilawati, Taufikurahman, Timotius, Walton Praniko Al Jebo, Yeryana, Yoab Ulimpa, dan Yosis Sentris Lilihata
Jurnalis/Penulis	: Adi Marsiela, Alisa Qottrun Nada Munawaroh, Alya Nurbaiti, Amilia Buana Dewi Islamy, Andi Hajramurni, Apriadi Gunawan, Bambang Muryanto, Dian Putri, Fadiyah Alaidrus, Gemma Holliani Cahya, Halvin Octriadi Utama, Margareth Suhartin Aritonang, Nurdiyansah Dalidjo, Permata Adinda Priyadi, Safina Maulida, Sapariah Saturi, Wijatnika, dan Zulyani Evi

SERI 1

KISAH DARI KAMPUNG

TANGGUH DI TENGAH KRISIS

Kisah dari Kampung merupakan rangkaian buku seri berisi kumpulan kisah yang merekam pembelajaran gerakan Masyarakat Adat di tingkat kampung. “*Tangguh di Tengah Krisis*” menjadi tema besar pada seri perdana ini. Kisah dari Kampung ditulis secara kolaboratif dengan sudut pandang Masyarakat Adat oleh Kader AMAN (termasuk pemuda adat dan perempuan adat) bersama para jurnalis maupun penulis.

Rumah AMAN

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820

Telepon/Faks : (021) 829 7954/837 06282
Surel : rumahaman@cbn.net.id
Facebook : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Twitter : @RumahAMAN
Instagram : @rumah.aman
YouTube : AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -
Situs : www.aman.or.id
Siniar Spotify : Radio Gaung AMAN/www.radio.aman.or.id

Daftar Isi

Sambutan Sekretaris Jenderal AMAN	vii
Menulis bersama Masyarakat Adat	xi
Bagian I Kisah Perjuangan Kolektif Masyarakat Adat	1
01. Kisah dari Natarmage: Tanah dan Perjuangan Kami	3
02. Kisah dari Fanugwa Loran: Mempertahankan Wilayah Adat untuk Kemakmuran Bersama	25
03. Kisah dari Balai Pantai Uang: Hidup Mandiri di Tengah Keterbatasan	39
04. Kisah dari Kasepuhan Bayah: Bukan Seongkok Batu	51
05. Kisah dari Banua Lemo: Tangguh Menghadapi Covid-19	69
06. Kisah dari Barambang Katute: Tangguh di Tengah Ancaman Covid-19	81
07. Kisah dari Suku Sakai Batin Beringin: Perjuangan Berladang di Masa pandemi.....	107
08. Kisah dari Deri Kambajawa: Hutan adalah Ibu bagi Kami	123
09. Kisah dari Uma Saureinu: Kami Menjaga Bumi Sikerei	143
10. Kisah dari Kampung Ansok: Kemandirian Pangkal Kemerdekaan Kami	159

Bagian II Kisah Perjuangan Pemuda Adat	183
11. Kisah dari Anak Talang: Jangan Biarkan Ini Menjadi Pohon Terakhir	185
12. Kisah dari Bulutana: Menjadi Sehat Itu Murah	199
13. Kisah dari Suku Rambang Kapak Tengah: Berdaulat dengan Menanam.....	207
14. Kisah dari Kesu': Tutur Sejarah dan Gerakan Pulang Kampung	221
15. Kisah dari Kasepuhan Ciptamulya: Tanggung dengan Bertani	235
16. Kisah dari Kampung Koker: Pemuda Adat Pulang Kampung	245
17. Kisah dari Kampung Adat Malaumkarta: Dari Sasi Laut dan Gereja	263
18. Kisah dari Negeri Manusela: Menjaga Adat Menjaga Bumi	273
19. Kisah dari Desa Runtu: Ketika Ladang Beralih Jadi Perkebunan Sawit	285
20. Kisah dari Sanggar: Bersama untuk Berdiri di Kaki Sendiri	291
Bagian III Kisah Perjuangan Perempuan Adat	301
21. Kisah dari Haringen: Sehat itu dari Hutan	303
22. Kisah dari Hoana Gura: Buranyita Inspirasi Perempuan	313
23. Kisah dari Negeri Honitetu: Perempuan Mata Sagu	329
24. Kisah dari Suku Osing Desa Kemiren: Kisah Mak Sus dan Sekolah Adat Osing	341
25. Kisah dari Dayak Benuaq: Perempuan Juga Bisa Menjadi Pemimpin	359

26.	Kisah dari Montomisan: Melaut untuk Lipu, Berkebun untuk Rumah	383
27.	Kisah dari Kampung Montong Baan: Kedaulatan Pangan untuk Kedaulatan atas Tanah Adat	395
28.	Kisah dari Percut Saentis: Perempuan Melawan Penjajah Wilayah Adat	409
29.	Kisah dari Punan Dulau: Yang Dulu Terusir dan Kini Pulang	421
30.	Kisah dari Usal Ponto Ai Padeng: Menanam dan Terus Menanam Meski Pandemi	441

Sambutan Sekretaris Jenderal AMAN

Rukka Sombolinggi

Salam Nusantara,

Narasi tentang Masyarakat Adat banyak dikonstruksi oleh pihak lain dengan sudut pandang kolonial dan disebar melalui tulisan. Hingga saat ini, mayoritas Masyarakat Adat terus bergulat dengan stereotipe dan stigma. Kita terlalu sering disebut anti-pembangunan, anti-kemajuan, kolot, terbelakang, dan berbagai cap negatif lainnya. Stereotipe dan stigma dibangun untuk menyingkirkan dan digunakan untuk membenarkan perampasan wilayah adat.

Kisah-kisah tentang Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara sudah mulai muncul dalam dua dekade terakhir, namun belum mampu bersanding sejajar dengan isu-isu populer. Oleh karena itu, penting bagi Masyarakat Adat untuk menuliskan kisahnya sendiri dan menceritakan kisah tersebut kepada semua pihak sebagai bagian dari realita kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan spiritualitas tentang bagaimana sebenarnya Masyarakat Adat mengelola wilayah adatnya secara adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Buku *Kisah dari Kampung* ini digagas untuk menghadirkan realitas Masyarakat Adat, termasuk di masa pandemi. Inisiatif ini adalah bagian dari gerakan pendokumentasian wilayah adat dengan melibatkan beragam perspektif sosial yang ada di Masyarakat Adat, termasuk dari para tetua adat, perempuan adat, pemuda adat, dan seluruh elemen Masyarakat Adat.

Buku ini adalah hasil dari perkawinan dua tradisi bercerita, yakni tradisi lisan di Masyarakat Adat dan tradisi tulisan di kalangan jurnalis. Mempertemukan dua tradisi berkisah ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Mempersatukan persepsi, saling menghargai, empati, dan rasa setara, menjadi modal untuk berkarya tanpa bertemu tatap muka. Ya! Buku ini ditulis di masa pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan pertemuan langsung. Belum lagi kondisi di wilayah adat yang menghadapi tantangan sendiri karena jaringan seluler yang tidak secanggih di perkotaan.

Buku ini juga merupakan bukti resiliensi bekerja di tengah pandemi. Untuk itu, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan jurnalis, Kader AMAN, Pengurus AMAN, dan tentu saja komunitas Masyarakat Adat yang terlibat dalam penulisan buku ini. Saya tak mungkin menyebutkan satu per satu di luar nama-nama di bawah ini:

Jurnalis: Adi Marsiela, Alisa Qottrun Nada Munawaroh, Alya Nurbaiti, Amilia Buana Dewi Islamy, Andi Hajramurni, Apriadi Gunawan, Bambang Muryanto, Dian Putri, Fadiyah Alaidrus, Gemma Holliani Cahya, Halvin Octriadi Utama, Margareth Suhartin Aritonang, Nurdiyansah Dalidjo, Permata Adinda Priyadi, Safina Maulida, Sapariah Saturi, Wijatnika, dan Zulyani Evi.

Kader AMAN: Adrianus Lawe, Aldio Parante, Ardi Pratama Syahputra, Baso Gandangsuru, Debora Rambu Kasuatu, Fitriyani, Fransiskus Mado, Haeruddin, Henriana Hatra, Ilham Saifulloh, Jomima Ihalewey, Latri, Lidong Sarungallo, Mahyuni, Mika Ganobal, Munira, Mustaqim, Odih Kustiandi, Pipi Supeni, Pliriwisma, Rasmiyanti Umar, Ririn Mesi Noviana, Rosa'adah, Supriadi, Susiati Ningsih, Susilawati, Taufikurahman, Timotius, Walton Praniko Al Jebo, Yeryana, Yoab Ulimpa, dan Yosis Sentris Lilihata.

Editor teks: Nestor Rico Tambunan, Brigitta Isworo Laksmi, Evi Mariani, Sapariah Saturi, Caroline Jasintha Monteiro, dan Mardiyah Chamim.

Editor foto: Ricky Yudhistira.

Terima kasih kepada saudara/i saya di PB AMAN: Eustobio, Mina Susana Setra, Erasmus Cahyadi, Abdi Akbar, Titi Pangestu, Giat Perwangsa, Yayan Hidayat, Marolop Manalu Gorga, Annas Radin Syarif, Arifin Saleh, Muhammad Arman, dan Tim Infokom PB AMAN.

Banyak sekali tantangan, suka-duka, dan cerita-cerita lucu yang telah dilalui bersama sebagai dinamika selama proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada semua atas dedikasi dan pantang menyerah mewujudkan lahirnya buku ini. Doa khusus kepada saudari Wijatnika.

Semoga buku ini menginspirasi lahirnya kisah-kisah yang lain dari berbagai pelosok Nusantara. Menjadi jembatan komunikasi sebagai kekuatan dalam menggalang solidaritas, empati, solusi, dan berbagai hal positif untuk mewujudkan Masyarakat Adat Nusantara dan bangsa Indonesia yang bedaulat, mandiri, dan bermartabat.

Selamat membaca!

Menulis bersama Masyarakat Adat

Oleh Nurdiyansah Dalidjo dan Evi Mariani

Sejak awal membahas ide dan rencana untuk Buku Seri Kisah dari Kampung, kami - para jurnalis/penulis dengan beragam latar belakang - merasa terhormat dan bersemangat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Proses tersebut kami lalui lewat serangkaian diskusi untuk menyusun konsep, pendekatan, dan strategi. Buku Seri Kisah dari Kampung didesain untuk melibatkan penulis yang berpasangan, yaitu jurnalis/penulis dan warga Masyarakat Adat (Kader AMAN) yang tinggal di berbagai kampung dengan kekhasannya. Kami dan AMAN menyebutnya “proses penulisan kolaboratif,” di mana masing-masing memiliki peran yang setara dan saling melengkapi.

Proses penulisan kolaboratif menawarkan metode yang unik. Sebagai pasangan, para jurnalis/penulis bersama Kader AMAN menyelami beragam hal tentang identitas maupun kehidupan Masyarakat Adat dan ruang hidupnya, sehingga kisah yang dihasilkan pun dapat menjadi kekuatan dalam menggalang solidaritas, empati, solusi, dan hal positif yang mendukung gerakan Masyarakat Adat.

Keunikan dari proses itu dapat dilihat sebagai penegasan terhadap tindakan afirmasi bagi Masyarakat Adat untuk menulis kisahnya. Bagi Masyarakat Adat yang didominasi oleh tradisi tutur, menulis adalah tindakan yang revolusioner, baik dalam artian melawan keterbatasan pada keterampilan menulis maupun melawan narasi arus utama yang banyak ditulis oleh bukan Masyarakat Adat, sehingga ada bias pada stigma dan diskriminasi. Bagi Masyarakat Adat yang berada dalam situasi konflik, menulis adalah sebuah privilese yang tak mudah untuk dilakukan.

AMAN hendak menegaskan partisipasi Masyarakat Adat dalam menuliskan kisah-kisah hidupnya, meliputi keterkaitan pada identitas serta serangkaian pengalaman, perasaan, dan gagasan yang personal dan politis. Maka, Buku Seri Kisah dari Kampung menitikberatkan pada pengetahuan yang diperoleh dari proses reflektif agar perspektif dan narasi dari Masyarakat Adat tampil asli dan langsung sebagai subjek.

Kolaborasi juga dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan empati dari kalangan yang bukan Masyarakat Adat terhadap ketertindasan yang dialami Masyarakat Adat. Begitu pun sebaliknya. Sehingga, terjadi transfer pengetahuan yang unik dan timbal balik.

Hal itu mensyaratkan para jurnalis/penulis untuk menanggalkan stigma terhadap Masyarakat Adat yang muncul karena asumsi yang selama ini amat jarang dikonfirmasi. Maka, menulis bersama Masyarakat Adat, memiliki kekhasan. Para jurnalis/penulis pun punya peluang untuk berinteraksi dan memahami kelompok-kelompok yang memiliki ketertindasan berlapis di dalam komunitas Masyarakat Adat, seperti perempuan adat, minoritas gender dan seksual (Masyarakat Adat yang LGBTIQ+), penyandang disabilitas, lansia, dan lainnya.

Pada situasi lain, penggalian data dan informasi harus memperhatikan kondisi unik Masyarakat Adat. Data dan informasi diharapkan dapat digali sedetail mungkin, tetapi harus menghormati nilai adat dan peraturan adat yang berlaku. Maka, proses komunikasi dan negosiasi perlu dibangun untuk mencapai suatu konsensus, di mana Masyarakat Adat sebagai pemilik kisah memusyawarahkan dan memutuskannya dengan mekanisme di kampung masing-masing.

Ada bermacam tantangan yang sebelumnya tidak pernah kami duga, apalagi kami melakukannya di tengah pandemi Covid-19. Hampir seluruh interaksi dan koordinasi dilakukan secara daring. Tantangan itu mencakup berbagai hal atau aspek. Ada kendala teknis dalam keterbatasan komunikasi terkait sinyal telepon maupun internet, di mana ada Kader AMAN yang harus keluar kampung hanya untuk bisa saling berkabar. Masalah kesenjangan lain, kami lalui dengan interaksi untuk bersama membangun rasa nyaman dan aman. Ibarat pengantin yang perlu terlebih dulu berpacaran atau bertunangan untuk dapat saling mengenal, memahami, dan membangun konsen. Sementara itu, ada juga perbedaan pola kerja, baik itu kami sebagai penulis/jurnalis maupun kawan-kawan Kader AMAN - melakukan kerja-kerja jurnalistik. Kami saling belajar memahami dan menemukan cara dalam hal adaptasi dan negosiasi proses. Setiap pasangan atau setiap kisah menjadi unik, salah satunya karena faktor tersebut. Di tengah jalan, kami juga harus mengupayakan dukungan bagi pasangan yang menghadapi keterbatasan. Beberapa pasangan juga mengalami bongkar-pasang untuk bisa melanjutkan proses. Kami juga kehilangan satu kawan yang meninggal setelah terpapar Covid-19. Sejumlah kisah juga mengalami penundaan karena sejumlah kawan jurnalis/penulis dan Kader AMAN maupun anggota keluarga kami, terinfeksi virus tersebut. Beberapa kampung terpaksa kembali menerapkan sejumlah pembatasan, bahkan karantina.

Terlepas dari serangkaian tantangan itu, buku ini kemudian lahir dan hadir. Itu menjadi kebanggaan bagi kami karena telah melalui tantangan itu dan menegaskan bahwa - bersama Masyarakat Adat - kami dapat membuktikan kalau itu bukan hal yang mustahil.

Buku Seri ini berisi kumpulan kisah dari sudut pandang Masyarakat Adat dan berisi profil kampung, tantangan, dan capaian gerakan Masyarakat Adat di kampung yang dilakukan secara kolektif, termasuk oleh perempuan adat dan pemuda adat. Buku juga mencakup beragam topik yang terhubung dengan gerakan pengakuan, kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, pemetaan wilayah adat, sekolah adat, dan lain-lain.

Selamat membaca! Dan mari kita bersama mendukung gerakan Masyarakat Adat di Indonesia.

* * *

Bagian I
Kisah Perjuangan Kolektif
Masyarakat Adat





01

Kisah dari Natarmage: Tanah dan Perjuangan Kami

Oleh Fransiskus Mado bersama Apriadi Gunawan

“Tanah amin moret Amin.” Itu ungkapan yang bermakna bahwa tanah kami adalah hidup kami serta menggambarkan prinsip Komunitas Masyarakat Adat Natarmage di Pulau Flores Bagian Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sinilah tempat saya, Fransiskus Mado, dilahirkan dan dibesarkan.

Wilayah adat kami meliputi sejumlah desa, yaitu Desa Natarmage, Desa Tanarawa, Desa Tuabao, Desa Talibura, Desa Ilin Medo, dan Desa Nangahale. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama. Saya sendiri tinggal di Kecamatan Waiblama.

Komunitas kami ini mempunyai wilayah adat yang terbentang luas dari utara perairan Laut Flores di Kecamatan Talibura hingga masuk ke pedalaman yang mempunyai area gunung bukit serta landai menembus ke selatan dari sebagian wilayah di Kecamatan Waiblama.

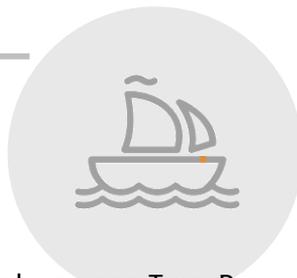
Kehidupan saya dan warga adat lain di Komunitas Masyarakat Adat Natarmage, masih bergantung pada pola hidup tradisional yang diwariskan oleh leluhur dengan tradisi yang masih melekat pada kepercayaan terhadap leluhur dan alam semesta. Meski bertahan dengan pola tradisional, kami berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu.

Di tengah kesibukan sehari-hari, pada musim kemarau, kami di kampung akan beramai-ramai membersihkan lahan yang terisi dengan tanaman komoditi yang menjadi satu-satunya harapan kami, yaitu jambu mete. Biasanya, menjelang musim hujan di penghujung tahun, kami mulai menyiapkan lahan yang bersih untuk menanam padi dan jagung sambil diselipi tanaman jenis umbi-umbian.

Kami juga sejak dahulu mempunyai kebiasaan kerja di kebun secara berkelompok. Melalui kerja berkelompok itu, kami berpindah dari satu kebun ke kebun milik warga yang lain. Kebiasaan kami ini sama nilainya dengan model kerja gotong-royong yang dapat meringankan beban bekerja sebagai seorang petani lahan kering. Di sela-sela kerja kelompok, kami selalu bercerita tentang kampung dan kebiasaan nenek moyang.



Lahan tanaman pangan di Komunitas Masyarakat Adat Natarmage.



Asal-usul Kampung Natarmage

Suatu ketika, saya berjalan menuju rumah seorang Tana Puan, pemangku adat tertinggi di kampung. Dia mengajak saya mengobrol tentang sejarah kampung halaman kami sejak dahulu kala. Dengan penuh semangat, Tana Puan menceritakan asal-usul Kampung Natarmage. Saya mendengarkan cerita yang menarik dengan serius. Ibarat dongeng, ceritanya mengisahkan tentang kehidupan sekelompok orang dalam membangun komunitas adatnya.

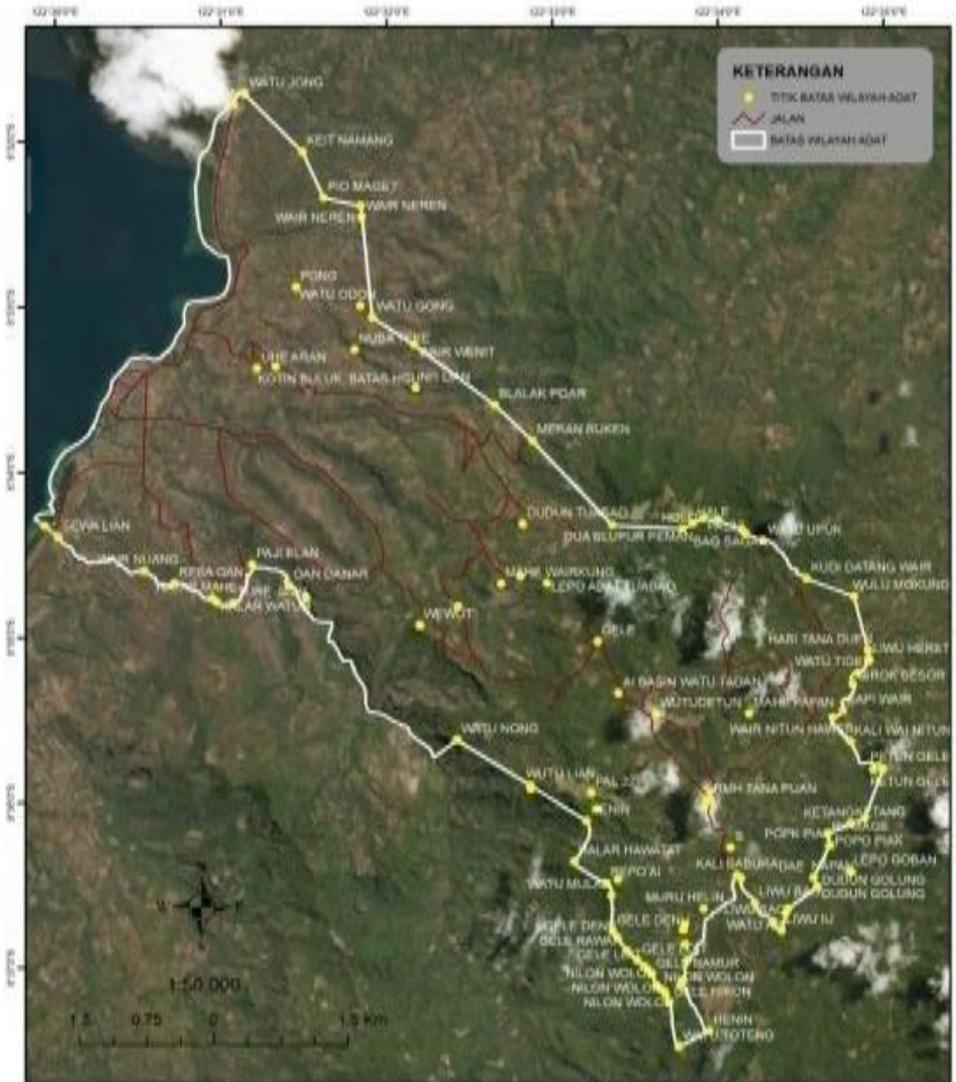
Kemudian, kami mulai saling bertanya dan menjawab tentang kisah lahirnya Natarmage, kampung halaman kami. Ternyata, kampung kami berawal dari kisah perjalanan hidup sekelompok orang yang dipimpin oleh Sugi Sao yang datang dari Siam Sina Malaka dengan menggunakan perahu layar untuk mencari negeri untuk tinggal. Siam Sina Malaka adalah sebutan orang tua di kampung yang berarti orang luar yang datang ke Indonesia lewat Selat Malaka.

Setibanya di kampung kami sekarang, Sugi Sao melakukan survei untuk mengamati sekitar tempat ini. Beliau tidak menemukan seorang pun penghuni di sekitar tempat ini. Sugi Sao bersama keluarganya mulai tinggal dan bertahan di kampung sembari menetapkan Soge menjadi sukunya sejak saat itu hingga sekarang.

Tana Puan masih melanjutkan ceritanya. Di saat Sugi Sao berburu dan beristirahat di bawah pohon asam yang rindang, beliau mendengar kicauan burung *kuau* yang suaranya mirip seperti mengucapkan kata "*oakauk nararmage*." Sugi Sao mengikuti kata-kata itu hingga akhirnya memberi nama kampung kami dengan sebutan Natarmage.

BATAS LUAR WILAYAH ADAT NATARMAGE

KECAMATAN TALIBURA DAN WAIBLAMA, KABUPATEN SIRKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Peta Wilayah Adat Natarmage

Nenek moyang kami sejak dahulu memiliki kebiasaan melakukan ritual-ritual pemujaan terhadap leluhur dan alam semesta. Kami mengikuti ritual tersebut hingga sekarang dan semua pekerjaan kami selalu diawali dengan ritual. Ketika membuka kebun baru atau mau membangun rumah dan sebagainya, kami melakukan ritual menurut tahapan-tahapan yang sesuai dengan jenis pekerjaan tersebut.

Kami mempunyai keyakinan terhadap konsep “Tuhan, Bumi, dan Langit.” “*Ina Nian Tana Wawa Aman Lero Wulan Reta*” adalah bahasa untuk kepercayaan kami yang secara sederhana dapat diartikan: Ibu Bumi, Bapak Langit. Hingga saat, ini kami tetap mempercayai dan meyakini konsep tersebut. Kami meyakini konsep itu disatukan oleh Sang Maha Kuasa, yaitu *Amapu* (Tuhan) atau dalam sebutan kami *Amapu Tana Wulan*. Artinya, Tuhan Penguasa Tanah dan Langit.

Konflik HGU



Sejak dulu, leluhur kami mengalami gangguan kekuasaan dari orang kulit putih (istilah bagi penjajah Belanda). Mereka datang dan merampas wilayah adat kami di sebagian lokasi pesisir Pantai Pedan sejak tahun 1912. Leluhur kami tidak menyadari bahwa perampasan wilayah tersebut, tidak hanya terjadi pada wilayah adat kami Suku Soge, akan tetapi hal yang sama juga terjadi di wilayah yang bersebelahan dengan pesisir Pantai Pedan, yaitu Patiahu yang merupakan wilayah adat Suku Goban.

Kedua lokasi itu sama-sama berada di pesisir pantai yang hanya dibatasi oleh unsur batasan wilayah adat. Namun, hubungan sosial kami sangat akrab karena dua suku dan wilayah adat sejak dahulu telah hidup berdampingan.

Masalah mulai terjadi saat kehadiran penjajah Belanda di tanah leluhur kami. Ironisnya, penjajahan tersebut tetap ada seakan dimandatkan kepada orang pribumi sendiri, sehingga tetap dirasakan turun temurun sampai pada generasi kami sekarang.

Sambil mengikuti orangtua kami berjuang, saya bertanya dan mencari tahu akar permasalahannya. Saya bersama warga adat suku lainnya mulai ikut berjuang sejak tahun 2014. Saya mengingat secara baik bahwa tanggal 9 Agustus 2014, kami yang berjumlah 700 kepala keluarga, secara serentak turun menduduki lokasi tanah eks hak guna usaha (HGU) Nangahale. Masalah itu sekarang sudah diketahui banyak pihak dan kasusnya masih terkatung-katung.

Dari cerita yang saya gali dari beberapa tokoh, orang-orang tua dan mereka yang mengetahui lebih dahulu masalah tanah eks HGU tersebut, didapat penjelasan bahwa tanah Nangahale Patiahu telah dirampas oleh penjajah Belanda sejak tahun 1912, yaitu Amsterdam Soenda Company yang berkedudukan di Amsterdam.

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, tanah kami beralih ke tangan Vikaris Apostolik Keuskupan Agung Ende dengan status HGU. Singkat cerita, kami menyadari bahwa ternyata tanah yang mereka rampas dan beralih dari tangan ke tangan tersebut, adalah jejak langkah dari leluhur kami. Kami juga menyadari bahwa nenek moyang kami pasti telah diusir oleh penjajah Belanda. Kesadaran ini mendorong kami untuk mendapatkan kembali wilayah adat kami yang telah dirampas itu. Sebab, semua kebiasaan ritus adat kami masih berlaku di tanah tersebut.



Pakaian adat dari Masyarakat Adat Natarmage.

Kami dari Komunitas Masyarakat Adat Natarmage bersama tetangga kami, yaitu Komunitas Masyarakat Adat Runut, mempunyai pandangan yang sama, bahwa tanah eks HGU Nangahale Patiahu ini berada dalam satu kesatuan di antara dua wilayah adat kami. Maka, kami bertekad bersama-sama mengklaim kembali dan mendudukinya.

Kami melihat cara licik perusahaan yang telah mengalihkan tanah eks HGU dari tangan ke tangan. Tanah tersebut telah beralih dari PT DIAG Keuskupan Agung Ende ke PT KRISRAMA Keuskupan Maumere. Peralihan itu kami ketahui berdasarkan dokumen keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/ HGU/89 tanggal 5 Januari 1989 tentang pemberian HGU Hak Guna Usaha kepada perkebunan kelapa PT DIAG dalam jangka waktu 25 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

Menurut tokoh pejuang pendahulu kami, permasalahan sengketa tanah eks HGU itu sempat dimediasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sikka pada 2005. Hasilnya, pihak yang bersengketa sepakat untuk secara bersama-sama membahas sengketa tanah tersebut di akhir masa kontrak 31 Desember 2013. Namun, ternyata Pemda mengabaikan kesepakatan itu, sehingga tanggal 9 Agustus 2014 kami secara serentak turun dan menduduki lokasi eks HGU Nangahale Patiahu sampai saat ini.

Sementara itu, pihak perusahaan tetap mengelola aset perusahaan yang ada di atas tanah kami. Menurut kami, pengelolaan aset tersebut tidak mempunyai izin yang jelas dari pemerintah karena masa kontrak sudah berakhir di tahun 2013.

Ancaman



Keluarga besar Suku Soge dan suku pengikutnya yang kami sebut dengan *Sukun Pulu Wot Lima Aken Rua Plewong Telu*, selalu bekerja sama dalam pelaksanaan ritus, baik ritus yang berurusan dengan manusia maupun ritus lain yang bersifat komunal, termasuk ritus yang dilakukan terhadap alam semesta dan juga ritus yang berurusan dengan upacara di kebun.

Karena sering mendengar cerita dari para tokoh pejuang dan tetua adat, saya bersemangat untuk melihat apa saja yang menjadi ancaman di dalam komunitas adat kami. Biasanya, setiap tahun kami melakukan ritual adat *Balatan Tanah* dan *Gren Nuba*. *Balatan Tanah* merupakan ritual adat yang kami lakukan untuk upacara pendinginan tanah di wilayah adat kami. Sedangkan *Gren Nuba*, merupakan upacara adat yang kami lakukan untuk meminta berkah, kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan lain dalam hidup. Untuk melakukan itu, kami melakukan ritual di daerah muara sungai. Daerah muara sungai tersebut kami namai Nuba Nanga.

Sayangnya, Nuba Nanga sekarang dalam keadaan terancam hilang dan keadaannya tidak tertata rapi karena ada pihak lain yang sengaja melakukan perusakan akibat dari pengembangan perusahaan mereka. Ketika saya bertanya kepada tetua kami, tetua tersebut menjelaskan bahwa Nuba Nanga kita tetap ada, tetapi ada yang sudah dibongkar dan dibakar oleh orang lain. Tetua kami melanjutkan ceritanya dengan bilang bahwa kami pernah menyampaikan kepada orang yang berada dekat dengan lokasi tersebut supaya kita bersama-sama menjaga tempat ritus ini. Ada yang berhati baik dengan menyumbangkan sedekah ketika kami melakukan ritual adat di Nuba Nanga, tetapi rupanya banyak juga orang yang berusaha untuk menghilangkannya untuk kepentingan mereka sendiri.



Pohon tempat ritus di area pesisir Nangahale yang ditebang oleh perusahaan.

Saya mendengar keluhan itu dan saya sempatkan diri untuk mengikuti pertemuan *kampung*. Kami bermusyawarah untuk kembali menata dan menjaga Nuba Nanga menjadi tempat melakukan ritual.

Wilayah adat kami di Natarmage cukup luas, dari bibir pantai Nangahale hingga ke daerah pegunungan, sehingga kami hidup menyebar dari gunung sampai ke pantai. Meskipun kami hidup secara tersebar, tetapi kami tetap taat ketika ada jadwal melakukan ritual.

Sebagian keluarga kami yang ada di pesisir pantai, mencari ikan dengan cara kampung, yaitu ketika pasang surut ramai-ramai mencari ikan. Ada juga yang mencari ikan dengan memanah dan memancing dengan perahu kecil. Hasil pencarian ikan, biasanya dibawa pulang. Sebagian dibawa ke rumah untuk disantap bersama keluarga dan sebagian dijual di pinggir jalan dan sebagian lainnya dibakar di pesisir pantai sambil menikmati matahari yang memerah menjelang tenggelam di sore hari.

Kebiasaan tersebut sudah mulai kaku karena di wilayah pesisir yang saya ceritakan tadi, sudah dibangun petak untuk perusahaan mutiara. Sedihnya lagi, Pemda telah menyampaikan bahwa di tempat kami ini akan dibangun wisata pabrik pengalengan ikan dan wilayah itu dijadikan aset mereka.

Ketika kami mendengar kabar tersebut, sontak semua anggota suku bergumam satu sama lain, memunculkan raut yang kesal dan menolak apa yang disampaikan pihak Pemda. Saat ini, pemangku adat kami, Tana Puan dan kepala suku, tetap menyampaikan kepada semua anak sukunya bahwa kita jangan takut untuk tetap tinggal dan jaga tanah kita sendiri. Kami tidak boleh lari ke mana-mana. Kami hidup punya adat, sehingga kami tetap minta kepada leluhur dan alam semesta untuk menjaga kami.

Kami sering melakukan musyawarah adat di *Blefak*. *Blefak* merupakan bangunan rumah adat tempat kami melakukan musyawarah adat. Di tempat itu, kami selalu duduk membahas segala ancaman yang ada bersama dengan tetangga suku sebelah barat yang merupakan bagian dari wilayah adat Komunitas Masyarakat Adat Runut yang mengalami nasib sama.

Seiring waktu, kami semakin menyadari bahwa ancaman itu akan membuat hilangnya adat kami, sehingga setiap saat kami selalu bertemu dengan Tana Puan dan kepala suku. Tana Puan merupakan penguasa wilayah adat tertinggi, sedangkan kepala suku merupakan penguasa suku tertinggi.

Di saat kami melakukan musyawarah adat, Tana Puan selalu menyampaikan kepada kami bahwa ancaman yang kami alami langsung ini sudah berlangsung sejak tahun 1969. Begitu saya mendengar apa yang disampaikan Tana Puan tersebut, saya lantas menyisihkan waktu untuk mencari tahu lebih lengkap.

Tana Puan mengungkap kesaksiannya bahwa nasib Suku Soge di Natarmage, sama dengan nasib Suku Goban di Runut.

Menurut kesaksian Tana Puan, dirinya bersama beberapa orang kampung pada 1969 dipaksa oleh pastor, seorang keturunan orang Barat (asing) untuk membongkar dan menguburkan *Mahe*, tempat kami melakukan ritual milik saudara kami dari Suku Goban. Tana Puan bercerita bahwa pada saat itu, ketika mereka menolak melakukannya, maka semua dianggap PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga mereka pasrah dan membiarkan itu musnah sampai sekarang.

Sekarang, kami juga mengalami ancaman yang sama, yaitu Nuba Nanga digusur dan dibakar untuk kepentingan pihak perusahaan. Ancaman datang dari pastor untuk kepentingan perusahaan yang sama.



Perampasan Lahan

Wilayah adat Natarmage merupakan bagian dari area pesisir pantai Pedan Nangahale yang sedang kami perjuangkan sejak dulu sampai sekarang. Kami melihat ada upaya tersembunyi yang dilakukan pihak lain untuk merampas wilayah adat.

Ketika saya bertemu kembali dengan Tana Puan, beliau mengatakan bahwa tanah kita ini dirampas sejak dulu oleh orang Belanda dan kini kita berhadapan dengan perusahaan milik gereja Katolik.

Perusahaan yang pernah kelola tanah kami, adalah PT DIAG Keuskupan Agung Ende dan sekarang keuskupan sudah mengalihkannya ke PT KRISRAMA di Keuskupan Maumere.

Sejak akhir Desember 2013, tanah ini sudah selesai dikontrak oleh pihak perusahaan. Kami komunitas adat dua suku, pernah melakukan tatap muka dengan pihak perwakilan Pemerintah Kabupaten Sikka, tetapi belum ada titik akhir penyelesaian. Pihak perusahaan pun tetap mengelola aset yang ada.

Namun kini, kami menduduki tanah eks HGU tersebut. Terkadang kami resah karena terganggu dengan ulah karyawan yang kerap datang tanpa izin masuk kapling rumah kami dan memetik buah kelapa yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Daun kelapa yang mereka tebang berjatuh dan mengotori halaman rumah kami. Kami merasa bahwa tindakan itu merupakan penghinaan terhadap kami. Ada kesan bahwa apa yang mereka lakukan itu atas perintah orang tertentu dengan tujuan agar kami angkat kaki dari tanah kami.

Kami tetap berprinsip *Tanah Amin Moret Amin*, sehingga kami tidak akan melangkah sejenkal pun dari tanah kami karena kami bukan orang asing. Kami bukan datang membawa perusahaan, tetapi kami meneruskan apa yang menjadi pemberian leluhur kami.



Jejak Perlawanan

Kami akrab memanggilnya Anton Toni, seorang warga adat dari Natarmage. Toni bercerita bahwa perjuangan mempertahankan tanah ulayat sudah terjadi sejak tahun 1812 saat Belanda datang membangun perusahaan Soenda Company yang berpusat di Amsterdam. Sementara pada 1800-an, nenek moyang kami sudah menghuni Kampung Pedan Nanghale.

Perusahaan Belanda mengembangkan usaha mereka awalnya dengan menanam kapas. Saat itu, sudah muncul perlawanan dari beberapa orangtua kami. Mereka membakar semua hasil panen kapas yang ditanam perusahaan Belanda.

Banyak yang tewas terkena tembakan peluru tajam oleh senjata serdadu Belanda. Orangtua kami yang gugur dalam perlawanan itu, dimakamkan di Pekuburan Wairhek, dekat lokasi Pantai Pedan.

Meski korban berjatuhan, perlawanan tetap berlangsung dari tahun ke tahun, hingga perusahaan itu berpindah tangan ke misionaris Barat tahun 1965-1969. Kurun waktu itu, terjadi gerakan Tanam Salib, sehingga beberapa sarana ritus kami dikuburkan, seperti *Ai Pua*, *Sope*, dan *Mahe*. Ritus-ritus itu diganti dengan penanaman salib.

Ai Pua adalah kayu keramat yang ditanam di tengah kebun sebagai tempat melakukan ritus untuk keberhasilan kebun. *Sope* adalah wadah tempat menyimpan benda-benda ritual untuk keperluan ritus. *Mahe* adalah tempat keramat sekaligus tempat ritual adat untuk memuja Sang Pencipta melalui alam semesta dan dipusatkan di tengah hutan lindung.

Cerita perlawanan juga datang dari warga adat lain, yaitu Moan Jeng dan Moan Aris. Keduanya menuturkan, ada seorang tokoh adat bernama Moan Lewor Goban yang mulai mengorganisasi Masyarakat Adat Utan Wair dan Likong Gete untuk melakukan perlawanan atas tanah HGU dan hutan tutupan di Tana Ai. Moan Lewor Goban selalu melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Perlawanan berlangsung dari tahun ke tahun hingga tahun 2009.

Kini, perlawanan yang telah digagas oleh para tokoh adat tersebut, kami lanjutkan hingga sekarang. Kami melakukan perlawanan dengan menduduki lokasi tanah bekas HGU Nangahale Patiahu. Kami sudah turut rasakan ikut berjuang. Satu hal yang selalu kami lakukan, adalah selalu melakukan ritual adat sebelum melakukan kegiatan apa pun di lokasi ini.



Warga berkumpul di sebuah pondok penyimpan makanan saat menduduki lokasi tanah bekas HGU Nangahale Patiahu.

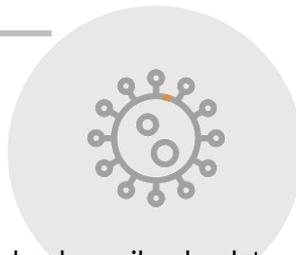


Situasi Politik

Kami selalu mengikuti perkembangan politik di Kabupaten Sikka. Kami pernah mencalonkan salah seorang anak adat kami untuk maju ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten Sikka, tetapi belum berhasil memperoleh kursi. Kami berharap suatu saat nanti ada anak adat yang berhasil kami utus ke kursi DPR, sehingga dia bisa mengikuti dan mengawal kepentingan Masyarakat Adat di Kabupaten Sikka.

Kampung kami telah menjadi anggota AMAN. Selama ini AMAN-lah yang selalu mendampingi dan membela kepentingan kami. Sejak tahun 2019, kami telah mendorong agar Pemda Sikka segera membentuk Peraturan Daerah yang mengakui Masyarakat Adat di Kabupaten Sikka. Bahkan, kami telah berinisiatif membantu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu. Sudah empat kali kami melakukan konsultasi publik dan tahun 2019 lalu, hasil konsultasi sudah kami serahkan ke Bupati Sikka dan DPRD Sikka melalui Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda). Akan tetapi, dokumen usulan Ranperda Masyarakat Adat tersebut tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang.

Kami bersama para tokoh adat serta pemerhati, sudah berulang kali melakukan pendekatan dengan Pemda, DPRD, Kementerian ATR/BPN, bahkan sampai ke Presiden RI. Tapi, tetap tidak membuahkan hasil apapun.



Pandemi Sebagai Ancaman Baru

Di saat kami sedang berjuang mempertahankan wilayah adat, muncul ancaman baru berupa wabah virus Covid-19. Ancaman virus ini sudah menyebar ke wilayah adat kami, sehingga kami pun ikut aturan pemerintah dan mentaati upacara adat untuk menghindari serangan virus.

Menurut kami, ancaman virus itu sangat berat karena kami tidak bebas ke mana-mana, termasuk tidak bisa saling mengunjungi antara keluarga di gunung dan keluarga di pesisir karena dibatasi oleh pos penjagaan di dua wilayah desa.

Kami hanya bisa saling memberi pesan agar tetua adat dapat bertemu. Para tetua adat sepakat untuk membuat ritual adat yang kami yakini dapat mengusir virus ganas tersebut. Saya mengikuti ritual adat tersebut. Namanya *Lepe Likong*.

Lepe Likong adalah nama ritual yang diartikan sebagai membentengi wilayah, sehingga dalam pelaksanaan ritual, kami meyakini bahwa wilayah adat kami telah dibentengi oleh kekuatan ritual, sehingga virus tidak akan menjangkau wilayah adat.

Kami semua anak suku dipesankan untuk taat terhadap aturan ritual *Lepe Likong*. Saat tetua adat kami melakukan ritus sampai hari keempat, semua orang yang ada di dalam wilayah adat, tidak boleh bepergian sampai keluar dari wilayah ritual kampung kami. Apabila ada yang melanggar, maka akan mendapat teguran keras dan bisa mendapat sanksi. Sehingga, saat ritual adat itu dilaksanakan, kami semua siap untuk berdiam diri di lingkungan masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan.

Kami bersyukur hingga Juli 2021, tidak ada anggota suku adat yang tertular Covid-19. Tahun 2020, terdapat dua orang yang berada di luar wilayah klaster terpapar Covid-19, namun mereka sudah sembuh.

Kami semua anggota suku yang berada di dalam wilayah adat, tetap waspada terhadap perkembangan virus mengingat belakangan telah muncul berbagai varian baru. Kami selalu ikut aturan kesehatan dari pemerintah sembari tetap berdoa kepada Tuhan dan leluhur alam semesta. Semoga kami semua dapat terhindar dari wabah.

Doa tersebut terbungkus dalam bentuk syair yang kerap diucapkan para tokoh adat dari Natarmage saat menggelar *Lepe Likong*.

*Neni ora Ina Buan, Prawi ora Ama Gaen
Anin Goit warat raat
Bano aun Mula Puan, rema aun Lero Lohor
Lau Nian Lou Bau, wawa tana Lodo man
Anin Goit Warat raat*

*lopa hekor, lopa Hewar, Lopa Wau Lopa Gon, Nian Mue uru widin,
tanah mue tada komak, Bano Mula Pua man, Rema Lero Lohor Bau,
Bake watu mala Likong, Huga Roun Mala Lepe, Wair lopa Ba Pout,
watu lopa gogo bajang, Gebi beli Gring, Kape beli edeng, Teri Naha
Wiin Blatan, era naha Tebon Bliran, Tuber naha Blon, Manar naha
Hait
Amen*

Syair itu kira-kira diartikan: “Mohon kepada orangtua dan leluhur. Menjauhkan angin wabah penyakit. Terbawa seiring terbenamnya matahari. Bentengi tanah kami. Lindungi nyawa kami. Semoga sehat dan umur panjang.”



Perempuan Adat

Pada Februari 2021, para perempuan adat dari Natarmage mengadakan pertemuan kampung bersama Seknas PEREMPUAN AMAN guna membentuk wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN. Hadir pada kesempatan itu, Ketua Umum Devi Anggraini, Kepala Suku Soge Ignasisus Nasi, dan saya sendiri sebagai perwakilan warga adat. Dari pembentukan yang berlangsung di Balai Pertemuan Adat tersebut, terpilih Donata Dua sebagai Ketua Pengurus Harian Komunitas (PHKom) PEREMPUAN AMAN Natarmage. Donata Dua mengatakan bahwa PEREMPUAN AMAN Natarmage merupakan organisasi sayap AMAN yang memiliki tujuan membantu Masyarakat Adat Natarmage dalam memperjuangkan kembali tanah ulayat Patiahu-Nanghale. Perempuan adat mulai terlibat dalam berbagai aksi, aliansi, dan advokasi.

Kemudian dalam mempertahankan kehidupan kami di komunitas, perempuan adat tentunya juga bercocok tanam. Ada yang membuat kue dari pangan lokal dan mengakses program gerakan kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat berupa bantuan ternak kambing 11 ekor yang diinisiasi dari PB AMAN.



Pemuda Adat

Ruben adalah nama sapaan seorang pemuda adat di kampung kami. Ia selalu berjuang dan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak Masyarakat Adat. Sejak 9 Agustus 2014, Ruben bersama pemuda adat dan para tokoh adat lainnya, menggerakkan 700 kepala keluarga untuk menduduki tanah ulayat mereka di Patiahu-Nanghale.

Dalam perjuangan itu, kawan-kawan sempat mendapat intimidasi dan tindakan anarkis dari aparat TNI-Polri. Ada juga yang diseret ke penjara pada waktu itu. Namun, tindakan dari oknum TNI-Polri tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan untuk merebut hak. Masyarakat Adat mulai membangun rumah, membuka kebun, membuka sawah, membentuk kelompok tani, serta membantu komunitas membangun kerja sama dengan pihak luar untuk kepentingan perjuangan.

Menurut Ruben, walaupun organisasi pemuda adat belum terbentuk di Natarmage, tetapi dalam beberapa kesempatan, mereka sering berjumpa dan bertukar pikiran dan mengadakan kegiatan bersama dengan BPAN Flores Bagian Timur. Ruben berharap kepengurusan pemuda adat di tingkat kampungnya dapat segera dibentuk. Hal itu sangat penting agar para pemuda adat bisa belajar tentang organisasi, kepemimpinan, dan mempertahankan adat istiadat sekaligus mencintai wilayah adat di tengah kepingan globalisasi dan modernisasi.



02

Kisah dari Fanugwa Loran: Mempertahankan Wilayah Adat untuk Kemakmuran Bersama

Oleh Mika Ganobal bersama Adi Marsiela

Masyarakat Adat Loran yang turut dalam gerakan #SaveAru pada kisaran 2013 lalu, berhasil menggagalkan rencana konversi hutan menjadi perkebunan tebu di kepulauan tersebut. Kolektivitas Masyarakat Adat dalam menjaga alam dan lingkungannya tidak lepas dari keseharian mereka yang sejak dulu mengandalkan perburuan sebagai cara bertahan hidup.

Komunitas Masyarakat Adat Fanugwa Loran terletak di tengah-tengah Kepulauan Aru, sehingga masuk dalam Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Fanugwa Loran merupakan wilayah adat yang saat ini secara administratif menjadi desa. Pemerintah menyebutnya sebagai Desa Lorang. Ada tambahan huruf 'g' di bagian belakangnya.

Wilayah Adat Fanugwa Loran terdiri dari 379 pulau besar dan kecil. Semuanya memiliki nama dan fungsi masing-masing. Nama dan fungsi pulau itu sudah diatur oleh nenek moyang dari Komunitas Masyarakat Adat Fanugwa Loran.

Sejarah kami berawal dari 10 marga kecil dan besar yang dipimpin oleh para *Mon Mona Gwalan* atau ketua marga. Berikut ini adalah pembagian marganya, yaitu Marga Badidi Yai, Marga Dakael Gwarjir, Marga Tarau Gwarjir, Marga Gwaitedi, Marga Leftafuran Jugir, Marga Goini, Marga Gwanobal Gwajir, Marga Feldaba Gwajir, Marga Regwajir, dan Marga Djirmori. Mayoritas mereka berdiam di Pulau Kobo dan Kobror, dua pulau besar di Kepulauan Aru.

Masing-masing marga itu mempunyai mata belang (*kalay mona*) atau nenek moyang, antara lain:

1. Mala Guar : Badidi Yai
2. Gwal Gwal : Dakael Gwarjir, Tarau Gwarjir
3. Mangar : Gwanobal Gwajir
4. Kalaifui : Gwaitedi
5. Beljeur : Regwajir
6. Marlai : Leftafuran Jugir
7. Lengam : Goini
8. Korisan : Feldaba Gwajir
9. Marutu : Djirmori

Luasan Fanugwa Loran mencapai 40 ribu hektar yang terdiri dari daratan, selat besar, dan kecil, serta sungai. Mayoritas daratan itu berupa bakau, hutan alam, permukiman, kebun, dan ladang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Fanugwa Loran sebanyak 258 jiwa yang terdiri dari 125 perempuan dan 133 pria pada 2019. Mayoritas penduduk beragama Kristen.

Mata pencaharian kami adalah berkebun, menangkap ikan, berburu, serta sebagian kecil berdagang. Setidaknya sembilan dari 10 orang mengandalkan penghidupannya dari kekayaan alam yang masih melimpah. Masyarakat Adat menjaga lingkungannya sesuai aturan-aturan adat yang menjadi aturan baku dalam kehidupan sosial kami. Tatanan yang ada dibangun berdasarkan aturan yang sudah ada sejak awal.

Lokasi permukiman saat ini merupakan hasil perubahan atau perpindahan yang ke-10 kalinya. Meski berpindah, nama “Loran” sudah ditentukan oleh *jabuja takuna* (nenek moyang) atau datuk sebagai Fanugwa Loran atau secara administratif kini disebut dengan Desa Lorang.

Pada saat awal pembentukan Fanugwa Loran, para leluhur dari berbagai marga berkumpul di Sungai Badidi, masing-masing marga akan saling menunggu hingga 10 marga hadir.

Awal kedatangan para marga ini sudah ditunggu oleh moyang mereka, yakni Jabuja Takuna (datuk) dan Fanugwa Dugwayi (tuan tanah). Tata urutan dalam bertemunya nenek moyang itu sesuai pada urutan marga di atas. Sedangkan pembagian atau perpindahan permukiman itu, antara lain Badidi Gwarfufin, Fkar Gwaka Tafuran, Ilma Lengarna, Bigwa Ukin Di, Gwar Fefa Jin Jina, Kai Falauna, Gutan Dalengan, Gwar Nga Nau, Kokoyar Jurin, dan Lar Fafin Tubin.

Dalam perjalanan di atas, Fanugwa Loran sudah disematkan pada kampung yang pertama walaupun pada saat penjelasan tersebut diberikan, mereka tidak berada di wilayah *petuanan* atau kawasan dari Fanugwa Loran.



Hutan untuk Kehidupan

Dalam aturan adat di Fanugwa Loran, hutan adalah tempat untuk kehidupan bagi komunitas adat, terkecuali tempat keramat yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya.

Komunitas Masyarakat Adat Fanugwa Loran menyepakati hak *petuanan*, seperti setiap hutan boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya dan setiap kawasan budi daya dapat dijadikan hutan atau kebun hingga ladang dan permukiman. Kegiatan yang bisa dilakukan di sana, antara lain memasang jerat dan berburu, memotong kayu bakar atau kebutuhan material rumah, dan menanam sagu di tempat yang kami sebut dengan dusun sagu.

Mereka yang berbeda marga juga diperkenankan melakukan aktivitas ekonomi di lahan tersebut setelah mendapatkan izin dari pemilik *petuanan*.

Yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain di wilayah adat, adalah penebangan secara liar, kehadiran perusahaan atau investor dalam bentuk apa pun, penangkapan satwa, dan perusakan hutan. Bagi kami, hutan ibarat “pasar” karena kebutuhan makan-minum bisa didapatkan di hutan. Hutan juga jadi tabungan bagi anak-cucu di masa mendatang.

Masyarakat Adat Aru di bagian selatan, - yang terdiri dari 14 kampung - biasanya menggelar upacara adat *Daotel* atau semacam membakar alang-alang. Ritual adat ini masih dilakukan oleh Masyarakat Adat dari dua desa di bagian selatan.

Akses menuju ke desa hanya menggunakan perahu motor selama enam jam dari pusat kabupaten. Perjalanan bisa ditempuh selama dua jam saja menggunakan *speed boat* dengan harga paket antara Rp8-9 juta.

Masyarakat Adat di bagian pesisir memanfaatkan area bakau untuk mendapatkan bahan makanan, seperti udang, ikan, dan kepiting. Tidak ada perikanan budi daya di sini.



Berburu dengan Anjing

Aktivitas berburu yang jadi salah satu mata pencaharian kami juga berlaku bagi mereka yang bermukim di Desa Lorang, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Binatang buruan, seperti babi dan rusa, bisa dijumpai di daratan atau sabana, kerap ada juga di pesisir atau bakau. Selain itu, ada kangguru pohon yang biasa disebut *pelanduk*.

Perburuan di pulau-pulau kecil, daratan, maupun di hutan bakau biasanya diawali dengan persiapan sehari atau semalam sebelumnya. Peralatan busur, panah, serta perahu atau sampan harus dipastikan siap pakai jika akan menyeberang ke pulau lain.



Tradisi berburu secara kolektif dalam Masyarakat Adat Lorang.

Waktu perburuan yang paling tepat adalah dini hari sebelum matahari terbit pada jam 4-6 pagi atau saat masih ada embun. Pada masa-masa itu, binatang buruan diperkirakan masih kenyang. Mereka belum buang air besar atau air kecil, sehingga bobot tubuh mereka lebih berat dan lebih mudah dikejar saat perburuan.

Beda tempat perburuan, beda pula strategi yang digunakan oleh pemburu. Perburuan di pulau atau *gurija*, kondisi alamnya biasa berupa hutan dan bakau. Hal ini memudahkan pemburu dan anjingnya mengejar binatang buruan karena hanya ada satu atau beberapa jalur pelarian buruan. Bisa juga pemburu menunggu buruannya lewat saat dikejar anjing atau biasa disebut *mangela*.

Jika buruan berhasil lolos dari gigitan anjing di darat, biasanya bisa ditemukan di daerah pesisir.

Lokasi atau tempat berburu lain, adalah *da'yar kurur* atau hutan bakau. Biasanya buruan yang dapat ditemui di sana, yakni rusa dan babi hutan. Mereka mencari makan di hutan bakau. Babi biasanya mencungkil lumpur untuk mencari kerang di lumpur. Selain itu, babi dan rusa juga memakan buah dari salah satu pohon bakau, sedangkan hanya rusa yang gemar melahap pucuk muda bakau.

Tempat berburu lain, kami sebut *jur-jurin* atau areal hutan yang diyakini ada binatang buruan.

Para pemburu harus memiliki kemampuan untuk membaca jejak binatang buruan di hutan. Selain jejak dari kaki, pemburu juga biasanya mengamati dan memeriksa bekas gigitan rusa pada pucuk pohon.

Pemburu juga bisa membedakan jenis kelamin rusa dari bekas tandukan di pepohonan. Bekas tandukan pada pohon memperlihatkan lokasi itu dilalui oleh rusa jantan. Usia binatang buruan bisa terlihat dari sisa tanduk rusa yang tertinggal di kayu pohon. Jika sudah tidak ada sisa bulu, bisa diperkirakan rusa itu terbilang dewasa.

Meski bisa dilakukan sendiri, kegiatan berburu biasanya melibatkan beberapa orang. Semua itu tergantung kebutuhan. Perburuan berkelompok biasanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti perayaan atau kegiatan di kampung.

Ada tugas-tugas berbeda dalam perburuan berkelompok. Biasanya ada tiga orang atau lebih yang masuk ke hutan atau areal perburuan. Mereka kerap membawa anjing ke dalam hutan. Sementara pemburu lainnya, bertugas menjaga tempat atau akses lari binatang buruan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Sebaran pemburu yang menjaga akses lari ini tergantung dari penilaian berapa banyak akses untuk melarikan diri.



Kelompok berburu Masyarakat Adat Loran

Jika perburuan berlangsung di pulau kecil (usir pulau), biasanya ada pemburu yang bertugas menjaga di laut, sungai, atau selat. Merekalah yang kelak mengejar buruan saat mereka menjauhi daratan dan berenang untuk menghindari kejaran anjing pemburu kami. Apabila menggunakan perahu, biasanya ada dua pemburu di masing-masing perahu.

Hasil buruan sangat tergantung dari selera anjing yang mengikuti perburuan. Ada yang menyukai rusa atau babi sebagai buruan, terkadang ada anjing tertentu yang lebih tertarik pada jenis kelamin binatang buruan tertentu. Saat ada jejak buruan, namun tidak sesuai selera anjing, maka buruan itu dipastikan lolos karena tidak dikejar oleh si anjing.

Dalam perburuan, anjing pemburu biasanya mempunyai pimpinan. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakilnya. Yang memimpin biasanya lebih cekatan ketika berhadapan dengan buruan serta punya karisma di antara anjing-anjing lain.

Untuk menentukan pemimpinnya, pemburu biasanya memerlukan waktu hingga tahunan. Anjing itu dilibatkan dalam perburuan hingga dewasa dan terlihat kemampuannya, sehingga bisa dilatih untuk selalu berada di depan.

Saat anjing menggonggong, pemburu bisa membedakan suaranya untuk mengidentifikasi apakah yang menggonggong itu pemimpin atau bukan. Bila anjing kepala yang menggonggong, biasanya buruan akan dikepung oleh sekelompok anjing. Saat buruan sudah digigit, maka yang pertama memakannya adalah anjing pimpinan, sedangkan anjing lain akan menunggu giliran di sampingnya.

Karena perannya yang sangat penting, pemburu juga harus merawat anjing-anjingnya. Mereka menggunakan ramuan tradisional yang diracik dari tumbuhan dan bahan-bahan dari hutan serta lingkungan sekitar.

Anjing yang terluka saat berburu, misalnya digigit babi, ular, atau dilukai kasuari, perlu dirawat menggunakan daun kayu, pucuk daun yang muda, akar kayu, serta rerumputan. Jika anjing terluka akibat benturan saat lari, maka pengobatan dilakukan dengan menggunakan daun kayu yang dipanaskan (*rauh*) dekat bara api, kemudian ditempelkan pada anjing yang sakit. Untuk merangsang penciuman anjing, biasanya pemburu menggosok hidung anjingnya menggunakan daun, *halia*, dan tembakau.

Para pemburu ini juga bisa menghadapi buruan yang sama. Namun, mereka sudah bersepakat, saat ada warga dari Desa A sudah memanah binatang buruan terlebih dulu, namun pemburu dari desa lain yang mematikan buruan, maka binatang buruan itu akan tetap jadi pemburu dari Desa A yang pertama memanahnya. Ini kebiasaan yang diwariskan turun temurun.

Hal itu berlaku juga untuk meneruskan kemampuan atau keahlian berburu. Secara alamiah, para orangtua di Aru mengajarkan anak-anaknya memanah. Mereka harus membuat sendiri anak busurnya dari pinang hutan. Sementara yang berusia sekolah dasar, membuatnya dari lidi daun.

Selain itu, ada juga kegiatan lomba memanah tradisional bagi anak-anak. Saat usia mereka bertambah, maka busur dan anak busurnya disesuaikan menjadi lebih besar.

Biasanya hasil buruan itu dibuat dendeng, ada juga yang kemudian dibagikan kepada orang-orang di kampung jika berburu dilakukan secara berkelompok.

Marafenfen

Marafenfen itu beta pu kampung
Marafenfen itu ko pu kampung
Marafenfen itu katong pu kampung
Tampa kumpul orang sudara
Gayar kongan beta pu tempat mandi
Alang alang beta pu tampa bermain

Biarkan katong tambaroro di atas lidah api yang bakar tor dauk
Biarkan katong bertarung dalam lomba panah antar-kampung
Itu katong tarangan jugir
Itu katong jar jugir

Kakatua raja kautangkap, kau tangkar
Kaka tua putih kaukandangan
Rusa timur tak luput dari pembantaian
Padang sabana tak akan kubiarkan kauambil
Karena itu bukan ko punya

Mundur untuk tanah adat?
Tentu tidak
Lalu apa yang akan kulakukan?
Beta akan menjaga warisan Jom Ja Gwasira untuk anak-cucu

Ayo, anak-cucu jargaria
Mima Tayi Yetu (mari katong bersatu)
Jangan mau diadu domba karena katong bukan domba.
Beta deng ko jar, SITA KAKA WALI KE, SITA EKA TU
Sekali lagi beta deng ko jar, SITA KAKA WALI KE, SITA EKA TU

Marafenfen, 28 September 2021
Mika Ganobal



Mempertahankan Wilayah Adat Beta

Kondisi pandemi Covid-19 kembali menguji kolektivitas dan soliditas Masyarakat Adat di Kepulauan Aru, termasuk Masyarakat Adat Loran. Kondisi serupa terjadi pada 2013 silam saat Masyarakat Adat mempertahankan wilayahnya dari penguasaan perkebunan tebu.

Saat ini, Masyarakat Adat Marafenfen tengah memperjuangkan hak atas wilayah adat yang diserobot sepihak oleh TNI Angkatan Laut untuk bandar udara dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang rencananya mencapai ratusan hektar itu berlokasi di Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Upaya advokasi saat ini bergulir ke Pengadilan Negeri Dobo. Masyarakat Adat menggugat TNI Angkatan Laut, Gubernur Maluku, dan Badan Pertanahan Nasional atas objek sengketa tanah seluas 689 hektar.

Meski secara geografis, Marafenfen berada di sisi selatan, perlawanan atas upaya penyerobotan wilayah adat juga menjadi perhatian Masyarakat Adat Loran. Persoalan Marafenfen itu merupakan persoalan kolektif seluruh Masyarakat Adat Aru.



Aksi Masyarakat Adat Marafenfen menolak Pembangunan Pangkalan Udara TNI AL.

Informasi awal soal penyerobotan lahan itu datang dari mendiang Dolfintje Gaelagoy yang akrab disapa Mama Do. Saat itu, orangtua Mama Do tengah di padang sabana, lalu ada helikopter TNI Angkatan Laut dan bertanya soal Kampung Marafenfen. Selanjutnya, ada pertemuan di kampung tersebut.

Bagi Masyarakat Adat yang tinggal di sebelah selatan Aru, kawasan sabana itu punya peran penting sebagai habitat satwa buruan. Sebelum berburu, Masyarakat Adat biasa menggelar upacara *Daotel* yang artinya membakar alang-alang. Bagian area yang terbakar itu sudah ditandai. Saat terbakar, biasanya hewan buruan akan keluar dan Masyarakat Adat akan menangkapnya dengan cara memanah.

Ritual sejak zaman nenek moyang itu masih tetap dijalankan setiap tahun. Penggunaan lahan di wilayah adat itu bakal mengganggu habitat dan perburuan yang jadi kebiasaan Masyarakat Adat.

Mereka yang mendukung perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen ini bergiliran mengawal jalannya persidangan. Mereka menyanyikan lagu adat dan mendampingi mereka yang ada di dalam ruang sidang setiap Rabu, dimulai dari pagi hingga pukul tujuh malam, bahkan hingga pukul sembilan malam.

Masyarakat Adat tidak meminta banyak terhadap pemerintah. Mereka meminta hak-haknya dihargai.



Aksi Masyarakat Adat Marafenfen di depan kantor pengadilan.



03

Kisah dari Balai Pantai Uang: Hidup Mandiri di Tengah Keterbatasan

Oleh Lastris bersama Apriadi Gunawan

“Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.” Peribahasa tersebut menggambarkan pola kerja sama yang selama ini dilakukan secara turun temurun oleh Masyarakat Adat Balai Pantai Uang (juga kerap disebut dengan Balai Adat Pantai Uang) di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pola itu lazim disebut gotong royong. Saya bagian dari Masyarakat Adat Balai Pantai Uang dan saya kerap melibatkan diri dalam gotong royong. Kami menyebut kebiasaan tersebut dengan *basasawuhan bawagingan*. Kebiasaan itu terus menerus kami lakukan untuk meringankan beban kerja kami sebagai peladang lahan kering.

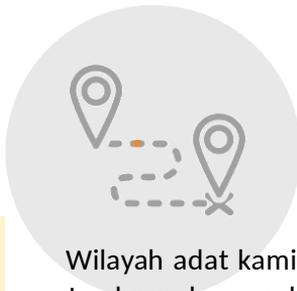
Di sela-sela gotong royong, biasanya kami selalu mendengar cerita dari para pemangku adat tentang kampung dan kebiasaan nenek moyang. Suatu saat, ketika saya ikut bergotong royong di kebun, saya berbincang dengan *tutua* (tetua) dari Komunitas Masyarakat Adat Balai Pantai Uang, yakni Juhri, tentang sejarah kampung.

Pria paruh baya itu dengan penuh semangat bercerita tentang sejarah Kampung Balai Adat Pantai Uang. Kisah kampung kami berawal dari kisah perjalanan hidup sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang *datu* yang datang dari pantai, terus bergeser dari bawah ke gunung karena tidak suka dengan peradaban yang semakin berubah.

Saya mendengar kisahnya seperti dongeng yang indah tentang kehidupan asal mula terbentuknya sebuah komunitas adat.

Kisahnya diawali saat *datu* berjalan menelusuri anak sungai menuju hulu. Tiba-tiba *datu* terpeleset jatuh ke sungai. Uang perak yang disimpannya di saku *laung*-nya jatuh dan hilang entah ke mana. Berhari-hari *datu* mencari uangnya yang di jatuh di sungai, namun tidak ditemukan. Akhirnya, *datu* menamai sungai tersebut dengan sebutan Sungai Uang.

Datu berpikir kalau jatuhnya uang di sungai itu, mungkin pertanda bagus untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus bercocok tanam. Sejak itu, *datu* dan keluarganya tinggal di tempat itu hingga sekarang. Setelah beranak pinak hingga terbentuk sebuah komunitas kecil (balai), maka *datu* menamai komunitas tersebut dengan sebutan Balai Adat Pantai Uang.



Wilayah Adat yang Minim Akses

Wilayah adat kami sangat minim akses dan pelayanan publik. Jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari perkotaan. Akses menuju perkampungan adat pun jelek dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Lebar jalannya hanya setapak. Itu pun kami buat secara bergotong royong menggunakan cangkul.

Siapa pun yang melewati jalan tersebut harus berhati-hati karena kondisi jalan yang sempit. Bila musim hujan, jalannya sangat licin dan berlumpur.

Balai Adat Pantai Uang merupakan daerah pegunungan datar yang memiliki luas 562 hektar. Wilayahnya terbentang dari utara gunung bukit serta landai menembus ke selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Balai Adat Cabai, di sebelah selatan berbatasan dengan Balai Adat Papagaran, di sebelah timur berbatasan dengan Balai Adat Bayawan, dan di sebelah utara berbatasan dengan Balai Adat Pantai Mangkiling.

Jumlah kami sedikit. Di daerah yang terletak pada ketinggian 1.779 meter di atas permukaan laut ini, hanya ada 22 kepala keluarga. Jumlah laki-laki sebanyak 50 orang, sementara perempuan sebanyak 35 orang. Sehingga, total hanya ada 85 orang yang tinggal.

Salah satu alasan yang membuat saya cukup nyaman tinggal di sini, adalah udaranya yang sejuk. Pada saat-saat tertentu, udara di tempat kami tinggal ini bisa amat dingin.



Bertani Secara *Bewaging*

Kami mengisi kehidupan keseharian kami dengan menanam padi di sekitar perbukitan. Kerja keseharian kami adalah memang menanam padi. Kami tidak mengerjakannya secara sendiri-sendiri, melainkan bergotong-royong. Kami istilah itu dengan *bewaging*.

Bewaging bisa berarti pula menanam padi yang selalu cepat selesai karena kami melakukannya dengan kerja sama secara bergiliran dari satu pemilik ladang ke pemilik ladang lainnya. Setiap pemilik ladang mendapatkan giliran sesuai kesepakatan yang dilakukan melalui musyawarah dengan mengacu pada umur benih.

Acara adat dari tradisi *bewaging* disebut *Menugal*. *Menugal* dilakukan pada pagi hari. Sebelum *Menugal*, kami berkumpul lebih dulu di suatu tempat yang kami sebut pondok. Di situ, sebelum *Menugal*, kami makan dan minum. Setelahnya, mulailah kami *Menugal*.

Kaum laki-laki membikin lubang untuk benih padi, sementara para perempuan mengisi lubang yang telah tersedia itu dengan bibit-bibit padi yang sudah disiapkan.

Tradisi *bewaging* merupakan warisan nenek moyang kami. Hingga kini, tradisi itu masih dipraktikkan seturut generasi ke generasi. Semua merawat tradisi itu. Anak-anak hingga orang dewasa di kampung telah mengenal dan melakukan *bewaging*. Ibarat sebuah pohon, tradisi yang diperlihatkan lewat kerja sama itu terus tumbuh - bertangkai dan berpucuk. Kami semua merawatnya.

Melalui *bewaging*, kami merasakan adanya perwujudan solidaritas yang kuat di antara warga Masyarakat Adat Balai Pantai Uang.



Warga makan bersama saat istirahat di sela-sela bergotong royong menanam padi.

Namun, kebersamaan kami terkadang menyisakan kesedihan manakala butiran-butiran padi yang telah menguning, seketika hancur tidak bisa dipanen karena tertimbun tanah longsor. Itu sering kami alami. Risiko tersebut tidak bisa kami hindari sebagai konsekuensi bercocok tanam di daerah perbukitan.

Banyak orang di kampung kami, termasuk keluarga saya dan tetangga, ramai-ramai membuka ladang untuk menanam padi dan jenis tumbuhan lainnya. Jelang musim penghujan di awal tahun, biasanya kami sudah mulai menyiapkan lahan yang bersih untuk ditanami padi dan jenis tanaman lainya secara tumpang sari, seperti umbi-umbian, jahe, cabai, dan sebagainya.

Khusus tanaman padi, biasanya kami menanamnya satu tahun sekali. Sehari atau dua hari sebelum masa tanam, semua peralatan, termasuk bibit padi, sudah disiapkan. Tiba waktunya, padi pun siap ditanam. Saya termasuk perempuan adat yang sering ikut menanam padi. Saat panen, saya juga ikut memanen padi menggunakan alat, seperti *gupitan* yang terbuat dari bambu atau kaleng bekas. Panen padi dilakukan selama enam bulan pasca-masa tanam.

Dalam prosesi menanam padi itu, perempuan dan laki-laki bergotong royong. Namun, dalam praktiknya, para perempuan adat berganti peran dengan para laki-laki. Para perempuan sibuk bekerja di ladang dan dapur menyiapkan hidangan bekal kerja. Sementara, para lelaki hanya ikut membantu kaum perempuan mengangkut padi yang sudah dipetik untuk dibawa ke tempat tujuan yang sudah disiapkan. Setelah itu, para lelaki dan perempuan makan bersama.

Tradisi gotong-royong menanam padi di Balai Adat Pantai Uang itu, menegaskan keterlibatan dan kontribusi perempuan adat yang cukup menonjol. Kerja mereka mencerminkan bahwa setiap tetesan keringat perempuan adat, punya arti dan penting untuk dihargai.



Adat Istiadat dan Simbol Kehidupan

Komunitas Masyarakat Adat Balai Pantai Uang hingga kini tetap mempraktikkan serta melestarikan adat istiadat dan kearifan tradisional. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kami, senantiasa disertai dengan ritual adat yang memiliki makna tertentu.

Muin, salah seorang Penghulu Adat Pantai Uang, menyatakan kalau sejak dulu nenek moyang tetap mempertahankan adat istiadat dan kearifan lokal. Muin mencontohkan, saat membuka ladang untuk bercocok tanam, sebelumnya warga mengadakan ritual *mentanungi* (memeriksa). Tujuannya adalah untuk menentukan lahan tersebut baik atau tidak untuk dijadikan ladang. Kalau kondisi lahan baik, maka semua tumbuhan di atas lahan itu bisa ditebas dan ditebangi.

Setelahnya, dilakukan *beilairaba*. Saat lahan sudah kering, maka lahan itu akan *diselukut* atau dibakar. Sebelum pembakaran, ada ritual yang mendahului, di mana kami melakukan *behambur* beras kuning agar saat membakar lahan, api tidak menjalar ke tempat lain. Setelah dibakar, lahan kemudian disiapkan untuk ditanami padi.

Untuk menanam padi, ada ritual adat lainnya. Demikian pula pada saat padi telah berumur tiga bulan. Ritual itu berupa upacara bernama *Sembu Umang* sebagai tolak bala agar padi yang ditanam terhindar dari hama. Setelah tanaman berumur enam bulan, padi sudah masak atau matang dan sudah bisa dipetik atau dipanen.

Setelah panen, ada lagi ritual adat, yaitu *Aruh Adat Mehanyari* padi untuk dimakan serta pesta ucapan syukur kepada *Neneng Bahtara* (Tuhan Yang Maha Kuasa) atas segala rezeki yang didapat.

Kemudian, sebelum padi dimasukkan ke dalam *lombong* atau *kindai*, dilaksanakan lagi ritual *Aruh Adat Ganal* atau *Bekalang Tahun* sebagai penutup untuk penyerahan hajat janji selama satu tahun.

Selain ritual menanam padi, banyak hal yang terkait adat istiadat dan kearifan lokal yang hingga kini masih dilaksanakan secara turun temurun.



Warga berkumpul untuk melakukan ritual tolak bala.

Kepala Adat Juhri menuturkan, dalam melakukan perkawinan adat pun kami bergotong royong saling membantu satu sama lain. Ada yang disebut rembuk adat untuk membicarakan pengelolaan sumber daya alam, seperti bercocok tanam dan sebagainya. Musyawarah adat dilakukan untuk membicarakan serta mengevaluasi lembaga, mengganti pengurus organisasi, dan menyelesaikan masalah lain.

Sidang adat merupakan keputusan tertinggi ketika terjadi masalah secara internal maupun eksternal dengan pihak luar. Sidang tersebut digelar apabila suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sidang adat dilakukan oleh para tokoh, kepala adat, dan *damang*.

Sanksi adat adalah *tahil*. Setiap yang melakukan pelanggaran adat, maka dikenakan sanksi berupa *tahil*.

Selain ritual adat, salah satu identitas budaya yang hingga kini masih melekat di komunitas adat kami, adalah tarian adat. Tarian adat bukan sekadar identitas budaya, tapi lebih dari itu, yaitu simbol kehidupan kami.

Penasihat Lembaga Balai Adat Pantai Uang Hadi Irawan menyebutkan, salah satu tarian adat yang populer adalah Tari Tandik Balian. Tarian itu biasanya dibawakan para *tutua* adat dan pemuda adat. Semua penarinya laki-laki dan diiringi dengan berbagai alat musik, seperti serunai, seruling, gendang, dan lain-lain. Ada juga Tari Kanjar yang juga dibawakan oleh kaum lelaki.

Sementara itu, ada Tari Babangsai yang semua penarinya dibawakan oleh perempuan adat dengan iringan alat gendang dan serunai.



Kemandirian di Tengah Ancaman

Suatu pagi, matahari mulai menampakkan sinarnya. Mataku tertuju kepada sejumlah anak yang berlarian penuh keceriaan. Mereka memegang bendera merah putih. Mereka bersemangat mengayunkan bendera di tengah sepiya perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sesekali anak-anak usia sekolah itu berteriak “merdeka,” meski mereka belum pernah merasakan denyut kemerdekaan itu di atas tanah leluhur.

Sejak dilahirkan ke bumi, anak-anak tersebut tidak pernah menikmati fasilitas dan layanan sekolah di kampung. Kenyataan pahit itu tidak membuat anak-anak untuk menyerah. Anak-anak adat harus menempuh jalan berliku puluhan kilometer agar bisa sekolah ke desa sebelah.

Perih hatiku melihat getirnya perjuangan hidup anak-anak adat kami. Sejak lahir, anak-anak adat kami sudah dihadapkan pada realita hidup yang sangat keras. Hal yang sama juga dirasakan oleh para orangtua anak adat. Dari pagi hingga petang, kami bekerja keras memeras keringat untuk mengais rezeki agar bisa bertahan hidup.

Pendapatan utama kami berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Kami mengelola alam yang terbentang di sekitar perkampungan dengan penuh kesabaran. Beberapa jenis sayur dan buah, kami tanam untuk menopang kehidupan, seperti padi, cabai, pisang, talas, kacang, dan sebagainya.

Kami hidup dari keringat sendiri tanpa bantuan dan campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah.

Budi Hartono, salah seorang tokoh pemuda adat di Balai Adat Pantai Uang, menyatakan, sejak berdirinya kampung hingga sekarang, belum pernah Masyarakat Adat menerima bantuan apa pun dari pihak luar, termasuk pemerintah. Budi mengaku pernah suatu ketika pejabat pemerintah datang ke kampung, tapi hanya sekedar melihat keadaan tanpa pernah menawarkan atau menyalurkan bantuan.

“Sebutir beras pun belum pernah pemerintah mengirimkannya ke kampung ini. Tapi, hingga kini, kami cukup kuat untuk bertahan hidup mandiri tanpa campur tangan dari pihak mana pun,” kata Budi, mantan Sekretaris Lembaga Adat Pantai Uang periode 2018-2019.

Budi menyatakan bahwa kemandirian ekonomi yang selama ini kami terapkan di kampung, yaitu bercocok tanam secara berkelompok. Dia mengakui, hal itu tidak mudah karena sejumlah kendala kerap kami temukan di lapangan, terutama saat memasarkan hasil panen. Menurutnya, kendala itu lebih disebabkan karena akses jalan menuju ke kota untuk memasarkan hasil panen, masih memprihatinkan.

Budi menambahkan, selain buruknya akses jalan, sejumlah fasilitas pendukung juga belum terhubung ke kampung, seperti akses komunikasi saluran telepon dan internet. Hal lain adalah sarana pendidikan dan layanan kesehatan.

“Kami tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan terus membayangi hidup Masyarakat Adat di sini,” ucapnya dengan nada lirih.

Di luar kondisi yang menjadi kendala bagi kami, sejak dulu hingga sekarang, kami tidak pernah berkonflik dengan siapa pun. Tidak ada perampasan wilayah adat oleh pihak mana pun hingga sekarang. Kami aman dari konflik sejauh ini karena di kawasan wilayah adat kami tidak terdapat mineral untuk ditambang maupun perkebunan sawit. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pun tidak ada perusahaan tambang dan sawit, sehingga hutan dan alam tetap lestari.

Namun, saat ini Balai Adat Pantai Uang mulai merasa terancam dengan munculnya keinginan menetapkan kawasan hutan di wilayah adat kami sebagai kawasan hutan negara, baik itu hutan desa, hutan lindung, hutan tanaman rakyat, serta berbagai jenis hutan negara lainnya.

Wilayah adat kami merupakan bagian dari suatu area pegunungan. Saat ini, kami sedang berupaya mempertahankan wilayah adat kami dari tangan-tangan jahil yang hendak mengganggu ketentraman kami dengan cara merampas wilayah adat. Baru-baru ini, di tengah pandemi, kami mulai mengendus adanya dugaan tindakan ilegal. Kami melihat ada upaya tersembunyi dari pihak lain yang sedang berusaha mengklaim wilayah adat kami sebagai kawasan hutan negara.

Kami selama ini mandiri. Kami tak mendapatkan bantuan dari siapa pun. Meski begitu, dalam kesendirian kami, kami tetap berada di bawah potensi ancaman kehilangan wilayah adat kami yang kami tinggali sejak nenek moyang kami. Ancaman kehilangan itu berarti pula ancaman atas ancaman kehilangan seluruh kehidupan kami, seluruh ritual adat kami.

* * *



04

Kisah dari Kasepuhan Bayah: Bukan Seongkok Batu

Oleh Henriana Hatra bersama Alya Nurbaiti

Bayah bukan seongkok batu, secuil tanah, atau sekolam air laut. Bayah adalah hasil keringat dan darah para leluhur kami. Leluhur yang menjaga keseimbangan hubungan antara Masyarakat Adat dengan alam sumber kehidupannya. Namun kini, kami sebagai Masyarakat Adat Bayah, kaget. Bayah sudah menjelma menjadi lirik lagu “Ujung Aspal Pondok Gede” karya Iwan Fals.

*Sampai saat tanah moyangku
Tersentuh sebuah rencana
Dari serakahnya kota
Terlihat murung wajah pribumi*

*Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah
Tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari
Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri
Satu per satu sahabat pergi dan tak 'kan pernah kembali*

Ya, di antara hutan, sawah, dan rumah kami, kini berdiri pabrik dan tambang. Sejak 2013, tahun berdirinya pabrik semen PT Cemindo Gemilang, beragam bencana yang sebelumnya tak pernah ada, mulai mewarnai kehidupan kami. Perselisihan pendapat di tengah-tengah Masyarakat Adat pun menjadi suatu keniscayaan: sebagian besar menentang keberadaan pabrik, tetapi ada pula yang hidup sebagai buruh pabrik dan kuli panggul di dermaga milik perusahaan itu.

Saya Henriana Hatra. Saya lahir dan besar di Kampung Bayah 2, Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sehari-hari, saya mengajar di SMP Negeri 2 Bayah yang terletak di Desa Sawarna. Jarak sekolah itu dari rumah saya, sekitar 20 menit dengan sepeda motor. Dalam perjalanan pergi dan pulang kerja, saya melewati kawasan yang dulunya terbuka untuk Masyarakat Adat dan dapat kami masuki dengan leluasa. Kini, tempat-tempat itu dibatasi oleh pagar dan tembok perusahaan. Untuk mencapai beberapa titik itu, sekarang kami harus jalan memutar cukup jauh.

Pabrik semen dan tambang batu kapur adalah barang asing yang tak pernah saya bayangkan akan hadir di Kasepuhan Bayah. Saya tidak pernah membayangkan bahan baku semen melewati permukiman warga. Bahan baku “melayang,” disalurkan melalui *conveyor belt* (ban berjalan) raksasa sepanjang lima kilometer. Itulah pemandangan kami sehari-hari. Terlebih, alat itu bersuara dengan amat bising. Padahal, sebelumnya di sana adalah hamparan *leuweung* (hutan) yang hijau dan tenang.



Perbukitan Karst

Ada sekitar 500 *kasepuhan* (komunitas Masyarakat Adat) di Kabupaten Lebak, Banten. Kasepuhan Bayah adalah satu-satunya yang menempel dengan laut. Kasepuhan Bayah terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, dan Kecamatan Panggarangan. Kecamatan Bayah terdiri dari Desa Cidikit, Desa Bayah Timur, Desa Bayah Barat, Desa Darmasari, Desa Pamubulan, Desa Cimancak, Desa Cisuren, Desa Pasirgombong, Desa Sawarna, Desa Sawarna Timur, dan Desa Suwakan. Sementara di Kecamatan Cilograng, terdapat Desa Lebak Tipar, Desa Panggarangan, Desa Hegarmanah, Desa Situregen, Desa Sogong, Desa Sindang Ratu, Desa Mekarjaya, dan Desa Jatake.

Kasepuhan Bayah merupakan salah satu *pupuhu* (*kasepuhan* induk) yang diamanatkan oleh leluhur untuk mengisi dan mengelola *wewengkon* di sekitar aliran Sungai Cimadur hingga muara di Pantai Bayah. Batas wilayah adat kami, yaitu Hutan Bantarkidang di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Sungai Cibareno di sebelah timur, dan Sungai Cipager di sebelah barat. Wilayah kami telah dipetakan melalui proses pemetaan partisipatif. Warga Desa Bayah telah mendapatkan pengakuan bersama wilayah adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Bentang alam kawasan Bayah berupa hutan hujan tropis, perbukitan, lembah, dan pantai. Keseluruhannya membentuk semacam kubah yang dinamakan Kubah Bayah. Kawasan pada ketinggian sekitar 551 meter di atas permukaan laut ini, dialiri tiga sungai besar, yaitu Sungai Cibareno di bagian timur, Sungai Cimadur di bagian tengah, dan Sungai Cipeucangcuri di sebelah barat. Di wilayah Gunung Madur, terdapat perkebunan karet, sedangkan hamparan sawah yang sangat luas, terletak di samping Sungai Cimadur dan Sungai Cidikit. Uniknya, dari bagian tengah hingga selatan kubah, terbentang kawasan karst (batu kapur atau gamping).

Sebagian kawasan karst berada pada kawasan hutan tanaman mahoni, hutan jati, hutan campuran, serta hutan lindung yang terletak di wilayah kekuasaan polisi hutan Bayah Selatan, milik Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani). Karst bernama Karst Sawarna adalah zona lindung yang tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan maupun kegiatan yang dapat merusak bentuk dan fungsi kawasan karst.

Sementara itu, pada kawasan pesisir berjejer pantai-pantai: Pantai Bayah, Pantai Karang Tareje, Pantai Pulo Manuk, Pantai Goa Langir, Pantai Sawarna, dan Pantai Tanjung Layar. Pantai Karang Tareje menampilkan fenomena geologi yang menarik. Karang Tareje adalah karang yang tersusun membentuk *tareje* (tangga). Jika ombak sedang besar, ombak yang membentur karang akan membentuk air terjun. Pantai Sawarna - atau sebutan lainnya adalah Pantai Ciantir - memiliki ombak yang cocok untuk berselancar. Saya sejak kecil suka bermain di pinggir pantai untuk memancing.

Saat ini, lebih dari 73.000 Masyarakat Adat Bayah tinggal tersebar di wilayah adat seluas 38.000 hektar. Mayoritas kami bekerja sebagai nelayan dan petani. Ada juga yang berladang dan beternak ikan air tawar.



Perahu nelayan di perairan Bayah dengan pabrik semen dan asap dari tumpukan batu bara pada latar belakang. Asap dan debu *klinker* (semen dari aktivitas bongkar muat) yang berterbangan, memerihkan mata dan menghalangi pandangan nelayan serta meningkatkan risiko kecelakaan karena tingginya lalu lintas kapal.



Bencana Pabrik Semen

Saya ingat betul, pada mulanya adalah tahun 2012. Saat itu, mafia-mafia tanah bergerilya mendatangi rumah-rumah warga. Mereka hendak mengambil alih lahan garapan warga. Katanya, untuk “program pembangunan pemerintah.” Mereka tidak menjelaskan bahwa pada lahan tersebut akan dibangun pabrik semen, apalagi menjelaskan dampak lingkungan dari aktivitas pabrik. Warga hanya dijanjikan kesejahteraan. Berbekal semangat mendukung program pemerintah itu, warga menerima uang ganti rugi atas alih garap lahan.

Ibu saya termasuk yang melepaskan lahan keluarga kami di Desa Darmasari. Sekarang beliau dan banyak warga kecewa dan menyesal, tapi pabrik sudah terlanjur beroperasi. Saat ini, Masyarakat Adat tengah berjuang menentang pembebasan lahan oleh perusahaan besar lainnya: PT Siam Cement Group.

Saat ini, PT Cemindo Gemilang memproduksi semen dengan merek Semen Merah Putih. Pabriknya berdiri di atas lahan seluas 50 hektar, sedangkan kompleks pabrik keseluruhan memiliki total luas 3.000 hektar yang terdiri dari tambang, pelabuhan, dan infrastruktur lain. Pabrik ini juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 60 Mega Watt (MW) dan menggunakan 100 ribu ton batu bara sebagai bahan bakar setiap bulannya.

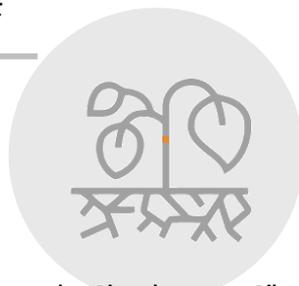
Kompleks PT Cemindo Gemilang berada di Desa Darmasari dan Desa Pamubulan. Kedua desa tersebut dan Desa Lebak Tipar adalah yang paling terdampak oleh aktivitas pabrik dan tambang. Jika dilihat dari foto udara, kompleks pabrik akan tampak kontras dan mencolok dengan warna hijau gelap di sekelilingnya.

Lahan pabrik itu dulunya adalah *leuweung*. Menurut *juru basa* (juru bicara) kami, Iwan Kastiwan, *leuweung* tersebut termasuk kategori *leuweung sampalan*, yaitu hutan tempat mengembala ternak, mengambil buah-buahan, dan mencari kayu bakar.

Sementara itu, lokasi tambang kapur sebagian merupakan *leuweung sampalan* dan sebagian lagi *leuweung tutupan*. “Ya, jadi ada sebagian yang di kawasan hutan tutupan karena luas sekali lahan tambangnya,” ujar Iwan.

Leuweung tutupan adalah hutan yang tidak boleh dijamah, bahkan oleh Masyarakat Adat sendiri. Di *leuweung* itu pula terdapat zona karst lindung. Ia adalah hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu, diubah fungsinya, apalagi dirusak. “Ada banyak mata air di situ,” kata Iwan.

Betul saja, sejak ada tambang, untuk pertama kalinya, Masyarakat Adat Bayah di Desa Darmasari dan Pamubulan, kekurangan air bersih. Padahal, sebelumnya, air di Bayah selalu melimpah. Ternyata enam dari tujuh mata air telah rusak. Mata Air Cipicung adalah sumber air bagi 600 kepala keluarga di Darmasari. Kini, alirannya terhenti karena debit yang sangat sedikit sebab daerah tangkapan air di sekitar hulu sungai, berubah menjadi tiang pancang *conveyor belt*.



Bencana Air

Mata air lainnya, yaitu Mata Air Cibayawak, Cipaderang, Cibutun, Ciarya, dan Cimonyet juga sama nasibnya: kering dan tercemar limbah. Air juga tidak lagi mengalir di Curug Cipaderang yang dulunya kerap dikunjungi wisatawan lokal. Satu-satunya mata air yang tersisa, terletak jauh di dalam perkebunan karet, kira-kira tujuh kilometer dari permukiman terdekat. Saat ini, PT Cemindo Gemilang mensuplai warga dengan dua mobil tangki air atau 16 ribu liter sehari. Namun, itu tentu tidak cukup.

Kawanku Penol yang tinggal di Kampung Sawah di Desa Darmasari, mengisahkan bencana air. “Kalau kemarau, kekeringan dan banyak debu. Kalau musim hujan, banjir lumpur dan longsor,” katanya.

Penol sedikit beruntung karena Kampung Sawah terletak di pinggir sawah dan sungai, sehingga ia masih dapat mengambil air di sungai.

Tapi, ia bilang, “Sialnya, ya, kalau hujan, dapat kiriman lumpur dari atas.” Kampung Sawah berada persis di bawah perbukitan, di mana tambang dan pabrik berdiri.

Penambangan memang berpotensi menghilangkan epikarst, zona dekat permukaan daerah karst yang berfungsi sebagai media penyimpanan air. Hilangnya epikarst dan pepohonan di atasnya, akan menghentikan resapan ke dalam lorong atau sungai bawah tanah. Akibatnya, air hujan akan melimpah dan membentuk air larian (*runoff*) yang - jika dalam jumlah besar - dapat menyebabkan banjir.

Sejak dulu, Masyarakat Adat Kasepuhan sudah menjalankan *tatali paranti* dan menggunakan sistem zonasi wilayah adat secara turun temurun: *gunung kayuan* (gunung kayu), *lamping awian* (lereng bambu), *legok balongan* (sumur), dan *datar imahan* (rumah datar). Dengan sistem itu, kami jauh dari bencana alam. Eksploitasi wilayah oleh pabrik semen, sudah jelas tidak mengindahkan sistem zonasi. Hak Masyarakat Adat hilang, bencana pun datang.



Masyarakat Adat, khususnya pemuda adat, menanam pohon untuk memulihkan mata air Cipicung yang kering dan tercemar oleh limbah pabrik semen.



Pencemaran dan Pemiskinan Nelayan

Tak hanya sumber air bersih yang hilang, limbah pabrik juga mencemari beberapa anak sungai. Kalau musim hujan, warnanya seperti kopi susu. Kadang-kadang airnya sampai hitam dan lengket. Padahal, kami pernah menguji kandungan air Sungai Cibayawak ke Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Serang pada 2013 dan hasilnya air tersebut layak minum. Tapi, sekarang Ikan-ikan di sungai malah mati.

Air yang tercemar juga mengalir ke kolam lele milik warga atau *pibalongeun*. Ribuan ikan lele ternak milik kami, mati. Kejadian tahun 2017 itu, menyebabkan kami mengalami kerugian dari kerusakan kolam ikan lele, mencapai sekitar Rp40 juta. Penol adalah salah seorang korban.

Pencemaran tidak hanya terjadi di darat. Di laut, batu bara, klinker (seperti batuan kecil hasil dari rantai proses produksi semen), dan limbah sawit yang digunakan sebagai campuran bahan bakar untuk pembakaran semen, tumpah. Tumpahan itu mengalir ke *legon*, yaitu area di mana terdapat banyak ikan untuk ditangkap oleh nelayan. Banyak ikan mati karenanya.

Tidak hanya itu, batu bara di dermaga sering terbakar, sehingga mengeluarkan asap putih dan bau menyengat. Aktivitas bongkar muat batu bara di dermaga, juga menerbangkan partikel kecil yang terbang ke arah permukiman Masyarakat Adat di Bayah Timur, Bayah Barat, Darmasari, dan Pamubulan. Selain itu, aktivitas penambangan sudah jelas menjadi sumber polusi udara berupa debu. Bagi Masyarakat Adat, tak ada hari tanpa menghirup debu itu.

Sampai hari ini, kami masih dikepeng gelap dan pekatnya asap dan debu. Begitu pekat sampai-sampai kami mencandainya itu seolah bisa jadi *pupur* (bedak) perempuan di desa.

Ketika Covid-19 mewabah, anak-anak kami jarang bermain di luar. Saat pandemi datang, kami tidak kaget dengan protokol kesehatan. Tanpa Covid-19 pun kami sudah biasa memakai masker kalau mengendarai motor atau jalan kaki ke luar rumah.

Udara sehat di Bayah sekarang menjadi barang langka. Partikel debu klinker ukurannya 2,5 mikron, sehingga mudah sekali masuk dan menyumbat saluran pernapasan. Menurut catatan Puskesmas Bayah pada 2019, penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) secara fluktuatif menduduki peringkat tertinggi dalam kurun waktu Februari hingga Agustus sebagai penyakit yang paling banyak diderita Masyarakat Adat Bayah.

Debu dari pelabuhan juga sampai ke pantai. Penduduk sekitar Pantai Karang Tareje pernah memasang spanduk bertuliskan: “Selamat Datang di Kawasan Wisata Debu.”

Debu mengganggu pandangan nelayan. Hal itu membahayakan mengingat tingginya lalu lintas kapal, bukan hanya perahu nelayan, melainkan juga tongkang batu bara dan kapal besar lainnya. “Kalau mau ke tengah laut melewati area itu, aduh, perih di mata,” tetanggaku Sangsang bercerita. Dia seorang nelayan.

Nelayan bisa dibilang profesi yang paling terdampak oleh keberadaan pabrik semen. Selain *legon*-nya tercemar, nelayan juga kehilangan *pangrerekan* atau tempat nelayan menyandarkan perahu. Tempat yang biasanya menjadi selayaknya pelabuhan bagi nelayan, kini sudah menjadi pelabuhan milik pabrik dan tertutup bagi masyarakat. Pernah suatu kali kawan-kawan saya nekat memancing di dermaga. Yang terjadi adalah: joran-joran pancing mereka dipatahkan oleh aparat keamanan.



Objek Vital Nasional

Semua yang kami alami seolah harus bisa dimaklumi. Negara sudah berdiri di belakang pabrik. Negara memperkuat pabrik semen dengan memberikan status Objek Vital Nasional. Dengan status tersebut, perusahaan (merasa) memiliki alasan kuat untuk menampilkan kekuatan militer dalam menjaga investasinya.

Sejak pembangunan dermaga, lingkungan di sekitar dermaga berangsur-angsur mengalami pendangkalan, khususnya pada wilayah muara. Kondisi itu menyulitkan nelayan untuk bersandar. Dulu, posisi karang tampak di tengah laut dan jauh dari pantai. Sekarang, tinggal kira-kira 300 meter dari bibir pantai. Menurut cerita Aki Ahdan, - aki berarti kakek - jika sedang pasang, ombak pernah mencapai kolong Jembatan Kembar di Muara Bayah. Sekarang, kolong jembatan itu sudah menjadi daratan dengan luas lebih dari tujuh hektar.

Bila menyandarkan perahu saja sudah susah, mencari ikan lebih susah lagi. Nelayan Bayah adalah nelayan tradisional yang tidak menggunakan teknologi mutakhir. Perubahan daerah tangkapan ikan memerlukan kemampuan memperkirakan keberadaan ikan dan pola migrasi ikan. Tak jarang nelayan frustrasi dalam proses tersebut.

Saya sering main ke tempat pelelangan ikan (TPI). Ada tiga tempat, yaitu TPI Bayah, TPI Pulomanuk, dan TPI Sawarna. Saat kami mengunjungi TPI Bayah, Sangsang bercerita sambil menunjuk beberapa titik lokasi.

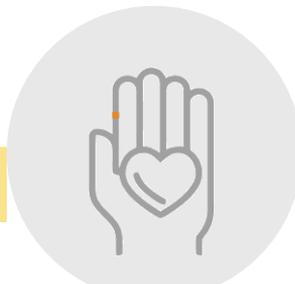
“Dulu di situ *tuh* kalau mengambil ikan, *ngga* perlu jauh. Satu sampai dua kilometer saja. Paling beberapa jam saja sudah bawa ikan banyak. Sekarang, banyak kapal, laut tercemar, ongkos melaut naik, pendapatan turun,” ujarnya.

Setelah ada dermaga, Sangsang harus menempuh jarak lima sampai sepuluh kilometer untuk mencapai daerah tangkapan ikan yang baru. Otomatis, ia harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk bahan bakar. Dua kali lipat atau lebih dari dua kali lipat dari biaya semula. Jika biasanya satu sampai dua liter bahan bakar cukup, sekarang perlu tiga sampai lima liter untuk pergi ke Desa Sawarna, Pulau Manuk, atau Desa Cimandiri.



Sangsang, nelayan tradisional dari Kasepuhan Bayah, sedang menyiapkan jaring. Pencemaran air laut akibat operasional pabrik semen membuat nelayan seperti Sangsang harus melaut lebih jauh dengan mengeluarkan ongkos lebih.

Dulu, jarang sekali nelayan meminjam uang kepada pengepul ikan atau pemilik perahu. Paling-paling, hanya sewaktu-waktu, misalnya saat pendaftaran masuk sekolah. Namun, kini nelayan semakin sering meminjam uang karena kesulitan ekonomi yang terjadi akibat berbagai kerusakan lingkungan dan perubahan kondisi ekosistem. Jika sebelumnya rata-rata pendapatan nelayan Bayah sekitar Rp700 ribu dari sekali melaut, kini turun drastis jadi berkisar antara Rp100-150 ribu dari sekali melaut.



Perempuan Penyelamat Ekonomi

Pada dasarnya, nelayan bergantung pada sumber daya alam dan iklim, sehingga penghasilannya cenderung tidak pasti. Oleh karena itu, kegiatan menangkap ikan jarang menjadi pekerjaan yang eksklusif. Bahkan, sebelum ada industri semen, banyak nelayan Bayah yang merangkap pekerjaan sebagai penjahit, pekerja perkebunan, buruh bangunan, dan tukang ojek. Namun, kini dengan penghasilan nelayan yang menurun drastis, kebutuhan rumah tangga pun sulit tercukupi meskipun ada sumber nafkah yang lain.

Menghadapi situasi seperti itu, perempuan-perempuan istri nelayan jelas tidak tinggal diam. Sejak dulu, ibu-ibu biasa menjemur ikan untuk dendeng ikan yang merupakan salah satu panganan khas Bayah. Herni, istri Sangsang, juga melakukannya.

Dendeng ikan, selain untuk stok pangan sendiri, lumayan juga jika dijual. Jenis ikannya tergantung musim. Yang paling sering, adalah ikan layur, ikan selayang, dan ikan tembang. Yang diolah adalah jenis ikan-ikan pelagis yang kalau dijual basah, harganya tidak begitu mahal. Ikan-ikan itu biasanya berakhir sebagai dendeng.

“Kalau dulu, suami saya berangkat subuh, pulang jam sembilan atau sepuluh pagi, lalu ke pelelangan ikan. Siangnya, setelah pelelangan tutup, dia akan melaut lagi. Nah, ikan hasil melaut siang atau sore itulah yang biasanya dibawa pulang ke rumah dan saya bikin dendeng,” ucap Herni.

Namun, sekarang Sangsang susah mendapat ikan. Jangankan melaut siang-siang, melaut pagi saja kadang-kadang dia lakukan. Sebab, jika hari ini tidak dapat ikan, besoknya tidak bisa melaut lagi karena tidak cukup modal untuk beli bahan bakar dan perbekalan. Oleh karena itu, Herni cermat menyisihkan uang dan membeli ikan dari luar Bayah untuk dibuat dendeng dan dijual kembali.

“Misalnya, dari Pelabuhan Ratu, ‘kan tidak terlalu jauh dari sini,” ujar Herni.

Setidaknya, apa yang dilakukan Herni membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari meski untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya masih belum mencukupi. Anak kedua Herni dan Sangsang tidak dapat meneruskan ke SMA.

Herni dan perempuan adat lainnya tidak surut semangat. Mereka juga bersiasat untuk membantu ekonomi keluarga dengan membuat dan menjual berbagai makanan ringan, seperti keripik pisang dan rengginang manis.



Melawan untuk Bertahan

Dalam kurun tahun 2013 hingga 2019, tak kurang dari 50 pemberitaan tentang aksi protes Masyarakat Adat Bayah, muncul di media. Mereka mempersoalkan berbagai temuan kerusakan lingkungan, kerusakan mata air, hilangnya akses masyarakat terhadap hutan, polusi udara, dan pemiskinan nelayan.

Bisa dikatakan, aksi sudah menjadi bagian sehari-hari Masyarakat Adat Bayah. Itu betul, sungguh! Hanya pandemi Covid-19 yang kemudian bisa menghalangi kami melakukan aksi. Selama pandemi, kami nyaris tak melakukan aksi. Sebelumnya, warga Pamubulan pernah memblokir jalan, warga Cibayawak pernah menghadang 30 truk pengangkut batu bara, serta kelompok nelayan pernah mengepung dermaga selama tiga hari tiga malam dan menahan beberapa kapal. Kami kerap berunjuk rasa di halaman kantor PT Cemindo Gemilang. Spanduk-spanduk berisi protes, kami bentangkan di beberapa lokasi strategis.



Salah satu spanduk berisi protes Masyarakat Adat Bayah terhadap aktivitas pabrik dan tambang, dibentangkan di Jembatan Kembar dekat Muara Bayah.

Saya mencoba menghimpun kekuatan pemuda adat lewat Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB). Pada 2019, kami menanam 10 ribu pohon sebagai upaya pemulihan Mata Air Cipicung. Pemuda adat juga melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, membagikan bibit pohon, dan mendokumentasikan berbagai bentuk aksi dan perjuangan Masyarakat Adat Bayah.

Sebenarnya, DPR RI - melalui Panitia Kerja Limbah dan Lingkungan Komisi VII - telah melakukan sidak pada Maret 2019 dan menemukan adanya penumpukan limbah semen di sekitar pabrik yang belum diolah. Di tahun yang sama, Masyarakat Adat Bayah juga melapor ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sayangnya, pengaduan tersebut hanya berbuah sanksi administrasi. Sampai saat ini, warga tidak mendapatkan salinan resmi teguran tersebut. Yang terakhir, tahun 2021 kami mengadukan PT Cemindo Gemilang ke Komnas HAM, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.

Keinginan Masyarakat Adat Bayah hanyalah sederhana. Kami hanya minta agar mereka jangan merusak alam kami. Kalau sudah merusak, alangkah baiknya agar membantu memulihkannya. Jika memanfaatkan sumber daya air kami, ikutlah menjaga sumber airnya. Air dari Sungai Cidikit kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan perusahaan ketimbang oleh kami.

Kami ingin setidaknya ada keberpihakan dari pihak perusahaan, tidak hanya kepada orang-orang Bayah, tapi juga lingkungan yang mempengaruhi kami. Kami tinggal di Bayah dan anak-cucu kami juga mungkin tinggal di Bayah, lalu apa yang kelak kami akan wariskan untuk anak-cucu kami kalau kondisi Bayah tidak dijaga dan dirusak?

Sekali lagi, Bayah bukan seonggok batu. Entah itu bencana pabrik semen atau pandemi Covid-19 yang mengancam kehidupan kami, kami akan terus melawan dan memperjuangkan hidup kami - hidup yang dianugerahkan oleh leluhur dan Tuhan Yang Maha Pemurah. Bayah bukan seonggok batu!



05

Kisah dari Banua Lemo: Tangguh Menghadapi Covid-19

Oleh Baso Gandangura bersama Bambang Muryanto

Saya salah satu anggota dari Majelis Adat Masyarakat Adat Banua Lemo. Nama saya Baso Gandangura. Saya ingin mengisahkan perjuangan Masyarakat Adat Banua Lemo, terutama saat menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang bermula sejak awal 2020.

Pada suatu siang yang cerah, belasan perempuan berkumpul di rumah saya sebagai Kepala Desa Bonelemo yang berada di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Para perempuan adat tersebut memotong daun sirih menjadi potongan kecil-kecil, lalu merebusnya hingga mendidih. Setelah ditiriskan dan agak dingin, perasan jeruk nipis dicampurkan. Cara itu dilakukan sejak dulu kala oleh para leluhur kami untuk menghindari penularan penyakit.

Dalam upaya mengurangi risiko terpapar Covid-19, kami memodifikasi metode itu. Dari penelusuran kami, pengetahuan leluhur dan penelitian ilmiah membuktikan, daun sirih dan jeruk nipis adalah bahan organik yang bisa menangkal radikal bebas. Campuran kedua bahan tersebut adalah antiseptik alami.

Para perempuan adat itu sedang membuat disinfektan. Rumah saya disepakati sebagai posko penanggulangan Covid-19. Setelah itu warga meminta agar disinfektan dibuat di tiap dusun agar mudah mendistribusikannya.

Disinfektan yang dibuat secara mandiri itu kemudian dibagi-bagikan kepada warga sebagai ganti *hand sanitizer* yang harganya mahal dan langka. Formulasinya berasal dari resep obat warisan leluhur yang kami rawat dan kami jaga secara turun-temurun.



Pengetahuan Leluhur

Menghadapi ancaman pandemi Covid-19, kami selalu bahu-membahu. Kami menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kami. Setiap orang, setiap anggota dari Masyarakat Adat mengambil peran sesuai dengan kemampuannya.

Munculnya Covid-19 membuka kembali ingatan Masyarakat Adat Banua Lemo tentang peristiwa yang pernah dialami leluhur pada zaman dulu. Cerita yang dituturkan secara turun-temurun itu mengabarkan ada wabah penyakit yang menyebar dan merenggut banyak nyawa yang dikenal sebagai *sopu tau* atau *ra'ba biang*. Itu merupakan istilah untuk menggambarkan situasi ketika banyak orang meninggal dalam waktu singkat.

Karena peristiwanya demikian mirip, kami menggali lagi apa yang dahulu dilakukan para leluhur kami dalam menghadapi *sopu tau* atau *ra'ba biang*. Setelah kami semua bertemu secara kolektif, baik formal maupun secara informal, kami kembali menemukan beberapa metode yang dimiliki leluhur kami, baik dalam hal pengobatan, pencegahan penyakit, dan pengelolaan dampak ikutan akibat wabah.

Ada berbagai langkah untuk menangkal penyebaran penyakit atau pandemi. Ada *ma'rambu*, *sipoliran bilajan*, *disapai'/sapai'i*, *mirambu dapok bungga so'mak*, *ma'pallin*, dan *pa'kurung (dau ma'kurung ke tae mulan pakandei)*. Semua prinsip itu kami praktikkan kembali.

Untuk menerapkan *ma'rambu*, kami membuat bilik sterilisasi. Bilik sterilisasi didirikan di rumah saya dan ada satu atau dua lainnya yang dibuat di gerbang desa. *Ma'rambu* adalah cara pengobatan tradisional leluhur yang masih dilakukan sampai saat ini. Pengobatan itu menggunakan cara pengasapan badan, tanpa ditutupi, dengan bahan *panti'* (lilin lebah hutan) yang dibakar dengan arang. Pengobatan dengan menggunakan asap warisan leluhur itu dipercaya dapat membantu penyembuhan suatu penyakit. Selain *panti'* dan arang, rotan juga bisa digunakan sebagai bahan pengasapan. Semua bilik penguapan untuk sterilisasi dibangun secara swadaya, termasuk alat penguapannya yang kami beli dengan dana swadaya.

Kami juga menggunakan daun sirih, jeruk nipis, dan daun *pariah* yang kami ramu menjadi ramuan antiseptik. Ramuan itu kami gunakan untuk membersihkan virus dan sisa-sisa penyakit. Cara menggunakannya bisa dengan metode *dibolo'* atau *ditongko'*.

Dengan metode *dibolo'*, orang yang sakit dimandikan dengan air yang dicampur dengan ramuan. Sedangkan *ditongko'* (ditutupi), adalah metode penguapan dengan cara, orang yang sakit duduk di kursi dengan seluruh badan ditutup kain dari kepala hingga ke bawah, lalu diuapi dari bawah. Uap berasal dari air rebusan daun sirih, jeruk nipis, dan daun *pariah* yang ditempatkan dalam baskom besar di bawah si penderita sakit.

Semua warga Banua Lemo wajib menjalani pengasapan satu minggu sekali. Orang yang datang dari luar desa juga wajib menjalani terapi itu agar bersih dari Covid-19.

Bilik sterilisasi ternyata menarik perhatian masyarakat di luar Banua Lemo. Warga dari kecamatan lain pun akhirnya datang ke Banua Lemo untuk melakukan penguapan. Mereka juga belajar cara membuat bilik penguapan sesuai dengan pengetahuan warisan leluhur mereka sendiri. Setelah pandemi berjalan beberapa bulan, sembilan desa di Kecamatan Bajo Barat memiliki bilik sterilisasi.



Seorang perempuan masuk bilik sterilisasi yang kami buat secara swadaya.



Pembatasan Pergerakan

Polirankan bilajanki mai, ki polirankun bilajanmi mati' adalah istilah yang menggambarkan ketakutan leluhur ketika wabah melanda. Untuk mencegah penyebaran wabah, masyarakat antarkampung tidak boleh saling berinteraksi.

Ingatan itu menginspirasi Masyarakat Adat Banua Lemo untuk menerapkan *sipoliran bilajan* atau pembatasan pergerakan guna melindungi diri dan melindungi masyarakat dari kampung lain dari wabah yang sedang mengamuk. Langkah pembatasan pergerakan, yang dulu dilakukan leluhur kami, ternyata dilakukan seluruh umat manusia di dunia pada masa pandemi Covid-19.

Di pintu gerbang desa, kami membuat portal untuk memeriksa dan membatasi pergerakan masyarakat. Prinsip *sipoliran bilajan* menjadi dasar untuk *lockdown*. *Lockdown* dilakukan secara ketat saat Hari Idul Fitri selama 14 hari.

Selain itu, masyarakat juga dihimbau tidak menjalankan aktivitas di luar desa. Seorang warga boleh keluar bila sangat terpaksa seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu pun harus mendapat izin dari Satuan Tugas Covid-19 di desa.

Kami juga menerapkan *disapai'* atau jaga jarak dalam berinteraksi dengan sesama warga. Prinsip leluhur itu selalu dijalankan dari generasi ke generasi, apalagi saat warga Banua Lemo menginap di rumah orang yang tidak dikenal.

Disapai' atau *sapai'* artinya memberi jarak atau membatasi kontak fisik. "Kalau kau bertemu seseorang yang tidak kau kenali asal-usulnya, kau harus jaga jarak atau beri *sapa'*. Jika dia memiliki penyakit, maka tidak akan menular ke kau."

Begitulah wejangan atau ilmu yang diberikan leluhur kami. Wejangan itu terus hidup dalam khasanah lisan kami. Wejangan itu kami teruskan kepada anak dan cucu sampai saat ini.



Seorang pria melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga.



Dapur Berasap Selokan Basah

Kami mempunyai cara tersendiri dalam menilai ketahanan pangan sebuah keluarga: *mirambu dapok*, *bungga so'mak*, yang artinya, “dapur yang mengeluarkan asap, selokan yang basah.”

Dapur yang berasap menandakan adanya kegiatan memasak di rumah itu. Sedangkan selokan yang basah, menandakan adanya aktivitas mencuci piring yang digunakan untuk makan.

Dengan prinsip itu, kami menyiapkan diri agar bahan makanan pokok selalu tersedia bagi seluruh warga. Kami menegakkan prinsip kedaulatan pangan dengan menanam beragam tanaman pangan, seperti sagu, jagung, ubi, sayuran, dan memelihara ikan di kolam. Semua itu demi memastikan keberlangsungan pasokan bahan-bahan pangan.

Di dalam prinsip kedaulatan pangan itu, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya makanan bagi warga yang mengisolasi diri atau terkurung. *Pa'kurung (dau ma'kurung ke tae mu lan pakandei)* adalah prinsip yang intinya, kami tidak boleh mengurung makhluk hidup tanpa suatu jaminan atau persediaan makanan. Prinsip itu sudah ada sejak zaman dulu dan sekarang menjadi acuan dalam melakukan karantina warga yang terpapar Covid-19 atau isolasi mandiri.

Pemerintah Desa juga menyiapkan persediaan makanan pokok bagi warganya. Tindakan itu untuk mengantisipasi jika pandemi berlangsung lama dan menyebabkan kelangkaan pangan. Warga menanam jagung dan ubi jalar yang bibitnya diberikan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, warga juga menerima bantuan sagu. Kami ingin memastikan ada ketersediaan pangan selama pandemi.

Ketersediaan bahan makanan adalah untuk mendukung prinsip ajaran leluhur *mirambu dapok, bungga so'mak*. Artinya, dapur yang mengeluarkan asap, selokan yang basah menandakan ada aktivitas memasak dan tidak ada warga yang kekurangan makanan.

Masyarakat Adat Banua Lemo tidak pernah mengalami kekurangan bahan makanan selama pandemi. Sebab, warga masih terus menanam bahan makanan pokok, seperti padi, jagung, ubi, dan lainnya.

Prinsip yang berkaitan dengan *mirambu dapok, bungga so'mak* adalah *pa'kurung (dau ma'kurung ke tae mu lan pakandei)*. Jika ada warga yang melakukan isolasi mandiri, maka dipastikan memiliki persediaan makanan yang cukup.

“Jaminan kebutuhan hidup disiapkan secara bergotong-royong oleh warga dan Pemerintah Desa Bonelemo.”

Dengan ketangguhan itu, Masyarakat Adat Banua Lemo bisa mengurangi risiko terpapar Covid-19. Sebelum proses vaksinasi, ada dua warga yang tertular Covid-19, kemungkinan tertular saat mereka bertugas ke Bogor, Jawa Barat.

Salah satu dari mereka menularkan ke ibunya yang menunggunya saat dirawat di rumah sakit. Kemudian sang ibu melakukan isolasi mandiri di Desa Bonelemo.

Setelah proses vaksinasi, ada empat orang yang terpapar Covid-19. Satu orang dirawat di rumah sakit karena memiliki riwayat asma yang akut, sedangkan sisanya melakukan isolasi mandiri.



Tak Bergantung pada Pemerintah

Pengalaman Masyarakat Adat Banua Lemo yang saya tuturkan ini telah mengajarkan, tidak semua ajaran leluhur itu kuno dan tidak relevan dengan situasi saat ini. Faktanya, kami bisa mengatasi pandemi Covid-19 dengan pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur.

Dari ribuan penduduk desa, hanya tujuh orang yang terpapar Covid-19. Cerita Covid-19 kami adalah cerita yang berbeda dengan cerita yang dipunyai masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Adat Banua Lemo di Desa Bonelemo adalah salah satu Masyarakat Adat di Indonesia yang bergerak secara cepat dan mandiri dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Warga desa yang berjumlah 1.268 orang itu menerapkan ajaran leluhur untuk menghadapi pandemi Covid-19.



Pembuatan ramuan tradisional untuk pencegahan Covid-19.



Tiga Versi Kisah Asal-usul

Siapa kami, Masyarakat Adat Banua Lemo? Ada tiga versi tentang asal-usul kami.

Versi pertama, menyatakan ada pengembara dari Duri, Kabupaten Enrekang yang berjalan melintasi pegunungan tinggi sekitar ribuan tahun lalu. Pengembara itu bermukim di sebuah tempat dan membentuk kampung yang diberi nama Banua Lemo.

Versi kedua, menyatakan Masyarakat Adat Banua Lemo dipercaya berasal dari Sangalla yang dibawa oleh Angin Dara ribuan tahun lalu.

Versi ketiga, menyatakan Masyarakat Adat Banua Lemo adalah suku pengembara yang tidak jelas asalnya.

“*Banua*” berarti rumah, kampung, tempat bermukim, atau tempat berkumpul, sedangkan “*lemo*” berarti buah jeruk. Jika digabung, maka arti “*Banua Lemo*” adalah “Kampung Jeruk.”

Secara sosial, Masyarakat Adat Banua Lemo dipimpin oleh sebuah lembaga adat dengan *To Makaka* sebagai pemimpin tertinggi. Ia dibantu pemuka adat lainnya yang menangani urusan tertentu, seperti *baliara*, *minjara*, *syara'*, *bunga' lalan*, *matoa*, dan *tobarani*. Keputusan terakhir ada di tangan *To Makaka*. Tetapi, ada persoalan lain yang diselesaikan dengan cara *ma'tongkonan* atau musyawarah, misalnya untuk urusan menanam padi (*rokko tempe*), panen padi (*mepare*), syukuran panen (*mak urre sumanga'*), dan lainnya.

Di dalam wilayah adat kami, ada wilayah yang bisa dikuasai warga adat secara individual, misalnya area *tondok* (hunian), *tempe* (sawah), dan *bela'* (kebun). Proses pembagian harus diputuskan dengan persetujuan *To Makaka*. Sedangkan hutannya, ada beberapa jenis. Ada *pangngala' kalottik'* yaitu hutan yang tidak bisa dialih-fungsikan untuk perkebunan. Hutan kategori itu, kayunya hanya bisa diambil untuk pembangunan rumah, diambil rotannya, dan untuk area melepas ternak, seperti kerbau. *Pangngala' tua* atau hutan keramat adalah hutan yang dilindungi. Hutan itu hanya bisa diambil rotannya, tumbuhan obat-obatan, madu, dan produk non-kayu lainnya. *Kabo lolo* atau ladang berpindah adalah lahan yang bisa digunakan untuk ladang berpindah. Setelah diolah dan ditinggalkan selama tiga tahun, maka akan ditanami lagi dengan aneka tanaman, seperti sayur, padi, palawija, dan lainnya. *Kabo toa* atau hutan belukar adalah lahan yang diolah masyarakat dan ditinggalkan hingga 15 tahun. Setelah itu, diolah kembali untuk ditanami tanaman palawija atau sayuran, padi, dan lainnya. *Tempe* atau sawah adalah lahan persawahan yang hasilnya menjadi sumber pangan secara turun-temurun dan menggunakan sistem pengairan tradisional.

Sedangkan hukum yang berlaku ada tiga, yaitu hukum adat yang diputuskan oleh petinggi adat kepada seseorang yang melakukan pelanggaran adat. Sanksinya bisa bermacam-macam, seperti denda satu ekor kerbau, disuruh bekerja di kebun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hukum agama, yaitu hukum yang mengacu kepada kepercayaan agama. Terakhir, hukum negara yang diberlakukan apabila ada yang melanggar aturan negara.

Masyarakat Adat Banua Lemo memiliki wilayah adat seluas 7.250 hektar dan secara administrasi berada di tiga desa, yaitu Bonelemo, Bonelemo Barat, dan Bonelemo Utara di Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.

Jumlah keluarga warga Banua Lemo sekitar 679 kepala keluarga (KK) dan jumlah total 2.820 jiwa, terdiri dari 1.390 pria dan 1.430 perempuan. Kami bekerja sebagai petani, buruh, dan pegawai negeri sipil (PNS). Mayoritas beragama Islam dan berbahasa daerah Tae.

Dari cerita yang disampaikan turun-temurun, Masyarakat Adat Banua Lemo dipercaya sudah ada sejak *To Makaka* yang pertama kali mendirikan Kampung Bonelemo dan menyebarkan adat istiadat sekaligus mengangkat perangkat adat. Kami juga terus berupaya merawat semua adat istiadat dan pengetahuan yang ada di dalamnya.

Terbukti, dengan berbekal ajaran leluhur kami mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19. Kami mencoba tidak bergantung kepada Pemerintah Indonesia. Dengan pengalaman tersebut, kami bertekad untuk terus menjaga, merawat, dan meneruskan pengetahuan dan kearifan yang telah diwariskan oleh leluhur kepada kami.

* * *



06

Kisah dari Barambang Katute: Tangguh di Tengah Ancaman Covid-19

Oleh Haeruddin bersama Andi Hajramurni

Kedaulatan pangan adalah hak menentukan nasib sendiri, terutama terkait dengan hak memilih dan menentukan sumber penghidupan. Masyarakat Adat di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, lekat dengan kehidupan sebagai petani. Secara garis besar, sumber kehidupan kami adalah menyaring enau, menanam tembakau, cengkih, kopi, palawija, jagung, dan padi, serta beternak.

Warga di Dusun Balang dan Dusun Bontomanai - saat tulisan ini dibuat - sedang menunggu masa panen padi. Di kedua tempat itu terdapat banyak sawah. Sementara di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, rata-rata warga memiliki kebun yang mereka tanami jagung. Biasanya, per orang menanam jagung 15-40 liter.

Bercocok tanam, khususnya palawija atau hortikultura dan menyaring enau, telah kami lakoni secara turun-temurun. Selain sebagai sumber mata pencaharian, beberapa jenis tanaman juga jadi makanan pokok, seperti padi, jagung, dan ubi.

Namun, sejak pandemi Covid-19 menyebar, kami juga terkena dampak ekonomi dengan menurunnya produksi. Bahkan, hasil bumi yang biasanya menjadi penopang ekonomi, seperti cengkih dan kopi, tidak berbuah selama dua tahun. Harga penjualan produksi juga turun akibat pembatasan sosial. Sementara itu, harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik terus.

Dampak pandemi juga dirasakan warga yang menyaring pohon enau dan mengolahnya jadi gula aren atau gula merah. "Di masa pandemi Covid-19, penjualan gula merah kurang lancar. Harga jual gula merah turun, sedangkan bahan lain yang kami butuhkan harganya mahal, seperti bahan dapur," kata Andi Asmar, seorang penyaring enau.

Dulu, harga gula merah mencapai Rp15 ribu per kilogram, paling murah Rp12 ribu. Tetapi, sekarang hanya Rp7-9 ribu per kilogram. Para pengepul sengaja memanfaatkan situasi pandemi dengan membeli murah komoditi dari kami. Karena mengalami krisis, mau tidak mau kami tetap menjualnya walau terlampau murah. Tapi, ada juga yang masih memiliki sumber pendapatan lain, sehingga menunda penjualan hingga harga kembali stabil. Usaha lain yang turut menurun adalah *tire* atau porang. Tengkulak pun enggan mencarinya karena harganya kian merosot sampai Rp4 ribu per kilogram, padahal sebelumnya Rp10 ribu per kilogram.



Kedaulatan Pangan

Di tengah pandemi, AMAN berupaya menguatkan Masyarakat Adat agar tetap bertahan melalui Program Kedaulatan Pangan. Komunitas Masyarakat Adat Barambang Katute yang bergabung dengan AMAN sejak 2007, ikut dalam program tersebut.

Di Barambang, program itu dijalankan dengan membentuk Kelompok Temmappettue dan Kelompok Sipulung. Setiap kelompok terdiri atas 10 anggota. Kedua kelompok itu menjadi ruang kerja baru bagi Masyarakat Adat yang kesulitan ekonomi serta pemuda adat yang pulang kampung karena kehilangan pekerjaan di perantauan akibat pandemi. Kini, kami terus membudidayakan bawang merah, sawi, lombok, tomat, dan porang.

Setelah berjalan sekitar setahun, hasilnya sudah bisa dinikmati oleh anggota kedua kelompok dan warga lainnya.

Program itu menguatkan kerja sama dan gotong-royong antar-anggota kedua kelompok. Kami berbagi tugas. Ada yang menyiapkan bibit dan ada juga yang membawa pupuk kandang (kotoran kambing) untuk menambah kesuburan tanah.

Bawang merah misalnya, dengan masa panen dua kali, hasilnya sudah dinikmati. Minimal guna memenuhi kebutuhan bumbu dapur. Sebelumnya, jika ingin memasak masakan tumis yang menggunakan bawang merah, kami harus membelinya ke warung atau pasar. Sekarang, tersedia di sekitar kami, sehingga AMAN telah mendekatkan jarak kami dengan pasar.

"Walau hasilnya belum maksimal, tapi minimal sudah ada tanaman yang dikelola. *Alhamdulillah*, sekarang sudah bertahan hingga dua kali panen dan hasilnya terlihat ada. Berarti masih bisa dikembangkan ke depannya," kata Adam Suhardi, anggota Kelompok Sipulung.

Kami yakin apabila tanaman itu cocok dikembangkan di wilayah adat kami, maka tinggal menyesuaikan waktu tanam untuk mendapatkan waktu yang tepat sebab bawang merah tidak cocok di tanah yang terlalu basah, sehingga musim tanam disesuaikan pada musim kemarau.

Kondisi tanah di Barambang rupanya memang cocok untuk budi daya bawang merah. Pada awal budi daya dilakukan, kami membeli bibit 250 kilogram. Setelah dipanen, hasilnya mencapai 900 kilogram (bertambah 650 kilogram).

Lahan yang digunakan untuk membudidayakan bawang merah, adalah lahan sawah yang telah sekian tahun menganggur atau tidak ditanami padi. Lahan tersebut tidak bisa ditanami lantaran selalu didatangi babi dan sering kesulitan air, sehingga tanaman padi rusak dan petani merugi.



Ladang porang dan sayuran yang sedang dikembangkan.

Budi daya tanaman porang juga meningkat bersamaan dengan sayuran. Hasil yang diperoleh dari program itu, sudah bagus. Salah satu kendala adalah pemasaran. Hasil bumi yang kami miliki kalau dijual harganya murah. Padahal, uang hasil penjualan dibutuhkan untuk membeli kebutuhan yang tidak tersedia di wilayah adat kami.

"Kalau panen bawang, seharusnya pembelinya sudah ada dan jelas kesepakatan harganya karena tidak bisa disimpan lama," kata Adam. Saat ini, penjualan bawang merah hanya di warung. Itu saja yang bisa menjamin kelancaran penjualan bawang merah. Namun, di musim pandemi, warung-warung banyak yang ditutup. Sementara itu, harga kebutuhan dapur naik terus, seperti minyak goreng. Sulit memastikan harga komoditi yang diproduksi di tempat kami.

Meski demikian, kami tetap bersemangat mengembangkan tanaman pangan karena optimis dapat meningkatkan kesejahteraan di masa depan jika kondisi stabil dan pemasaran jelas.

Rencana selanjutnya, kedua kelompok akan mengusulkan pengadaan kultivator atau alat penggembur tanah. Selama ini, kami hanya mengandalkan cangkul, baik untuk pembuatan bedeng maupun penggemburan tanah.

Kami tidak menampik jika selama pandemi pemerintah menggelontorkan bantuan. Namun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tidak tersalur secara merata, padahal semua warga menderita dampak pandemi.



Peran Perempuan Adat

Program Kedaulatan Pangan yang diinisiasi AMAN, menguatkan pula peran perempuan adat. Para perempuan adat tidak sekadar berkutat di dapur untuk menyiapkan konsumsi para lelaki, tetapi juga terlibat secara langsung dalam program.

Sejak awal program, perempuan adat ikut berpartisipasi dengan mendukung anggota kedua kelompok yang seluruhnya laki-laki. Perempuan adat menyediakan konsumsi dan mengantarnya ke lahan yang dipilih untuk membudidayakan bawang merah dan tanaman palawija lainnya serta terlibat dalam penanaman, pembersihan lahan, dan panen.

Sejak budi daya bawang merah menggunakan bibit dari hasil panen, kiprah perempuan adat semakin kuat karena yang dipercaya memilih bibit dan memilah bawang merah yang akan dijual dan dikonsumsi.

"Hubungan sosial di antara kami juga turut tumbuh dan semakin kuat karena kami saling membantu hampir dalam setiap pekerjaan. Jadi yang berat, terasa ringan karena, misalnya kita sudah panen, ibu-ibu tetangga datang membantu kami membersihkan benih bawang," kata Sutriani, seorang ibu rumah tangga.

Saat menyediakan bekal atau konsumsi, ibu-ibu datang membantu menyiapkan, bahkan sampai ikut serta membawakan bekal untuk kaum lelaki ke lahan. Bahkan, perempuan adat membantu membersihkan lahan atau kebun dan mencabut rumput.

"Lucunya, kita kaum perempuan kalau panen, biasanya kita istilahnya *mattakko* atau kami pilih benih yang paling segar. Kita ambil dan bawa pulang masing-masing ke rumah, biasanya kita pakai di dapur, dan tujuan utamanya untuk ditanam di pekarangan rumah. Jadi, kalau sudah tumbuh dan kita butuh, tinggal ambil karena sudah terasa seperti serumah dengan setiap kebutuhan," tutur Maryam.

Selain menguatkan peran perempuan adat, program itu bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dapur, sehingga tidak perlu lagi ke warung atau pasar untuk beli bawang merah dan sayur. Perempuan adat juga terlibat langsung dalam proses ritual adat dan pesta dan kami sama-sama menikmati itu sesuai dengan prinsip yang kami sebut *maega tawwe purennuiki*.



Kegiatan berladang yang dilakukan secara bersama-sama antara kelompok lelaki dan perempuan adat.



Mata Pencaharian

Masyarakat Adat Barambang Katute yang sudah ada sekitar abad kelima Masehi, telah bercocok tanam dan berternak secara turun-temurun.

Menurut Ismail, pemangku adat Barambang Katute, sejak awal keberadaannya, para leluhur kami menanam jagung, ubi, dan talas. Jagung termasuk makanan tertua di Barambang karena sudah ada sejak manusia pertama hadir dan tinggal di wilayah itu. Menurut kepercayaan kami, manusia dan jagung turun atau dilahirkan secara bersamaan.

Seiring berjalannya waktu, makanan pokok kami berganti. Ada padi yang jadi makanan pokok.

Awal masuknya padi di Barambang diperkirakan sekitar 1964-1965. Padi pertama yang masuk, berasal dari Kampung Manipi, Arango, dan Lembangna dengan jenis, antara lain *ase* (padi) *ranggong*, *ase pandang*, dan *ase cella*.

Asal padi tertua dari Arango disebut *galung toa* (persawahan tua) yang dahulu tempat itu dinamakan *Attoorengnee*. Persawahan tertua di Barambang sendiri ada di Hiringapareng karena letaknya di pesisir sungai yang hulunya di kaki Gunung Bawakaraeng. Bahkan, nama kampung disebut sesuai nama sungai yang mengalir di sisinya, yaitu Hiringapareng. Posisi permukiman diapit dua gunung.

Tapi sekarang, kebanyakan sudah berubah jenis. Dan padi yang dibudidayakan, yaitu *ase bodo* yang berasal dari Bulukumba dan Bikeru.

Penanaman jagung yang pernah jadi makanan pokok, hanya sekali setahun. Selain untuk menanam jagung, ada juga kebun khusus (*palla*) untuk menanam singkong atau ubi kayu dan talas dan bermacam sayuran.

Untuk keamanan lahan pertanian, kami menggunakan *sappo* (pagar bambu), *sepe'* (parit), dan *bata* (batu bata yang disusun menyerupai dinding). Meski ketiga pengaman tadi ada, penjagaan tetap dilakukan karena tetap ada gangguan lain, misalnya babi dan monyet. Setiap pemilik kebun pun memelihara anjing untuk mendampingi penjagaan.

Di Barambang Katute, jadwal penanaman biasanya ditentukan oleh *panre*. *Panre tanra* itu pemangku adat yang mengetahui kapan waktu yang baik untuk melakukan penanaman.



Lanskap persawahan di wilayah adat.



Pola dan Aturan Perladangan

Masyarakat Adat Barambang Katute memiliki menganut pola dan aturan perladangan sejak dulu. Pola penyiapan lahan kebun yang dilakukan untuk jagung, dilakukan dengan cara menebang pohon dan rerumputan di lahan yang akan digunakan, kemudian dibakar.

Pola itu sesuai *pappaseng tomatoa* (pesan orang tua) *makkada* (yang berkata), "*Iyaro nakko bata api paenre'na, nakko ase uhae paenre'na.*" Artinya, bahwa tanaman jagung ditumbuhkan dengan api, sedangkan padi ditumbuhkan dengan air.

Sebelum orang-orang mulai menggunakan berbagai jenis pupuk kimia, tanah di tempat kami subur. Tapi, semakin hari semakin banyak yang menggunakan dan bergantung pada pupuk kimia. Akibatnya, apa pun yang ditanam, banyak dari kami merugi karena tanaman tidak akan tumbuh subur. "Bahkan, tanam jagung atau padi tanpa pupuk bisa tidak berbuah. Itulah perbedaan media tanam antara dulu dan sekarang," kata Ismail.

Dulu, kami berkebun dengan cara berpindah-pindah dari lahan satu ke lahan lain karena tidak menggunakan pupuk kimia. Biasanya, satu lahan kebun hanya ditanami hingga tiga tahun untuk kemudian pindah ke lahan baru.

Lahan itu sengaja dibiarkan atau diistirahatkan dari penggarapan. Dibiarkan berbagai tanaman tumbuh untuk memulihkan kesuburan tanah. Lahan itu baru digunakan lagi paling cepat setelah tiga tahun setelahnya. Meski berpindah-pindah dalam berkebun, kami tidak serta merta memabat hutan, apalagi jika itu hutan adat. Semua ada aturannya.

Pola berladang dengan cara berpindah itu tidak dianggap kami bebas memilih lokasi sebab lahan-lahan sudah ditentukan batasannya berdasarkan jejak satu garis keturunan, misalnya dengan batu bata, parit, dan pohon. Tanda selanjutnya adalah dengan *pappaseng to diolo* (pesan leluhur) yang terus dialirkan dan disaksikan pada setiap garis keturunan, sehingga diakui semua garis dari keturunan lainnya.



Proses pembakaran yang dilakukan secara arif di lahan kecil.

Komoditas Unggulan



Komoditas unggulan Masyarakat Adat Barambang Katute adalah kopi, cengkih, gula enau atau gula aren, dan sapi. Kopi sudah ditanam sebelum Belanda masuk.

Jenis kopi yang sudah ada sejak dulu, adalah kopi *hugi'* (kopi bugis). Daunnya hampir serupa dengan jenis kopi robusta, tapi biji kopi *hugi'* lebih besar. Kopi pernah jadi minuman sehari-hari dan hasil panennya dijual ke pasar untuk membeli keperluan lain.

Setelah kopi masuk, disusul cengkih sekitar tahun 1971-1972 lewat program dari pemerintah. Per desa, pertama kali dapat satu peti bibit (sekitar lima ribu pohon) dan itu dibagikan kepada masyarakat masing-masing lima pohon. Tetapi, saat itu, pembibitannya langsung dilakukan di satu area dengan cara gotong-royong. Setelah bibitnya tumbuh dan bisa dipindahtanamkan, barulah diumumkan dan dibagikan kepada setiap warga. Di Bulukumba, banyak cengkih berbuah. Warga pun ke sana mengambil bibit, apalagi yang banyak keluarga di sana. Akhirnya, cengkih terus dikembangkan hingga saat ini.

Selain kopi dan cengkih, gula aren atau gula merah juga jadi komoditas unggulan dan menjadikannya sumber penghidupan. Orang yang menyaring pohon enau disebut *massari tua' inru'*.

Komoditi unggulan lainnya adalah *cafi* (sapi). Meski sapi belakangan masuk di Barambang dan Bonto Katute, sebelumnya hewan ternak yang dipelihara warga adalah *tedong* (kerbau) dan *jarang* (kuda). Namun, seiring perkembangan zaman, warga pun beralih membudidayakan sapi karena pembiakannya lebih cepat dibanding kerbau serta harganya juga tinggi, sehingga hasil penjualannya bisa digunakan untuk bangun rumah dan biaya pernikahan. Sementara untuk kuda, awalnya dipelihara sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil panen dari kebun atau sawah ke rumah. Tetapi, setelah akses jalan bisa dilalui kendaraan bermotor, kuda pun dijual dan hasilnya digunakan untuk beli sepeda motor.



Gotong-royong

Gotong-royong (*akkasihiang*) telah dilakukan Masyarakat Adat Barambang Katute sejak dulu. Sebelum mulai melakukan *akkasihiang* terkait kerja bakti, *Puang Barambang* mengadakan *arripungan* atau *tudang sipulung* (rapat) atau disebut *akkasihiang se're* Barambang (rapat sekampung) dengan bawahannya yang berperan sebagai kepala kampung.

Setelah ada kesepakatan dari hasil musyawarah, setiap kepala kampung menyebarkan informasi kepada bawahannya yang bertindak sebagai *saria* mengenai jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. *Saria* menyebarkan informasi kepada semua kalangan masyarakat.

Gotong-royong merupakan bagian dari aturan adat yang berkaitan dengan pranata sosial yang hingga saat ini tetap dilakoni, yaitu:

- a. *asibali'l* (sistem penggarapan gotong-royong secara bergiliran);
- b. *akkio'* (kegiatan mengajak orang tetangga membantu menggarap selama setengah hari);
- c. *abbatti* (kegiatan gotong-royong di fasilitas publik, seperti membersihkan jalan dan jembatan);
- d. *paoppangi tanah* (sanksi sosial yang sifanya mengikat jika melakukan perbuatan asusila, misalnya perintah meninggalkan kampung dan tidak diharap kembali atau dianggap telah mati); serta
- e. *sipakalebbi, sipakainge, mali siparappe, telleng siapaonang* (sebuah prinsip yang harus dipegang teguh untuk saling menghargai, mengingatkan, tolong menolong dalam kesulitan, dan tidak menjatuhkan).

Gotong-royong juga dilakukan untuk menggarap lahan pertanian, seperti membajak sawah, di mana seluruh warga turun secara bersama dan saling bahu membahu.

Di Kampung Balang dan Hiringaparengitu, hampir seluruh wilayah dipenuhi sawah. Lahan persawahan tersebut adalah hasil pola kerja sama atau gotong-royong yang dilakukan seluruh tatanan perangkat adat dan masyarakat. Pengerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam sepekan, kerja bakti dilakukan selama dua kali, di mana ada dua warga *kalompo* (RT) yang bekerja secara bergiliran.



Kegiatan menanam padi yang dilakukan secara bergotong-royong.



Dilema Pendidikan Tinggi dan Menjadi Petani

Yang masih butuh perhatian serius di Barambang Katute, adalah sektor pendidikan. Tingkat pendidikan masih rendah. Jumlah anak yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sangat sedikit. Bahkan, di pelosok masih ada yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Anak-anak di kampung tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan biaya. Meski begitu, ada masih banyak pemuda adat yang bertani.

"Sebagian besar berpikir bahwa lebih berkah jika bertani (bisa) menikmati hasil keringat sendiri. Mungkin, berdasarkan *pappaseng* atau pesan leluhur, (adalah) agar kita tidak bertindak *mabureko* (curang), seperti sekarang orang yang korupsi mengorbankan kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kepuasannya sendiri," kata Andi Asmar, seorang pemuda adat.

Orangtua dulu ingin anaknya bisa membaca (tidak buta huruf), tapi tetap bertani karena lebih penting dan lebih berkah jika mencari rezeki dengan mencangkul. Segala rezeki yang datang dari Sang Pencipta, harus dilalui dengan kerja keras.

Karena itulah, pemuda adat memilih turun tangan membantu orangtua bertani berdasarkan keputusan pemikirannya sendiri bahwa lebih baik bertani daripada melanjutkan sekolah. Yang melanjutkan sekolah sampai sarjana, umumnya karena memang bercita-cita jadi pegawai. Tapi, jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung jari.

Kegiatan utama pemuda adat adalah bertani dengan menanam jagung, padi, cengkih, dan kopi serta menyaring enau. Dan ketika musimnya tiba, ada yang menanam tembakau ketika dianggap telah memasuki waktu yang tepat.

Ada juga yang pergi ke kota dan merantau ke Makassar dan kota-kota besar lain di Kalimantan, bahkan ke Malaysia untuk bekerja. Selama pandemi, beberapa pemuda adat pulang kampung karena kehilangan pekerjaan, apalagi yang bekerja sebagai buruh bangunan.



Panen tembakau.



Sejarah Kami

Masyarakat Adat Barambang Katute mendiami perkampungan di pegunungan dan bukit-bukit yang ada di Bonto Katute secara turun-temurun. Hidup kami berjalan sesuai dengan sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya berdasarkan hukum adat yang diwariskan nenek moyang.

Sejarah keberadaan orang pertama di Barambang Katute, diprediksi sekitar abad kelima Masehi. Mula-mula, adanya tanah yang disebut *Lempangang Ritana Toa* atau tanah tua.

Menurut sejarah yang tertuang dalam Lontara yang diwariskan secara turun-temurun, di tempat tersebut dipercaya munculnya *To Manurung* atau orang pertama yang ada dan menempati tempat tersebut. Orang pertama itu adalah laki-laki. Kemudian, muncul seorang perempuan sebagai orang kedua di tempat yang dikenal dengan nama *Pabbattu*.

Kedua manusia tersebut lantas menikah dan melahirkan anak yang dikenal dengan *ana' dinru laheng* yang berarti “anak tersebut dilahirkan kembar” - seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak laki-laki meninggalkan *Lembangang Ritana Toa*, sementara saudara perempuannya tetap tinggal. Anak perempuan tersebut kemudian melahirkan empat orang anak atau dikenal dengan *ana' eppa*. Anak-anak itulah yang dilantik jadi pemangku adat di tiga Kampung, yakni Kampung Katute, Kampung Bihulo, dan Kampung Gantarang. Anak pertama dilantik sebagai *Ada' Tungka Ri Katute*, anak kedua sebagai *Sanro Tungka Ri Bihulo*, dan anak ketiga sebagai *Karaeng Tungka Ri Gantarang*.

Ketiga pemangku adat tersebut kemudian dikenal dengan *ada' tallua*. Ketiga anak yang dijadikan sebagai pemangku adat tersebut dilantik oleh si anak bungsu atau anak keempat. Sementara si bungsu, jadi *uwwa* atau penasihat ketiga saudaranya yang menjalankan pemerintahannya.

Mereka kemudian membangun sebuah rumah pertama di Lengkesa yang dikenal dengan *Mabbola syibatu Ri Lengkesa*. Di rumah tersebut, mula-mula dikenal *Paruru, Halasuji, Lamming, Campaniga*. *Ada' Tungke* menjalankan pemerintahan selama ratusan tahun. Dia digantikan oleh anaknya yang diangkat sebagai *Arung*.

Arung dalam menjalankan pemerintahannya membangun rumah adat di Bonto Katute yang dikenal dengan Bukit di Kampung Katute. *Arung* tersebut dikenal dengan nama Arung Bonto karena pusat pemerintahannya ada di *Arung Bonto*, yaitu rumah adat di Bonto Katute. *Arung Bonto* kemudian membentuk dan mengangkat pemimpin adat yang disebut *Barambang* dan selanjutnya menjadi Barambang dengan sebutan *Puang Barambang*. Penghuni pertama atau *Puang Barambang* pertama adalah Barambang Camu yang menempati rumah di Bontolasuna, Desa Barambang.

Rumah pertama itu merupakan rumah adat kami. Di situlah awal-mula perkembangan komunitas Masyarakat Adat Barambang Katute yang menyebar ke Kampung Bontokatute, Bolalangiri, Coddong, Bihulo, Ambi, dan Balang. Setiap kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung sebagai perwakilan dari *Puang Barambang* yang berkuasa pada saat itu.

Salah satu bukti fisik yang dapat menunjukkan keberadaan kami, adalah kuburan tua di Maroangin yang saat ini secara administratif berada di Desa Bonto Katute, yaitu kuburan Barambang Camu. Bukti lain adalah kampung tua di Bontolasuna dan Ballalompoa di Katute serta beberapa tempat bersejarah yang sampai saat ini masih dihormati sebagai peninggalan nenek moyang Masyarakat Adat Barambang Katute.



Bentang kawasan permukiman dan kebun di kampung kami.

Masyarakat Adat Barambang Katute dipimpin oleh seorang *Puang Barambang*. *Puang Barambang* dalam menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan, dibantu oleh perangkat adat sesuai dengan kelembagaan adat Barambang Katute. Perangkat adat yang membantu *Puang Barambang*, adalah *Tomotoa*, *Sanro*, *Panre Tanra*, dan Guru.

Sampai sekarang, Masyarakat Adat Barambang Katute tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum adat yang diwariskan nenek moyang, baik itu kewajiban, larangan, maupun ritual.

Kewajiban yang harus dijalankan, yaitu *siparinggera'ngi* (saling mengingatkan di jalan yang benar), *sibantu-bantu* (saling tolong menolong), dan *mappanre botting* (kewajiban yang harus dilakukan anggota Masyarakat Adat yang telah menikahkan anaknya). Larangan-larangan yang masih ditaati, yaitu *Aja Mu Maddamo Hani ke Dadi ki Ase'e*, adalah petuah yang isinya melarang mengambil madu pada saat padi hendak berbuah dan *Aja mu Mabokongkara Bola ke Dadi ki Ase'e*, adalah larangan membongkar rumah saat padi hendak berbuah.

Sementara itu, ritual-ritual penting yang tetap dilaksanakan, mencakup *Ma'pamana Tanah* (ritual adat yang dikhususkan kepada bumi/tanah/langit dan seluruh alam karena menumbuhkan hasil panen yang melimpah), *Ma'tula Bala* (ritual adat yang dilakukan minimal satu kali setahun agar terhindar dari bencana), *No'o di Uhae* (ritual adat yang lakukan pengantin baru setelah pesta pernikahan selesai), *Manre Ase Baru* (ritual adat yang dilakukan setiap selesai panen padi dan biasanya dilakukan di rumah masing-masing atau di situs tertentu), *Mattama Rummallah* dan *Messu Rummallah* (ritual adat yang dilakukan menjelang puasa dan saat puasa akan berakhir), serta *Mappatinro Bin'e* (ritual adat dengan *matunu sulo* atau menyalakan obor pada benih selama satu malam sebelum ditabur atau ditanam).

Tanah atau lahan di wilayah adat kami pun umumnya dikuasai secara turun-temurun dan merupakan tanah milik adat. Berpindahnya hak atas tanah biasanya terjadi karena pengalihan hak dari orangtua atau nenek moyang atau warisan.

Karena tanah tersebut dikuasai secara adat, maka beberapa petuah adat yang masih hidup, di antaranya:

- a. *Ellako tabbangi'l kaju sibilangan metere battu ri kaloro ia* (pohon di bantaran sungai tidak boleh ditebang);
- b. *Ellako tabbang kaju punna caddi* (pohon yang siap diproduksi harus berdiameter kurang lebih 100 cm ke atas);
- c. *Ellako kokoi ri roman karama ia* (hutan yang dianggap lindung tidak boleh dikelola menjadi kebun); dan
- d. *Tabbang ko serre, attana ko sampulo* (jika ada penebangan pohon, maka seharusnya diadakan reboisasi di sekitar wilayah penebangan dengan menanam 10 pohon sebagai pengganti akan tetapi tidak dijadikan milik pribadi).

Dengan adanya petuah adat tersebut, Masyarakat Adat Barambang Katute tetap menjaga kelestarian hutan adat, kesakralan hutan larangan, dan situs peninggalan leluhur. Sebagai contoh, yaitu Buhung Pitu'e yang merupakan tujuh sumur di Kampung Batu Massompo. Sumur itu hanya didatangi pada pasca-panen padi atau jagung. Situs lainnya adalah Batu Oleng'e adalah batu besar yang berada di Kampung Batu Massompo. Dahulu, tempat itu digunakan untuk bertapa oleh Masyarakat Adat. Situs Batu Teddung'e adalah batu yang berbentuk payung yang ada di Kampung Batu Massompo. Situs itu tempat dilakukan ritual adat setelah panen dengan menyiapkan sesajen berupa makanan, seperti ayam dan *songkolo* (nasi ketan) atau *utti lampe* (pisang raja).

Liang Timburing'ia adalah situs yang hanya didatangi saat ada masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan. Sesajian yang dibutuhkan, yaitu daun sirih, kapur, dan pinang. Situs Batu Mico berupa batu besar yang berada sebuah tempat bernama Balang Toa di wilayah Kampung Batu Massompo serta situs Batu Massompo adalah batu berbentuk seseorang yang memikul beban yang berat.



Menantikan Pengakuan Pemerintah

Masyarakat Adat Barambang Katute belum memperoleh pengakuan dari pemerintah. Surat permohonan telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai pada 2019.

"Katanya, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah merespon surat permohonan kami dengan membentuk panitia verifikasi. Namun, karena pandemi Covid-19, panitia belum bisa turun," kata Ismail.

Masyarakat Adat Barambang Katute membutuhkan pengakuan dari pemerintah agar hak-hak kami, terutama atas hutan adat dan hutan larangan, bisa kembali dalam pengelolaan kelembagaan adat kami.

Di wilayah adat kami, terdapat tiga hutan adat dan dua hutan larangan. Ketiganya adalah Hutan Lembangia, Barannai, dan Bakubodoa. Sedangkan hutan larangan, yakni Hutan Lenpangan dan Ale Katute. Tetapi, saat ini semua hutan berstatus kawasan hutan masih berada di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan.

Walaupun belum memperoleh pengakuan dari pemerintah, Masyarakat Adat Barambang Katute terus menjaga wilayah adat, terutama hutan adat dan hutan larangan. Kami tidak mengizinkan orang luar masuk ke wilayah itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Seperti yang terjadi pada 2012-2013 ketika ada perusahaan pertambangan yang akan melakukan eksplorasi. Perusahaan tersebut mengaku telah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan penambangan timah hitam. Namun, setelah melalui perjuangan panjang, - dengan melakukan unjuk rasa berulang kali di Kantor Bupati dan DPRD Sinjai - rencana penambangan tersebut berhasil digagalkan.

"Katanya, ada beberapa perusahaan pertambangan mau masuk. Ini yang kami mau cegah, makanya kami berharap surat keputusan pengakuan pemerintah terhadap kami, Masyarakat Adat Barambang Katute, segera terbit," tandas Ismail.

Kami tetap menaruh asa besar terhadap pemerintah. Suatu hari nanti, kami pasti bisa mendapatkan hak kami sebagai Masyarakat Adat dan wilayah adat kami, termasuk hutan adat warisan nenek moyang kami.



07

Kisah dari Suku Sakai Batin Beringin: Perjuangan Berladang di Masa pandemi

Oleh Fitriyani bersama Bambang Muryanto

Pagi itu, sinar matahari yang hangat menemani Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin yang akan menanam ubi *mangalo* (sejenis ubi kayu) di ladang mereka di Dusun Suluk Bongkol, Desa Koto Pait, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Selasa (27/4/2021). Sekitar 20 orang, mayoritas perempuan adat, sudah berkumpul di tengah-tengah satu ruas jalan. Mereka menantikan teman-teman lain yang membawa batang ubi *mangalo* untuk ditanam.

Ubi *mangalo* adalah salah satu jenis ubi yang menjadi bahan makanan pokok Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin. Cara menyajikannya, ubi itu diparut, dihilangkan airnya, didiamkan beberapa hari, dan kemudian digoreng tanpa minyak. Parutan ubi *mangalo* yang seperti butiran pasir itu dimakan bersama dengan sayur dan lauk-pauk.

Pada masa pandemi yang telah berlangsung sekitar dua tahun, Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin bertekad membuat program untuk membangun kedaulatan pangan. Caranya adalah dengan menanam tanaman pangan pada lahan seluas 20 hektar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pria dan perempuan secara bersama-sama menanam ubi di ladang.

Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Sakai Batin Beringin Muhammad Wahyu Kurniawan mengatakan, selain menanam ubi, kami juga menanam sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan cabai.

“Agar bisa mencukupi kebutuhan Masyarakat Adat Sakai pada masa pandemi,” ujarnya.

Dalam masa pandemi yang serba sulit, apa yang lebih penting daripada ketersediaan bahan makanan yang cukup?

Ruas jalan tempat para perempuan adat berdiri itu ada di wilayah sengketa antara Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin dan PT Arara Abadi. Perusahaan itu mendapat konsesi dari pemerintah untuk menanam eukaliptus yang merupakan bahan utama kertas.

Mereka masih berdiri menunggu ketika dua orang anggota Satuan Pengaman (Satpam) PT Arara Abadi melintas. Sejurus kemudian, datanglah satu rombongan Satpam. Jumlahnya sekitar 200 orang. Mereka naik dua truk dan satu mobil *double cabin*.

Setelah berhenti, salah satu dari mereka turun dari mobil dan membentak. Ia meminta para perempuan adat menyingkir supaya rombongan Satpam dan para pekerja itu bisa masuk ke lokasi untuk menanam eukaliptus.

"Kami minta masyarakat Sakai jangan mengganggu kegiatan kami menanam eukaliptus di lahan ini!" teriaknya.

Tetapi, para perempuan adat sama sekali tidak gentar dan bergeming dengan hardikan itu.

"Kami tidak akan memberikan tanah ulayat kami lagi untuk kalian tanami kayu. Kalau kalian masih mau menanam kayu, kalian tanamkan saja kami ini!" balas seorang warga Sakai Batin Beringin.

Para perempuan adat itu menghadang ratusan Satpam berseragam biru itu agar tidak bisa meneruskan perjalanannya. Mereka akan ke lokasi penanaman eukaliptus yang secara kultural adalah milik Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin.

Aksi saling dorong terjadi. Para perempuan adat itu berdiri berjajar dan membawa bambu panjang di tengah jalan. Suasana menjadi panas dan riuh karena masing-masing pihak saling berteriak.

Ada yang nekad duduk dan berbaring di depan mobil *double cabin* agar rombongan PT Arara Abadi itu tidak bisa bergerak. Tetapi, anggota Satpam datang dan menyingkirkan mereka dengan paksa.

"Gunakan hati nurani!" teriak saya sebagai seorang warga Sakai Batin Beringin.

Namun, teriakan kami seolah sia-sia. Ibu Putih dan Pak Jumaidil yang berada di di depan mobil *double cabin* itu diseret, sehingga badan mereka terluka karena tubuh mereka menggesek batu-batu yang berserakan di jalan.

Kalah jumlah membuat Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin tidak bisa bertahan lama. Pertahanan kami jebol.

Rombongan Satpam dan pekerja itu meneruskan perjalanan mereka menuju petak tanah untuk menghancurkan tanaman sayur-sayuran yang sudah ditanam Masyarakat Adat sebelumnya. Tanaman sayur mayur itu sudah siap dipanen tidak lama lagi. Tangisan warga pun pecah.

Kami hanya bisa menangis. Semua tanaman hancur dan rata dengan tanah. Panen pada masa pandemi, hilang sudah.

“Tanah itu adalah tanah warisan dari nenek moyang kami,” ujar Wahyu.



Ritual adat sebelum menanam.



Akar Konflik

Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin adalah salah satu Masyarakat Adat yang tinggal di Provinsi Riau. Mereka telah mendiami wilayah itu, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945. Kebudayaan kami berbeda dari Suku Melayu dan hidup kami sangat bergantung kepada hutan.

Bentrokan fisik antara Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin dan PT Arara Abadi sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, Bongku, seorang warga Sakai Batin Beringin bahkan ditangkap dan diajukan ke pengadilan karena menanam sayuran di tanah milik leluhurnya.

“Konflik tanah sudah terjadi sejak zaman penjajahan,” ujar Ridwan, Kepala Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin. Konflik tersebut bahkan telah ditelisik secara mendalam saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan timnya untuk mendalami persoalan konflik di beberapa area di seluruh bumi Nusantara. Ada 11 wilayah adat yang menjadi target pendokumentasian konflik tersebut.

Laporan hasil pendalaman tentang konflik tersebut, telah ditulis dalam buku berjudul *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Buku tersebut terbit tahun 2016 dan mencatat konflik yang terjadi sejak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerapkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870. Aturan hukum itu menggariskan, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta merta menjadi domain negara.

“Sebagian besar Masyarakat Adat saat itu tidak memiliki bukti tertulis atas tanah-tanah mereka, sehingga sebagian besar tanah mereka beralih kepemilikannya.”

Situasi tersebut terus berlangsung hingga masa kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan unit-unit pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung. Ratusan izin pengusahaan hutan maupun izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, diterbitkan. Pemerintah memberikan hak penguasaan kawasan hutan kepada perkebunan dan peruntukan lainnya.

Melalui proses itu, perusahaan-perusahaan besar tersebut mengambil alih secara sepihak hampir seluruh wilayah adat menjadi tanah yang dikuasai negara. Penetapan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hutan adalah bagian dari lahirnya paket kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, yakni UU yang mengatur tentang kehutanan, pertambangan, dan penanaman modal.

Buku Inkuiri Komnas HAM tersebut menegaskan, paket UU itu mendorong konsentrasi kepemilikan lahan kepada sekelompok orang. Dalam masa itu, lembaga keuangan internasional dan sektor swasta yang ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia, terus mendorong liberalisasi atas sumber daya alam.

Salah satu perusahaan yang mendapat berkah dari obral izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, adalah PT Indah Kiat. Perusahaan itu mendapat konsesi mengelola wilayah hutan di Provinsi Riau yang sebenarnya milik Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin.

“Sekarang PT Indah Kiat sudah berubah menjadi PT Arara Abadi,” kata Ridwan.



Pembersihan bibit semangka dari gulma.



Tanpa Pemberitahuan Awal kepada Rakyat

Seperti dikutip dari situs *araraforestry.com*, PT Arara Abadi memperoleh izin pembangunan hutan pertama kali tahun 1979 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 359/Kpts/Um/6/1979 seluas 65.000 ha dengan jenis usaha Hak Pengusahaan Hutan-Hutan Alam (HPH-HA). Setelah berubah menjadi HPH-Tanaman Industri (HPH-HTI), luas konsesi PT Arara Abadi terus bertambah hingga mencapai 296.292 ha tahun 2013.

“Pemerintah memberikan tanah kepada perusahaan tanpa memberi tahu kepada masyarakat yang tinggal di wilayah itu,” tandas Ridwan.

Pada masa reformasi (1998), ada banyak perubahan peraturan hukum. Namun, semua itu tidak mampu memperbaiki konflik agraria yang dihadapi Masyarakat Adat. Kelahiran UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan desentralisasi di tingkat kabupaten, justru menjadi bentuk baru perampasan tanah milik Masyarakat Adat. Dengan beralaskan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang mengobrol izin konsesi untuk pertambangan dan eksploitasi hutan.

Pemerintah juga menetapkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak mengakui hutan adat milik Masyarakat Adat. Pasal 1 poin (f) pada undang-undang tersebut menyatakan, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.”

Akan tetapi, status tersebut kemudian berubah dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013. Keputusan tersebut menyatakan, hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, tetapi hutan hak.

Sayangnya, keputusan itu hanya bagus di atas kertas. Penerapan di lapangan masih demikian sedikit. Bisa dikatakan peraturan tersebut masih belum diterapkan di lapangan.

Pengalaman Bongku, warga Dusun Suluk Bongkol yang berusia 59 tahun, menjadi bukti Putusan MK di atas belum berlaku. Pria Sakai Batin Beringin itu membuka lahan seluas setengah hektar. Ia tidak tahu harus ke mana lagi untuk menanam setelah semua lahan milik leluhurnya menjadi konsesi PT Arara Abadi.

“Saya menebang pohon-pohon eukaliptus milik PT Arara Abadi karena saya ingin menanam ubi kayu (*mangalo*) untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari,” ujarnya. Pada 3 November 2019, Bongku ditangkap Satpam PT Arara Abadi dan ditahan di Polsek Pinggir, Bengkalis.

Di Pengadilan Negeri Bengkalis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Bongku melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Bunyinya, “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.”

Ajaib, Majelis Hakim memutuskan Bongku terbukti bersalah. Ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp200 juta pada 24 Februari 2020. Fakta bahwa Bongku hanya membutuhkan tanah untuk menyambung kehidupannya, tidak menjadi faktor pertimbangan yang meringankan. Bongku adalah potret Masyarakat Adat yang hidupnya marjinal.

Pada masa Reformasi, negara semakin murah hati memberikan keistimewaan kepada pemodal untuk memperoleh manfaat dari bumi Indonesia. Muncul UU sektoral, seperti UU Minyak dan Gas, Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 1 Tahun 2004 yang berubah jadi UU No. 19 Tahun 2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



Dampak terhadap Masyarakat Adat

Dahulu, kehidupan Suku Sakai Batin Beringin sejahtera, aman, dan damai. Semua kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari makanan hingga obat-obatan, bisa didapatkan di hutan tropis Sumatera itu.

“Kalau kami mau makan ikan, tinggal pergi ke sungai. Ingin makan daging, kami berburu ke hutan. Kalau mau makan buah-buahan, tinggal ambil di hutan,” ujar Ridwan.

Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin juga tidak mengenal bidan atau dokter. Jika sakit, obatnya sudah tersedia di hutan, tumbuh-tumbuhan yang bisa diramu jadi obat.

Bila ingin bercocok tanam, kami tinggal membuka sedikit hutan untuk ditanami aneka tanaman, seperti sayuran dan ubi. Kami menerapkan cara ladang berpindah gulir balik. Setelah beberapa waktu, kami pindah mencari lahan baru, dan meninggalkan yang lama agar menjadi hutan dan subur kembali. Kelak, kami akan melakukan rotasi untuk kembali ke tempat yang sama.

“Kami selalu berpindah agar mendapatkan tanah yang subur,” tambahnya.

Kini, setelah hutan dikuasai negara dan korporasi, kehidupan yang indah itu tinggal kenangan. Masyarakat Adat jatuh dalam kemiskinan.

Kepala RT Suluk Bongkal, Jumadel mengatakan, kehidupan warga Sakai Batin Beringin sangat memprihatinkan. Masyarakat Adat tidak bisa lagi mencari ikan, berburu binatang di hutan, serta menanam ubi *mangalo*, padi, dan sayuran lagi.

“Padahal, dengan cara itulah kami memenuhi kehidupan kami dan membiayai sekolah anak-anak kami,” ujarnya.

Kehidupan yang semakin payah juga dirasakan para perempuan adat. Hilangnya hutan membuat pendapatan para suami menurun drastis, sehingga berdampak pada pemenuhan kehidupan keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak.

“Kami terancam punah,” ujar Nurlela, seorang perempuan adat.



Penyemprotan kebun semangka yang dikelola oleh para pemuda adat.

Dalam buku berjudul *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan* - laporan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait Inkuiri Nasional Komnas HAM - menegaskan, hutan bagi Masyarakat Adat bukan hanya tumbuhnya aneka ragam hayati. Hutan adalah sumber dan tempat menggantungkan hidup, ranah spiritualitas, juga sebagai penyimbang makro dan mikro kosmik.

Nurlela mengatakan, lenyapnya hutan telah menghilangkan aneka tumbuhan obat. Para perempuan adat tak bisa mendapatkan obat gratis lagi dari alam untuk mengobati anak-anak mereka yang sakit.

Saya mengetahui beberapa tanaman obat itu, yakni daun *gedobuk*, *antoi*, lawang, *pepaga*, *beibu*, *tetujuh*, dan *banik*. Paket komplit itu bisa untuk menyembuhkan demam, sakit perut, batuk, dan pilek.

Menurut saya, ketika tanaman obat sudah sulit ditemukan, ya, kami jadi beli obat di warung.

Mengambil tanaman obat adalah bagian dari tradisi memungut yang biasa dilakukan perempuan adat di hutan. Kami mengambil apa saja hasil hutan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Laporan Komnas Perempuan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM menyatakan, tradisi ini mudah dilupakan karena belum dianggap sebagai suatu hak.

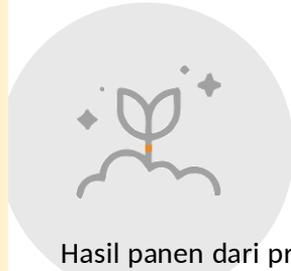
Ketika hutan mulai hilang, mereka semakin susah mendapatkan bahan makanan. Perempuan adat terpaksa menempuh waktu lebih lama untuk mencari makanan dan harus membeli bahan makanan itu.

Kami juga harus membayar biaya perjalanan untuk membeli makanan. Kondisi itu menambah beban fisik dan beban ekonomi bagi para perempuan adat yang kini harus berusaha untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makanan.

Jejak sejarah dan kebudayaan Masyarakat Adat juga hilang seturut dengan hilangnya hutan. Suku Sakai Batin Beringin tidak memiliki pemakaman umum. Jika ada anggota keluarga meninggal, kami memakamkan di belakang atau di depan rumah tinggal di hutan. Tempat tinggal berada di ladang yang dibuka di hutan.

Itulah sebabnya di hutan adat milik Suku Sakai Batin Beringin, terdapat banyak kuburan. Ketika hutan adat dikuasai korporasi, makam leluhur pun dihancurkan.

“Makam leluhur kami pun tak pernah dipedulikan oleh PT Arara Abadi,” kata Nurlela.



Menanam di Masa Pandemi

Hasil panen dari program menanam padi, sayuran, dan buah pada masa pandemi sebenarnya cukup menjanjikan. Dikutip dari berita berjudul “Panen *buung* (padi) di Batin Beringin Sakai,” lahan seluas 10 hektar bisa menghasilkan *buung* sebanyak 1.000 kaleng.

Hasil panen pada awal Februari 2021 itu, sebagian dibagikan kepada anggota Masyarakat Adat dan sisanya dijual untuk modal menanam pada musim selanjutnya. Sebelumnya, kami juga sempat memanen semangka.

Ismail Dolek, Ketua Program Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin menuturkan, program itu dijalankan untuk meningkatkan perekonomian dan sumber makanan serta vitamin Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin pada masa pandemi.

“Kami mengerjakannya dengan gotong-royong atau *besolak*,” ujarnya.

Menurut saya, hasil panen itu bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat Adat Batin Beringin. Tetapi sayang, sejak bentrok pada 27 April 2021, kami tidak bisa lagi melanjutkan program kedaulatan pangan.



Panen semangka.

Tanaman yang sudah tumbuh sudah dihancurkan. Tanah leluhur yang diklaim PT Arara Abadi selalu dijaga para petugas keamanan dari perusahaan pembuat *pulp* (bubur kertas) itu.

Harapan Masyarakat Adat untuk bisa berdaulat pangan dalam masa pandemi, pupus. Untuk melanjutkan hidup, kami menanam ubi, sayuran, dan lainnya di lahan milik orang. Sepertiga hasil panen untuk pemilik lahan dan sisanya untuk penggarap lahan.

Menurut saya, hasilnya itu sebenarnya, ya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi ya bagaimana lagi.

Untuk menambah penghasilan, Masyarakat Adat bekerja serabutan. Misalnya, menjadi buruh untuk memanen sawit di perkebunan yang ada di sekitar.

Menurut Catatan Akhir Tahun AMAN pada 2020 yang berjudul “Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)” mencatat bahwa Masyarakat Adat yang tanahnya sudah dirampas perusahaan dan pemerintah, - juga yang menjadi buruh atau dipaksa jadi petani sawit - tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan.

Masyarakat Adat yang sudah tidak berdaulat atas wilayah adatnya, bernasib sama dengan orang-orang yang hidup di perkotaan. Perkotaan di masa pandemi menjadi tempat paling tidak aman di dunia saat ini.

Sebagai Kepala Masyarakat Adat Sakai Batin Beringin, Ridwan masih menyimpan harapan, suatu ketika nanti kehidupan bisa lebih baik dari sekarang. Masyarakat Adat masih menunggu negara menunjukkan keberpihakannya yang nyata.

“Kami hanya menginginkan tanah ulayat (wilayah adat) kami kembali dan kami ingin hidup seperti dahulu lagi,” ujarnya.

* * *



08

Kisah dari Deri Kambajawa: Hutan adalah Ibu bagi Kami

Oleh Debora Rambu Kasuatu bersama Andi Hajramurni

Bagi Komunitas Masyarakat Adat Umbu Pabal, hutan ibarat seorang mama atau ibu karena hutan yang menyediakan semua kebutuhan hidup. Hutan adalah sumber kehidupan kami. Dari hutan pula, kami bisa menyekolahkan anak-anak kami.

Berdasar keyakinan tersebut, kami pun menjaga kelestarian hutan dan tidak akan pernah merusaknya. Kami tahu, jika hutan rusak, maka kami tidak bisa hidup layak, kami akan kelaparan, dan anak-anak kami tidak bisa sekolah.

Sejak dulu, secara turun-temurun, Masyarakat Adat Umbu Pabal menyandarkan hidup di hutan yang mengelilingi tempat kami bermukim. Kami tinggal di Kampung Deri Kambajawa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Namun, sejak hutan Manupeu Tanadaru ditetapkan pemerintah sebagai taman nasional pada 1998, Masyarakat Adat Umbu Pabal pun kehilangan hak-haknya terhadap hutan tersebut. Bahkan, hutan adat dimasukkan ke dalam wilayah taman nasional.

Masyarakat Adat Umbu Pabal memiliki empat hutan adat yang selalu kami jaga karena merupakan sumber kehidupan. Keempat hutan adat itu adalah Hutan Adat Takorak, Hutan Adat Lolu Ahar, Hutan Adat Ngadu Jongu, dan Hutan Adat Liangu Marapu. Dari keempat hutan adat, hanya Liangu Marapu yang tidak menjadi bagian dari kawasan taman nasional tersebut.

Selain ketiga hutan adat itu, terdapat lahan seluas sekitar 20 hektar milik warga yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru. Sebagian dari lahan itu berupa sawah dan kebun.

Saya Debora Bambu Kasuatu. Saya akan berkisah tentang perjuangan Masyarakat Adat. Sepenggal cerita di atas adalah sepenggal pengenalan awal dari kami.

Saya lantas berupaya menemui beberapa tokoh adat dan warga Masyarakat Adat Umbu Pabal. Saya bertemu dengan Baikuy Kayu yang berusia 60 tahun.

"Peraturan taman nasional tidak adil bagi kami. Kamilah yang menjaga hutan, sehingga tidak ada yang merusaknya, tetapi hak kami dibatasi dengan peraturan yang menyulitkan," ungkap Baikuy Kayu, salah seorang warga yang berusia 60 tahun.

Menurut Baikuy, pemerintah juga tidak memberikan kejelasan batasan-batasan: wilayah mana yang diizinkan diakses Masyarakat Adat untuk mengambil kebutuhan di taman nasional itu, seperti kayu, rotan, *tamiang*, dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat Adat Umbu Pabal sampai sekarang memang masih menggarap lahan persawahan yang masuk di kawasan taman nasional. Namun, kami selalu dibayangi kegelisahan dan ketakutan karena tidak ada kejelasan tentang hak-hak kami terhadap lahan itu.

"Apakah sepanjang hidup kami, kami akan menjadi masyarakat yang melanggar aturan? Kami yang menjaga hutan, tapi tidak mendapatkan apa-apa," kata Baikuy yang sejak 2013 ditunjuk sebagai Seksi Keamanan Taman Nasional Manupeu Tanadaru.

Masyarakat Adat Umbu Pabal telah berada di kawasan itu jauh sebelum kawasan hutan itu ditetapkan sebagai taman nasional. Bagi kami, lahan dan keempat kawasan hutan adat itu adalah wilayah adat kami. Kami telah bermukim di kampung itu sebelum orang-orang Belanda masuk.

Karena itulah, Masyarakat Adat Umbu Pabal mengharapkan kebijakan pemerintah agar tiga hutan adat kami, yakni Hutan Adat Takorak, Lolu Ahar, dan Ngadu Jongu, serta lahan sekitar 20 hektar, dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru. Harapan kami, hak atas semua hutan itu dikembalikan kepada kami agar kami menjaga dan mengelolanya.



Hutan Sumber Penghidupan

Kami memiliki hubungan erat dengan hutan karena hutan adalah sumber penghidupan kami. Hutan juga menjadi tempat pelaksanaan ritual adat tahunan yang selalu kami adakan, yakni *Purung Ta Kadonga Ratu*. Ritual itu digelar di Hutan Adat Liang Marapu. Ritual tersebut merupakan rangkaian ritual Kampung Deri Kabajawa.

"Kami memiliki hubungan erat dengan hutan karena hutan adalah sumber penghidupan kami dan tempat melaksanakan ritual adat setiap tahun," jelas Maramba Weki. Dia adalah salah seorang Ratu Adat atau Tetua Adat Umbu Pabal.

Dari hutan pula kami memperoleh bahan pangan untuk dikonsumsi atau diolah menjadi produk komersial yang hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan menyekolahkan anak-anak kami.

Tanaman hutan yang dimanfaatkan, antara lain rotan, *tamiang* (buluh), *wakuhu* (sejenis pandan hutan), serta beragam rempah untuk dikonsumsi dan dijual.

Rotan dan *tamiang* kami gunakan untuk membuat *nyiru* dan tali rotan yang dijadikan ikat pinggang, kendali kuda, dan ikat sendok.

Baiku Kayu bersama istri dan 24 keluarga lainnya di kampung Padangi, setiap hari menganyam *nyiru* yang terbuat dari rotan dan *tamiang* yang diambil dari kawasan hutan Manupeu Tanadaru yang kini telah jadi taman nasional.

"Kami menjual *nyiru* di empat kabupaten di Pulau Sumba. *Nyiru* sudah merupakan mata pencaharian utama kami. Dari hasil penjualan *nyiru*, saya dapat menyekolahkan kedua anak saya hingga perguruan tinggi," tutur Baiku.

Kampung Padangi berada jauh dari akses jalan umum, sekitar delapan kilometer jaraknya. Akses menuju kampung itu sangat terbatas karena infrastruktur yang tidak memadai.

"Buatan saya itu, ada yang saya pakai sendiri ada, ada yang saya kasih orang, ada juga yang saya jual," kata Rambu Dehi Boru atau yang akrab dipanggil Mama Ina.

Di hutan itu, juga tumbuh bahan-bahan rempah yang langsung kami konsumsi sendiri atau kami jual, misalnya jahe, kencur, lengkuas, kunyit, jahe merah, *huama*, kemangi hutan, *labung* atau salam, dan lainnya. *Waku* adalah sejenis pandan hutan yang tumbuh di sekitar kali dan mata air. *Waku* dibuat bola (bakul nasi), *tanga hobu* (bakul nasi kecil atau biasa juga digunakan menakar beras), dan juga dijadikan topi (*caping*) yang digunakan petani.

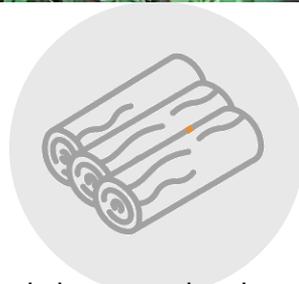
Tanaman aneka rempah yang cukup banyak itu, menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga. Seperti yang dilakukan keluarga Yulius U. Djawut Kaputung. Kunyit yang diambil dari kawasan hutan Manupeu Tanadaru, dijual dalam keadaan basah dan kering. Kunyit basah dijual Rp2.000 per kilogram, sedang kering Rp5.000 per kilogram. "Kunyit saya ambil di hutan. Saya jual setelah cukup satu karung atau sekitar 50 kilogram," ujarnya.

Selain kunyit, Yulius bersama keluarganya juga mencari *kalaira* atau porang di hutan untuk dijual. Porang itu dipilah jadi tiga bagian, yakni buah, umbi, dan bunga. Umbi porang laku Rp50.000 per kilogram, sementara bunganya mencapai Rp150.000 per kilogram. Mereka pun sedang membudidayakan bunganya untuk dijual. Tetapi, sejak dijadikan taman nasional, Masyarakat Adat terpaksa mengambil hasil hutan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Semua itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup.



Kegiatan Masyarakat Adat di hutan adat.

Kayu untuk Membangun Rumah



Selain mengambil rotan, *tamiang*, *wakuhu*, dan bahan rempah, selama ini Masyarakat Adat Umbu Pabal juga mengambil kayu hutan untuk bangun rumah, terutama rumah adat.

Namun, sejak Manupeu Tanadaru dijadikan taman nasional, otomatis akses kami untuk mengambil kayu bangunan dan hasil hutan, dibatasi. Kondisi itu mempersulit kami membangun rumah.

Saat ini, di Kampung Pandangi, ada unit rumah yang kondisinya buruk dan tidak layak huni lagi. Namun, kami belum bisa memperbaikinya karena kesulitan mendapat kayu bangunan.

"Kalau kami ambil kayu di dalam kawasan taman nasional, maka kami akan diproses hukum. Kami tanam kayu di kebun dan itu memang digunakan untuk membangun rumah. Tapi, itu tidak cukup," kata Baikun.

Untuk pembuatan rumah adat, warga Komunitas Masyarakat Adat Umbu Pabal akan mencari kayu di Hutan Manupeu Tanadaru, Hutan Adat Liang Marapu, dan Hutan Kacicu. Membangun rumah adat membutuhkan jenis kayu khusus dan masing-masing bagiannya menggunakan kayu yang berbeda jenis.

Rumah Adat Walu Nogul yang merupakan rumah besar atau rumah utama kami, mencakup 40 tiang yang terdiri dari kayu *walu dapa* (menara), kayu *walu leli* (cincin), dan kayu *walu kabaringu* (tiang utama) yang masing-masing terdiri dari delapan tiang yang dibuat dari kayu *mayela* sebagai tiang utama dan 16 tiang keliling. Sementara rumah utama Kabisu, terdiri atas 36 tiang, yakni empat tiang utama yang menggunakan kayu *mayela*, kayu *manera*, kayu *linnu*, dan kayu *ulukataka* atau kayu *bangu*. Tiang samping dan tiang tengah masing-masing 16 tiang dibuat menggunakan kayu *kiru*, kayu *kadoru*, kayu *lagapa*, *ai kaka*, kayu *tara manu*, dan kayu *ninunda kayu marra*.



Pohon besar yang kami rawat dan jaga di hutan adat.



Tradisi dan Adat Istiadat

Selain menjaga kelestarian hutan, terutama hutan adat, Masyarakat Adat Umbu Pabal juga berupaya menjaga kelestarian pangan lokal dengan menerapkan kearifan lokal.

Hingga saat ini, kami telah membudidayakan berbagai makanan pokok, seperti jagung, *pari dulla* atau padi, *jelai* (*kamaguh*), *watar* (daunnya seperti daun tebu dan bijinya berbentuk bulat), dan *kanu* (seperti tanaman ekor kucing yang memiliki banyak biji kecil dan keras). Berbagai jenis tanaman itu, tumbuh dan tersedia sepanjang tahun di berbagai kondisi lahan dan musim.

Sejak dulu, secara turun-temurun kami terbiasa memanfaatkan sumber-sumber pangan yang beragam itu sebagai basis pemenuhan kebutuhan pangan pokok sehari-hari maupun sebagai camilan. Keragaman pangan juga mengandung keragaman nutrisi, bahkan di antara tanaman pangan itu, ada juga obat yang berkhasiat.

Pangan lokal itulah yang menjadi andalan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan mengatasi ancaman bahaya kelaparan atau krisis pangan.

Secara tradisi, kami membudidayakan padi berdasarkan pengetahuan ekologi lokal yang lekat habitat dan lekat budaya. Menurut tradisi Umbu Pabal, padi (*pari*) dapat diperdagangkan. Padi biasa disimpan di lumbung-lumbung padi.

Kami juga mulai membudidayakan palawija, sayur-sayuran, dan memelihara beberapa hewan ternak. Tapi, hutan tetap menjadi sumber penghidupan kami.

Untuk budi daya padi dan tanaman lokal lainnya, kami memiliki tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Sesuai dengan tradisi kami, ada upacara adat atau ritual tertentu untuk setiap aktivitas yang penting bagi kehidupan, termasuk dalam bercocok tanam.

Ritual dilaksanakan mulai dari penggarapan lahan pertanian dan perkebunan, pembibitan, menanam, panen, hingga pasca-panen. Ritual yang dipimpin seorang kepala adat, merupakan bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur.

Ritual pertama digelar saat dimulainya proses penggarapan lahan sawah dan kebun. Ritual itu sebagai bentuk permintaan izin kepada alam dan juga leluhur agar upaya kami diberkati dan berhasil. Ritual tersebut terbagi ke dalam beberapa tahapan.

Ritual dimulai saat pengolahan sawah atau kebun dengan melakukan *Toni Paraingu* atau tutup kampung. *Toni Paraingu* digelar dengan memasang tanda larangan yang disebut *wairi waikokur*.

Setelah proses pengolahan lahan selesai dan benih siap disebar, Masyarakat Adat akan melakukan ritual *Pawadung*, yaitu memberi sesajen kepada leluhur berupa ayam atau babi dengan harapan benih yang akan disebar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ritual selanjutnya adalah *Bakale Kudu* yang digelar semalam sebelum bibit ditanam. Setelah ditanam, dilaksanakan lagi ritual *Padeta Ta'da Winu - Hamayang Ta Katiku Tana - Ta Katiku Mata Wai*, yaitu ritual pemberian makanan dan minum kepada dewa pemilik tanah. Dalam bahasa lokal dikenal dengan *Mangutana* yang bertujuan agar tanaman terhindar dari hama.

Pada saat padi atau tanaman sudah berisi, dilakukan lagi ritual *Haburung Ni Nama Walu Ta Eda Ta Dawu Ta Dimu Ta Karaja Ta Hawu Ta Kawawu*, yaitu ritual menjemput rezeki dan memberi makan kepada penjaga sawah. Penjaga sawah itu berwujud patung batu yang dalam bahasa lokal disebut *Katoda Talaka*. Ritual itu dimaksudkan agar tanaman terlindungi dari berbagai macam gangguan, baik penyakit, hama, maupun pencurian.

Saat panen akan dimulai, kami melakukan ritual *Dali Kaci'du*, yaitu ritual mengasah pisau. Kemudian dilanjutkan dengan ritual *Pawadung Kaweda* sebelum padi diinjak (*jili*), yaitu proses memisahkan bulirnya dari batangnya. Setelah bulir-bulir padi atau gabah dikumpulkan, digelar lagi ritual *Kokang* yang berarti membangunkan padi yang sudah dikumpulkan (*na kanguku*).

Ritual juga dilakukan saat gabah dimasukkan ke karung dan dibawa ke kampung, yaitu ritual *Urung Ihi Warung*. Gabah itu kemudian disimpan di *wallu boku* atau lumbung padi. Sedang jagung dan umbi-umbian disimpan di *hedang* atau loteng. Sebelum disimpan, semua telah dikeringkan.

Ritual tidak hanya dilaksanakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, tetapi juga dilakukan saat kami akan membangun rumah, terutama rumah adat, peristiwa perkawinan, dan kematian. Ritual itu telah jadi tradisi, budaya, dan adat istiadat. Ritual itu sekaligus adalah identitas kami sebagai Masyarakat Adat Umbu Pabal.

Dalam kegiatan adat perkawinan dan kematian, kami harus menyiapkan hewan, seperti kuda, kerbau, sapi, babi, dan beberapa hewan kecil lainnya. Hewan-hewan itu dijadikan sumbangan untuk pelaksanaan tradisi atau ritual adat.

Seperti yang dilakukan pasangan suami-istri Kaka Memang dan Riel Humta Tamar di Kampung Leti Alawu, Umbu Pabal. Kaka Memang yang biasa disebut Bapak Marni, setiap tahun menyumbangkan beberapa ekor hewan, baik untuk kegiatan adat perkawinan maupun kematian. Tahun ini misalnya, ia telah menyumbang kerbau, kuda, dan sapi masing-masing satu ekor.

Harga hewan cukup mahal, sehingga tidak semua anggota Komunitas Masyarakat Adat Umbu Pabal sanggup membelinya. Karena itulah, kami membentuk kelompok arisan. Setiap kali ada anggota yang mengadakan upacara tradisional, kami saling membantu. Untuk acara perkawinan, setiap anggota menyumbang Rp500 ribu, sedangkan untuk kematian Rp750 ribu.

Tradisi ritual dan adat istiadat yang telah turun-temurun digelar, telah mengundang perhatian wisatawan, baik lokal maupun internasional. Beberapa ritual atau tradisi memang unik.

Tetapi, sayangnya, akses ke daerah itu masih minim. Infrastruktur jalan masih terbatas, sanitasi lingkungan juga belum memadai. Masih banyak rumah warga yang tidak memenuhi standar kesehatan. Padahal, potensi Desa Umbu sebagai daerah destinasi budaya, cukup besar dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.



Ritual yang kami lakukan di salah satu tempat sakral leluhur.



Perempuan dan Krisis Pangan

Dari diskusi yang diadakan Komunitas Masyarakat Adat Umbu Pabal dengan Pemerintah Desa, diketahui bahwa stok pangan yang tersedia hanya cukup sampai Desember tahun 2021. Pangan yang dimaksud adalah umbi-umbian dan padi.

Sumber pangan berasal dari kebun dan sawah. Namun, hanya sebagian kecil yang menanam padi. Lebih banyak yang menanam umbi-umbian dan sayuran dari hutan. Setiap Juli hingga September, Masyarakat Adat masuk ke hutan untuk mencari pangan. Sumber lainnya adalah hasil *mandara* atau meminta makanan kepada keluarga yang cukup mampu dan membeli di pasar untuk memenuhi kebutuhan beras, gula, garam, ikan, dan minyak goreng.

Namun, sejak pandemi Covid-19 terjadi, mobilitas kami untuk ke pasar, dibatasi. Apalagi, akses ke hutan yang masuk kawasan taman nasional Manupeu Tanadaru. Kami mulai khawatir kalau ketersediaan pangan untuk jangka panjang akan terganggu. Pencurian bahan pangan dan ternak yang meningkat juga menjadi kekhawatiran lainnya.

Daya beli masyarakat juga menurun karena keterbatasan akses pasar, sehingga penjualan produk pertanian dan olahan hasil hutan, kini terhambat. Masyarakat Adat Umbu Pabal sulit memperoleh uang tunai yang dibutuhkan untuk membeli bahan pangan dan kebutuhan lainnya.

"Untungnya, ada beberapa kampung yang memiliki stok pangan cukup, sehingga kampung-kampung yang kehabisan bisa datang ke kampung lain untuk memperoleh bahan pangan," kata Mama Ina.



Membentuk Kelompok Tani

Ancaman krisis pangan tersebut telah menyita perhatian para perempuan adat. Para perempuan adat pun berinisiatif membentuk kelompok tani. Selain untuk memenuhi kebutuhan dapur, juga menyibukkan diri agar tidak jenuh tinggal di rumah.

Kelompok yang diorganisir Rambu Idi itu terbentuk sejak Desember 2020. Kelompok itu secara bersama-sama menanam sayur mayur, seperti cabai, kol, naga oka, kangkung, bayam, dan sawi hijau.

Proses penanaman palawija dilakukan masing-masing kelompok secara gotong-royong, mulai dari pemilihan lokasi atau lahan, bibit, penanaman, hingga pengadaan pupuk. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik buatan sendiri.

Sejak kelompok yang diorganisir Rambu Idi itu terbentuk, AMAN Sumba melakukan pendampingan dan mengadakan pelatihan penanaman dan pembuatan pupuk organik.

Hasil dari itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing anggota serta sebagian dijual, seperti cabai atau lombok. Dari hasil penjualan cabai, kami telah memiliki tabungan sebanyak Rp2.150.000. Tabungan akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan usaha kelompok.

Untuk pengembangan usaha ke depan, kami membutuhkan bantuan fiber untuk penampungan air menuju ke lahan kebun serta selang untuk menyiram tanaman. Kami juga butuh pendampingan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, terutama pembuatan obat-obatan pengendali hama penyakit atau pestisida dari bahan-bahan alami. Kami sudah lama sebelumnya menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia.



Sejarah Masyarakat Adat Umbu Pabal

Leluhur Masyarakat Adat Umbu Pabal, - seperti dikisahkan oleh ratu-ratu adat atau *Ina Ama Lima Kabihu*, yakni Kabihu Awanang, Deri, Kabihu Ranyiaka, Kabihu Tokang, dan Kabihu Lagu - awalnya dikenal sebagai orang sakti atau kebal yang disembah sebagai Marapu. Dalam baitan adatnya, "*Napa da tikung ngara, napa da tikung tamu*" yang artinya namanya tidak boleh disebut sembarangan.

Umbu Pabal adalah putra dari Bapak Negu dan Ibu Roku Hariwat. Ia memiliki beberapa saudara, yakni Umbu Majang, Umbu Gawau, Umbu Magada, Umbu Habuang Pedi, Umbu Reku, Umbu Diada, Umbu Jodu, Umbu Bayu, Umbu Toda, Umbu Langang, Umbu Tamojul, dan Rambu Robu.

Dikisahkan pula asal-usul Umbu Pabal adalah dari Hindia Belakang (India). Mereka masuk dengan menggunakan perahu ke Selat Malaka (baitan adatnya adalah *Malaka tana bara*); kemudian ke Pulau Jawa (*Djawa aga duangu, pudaru madahi*); selanjutnya ke Sulawesi (*Makahar*); Bali (*dua kadipu, kokuru kawawu*); kemudian ke Pulau Lombok (*dima dedi logi, hara kaka jawa*); dilanjutkan ke Flores (*Ende abarayu, nibu hada bolu*); dan berakhir di Tanjung Sasar (*haharu ma lee, kataka ledi watu*) di Pulau Sumba.

Setelah tiba di Tanjung Sasar, leluhur kami menuju ke Modu Bakul Kaboru Walla (sekarang Desa Mondu). Dari Mondu, kemudian ke Paraingu Nappu (*kabata napu deta, kabata napu wawa*) di Paraingu Nappu. Di sanalah mereka membuat kampung dan menetap, tapi hanya sementara. Mereka berpindah lagi ke Paraingu Wunga (*wunga haba jawa, totu tana dai parengu*). Mereka buat kampung dan menetap di sana. *Wunga* artinya yang pertama mendiami tanah atau suatu wilayah. Paraingu berada di atas bukit.

Berpindah-pindah tempat tinggal telah menjadi budaya orang-orang Umu Pabal zaman dulu. Perpindahan itu tergantung pada ketersediaan dan kondisi lahan untuk berkebun dan bersawah. Namun, lokasi perpindahan masih dalam wilayah adat.



Hampir seluruh kegiatan di wilayah adat, kami lakukan secara kolektif dan gotong-royong, termasuk dalam berladang atau berburu.

Kami saat ini berpusat di Kampung Deri Kambajawa yang merupakan hamparan luas di dataran rendah. Sehari-hari kami mengolah sawah dan kebun. Tapi, pada musim lapar atau paceklik, kami mencari uwi dan makanan lainnya di hutan.

Selain makanan, kami juga mencari kayu di hutan untuk membangun rumah. Beberapa hutan yang sejak dahulu menjadi tempat leluhur Masyarakat Adat Umbu Pabal mencari kayu dan makanan, antara lain Hutan Liangu Marapu, Hutan Katarumoru Kahanga Kiku, dan Hutan Tana Daru. Hutan-hutan itu sekarang berada di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru. Sementara lahan kering, digunakan untuk berburu dan melepas ternak yang berada di Galu Deri dan Pandangi.

Hingga saat ini, Masyarakat Adat Umbu Pabal masih bertani, berkebun, dan berternak untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber mata pencaharian.

Untuk komunikasi sehari-hari, kami menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Manggena. Bahasa Manggena merupakan bahasa dengan ciri khusus yang menjadi bahasa bagi yang memiliki perasaan sensitif, halus, serta tidak kasar dalam berbicara dan bertindak.

Mayoritas kami menganut aliran kepercayaan Marapu dan beragama Kristen Protestan. Sejak dulu, leluhur kami sudah mempunyai kepercayaan terhadap yang ilahi yang dikenal dengan Marapu Umbu Pabal. Sebagai bukti, secara rutin kami melakukan ritual adat *Purung Taliangu Marapu* di Hutan Adat Liangu Marapu (Goa Marapu atau Goa Keramat). Mereka melakukan itu setiap September.

Selain ritual adat, hukum adat juga masih dipegang dan diberlakukan, contohnya dalam menghadapi kasus pencurian. Jika ada yang mencuri, maka sumpah adat (*ruatu*) akan diberlakukan. Sumpah adat itu menyatakan bahwa yang mencuri di kawasan Umbu Pabal akan dibunuh oleh orang-orang Umbu Pabal. Dengan *ruatu* tersebut, orang-orang Umbu Pabal akan bersatu padu membunuh pencuri yang melakukan pencurian di wilayah adat.

Hukum adat juga berlaku untuk penyimpangan perkawinan, yakni *longu ihi uma oli na* atau selingkuh. Pelaku dikenakan sanksi minimal satu ekor babi. *Longu yera* atau kawin terbalik atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jika, melanggar, maka pelaku dikenakan sanksi untuk memulihkan dengan menyediakan lima ekor kerbau jantan dan kuda jantan.

Penyimpangan lainnya adalah *tabuhuk mabowa* atau kawin tidak sederajat, yakni apabila laki-laki dari kaum *kabihu* atau merdeka atau hamba menikah dengan perempuan dari kaum *maramba* atau bangsawan. Pernikahan semacam itu dilarang. Namun, apabila wanita bangsawan memaksakan diri untuk menerima laki-laki dari kelas yang lebih rendah, maka laki-laki harus membayar 50 ekor hewan dan hubungan anak perempuan dengan orangtua serta keluarganya dinyatakan putus.

Longu ana wini, *longu ana moni* atau inses juga merupakan penyimpangan perkawinan. Jika terjadi inses, hubungan tersebut harus dihentikan. Untuk memulihkan kembali hubungan mereka sebagai saudara kandung, diperlukan empat ekor babi. Peruntukannya sebagai berikut: satu ekor untuk ditikam sebagai korban (*koja ta talora*), satu ekor untuk mengembalikan hubungan persaudaraan mereka sebagai kakak-adik (*wawi dapa ropu kaba doku laba*), satu ekor sebagai *wala dongu we*, dan satu ekor untuk *wala dongu murah*.

Kami tidak hanya menjaga kelestarian hutan, terutama hutan adat, tapi juga menjaga benda-benda dan tempat ritual peninggalan leluhur atau tempat keramat, di antaranya rumah adat. Beberapa rumah adat yang ditinggalkan para leluhur, dianggap keramat. Ada tiga rumah yang tidak boleh dimasuki kaum perempuan, yakni Rumah Adat Walu Nogu, Uma Awana, dan Tamojul Keja kabihu Tokang.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Masyarakat Adat Umbu Pabal terus berketurunan. Tidak seluruhnya tetap tinggal di Desa Umbu Pabal. Sebagian besar ada yang menetap di beberapa desa tetangga, seperti Desa Umbu Pabal Selatan, Desa Umbu Mamijuk, Umbu Jodu, dan Umbu Langang. Bahkan, ada juga yang bermukim di Sumba dan di luar Sumba untuk sekolah atau bekerja.

Saat ini, sekilas kami dapat hidup secara normal, namun jauh di bawah kesadaran kami, tetap hadir rasa was was dan pertanyaan: akankah wilayah adat kami dikembalikan oleh negara?

* * *



09

Kisah dari Uma Saureinu: Kami Menjaga Bumi Sikerei

Oleh Pliriwisma bersama Dian Putri

Orang dulu kenyang makan sagu dan keladi.

Orang sekarang masih lapar kalau belum makan nasi.

Makanan tak sekadar kudapan penghilang rasa lapar. Di berbagai tradisi, makanan memiliki beragam makna, mulai dari identitas budaya yang luhur hingga penanda sebuah peradaban zaman. Aku, Pliriwisma, warga Masyarakat Adat asal Kampung Uma Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Di awal tulisan, sudah kusebutkan tiga dari beberapa hasil pangan lokal khas kampungku. Ya, sejak dahulu, Mentawai yang terletak di antara 0°55'00 hingga 3°21'00 Lintang Selatan dan 98°35'00 hingga 100°32'00 Bujur Timur, dianugerahi tanah subur dan perilaku Masyarakat Adat yang selaras dengan alam.

Tapi, sebelum lanjut bercerita tentang alam dan pangan, dengan senang hati akan aku jelaskan lokasi kampungku terlebih dahulu agar kamu yang belum pernah ke sini punya sedikit gambaran. Kampung Saureinu adalah salah satu dari wilayah adat dari Masyarakat Adat di Kepulauan Mentawai. Kamu harus menyiapkan waktu dan tenaga yang cukup untuk menyambangi kampungku.

Perjalanan ke kampung kami bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua melalui Jalur Trans Mentawai setelah menempuh perjalanan laut dari Kota Padang. Jika kamu berangkat dengan kendaraan bermotor dari Tuapejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka kamu masih harus tancap gas sekira 37 km lagi. Kamu lebih beruntung jika datang dari Sioban, ibu kota Kecamatan Sipora Selatan, yang jaraknya hanya 10 km menuju kampungku. Oh, ya, meski Mentawai bernaung di bawah Provinsi Sumatera Barat, tapi jangan kira jarak kota Padang ke kampungku dekat. Untuk sampai ke sini, kamu harus tabah menempuh 153 km lewat jalur laut.

Secara historis, sebelum Pemerintah Indonesia resmi dibentuk, kampungku akrab dengan nama Siureiakenen, artinya “orang baru menikah datang memasuki *polak uma* atau wilayah adat” sebelum sekarang dikenal dengan Saureinu. Kini, Saureinu masuk dalam wilayah administratif Sumatera Barat bersama dengan desa-desa lainnya, seperti Desa Goissoinan, Desa Matobe, Desa Tuapejat, Desa Sipora Jaya, dan Desa Bukit Pamewa. Di dalam wilayah adat Saureinu, terdapat tujuh dusun, yakni Dusun Bulsat, Dusun Bailo, Dusun Sawahan, Dusun Kaliou, Dusun Sikirene, Dusun Mangali, dan Dusun Sumber Air. Pada 2018, Desa Saureinu dihuni 398 rumah tangga dengan populasi 1.449 jiwa (731 laki-laki dan 728 perempuan).

Setiba di Desa Saureinu, kamu akan disambut dengan banyak rumah tradisional Masyarakat Adat Mentawai. Bentuknya seperti rumah panggung yang memanjang. Ya, aku pun tinggal di salah satu *uma* di sini. Kamu boleh melipir sejenak untuk melepas lelah akibat perjalanan panjang. Sementara aku ambilkan minum, kamu bisa menikmati hangatnya lantai kayu dan semilir angin sepoi-sepoi dari beranda *uma*.

Suhu di Mentawai yang hampir selalu di angka 27° celsius - 29° celsius makin terasa sejuk dengan piranti rumahku yang terbuat dari bahan alami. Lantai dan dinding terbuat dari kayu asli, sementara daun sagu yang tersusun rapi telah dijadikan atap yang tahan hujan dan panas. Seperti bentuknya yang memanjang, sejarah *uma* pun tak kalah panjang.

Tradisi mendirikan *uma* sudah dilakoni dua leluhur kami, Pajolaik dan Takket Keliu, sejak ratusan tahun lalu. Mereka berasal dari Siberut, Katengan Oinan atau perkampungan yang terletak di antara *tirik* (hulu) dan *mongan* (muara) dekat aliran Sungai Siberut. Sejak para leluhur kami, Sungai Siberut bukanlah sekadar aliran air, melainkan sumber alam yang menopang tumbuh suburnya beragam bahan pangan di dalam hutan untuk penghidupan.

Selain sebagai sumber penghidupan bagi manusia, Sungai Siberut sejak dahulu juga menjadi rumah bagi keragaman hayati flora dan fauna, seperti *bokkoi* (*Macaca pegensis*), *joja* atau lutung endemik di Kepulauan Mentawai (*Presbytis potenziani siberu*), *bilou* (*Hylobates klosii*), dan *simakobu* (*Nasalis concolor siberu*). Jadi, manusia, flora, serta fauna berbagi ruang dan hidup harmoni di sepanjang aliran Sungai Siberut.

Potensi alam yang berlimpah membuat leluhur kami terus mengeksplorasi Sungai Siberut. Para leluhur kami dulu mengembara dan singgah di Usut Ngaik atau sekarang dikenal Desa Matobe, persis di sebelah kiri muara sungai. Kala singgah itu, leluhur menanam pohon *sipeu* yang dibawa serta dari Siberut untuk menandai wilayah kepemilikan lahan. Setelahnya, mereka kembali berjalan ke hulu dan mulai membangun pondok di Goibok yang saat ini berada di seberang Sungai Mangili, Dusun Kaliou.



Aktivitas pemetaan wilayah adat.

Sejak itulah, *uma* mulai dikenal. Proses pembuatannya menerapkan sistem gotong-royong. Bermodal kayu asli dan daun sagu segar, *uma* pun berdiri kokoh dan mampu menampung lima hingga sepuluh keluarga. Tanpa paku, semen, dan kawat. Semua bahan diambil secukupnya dari hutan.

Jauh sebelum Negeri Sakura menemukan alat pendeteksi gempa, para leluhur kami telah membuatnya dengan cara sederhana di tiap *uma*. Pasak kayu sengaja dibenamkan ke dalam tanah sedalam dua meter. Ketika gempa datang, maka pasak itu akan bergoyang dan kami yang tinggal di dalam *uma* akan bersiap siaga.

Nah, jika letihmu sudah hilang, aku akan ajak kamu ke hutan. Akan kugenapi janjiku bercerita tentang pangan dan beberapa memori kolektif Masyarakat Adat yang tersimpan di dalamnya.



Daya Lenting Masyarakat Adat

Bagi kami Masyarakat Adat Mentawai, hutan tak hanya penyumbang oksigen melainkan lokapasar yang menyediakan segala kebutuhan pangan. Sebut saja *gobi* (ubi jalar), *palapa* (talas), *sikobou* (keladi merah), dan *jalangjang* (keladi batang besar). Semuanya tumbuh subur di sini. Selain itu, ada jenis keladi lainnya, seperti *laiket*, *diuji* serta banyak varian lainnya yang tak dapat kualih-bahasakan penyebutannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu bertanya apa makanan khas kami, jawabannya berbagai jenis keladi dan sagu. Komoditas yang tak kalah berlimpah lainnya, adalah cengkeh, pisang, kakao, pala, durian, bambu, dan kopra.

Meskipun hasil bumi kami beragam, ada satu jenis tanaman yang mengubah cara makan orang Mentawai: padi. Perubahan itu tentu tidak terjadi secara serta merta. Perubahan terjadi akibat dari program pemerintah yang diterapkan melalui para transmigran yang datang untuk menggarap sawah serta proyek desa. Sejak itu, sagu dan keladi diganti dengan nasi. Lahirlah ujaran: “Orang dulu kenyang makan sagu dan keladi, orang sekarang masih lapar kalau belum makan nasi.”

Tapi, mari kita lupakan sejenak hasrat makan nasi. Jika perutmu mulai lapar dan punya nyali, kamu bisa mencicip *toek* atau *cacing muara* yang hidup di sela-sela batang pohon tumbang. Rasanya gurih dan lembut. Kalau kamu rasa itu terlalu ekstrem, maka pilihan lainnya adalah ulat sagu yang sarat gizi. Teksturnya lembut dan kenyal. Ikan rawa gambut juga tak kalah menggoda untuk dijadikan santapan makan siang. Rasanya gurih dan segar.



Toek dari Saureinu.

Dari perjalanan menyusuri hutan, kamu bisa merasakan sendiri bagaimana hutan telah menjamin segala yang kami butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Dari rumah, makanan, air, udara bersih, hingga hasil pangan lokal yang menjadi mata pencaharian utama kami. Dari segi profesi, orang-orang di kampungku mayoritas bekerja sebagai nelayan atau petani. Otomatis, perekonomian kami sangat bergantung pada kondisi laut dan hutan. Karena itu, kami sangat menjaga laut dan hutan adat agar tetap lestari.

Dalam pengelolaannya, hutan adat seluas 5.686,86 hektar yang dimiliki 13 suku dan dikelola di bawah Lembaga Adat Desa Saureinu. Akses atau pemakaian dibatasi oleh aturan adat. Keluarga yang tidak memiliki lahan secara langsung menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki suku dan dapat dikatakan bukan (keturunan) orang Mentawai. Namun, keluarga tersebut dapat memperoleh hibah dari suku. Pewarisan dan pengelolaan tanah ditentukan sesuai dengan garis keturunan ayah atau kaum laki-laki (patrilineal), kecuali untuk pengelolaan lahan rawa yang diperuntukkan kaum perempuan, namun sebatas hak pakai. Lahan rawa diolah khusus menjadi ladang keladi.

Mendapatkan hak untuk mengelola hutan adat, bukan hal yang mudah bagi kami. Perlu perjuangan dan bantuan berbagai pihak agar kami sebagai pemilik sah hutan adat tak lagi sekadar memiliki, tetapi juga punya mandat untuk menjaga lingkungan dari tangan-tangan serakah. Kami punya sederet memori kelam tentang hal itu.

Cerita dimulai pada 1792 ketika bangsa Inggris yang dipimpin John Crisp, pegawai EIC (*East India Company*) atau Kongsi Dagang Hindia Timur Britania, dikirim ke Pulau Pagai untuk melihat potensi alam Mentawai. Pada masa itu, Mentawai terkenal akan kayunya, gaharu, rotan, dan rempah-rempah. Sebelum menggenapi niat buruknya mengeksploitasi Mentawai, Inggris yang kala itu telah menyepakati Traktat London harus keluar dari Sumatera. Tak lama kemudian, orang-orang Belanda pun masuk dengan niat yang sama: mengeksploitasi hutan.

Satu sejarah yang tak akan mungkin aku dan Masyarakat Adat Mentawai lupakan, adalah saat Belanda yang dipimpin seorang Letnan Angkatan Laut masuk ke Mentawai. Para leluhur kami sangat marah dan dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil mengusir mereka hingga Sang Letnan tewas. Namun, Belanda yang memiliki sejuta muslihat, kembali datang dengan pasukan ke Sipora lengkap dengan persenjataan. Leluhur kami akhirnya kalah dan diduga banyak darah tertumpah. Pada 1864, Belanda mengklaim kemenangan dengan mendirikan kantor perwakilan di Sipora dan mengangkat seorang letnan asal Melayu untuk memimpin.

Di zaman setelah kemerdekaan Indonesia, kisah itu berulang dengan berganti rupa (pelaku). Pada 1970, Pemerintah Indonesia menerbitkan izin kepada satu perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola hutan adat. Hasilnya bisa ditebak, yaitu kerusakan hutan adat yang berdampak buruk pada lingkungan dan secara sosial merusak karena melahirkan konflik yang memicu perpecahan antarsuku akibat monetisasi hutan adat. Pada masa itu, ritual pun dilarang, bahkan peralatan ritual direnggut paksa. Semua penderitaan itu menjadi lengkap ketika hukum adat warisan leluhur kami secara sistemik dihilangkan.

Beberapa aturan konservasi yang dibuat pemerintah justru menyebabkan kami tidak dapat memasuki hutan adat milik kami sendiri. Semua itu menorehkan luka dan menyebabkan trauma mendalam bagi kami.

Lantas, mengapa hutan adat menjadi incaran?

Mari, kita berhitung! Apabila semua sumber daya alam yang terdiri dari padi sawah, ulat sagu, *teok*, ikan rawa gambut, kopra, bambu, dan lainnya dikonversi dalam rupiah, maka nilainya berkisar Rp33,54 miliar/tahun. Sementara jasa lingkungan, yang meliputi hidrologi hutan, penyimpanan karbon, potensi pariwisata, dan hutan tebangan, ditaksir bernilai Rp840 juta/tahun. Jika dijumlahkan semuanya, maka total hasilnya adalah Rp34,38 miliar/tahun. Angka yang fantastis itu merupakan hasil perhitungan valuasi ekonomi wilayah adat kami. Sangat menggiurkan. Jika jumlah itu dibagi dengan jumlah rumah tangga, maka nilainya bisa mencapai sekitar Rp86.380.000/tahun. Itu adalah nilai yang diprediksi karena kami telah mengelolanya secara lestari. Sungguh kontras jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Mentawai pada 2021 yang berjumlah Rp2.484.041 /bulan atau Rp29.808.492 /tahun. Jika keduanya dibandingkan, maka UMR per tahun sekitar sepertiga dari nilai sumber daya alam yang kami miliki.

Meski kerusakan lingkungan dan sendi-sendi sosial di kampung kami telah dihancurkan, kami tidak tinggal diam. Kami tidak sendiri. Banyak Masyarakat Adat di seluruh Nusantara yang juga mengalami nasib serupa. Kami menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan keadilan. Setelah berjuang beberapa waktu, muncul harapan.

Perjuangan Masyarakat Adat Nusantara bersama AMAN dengan menguji UU Kehutanan terhadap UUD 1945, pada akhirnya menghasilkan beberapa perubahan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian itu, hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Sementara di tingkat lokal, terbentuk Pengurus Daerah AMAN Mentawai yang kemudian berjuang bahu-membahu dengan Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMAPM) yang telah terbentuk lebih dahulu. Melalui perjuangan yang cukup panjang, Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai akhirnya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya Peraturan itu menjadi dasar hukum bagi kami untuk mendorong penetapan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menetapkan Hutan Adat Uma Saureinu kepada Masyarakat Adat Uma Saureinu seluas 5.739 hektar. Hutan adat tersebut meliputi kawasan hutan produksi tetap (HP) yang luasnya 4.648 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.091 hektar di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan.



Menanam makanan pokok keladi.

Kami mensyukuri segala capaian itu, akan tetapi perjuangan kami belum benar-benar berakhir. Sejak UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan UU Cipta Kerja disahkan pada 2020, kami menjadi pihak yang paling rentan. Di mata pemerintah, yang mengukur segalanya dari aspek pembangunan, Masyarakat Adat dianggap tidak punya daya tawar dan sumbangsih ekonomi. Kedua UU tersebut ibarat karpet merah yang mempersilakan pengusaha tambang dan perkebunan sawit masuk ke hutan adat dan mengeruk semua SDA di dalamnya. Kondisi dan situasi itu seakan melanjutkan perbudakan yang dilakukan di zaman kolonialisme Belanda.

Apa yang kami harapkan akan kami peroleh dari pemerintah, kenyataannya justru bertolak belakang. Perusahaan besar yang digadang-gadang menanggung profit, malah hancur lebur akibat pandemi. Betapa banyak karyawan yang di-PHK dan tertular Covid-19, sementara Masyarakat Adat mampu bertahan hidup di masa sulit, bahkan menunjukkan kasus kematian akibat Covid-19 ada dua orang atau 0,1 persen, terendah se-Provinsi Sumatera Barat.



Kontrak Sosial dengan Perangkat Desa

Ratusan tahun hidup kental dengan sistem sosial Masyarakat Adat, membuat kami asing dengan sistem sosial yang umum berlaku di kota, seperti perangkat desa dan kepala desa. Lantas apakah hingga kini Desa Saureinu khususnya dan Mentawai umumnya tetap menggunakan sistem sesuai adat sebagai sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari?

Untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem sosial di Desa Saureinu pada 1990-2000-an, aku berbincang dengan Nathan Siritoitet, tokoh masyarakat sekaligus kepala desa kedua yang pernah menjabat. Dalam penuturannya, Nathan mengaku sempat merasa kesulitan saat pertama kali menjabat sebagai kepala desa, terutama mengenai pembangunan infrastruktur pembangunan dan operasional kantor desa.

“Dananya sangat minim. Di sini kami menggunakan uang sependai-pandainya untuk memenuhi biaya penginapan, transportasi, dan konsumsi dari uang yang diberikan (pemerintah) untuk pembangunan,” ujar Nathan yang diminta menjabat lebih dari dua periode.

Dengan uang operasional yang minim, Nathan juga harus rela menempuh perjalanan pulang pergi dari desanya ke Pariaman untuk mengambil dana desa setiap minggu. Selain masalah pendanaan dan aksesibilitas, Nathan mengaku bebannya sebagai kepala desa kian berat dengan sikap resisten Masyarakat Adat terhadap dirinya sebagai kepala desa.

“Pada saat saya menjabat, sistem sosial masyarakat kurang mendukung dan menganggap apa yang kami lakukan semata untuk mencukupi biaya hidup kami. Padahal, uang yang diberikan (pemerintah) bukan buat saya, tapi untuk memajukan desa,” sambungnya.

Nathan memberi contoh, jika ada pembangunan, ia tak pernah mempekerjakan orang dari luar Desa Saureinu. Dia mempekerjakan warga lokal, sehingga uang mengalir ke warga. Baginya, perangkat desa bukan untuk menjadi pekerja, melainkan mengontrol dan memimpin pembangunan karena dirinya sudah digaji oleh pemerintah. Nathan paham, perlu waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem sosial yang baru seperti perangkat desa. Setelah menjabat beberapa tahun, Nathan mulai merasa masyarakat mulai terbuka dan antusias mengikuti kegiatan gotong-royong desa.

“Masyarakat cukup patuh mengikuti (gotong-royong) yang empat hari dalam dua bulan sekali. Ini bukan semata kesepakatan dari saya (kepala desa), melainkan masyarakat sendiri,” tuturnya.

Sebelum Nathan menjabat, kepala desa pertama masuk dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Pada masa itu (sekitar 1990-an), LMD setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi aspirator masyarakat untuk bertindak sebagai pengambil keputusan. Alurnya seperti ini: rapat LKMD (diwakili ketua atau kepala desa) kemudian diteruskan kepada LMD untuk disepakati bersama, lalu disampaikan kepada kepala desa. Setelahnya, kepala desa menyampaikan hasil musyawarah mufakat ke masing-masing dusun. Hingga kini, kontrak sosial inilah yang digunakan untuk menjembatani komunikasi Masyarakat Adat dan pemerintah.



Antara Tradisi dan “Agama Baru”

Jauh sebelum misionaris Belanda datang ke Mentawai, kami menganut Arat Sabulungan sebagai agama dan jalan hidup. Dengan keyakinan penuh bahwa posisi kami sebagai manusia setara dengan hutan, tumbuhan, dan satwa yang punya roh dan berjiwa. Menyakiti alam sama halnya dengan melukai diri sendiri. Bagi kami, alam adalah tauladan yang mengajarkan segala aspek kehidupan.

Alam pula yang mengajarkan *sikirei* atau tabib lokal hingga dia pandai meracik obat dari tanaman. Jauh sebelum pengobatan medis berkembang, tangan dingin *sikirei* menyembuhkan kami yang sakit. Wajar bahwa bagi kami, *sikirei* adalah orang terpilih, orang berjasa, dan kami hormati. Meski kian terjepit oleh berbagai pengaruh baru, Arat Sabulungan masih hidup. Nathan menuturkan, “Dulu kami meyakini kepercayaan nenek moyang (Arat Sabulungan) dan berobat ke dukun-dukun (*sikirei*) sampai saya berusia tiga tahun.”

Tak hanya melangsungkan ritus, Nathan dan keluarga kala itu juga menaati lelatu Arat Sabulungan, seperti salah satu orang pergi mencari ikan, maka anggota keluarga lainnya harus tetap di rumah agar yang mencari ikan pulang dengan selamat.

Namun, semua itu mulai berubah sejak kedatangan August Lett dan A. Kramer, dua orang yang memulai Zending, sekolah untuk penyiaran agama Kristen Protestan, ke Mentawai pada 1901. Di periode abad “pencerahan” itu, Belanda mulai getol menggenapi misi ketiga dari penjajahan mereka ke Nusantara. Wilayah kami yang belum dimasuki misionaris agama lainnya, menjadi peluang besar untuk membaptis orang sebanyak-banyaknya.

Meski agama mengajarkan kedamaian, namun caranya seringkali penuh keributan. Atas nama kebenaran dalam ajarannya, para misionaris membakar peralatan ritual leluhur kami. Keyakinan kami dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Kami pun dilarang melakukan ritual. *Sikirei* yang dahulu kami hormati, mereka anggap sesat, ditangkap, dipenjara, dan dijadikan budak di perkebunan.



Penggalan sejarah komunitas Masyarakat Adat di Kepulauan Mentawai.

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Kami pun berharap menjadi merdeka. Namun, harapan itu pernah pupus. Kami tak pernah lagi benar-benar merasa merdeka. Kami justru mengalami penjajahan gaya baru yang justru lebih kuat.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap kami kian meruncing setelah Perdana Menteri Ali Sastromidjojo mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 167/PROMOSI/1954 tentang Pembentukan Panitia Interdepartemen. SK itu menjadi legitimasi untuk memaksa kami memilih satu dari lima agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. SK tersebut kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang memasukkan Khonghucu sebagai satu dari enam agama resmi.

Tak cukup memaksa kami pindah agama, tradisi menato tubuh, meruncingkan gigi, dan memanjangkan rambut juga ditertibkan. Ternyata tak hanya persoalan tampilan tubuh dan makanan, sistem sosial dan ekonomi juga dipaksa berganti. Untuk hal yang paling privat bagi seorang manusia, yaitu agama dan ekspresi tubuh, pun kami tak punya otoritas lagi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespon SK itu dengan menggelar Rapat Tiga Agama yang berujung pada penghancuran secara sistemik agama leluhur kami. Maka pada 1954, semua ritual Arat Sabulungan resmi dilarang dan kami dipaksa memilih: Islam atau Kristen. Fakta itu berbeda dengan pernyataan Nathan yang mengatakan, “Di sini, kita Indonesia merdeka, pemerintah kemudian menyarankan kami memiliki agama dan bebas memilih.”

Puluhan tahun setelah peristiwa itu, kini Nathan dan mayoritas Masyarakat Adat Mentawai telah menganut agama resmi, yakni Kristen Protestan (77,59%), Katolik (48,50%), Islam (29,09%), dan lainnya (0,19%). Laku gotong-royong khas Masyarakat Adat Mentawai diakui Nathan masih terjaga hingga kini, hanya beralih dari ritual Arat Sabulungan ke peribadatan di gereja.

“Saat pembangunan gereja semua ikut serta, ada yang memasak dan mengumpulkan makanan,” lanjutnya.

Mungkin sebagian Masyarakat Adat Mentawai telah berdamai dengan kondisi yang ada, mengambil jalan tengah antara iman dan tradisi. Semoga iman kepada Tuhan semakin menguatkan kami untuk menjaga hutan adat aman dari bencana di tengah kondisi semakin sempitnya lahan untuk menanam sagu dan keladi. Itulah kisah kami, Masyarakat Adat di Saureinu. Kami terus bertahan dengan mencoba beradaptasi.

* * *



10

Kisah dari Kampung Ansok: Kemandirian Pangkal Kemerdekaan Kami

Oleh Timotius bersama Marsiela Adi

Semangat membantu dan berjuang bersama merupakan nilai kolektif yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah Masyarakat Adat Dayak Seberuang. Pembangunan dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) serta pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) menjadi bukti.

Seperti pada umumnya Masyarakat Adat, pengetahuan tidak tersimpan pada tulisan hitam atas putih. Pengetahuan kolektif tersimpan di ingatan para tetua kampung. Karena itu, kami tidak menemukan referensi tertulis yang mencatat sejak kapan proses migrasi oleh Masyarakat Adat Seberuang di Kampung Ansok berlangsung. Informasi lisan dari para tetua di kampung jadi pegangan.

Nama “Ansok” diambil dari nama sungai dan merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Tempunak Hulu sekaligus pusat pemerintahan pada zaman dahulu. Penetapan itu berkaitan dengan domisili Temenggung Udap, pemimpin 17 kampung di wilayah Tempunak. Temenggung Udap memilih Kampung Ansok sebagai tempat tinggalnya.

Nenek moyang kami berasal dari Suku Dayak Seberuang yang datang dari daerah Sungai Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dayak Seberuang masuk ke dalam rumpun Dayak Iban (rumpun Ibanik) dari Tampun Juah di hulu Sungai Sekayam, Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia.

Saat bermigrasi, sebagian warga menelusuri Batang Sungai Seberuang di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dari sana terjadi perpindahan ke daerah Sintang, salah satunya ke daerah aliran Sungai Tempunak.

Ada syair dalam sastra lama yang berbunyi, “*Dular Muar Lalau bemuanyik, Dulau Nuba Lubuk Perisik, Dulau Buma Tanah Baik.*” Itu menceritakan Suku Dayak Seberuang yang diperkenankan lebih dulu mengambil kayu bermadu, memilih *nuba lubuk* yang banyak ikannya, dan lebih dulu berladang di tanah yang subur oleh Suku Melayu Jelimpau.

Syair itu tidak lepas dari sejarah kedatangan Suku Dayak Seberuang dari Batang Seberuang Kapuas Hulu ke Tempunak saat terjadi peperangan antara suku asli di Tempunak, yaitu Melayu Jelimpau, dan Suku Silan Muntak, suku di daerah Keberak, Belimbing, Kabupaten Melawi.

Peperangan mengakibatkan jumlah Suku Melayu Jelimpau semakin sedikit. Suku Dayak Seberuang yang baru datang, membantu hingga akhirnya Suku Silan Muntak kalah. Sebagai imbalan, Suku Melayu Jelimpau menyerahkan sumber daya, termasuk tanah, kayu, *tapang tembawang*, dan kekayaan yang ada di daerah Sungai Tempunak kepada Masyarakat Adat Dayak Seberuang.

Sejak itu, Masyarakat Adat Dayak Seberuang mendiami wilayah Tempunak dan terus berkembang hingga saat ini, sementara Suku Melayu Jelimpau mendiami wilayah Desa Kuala Dua, Kecamatan Tempunak.



Kampung Ansok

Secara administratif, Kampung Ansok berada di Dusun Balai Temenggung, Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jaraknya sekitarnya 410 kilometer dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, jarak kampung ke ibu kota kecamatan sekitar 78 kilometer.

Kampung Ansok belum memiliki sarana kesehatan seperti Posyandu. Untuk ke Posyandu, kami harus menempuh jarak sekitar empat kilometer ke Kampung Sungai Kura sebagai pusat desa. Sementara Puskesmas, hanya ada di Desa Kupan Jaya, Kecamatan Tempunak yang jaraknya sekitar 10 kilometer dari Kampung Ansok.

Jalan lintas desa menuju ke Ansok, mayoritas berupa jalan tanah. Kondisinya naik turun karena wilayahnya berbukit-bukit. Saat musim hujan, jalur jalan menjadi genangan lumpur. Perlu kendaraan roda empat dengan gardan ganda untuk menembusnya.

Kondisi serupa berlaku untuk akses komunikasi. Kami harus pergi ke Kampung Mansik yang masuk wilayah Desa Merti Jaya untuk mengakses jaringan internet berbayar. Sinyal untuk telepon seluler hanya ada di beberapa titik. Untuk mendapat koneksi yang bagus, harus naik ke dataran tinggi.

Saat ini, Kampung Ansok menjadi tempat tinggal bagi 309 jiwa atau 105 kepala keluarga dari Masyarakat Adat Dayak Seberuang. Sebanyak 146 jiwa di antaranya adalah perempuan. Kami berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak Seberuang, termasuk saat menjalankan upacara dan ritual adat.

Semua warga adat di Ansok sudah memeluk agama dengan mayoritas Katolik. Namun, ada juga yang beragama Islam. Perkenalan dengan agama Katolik bermula pada 1965 saat Pastor Adrianus van Der Vlueten, SMM asal Belanda menjadi misionaris di wilayah kerja Paroki Sintang. Meski demikian, ritual adat masih kami jalankan, seperti pada perkawinan, pengobatan bagi orang sakit, hingga proses meladang. Namun, Masyarakat Adat Ansok tidak lagi menempati rumah *panjai* (*betang*) sejak 1970-an. Kini, kami menggunakan sistem rumah tunggal berderet mengikuti pola jalan kampung.

Meski hidup terpisah-pisah, pergaulan kami tetap kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan solidaritas. Sistem gotong-royong atau *ruyung* tetap berjalan dalam keseharian, mulai dari aktivitas berladang, mendirikan bangunan rumah pribadi, fasilitas umum, pesta perkawinan, upacara adat, hingga membangun PLTMH.



Suasana di Kampung Ansok.



Membangun Listrik Mikrohidro

Kami terinspirasi saat melihat pembangunan PLTMH di Tenguli, Kampung Tembak, Desa Gunung Mali. PLTMH di Tenguli dibangun pada 2008. Masyarakat menggunakan listrik yang dihasilkan dari PLTMH tersebut. Saat pelaksanaan pembangunannya, masyarakat didampingi warga Bandung, seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Berkaca dari Tenguli, Antonius Antong, seorang Sarjana Ekonomi yang tertarik dengan pengembangan mikrohidro, melakukan sosialisasi kepada semua kepala keluarga di Kampung Ansok. Dari hasil sosialisasi tersebut, hanya 28 kepala keluarga yang tertarik memiliki PLTMH. Tanpa membuang waktu, kami segera menyusun panitia. Yosep Iyus, salah seorang warga, dipilih sebagai ketua panitia pembangunan. Warga lainnya, Undat, ditetapkan sebagai bendaharannya.

Panitia langsung melakukan peninjauan guna menentukan sungai untuk PLTMH. Terpilihlah aliran Sungai Ipoh yang berjarak sekitar 800 meter dari permukiman. Lokasi tersebut dimiliki oleh Lorensius Ridan, salah satu anggota tim pembangunan PLTMH.

Masyarakat yang berminat boleh bergabung sebagai anggota panitia. Kami bersepakat mengumpulkan iuran sebesar Rp10 ribu per bulan. Kami membeli semen seharga Rp75 ribu per sak untuk setiap dua kepala keluarga.

Proses pembangunan dilakukan gotong-royong setiap hari Kamis. Baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, kami melakukan pekerjaan yang mampu dikerjakan. Setiap kali bekerja, kami masing-masing membawa bekal dari rumah. Kadang-kadang untuk lauk di siang hari, kaum perempuan berinisiatif mencari sayur-sayuran di hutan dan memasaknya di lokasi pembangunan.

Setelah anggaran dihitung secara rinci, maka didapat angka Rp110 juta. Sebagai dana awal, kami memutuskan untuk meminjam dari Credit Union Keling Kumang (CUKK).

Untuk melunasi pinjaman itu, setiap anggota atau kepala keluarga wajib menyeter Rp5,5 juta dikali 1,5 persen untuk bunga atau jasa per bulan. Tenggat pelunasan disepakati selama 36 bulan, sehingga masing-masing anggota harus membayar pinjaman dan bunganya sebesar Rp235,277 per bulan. Pinjaman harus lunas tahun 2016.

Sehari-hari, kami mengandalkan pemasukan dari kegiatan penyadapan karet dan berladang (*beuma*). Kegiatan berladang di lahan kering (*uma*) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, seperti beras, umbi-umbian, jagung, dan sayuran. Hasil meladang itu tidak dijual. Rata-rata hasil panennya bisa mencapai 800 sampai seribu ton padi per kepala keluarga per tahun.

Masyarakat Adat Ansok mendapatkan penghasilan dari menyadap karet sebagai sumber utama. Rata-rata kami bisa menyadap antara 12 sampai 20 kilogram per hari per kepala keluarga. Dalam satu bulan, rata-rata petani karet bekerja selama 20 hari.

Kami bergotong-royong membeli pipa paralon ukuran delapan inci sebanyak 33 batang serta kabel dari Kota Sintang yang jaraknya mencapai 67 kilometer. Itu menjadi bagian dari proses penyelesaian PLTMH. Sementara untuk kebutuhan turbin, panel, dan generator senilai Rp50 juta, dipesan dari Bandung, Jawa Barat.

Proses panjang itu membuahkan hasil pada Maret 2016. Bupati Sintang Milton Chrosbi hadir ke lokasi guna meresmikan PLTMH yang mengalirkan tegangan listrik satu ampere dengan daya 250 watt ke masing-masing rumah.

Penyediaan energi listrik secara mandiri di Kampung Ansok itu, membawa perubahan signifikan. Warga di malam hari bisa menonton televisi. Sebelum ada listrik, kami kesulitan mendapatkan informasi dari luar. Anak-anak belajar pun hanya dengan penerangan yang sangat minim karena mengandalkan pelita berbahan bakar minyak tanah.

Selain itu, malam hari kampung menjadi senyap. Sebelumnya, setiap malam ada suara bising yang berasal dari *dompleng*, sebutan untuk mesin diesel. Warga juga harus membeli minyak tanah seharga Rp10 ribu dan solar Rp8 ribu per liter untuk menghidupi pelita dan mesin diesel. Kini, warga dapat menghemat pengeluaran. Untuk penerangan, kami cukup membayar iuran Rp10 ribu per bulan. Dana yang berhasil dikumpulkan, digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan PLTMH.

Perbandingan nominal biaya selama 10 tahun memanfaatkan minyak tanah dan diesel dengan PLTMH, sangat jauh selisihnya. Saat menggunakan minyak tanah dan diesel, 20 kepala keluarga harus merogoh kocek hingga Rp1 miliar. Sementara proyeksi pengeluaran biaya untuk PLTMH, diperkirakan sebesar Rp350 juta dalam 10 tahun.

Agar PLTMH bisa beroperasi secara terus menerus, setiap anggota berkewajiban melakukan pengecekan dan pemeliharaan. Masing-masing dua kepala keluarga atau anggota mendapat giliran bertugas menyalakan pembangkit selama tiga malam.

Saat ini, sudah ada dua unit PLTMH di Kampung Ansok. Masih sekitar 20 rumah belum menikmati manfaat dari kehadiran PLTMH. Tahun 2021 ini, ada penawaran dari PLN untuk mereka yang mau memanfaatkan sambungan listrik dari perusahaan negara tersebut. Nilainya mulai dari Rp4-5 juta per rumah, tergantung dari daya listrik, yaitu antara 450-1.300 kilowatt per jam (KWH). Pembayaran dilakukan dengan membeli kupon atau *voucher*.

Pipanisasi Air



Berbicara mengenai air, Masyarakat Adat Dayak Seberuang di Kampung Ansok juga bergotong-royong melakukan pipanisasi atau penyambungan pipa dari sumber air ke bak penampung hingga ke rumah warga.

Panitia pembangunan awal diurus Darmo sebagai ketua dan Hendrikus sebagai bendahara. Sementara kepengurusan tahun 2019 lalu, di bawah Adun sebagai ketua, Timotius sebagai sekretaris, dan Yohanes sebagai bendahara.

Prosesnya bermula dengan adanya alokasi dana bantuan dari Amerika Serikat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Dana tersebut disalurkan lewat lembaga pendamping Konsorsium Kujau Kalbar senilai Rp497 juta. Pemasangan pipa itu menyambungkan sumber air dari Sungai Badar Raya dalam kawasan hutan adat ke permukiman yang jaraknya sekitar lima kilometer.

Sebelumnya, pada 2012, kami pernah merencanakan kegiatan serupa. Semua warga ikut dalam proses tersebut. Sayangnya, masih terkendala biaya hingga akhirnya batal. Uang yang sudah terkumpul saat itu Rp4 juta. Pada 28 Desember 2017, proses pipanisasi kedua kalinya dimulai. Pemasangannya memakan waktu 18 bulan sejak survei hingga penyelesaian. Agar bisa dialirkan, sungai dibendung lebih dulu.

Kami menggunakan pipa berdiameter dua inci untuk mengalirkan air dari bendungan menuju *reservoir* atau tong induk. Pipa itu juga dipakai untuk menyalurkan air dari tong induk ke tong anak. Diameter pipa ini mengecil jadi tiga perempat inci dari tong anak ke rumah-rumah. Total ada 82 rumah dapat manfaat dari pipanisasi ini.

Tong induk berukuran 4 x 4 x 2 meter itu mampu menampung air hingga 32.000 liter. Dari sana, air mengalir ke tujuh tong anak yang masing-masing berukuran 1.600 liter. Setiap rumah mendapat aliran air dua liter per detik dengan tekanan dua bar. Setiap rumah membayar iuran Rp6 ribu setiap bulannya. Dana tersebut dikelola oleh tujuh kelompok konsumen sebagai penanggung jawab tong anak serta 12 pengurus yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan bendungan.

Sebelum ada pipanisasi, kami berduyun-duyun mandi ke Sungai Tempanak setiap hari dan membawa air untuk dikonsumsi menggunakan ember dan lain-lain. Setelah air sampai ke rumah, kami jadi tidak banyak membuang tenaga dan waktu, jadi tinggal putar keran saja.

Meski sudah ada kemudahan mendapatkan air, penggunaan air di dalam rumah tangga Masyarakat Adat Ansok juga diatur di dalam aturan adat. Ada aturan yang bisa berujung pada teguran dan sanksi lebih berat. Aturan itu, antara lain tidak boleh mengalirkan air ke kolam, tidak memperjualbelikan tanpa izin pengurus, tidak untuk bisnis, dan lainnya. Tiap bulan pun ada kegiatan bakti sosial pipanisasi.



Akses air melalui pipa di kampung.



Merintis BUMMA

Selain bekerja kolektif untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam konteks ekonomi, kami membentuk BUMMA Seberuang Ansok. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi melalui produk-produk lokal.

BUMMA terbentuk pada 17 Agustus 2019 lalu. Setengah dari anggotanya merupakan Masyarakat Adat Kampung Ansok. BUMMA diperkuat oleh lima KUMMA (Kelompok Usaha Milik Masyarakat Adat) sesuai dengan komoditas yang dikelolanya masing-masing, yaitu jahe, kopi, padi, jengkol, dan air.

Pengelolaan komoditas lokal oleh masyarakat masih terbatas pada penyediaan bahan baku. Belum ada pengelolaan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami mulai melirik penghasilan tambahan dari komoditas jengkol (*Archidendron pauciflorum*). Tanaman yang tumbuh liar di wilayah kebun itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Harganya berkisar antara Rp5-20 ribu per kilogram.

Dalam satu musim, kami bisa memanen satu kali. Rata-rata produktivitas jengkol di Kampung Ansok bisa mencapai 500-800 kilogram per kepala keluarga per tahun. Saat ini, jengkol sudah dibudidayakan oleh kami.

Pada 2018, komoditas itu bertambah seiring kehadiran tanaman kopi. Luasan kebun kopi sudah mencapai 12 hektar dengan sebaran 22.040 bibit kopi tertanam. Kegiatan pengembangan komoditas kopi robusta itu hasil swadaya masyarakat.

Saat ini, anggota KUMMA kopi ada 24 orang. Kami sudah menyemai 22 ribu bibit di *polybag* dan menanam sedikitnya tiga ribu bibit. Sementara yang terjual, sudah ada ratusan bibit yang dihargai satunya Rp8 ribu untuk pembelian langsung di lokasi.

KUMMA jahe sudah menanam hingga 569 kilogram yang terdiri dari 320 kilogram jahe padi, 200 kilogram jahe merah, serta 49 kilogram jahe bumbu. Sementara bawang dayak, mencapai 20 kilogram. Sekilas bentuk bawang dayak mirip dengan bawang merah, namun kami menggunakannya untuk pengobatan tradisional.

KUMMA air bersih sudah menyalurkan 100 persen kebutuhan warga dan rencananya bakal dikembangkan untuk menjualnya dalam bentuk galon isi ulang.

Masyarakat Adat Seberuang Ansok mendapatkan modal untuk mengulirkan usahanya lewat penawaran saham. Setiap lembar kupon sahamnya ditawarkan dengan harga Rp10 ribu.

Pendapatan KUMMA itu akan dibagikan dengan persentase paling besar 40 persen untuk saham, diikuti 20 persen untuk BUMMA dan KUMMA, serta 10 persen untuk petani dan AMAN.

Pengurus juga bakal mendapatkan upah dari hasil pembagian BUMMA sebesar 20 persen, ketua sebesar lima persen, sekretaris 10 persen, dan bendahara sebesar 2,5 persen.

Kami bersepakat membentuk BUMMA agar daya tawar hasil tanaman atau komoditas, meningkat. Begitu pun dengan stok atau persediaan hasil bumi untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Sehingga, harga tawar yang biasanya lebih rendah dari penampung ke peladang atau petani, bisa lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan bersama.



Aktivitas bertani secara kolektif.



Taat Ritual

Dalam berkegiatan atau beraktivitas, Masyarakat Adat Seberuang Ansok tetap menggelar ritual adat yang sudah berjalan turun-temurun. Untuk kegiatan berladang, kami memulai tahapannya dengan *mangul* atau memilih lokasi pada waktu yang tepat.

Mangul berlangsung pada bulan muda atau tiga hari setelah bulan baru atau saat baru terlihat sabit di langit. Setelah menemukan lokasi yang tepat, kami menggelar ritual *Mantap Tanah* atau membelah tanah dengan dimensi 10 x 10 meter dengan parang. Tanahnya diambil untuk kemudian disimpan di bawah bantal untuk mencari mimpi.

Peladang harus berada di tengah areal tanah yang akan ditanami. Tanah *ditempap* atau ditepuk tujuh kali dengan tangan kanan sambil mengucapkan permohonan restu pada Puyang Gana, sang pemilik tanah dan kepada Petara, penguasa langit.

Selepas pisau *dipantapkan* (ditancapkan) ke tanah, peladang mengambil tanah di bagian yang paling banyak tanah dari bilah pisau. Tanah itu lantas dibawa pulang beserta tiga batang kayu kecil dibungkus daun. Bungkus atau *putut* tanah itulah yang nanti disimpan di bawah bantal saat peladang tidur.

Apabila mimpinya baik, seperti melihat bulan atau matahari, disengat lebah bagus yang berarti *miang* padi, atau menyaksikan pemandangan alam, maka kegiatan berladang bisa dilanjut di tempat pengambilan tanah. Jika mimpi buruk, seperti hanyut, kesal, atau diserang semut, maka perlu melakukan pencarian lokasi lain.

Peladang yang mendapat mimpi baik, *mangul* diulang dengan membawa batu *ansah* (batu untuk mengasah parang). Batu *ansah* adalah batu khusus yang ketika disimpan di rumah juga ditempatkan secara khusus. Peladang membuat tempat istirahat atau *perengkah* guna menempatkan batu *ansah*. Sebagai penghargaan terhadap Puang Gana, penguasa tanah, peladang harus membawa potongan besi peraut atau paku. *Mangul* dilakukan tiga hari berturut-turut (*ngulang pangul*).

Jika ritual *Mantap Tanah* sudah dilalui, peladang melanjutkan dengan *Ngemaik Batu ke Pangul*. Pada ritual ini, peladang membawa batu pengasah parang untuk berladang ke tengah areal bakal ladang.

Ketika nanti membakar (*nunu*), batu tersebut harus dipindahkan ke pinggir ladang. Saat membakar, batu tersebut diberi ketan (*pului*) karena batu tersebut dianggap ikut bekerja. Batu *ansah* adalah wujud dari leluhur yang disebut Puyang Kampa.

Ritual *Ngemaik Batu ke Pangul* dilakukan tiga hari setelah *Mantap Tanah*. Itu menandakan lokasi telah ditetapkan sebagai lokasi untuk berladang tahun itu. Kedua ritual di atas biasa digelar pada bulan Juni.

Pekerjaan menebas di bakal ladang dilanjutkan dengan menebang. Setelah tebangan selesai, maka menunggu saat membakar atau *nunu uma*. Sebelum membakar, ladang harus dipastikan aman. Pembuatan sekat bakar telah diselesaikan sejak kegiatan penebangan. Sekat dibuat semakin lebar jika ladang dinilai memiliki risiko membakar wilayah sekitarnya. Peralatan buat memadamkan api juga sudah dipersiapkan.

Proses pembakaran memperhatikan arah angin. Apabila angin kencang mengarah ke daerah rawan kebakaran, maka kegiatan harus ditunda hingga angin reda atau ditunda hingga malam saat tidak ada lagi pemanasan dari matahari.

Sebelum membakar, peladang menyiapkan tujuh ruas lemang untuk Puyang Gana, Petara, dan Hantu Api yang disebut *Keredak*. Sebelum api dinyalakan, tanah *ditempap* (ditepuk) tujuh kali sambil menggenggam beras.

Beras dipakai untuk memanggil *Keredak*. Lemang tujuh ruas itu diletakkan di tengah ladang, di tempat yang api diperkirakan tidak terlalu besar dan mampu memasak lemang tersebut. Selesai membakar, lemang itu diambil, dikupas, lalu dilemparkan ke Puyang Gana, Petara, dan *Keredak*.

Masyarakat Adat Dayak Seberuang percaya bahwa pemberian lemang itu bakal menahan *Keredak* untuk tidak mencari makan di luar ladang yang bisa mengakibatkan kebakaran atau *ngerampit*. Ritual itu juga dilakukan untuk mengundang seluruh kehidupan yang ada di tempat itu untuk makan seraya memohon Yang Maha Kuasa agar ladang yang dibakar, memberikan hasil melimpah.

Ritual selanjutnya adalah *Menugal*. Peladang meletakkan besi pada lokasi peletakan benih padi (*pangal*). Peletakannya tidak boleh sembarangan.

Setelahnya, peladang akan menggelar ritual *Mangal* dengan memotong babi dan ayam. Di bawah tempat peletakan benih, ditanam *sabang*, kunyit, serai, *tuba urat*, *empenuh* (tanaman daun bulat), dan *mas* (beras kuning dimasukkan ke kulit telur). Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan Puyang Gana dan Buinasi.

Setiap tanaman memiliki makna. Tanaman *sabang* bermakna tempat tersebut adalah rumah padi. *Tuba urat* untuk mengobati padi yang sakit. Kunyit dan serai adalah penangkal penyakit padi, sedangkan *empenuh* menyimbolkan ladang tersebut harus penuh oleh padi.

Benih yang akan ditanam juga diberkati secara adat atau disebut *Nyengkelan Benih* dengan satu ekor ayam. Benih itu diperciki dengan darah ayam sebelum benih tersebut ditugalkan. Melalui upacara itu, benih yang ditanam diharapkan tumbuh subur dan pada waktunya menghasilkan buah yang berlimpah.

Lalu, upacara dilanjutkan dengan *Minah ke Serai* atau memindahkan tanaman-tanaman yang ada di ladang sebelumnya ke ladang yang baru. Ritual dilakukan setelah padi meninggi dengan ukuran sekitar lebih tinggi dari batang kayu (*laput batang*) yang selanjutnya akan dipelihara hingga tiba masa panen.



Kegiatan berladang secara gotong-royong.

Saat panen atau *ngetam*, peladang akan membuat ritual *Ngamik Padi Kuma*. Kami memotong seekor ayam di ladang yang akan dipanen perdana. Hal itu sebagai bentuk permohonan izin memanen padi kepada Puyang Gana dan Petara. Dalam tahapan itu, tiga pohon padi diikat dengan *tengang* (raja akar), tangan diikat dengan *tengang*, *telinga takin* (wadah ambil padi) diikat dengan *tengang*, tiga tangkap padi diambil, satu tangkai dilemparkan keluar ladang ke arah belakang.

Sebelum panen raya (*ngetam*), kami sebagai peladang akan mengadakan ritual adat panen pertama padi *pului* (ketan muda). Kegiatan itu disebut dengan *matah* atau *ngamik pului mudak*. Berbagai jenis *pului* yang ditanam, antara lain *pului mas*, *pului mawang*, *pului alus*, *pului kasar*, *pului manis*, *pului itung*, dan lainnya. Dalam proses itu, peladang juga mengajak tetangga maupun keluarga untuk pergi ke ladang bersama-sama. Pengambilan padi pertama itu dilakukan dengan cara dipatah atau dipotong dengan *penganyi*, kemudian diukur dengan ujung jari jempol yang bertemu dengan ujung jari telunjuk (*dicekal*). Selanjutnya, disusun ke dalam wadah yang disebut *tengkin*, di mana di atasnya ada daun *pelikat* (digosok dengan jari campur darah ayam). Jika padi melekat, maka pemakaian atau penggunaan konsumsi warga tersebut tidak boros (*nai ruak*). Sampai di rumah, padi ketan dan alat perladangan disatukan (beliung, kapak, *isau* atau parang, *lunggak*, batu asah, dan lainnya) dan dihamparkan di atas *kelayak* atau tikar, kemudian dioleskan dengan darah ayam kampung, lalu dibiarkan selama satu malam.

Dalam proses pengolahan padi ketan menjadi emping (*pam*) tersebut, padi ketan juga harus dioleskan dengan darah ayam dan dibiarkan satu malam. Keesokan harinya, padi ketan yang masih menyatu dengan tangkai sudah bisa dipisahkan dengan cara dikikis menggunakan bambu berbentuk pisau kecil. Setelah terpisah, kemudian ketan dicuci dan digongseng (*ngerenang*) hingga sedikit kering. Setelah beberapa menit, ketan ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Itu bisa dilakukan satu sampai enam orang penumbuk untuk satu lesung. Dari proses tersebut, jadilah emping. Namun, emping yang pertama tidak boleh langsung dimakan, melainkan harus melalui ritual adat untuk menempelkan emping basah ke bagian dahi atau ubun-ubun kepala (*betampal*). Hal itu bertujuan untuk penguatan semangat atau jiwa. Sebagian emping yang dibungkus dengan daun *ribu* dan daun *duap*, disimpan di kepala tangga, tulang bumbung, dan tiang *parak* (tempat penyimpanan kayu bakar). Selanjutnya, emping bisa dikonsumsi oleh warga.

Ritual memanen ketan juga sama. *Takin* diikat ke punggung sampai penuh, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah, padi dihamparkan di tikar. Di atas *takin*, ada daun *pelikat* (digosok dengan jari campur darah ayam jika padi melekat, sehingga padi melekat tidak boros atau *ruak*); *daun ribu*; serta *daun keruap* (supaya semua tempat padi penuh (*ruap*) seperti *kelliling* (*takin*) dan *inying* (*benar*)).

Padi dikikis, digongseng, lalu ditumbuk. Emping padi ditempelkan di ubun-ubun (semua anggota keluarga) dengan mengucapkan *sampi* (doa) bersyukur kepada semua kehidupan yang telah membuat ladang tersebut menghasilkan padi berlimpah, kemudian dimakan dengan daging ayam (kaki, kepala, hati, ampela, dan ekor). Ketika ritual dilakukan, wajib mengundang tetangga sekitarnya.

Ritual lain yang dilakukan ketika panen akan mulai dilakukan, adalah ritual *Ngumpun Kejirak*, yaitu ritual adat memberi burung *kejirak*, jenis burung yang dihormati petani, karena dianggap mereka telah memberi rezeki dengan bersarang di antara batang padi. Burung tersebut hanya ada pada musim berladang. *Kejirak* hanya bersarang saat orang berladang. Burung itu tidak boleh dibunuh dan telurnya tidak boleh dimakan. *Kejirak* adalah burung sakral bagi peladang.

Saat panen selesai dan semua padi sudah terkumpul di lumbung padi, peladang melakukan upacara *Maru* atau *Gawai* atau semacam ritual syukuran. Kegiatan itu merupakan pesta terbesar bagi Masyarakat Adat Dayak Seberuang dan rumpun Ibanik dalam ritual perladangan. Saat *Gawai*, juga dilakukan pesta pernikahan, syukuran rumah baru, dan kegiatan lainnya.

Biasanya *Gawai* berlangsung lebih dari satu hari dan dilakukan pada rentang waktu April-Juni, tergantung pada kebiasaan dan kesepakatan bersama. Dalam kegiatan itu, seluruh keluarga diundang.

Rangkaian siklus perladangan bakal ditutup dengan ritual *Nyelapat Tahun* atau upacara adat mengakhiri tahun perladangan dan memasuki tahun yang baru. Kegiatan biasanya berlangsung antara Juni-Juli. Seringkali, acara *Gawai* dilakukan bersamaan dengan *Nyelapat Tahun*. Setelah upacara itu, Masyarakat Adat Seberuang melakukan pantang.

Ritual-ritual dalam perladangan harus dilakukan dengan benar. Jika tidak dilaksanakan dengan benar, maka kami harus membayar adat yang disebut *Mali Uma*, yaitu adat atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perladangan yang telah dianut secara turun-temurun.

Bertahan Saat Pandemi



Mayoritas kami di Kampung Ansok tetap memegang dan menjalankan kebiasaan turun-temurun saat berladang. Kami melakukannya di tanah kering atau perbukitan. Hasil dari berladang pun mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Namun, seiring dengan adanya pandemi Covid-19, rata-rata hasil panen itu berkurang. Biasanya, hasil panen dapat bertahan antara satu hingga dua tahun ke depan. Saat ini hanya untuk satu tahun. Faktor utama yang menyebabkan berkurangnya hasil panen itu, adalah perubahan iklim.

Biasanya, musim kemarau terjadi di bulan Agustus, namun bergeser lebih awal ke bulan Juli dalam dua tahun terakhir. Pergeseran waktu kemarau mempengaruhi proses berladang, khususnya membakar ladang.

Masyarakat Adat di Kampung Ansok hanya panen sekali setiap tahunnya. Rentang waktunya panjang dari mulai proses *manggul* pada bulan Juni hingga saat panen pada bulan Februari dan Maret.

Warga yang tidak memiliki lahan tanam, biasanya meminjam atau dipinjami lahan dari sesama warga secara cuma-cuma. Bagi yang hasil panennya tidak mencukupi, biasanya *nyanggah* atau meminjam padi atau beras ke warga lain. Ada juga yang membeli beras ke warung. Warga yang tidak berladang, ada juga yang membeli beras yang berasal dari kota di warung terdekat. Harganya antara Rp90-120 ribu per karung ukuran 10 kilogram.

Masyarakat Adat di Kampung Ansok belum menjual atau memasarkan beras dalam skala besar pada kisaran 50-100 ton per tahun. Hal itu sangat tergantung dari permintaan tamu atau pengunjung yang datang ke Kampung Ansok.

Beras biasanya lebih spesifik untuk sumbangan sukarela terkait kebutuhan umum dan tertentu, seperti *Gawai*, sambutan tahun baru, pernikahan, pemakaman, dan acara lainnya.

Semasa pandemi dalam dua tahun terakhir, ada beberapa warga yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai serta bantuan sosial secara bergilir. Warga yang diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial, adalah yang tidak mampu, tidak bekerja, atau memiliki banyak tanggungan.



Pemuda Mengambil Peran

Guna mewujudkan kedaulatan pangan, para pemuda adat turut ambil bagian. Melalui organisasi Benua Adat Seberuang Ansok (BASA), para pemuda adat membangun Gerakan Pulang Kampung Pemuda Ansok. Saat ini, BASA dipimpin oleh Timotius dan dibantu oleh Leopoldus Anggau sebagai sekretaris dan Ifnasia Riska sebagai bendahara.

Para pemuda adat berusaha melakukan inovasi dengan menanam padi dan membudidayakan tanaman *sengkubak* yang bisa jadi pengganti penyedap makanan. Timotius mendapatkan bantuan dari Yusuf Yurdi untuk membudidayakan tanaman yang sudah mulai langka. Tanaman itu hanya bisa ditemukan di hutan adat yang masih utuh.

Tanaman hasil budi daya tersebut, dijual hingga ke luar pulau dengan harga Rp75 ribu per *polybag* di lokasi pembibitan.

Para pemuda adat juga membuat anyaman gelang dari rotan dan resam yang berasal dari tanaman di hutan adat. Gelang dengan beragam ukuran dan motif itu ditawarkan dengan harga antara Rp10-20 ribu per buah.

Untuk kebutuhan sehari-hari di kampung, kami juga membuat piring dari lidi pohon kelapa. Piring lidi itu dijual dan disewakan. Setidaknya sudah ada 104 piring yang dijual dan disewa. Untuk penyewaan, sudah ada tiga acara pernikahan di sana. Tarif sewanya antara seribu sampai dua ribu rupiah per piring, tergantung dari jarak lokasi kegiatan.



Kerajinan berupa piring anyaman dari lidi.

Semua aktivitas di Kampung Ansok adalah cerita tentang kemandirian dan gotong-royong. Kami tidak tahu di mana ujungnya. Yang pasti, kami tidak mengharapkan itu berakhir karena intervensi dari luar atau dari kebijakan publik yang tak mendengarkan kami. Sungguh, kami tidak ingin.

* * *

Bagian II
Kisah Perjuangan
Pemuda Adat





11

Kisah dari Anak Talang: Jangan Biarkan Ini Menjadi Pohon Terakhir

Oleh Supriadi bersama Zulyani Evi

Aku selalu terkenang masa kecil bermain di sungai atau menghirup hawa hutan yang sejuk dengan pohon tinggi menjulang. Kala itu, aku tak perlu repot membawa air minum, tetapi cukup datang ke sungai ketika haus. Namun, kini hutan menjadi panas, air di sungai tak mengalir lagi, dan tak ada hewan yang berlarian di hutan. Bukit-bukit yang rimbun sekarang tandus, bahkan salah satunya dinamai Bukit Tengkorak.

Komunitas Masyarakat Adat Anak Talang tidak dapat dipisahkan dari alam dan tradisi berladang. Hal itu termanifestasi dalam sejarah kami. Anak Talang adalah bagian dari Suku Talang Mamak yang bermukim di Indragiri Hulu, Provinsi Riau. “*Talang*” berarti ladang. Kami menyebut berladang dengan *baumo*. Ladang begitu lekat dengan Masyarakat Adat, begitu pula dengan para pemuda adat di Komunitas Masyarakat Adat Anak Talang.

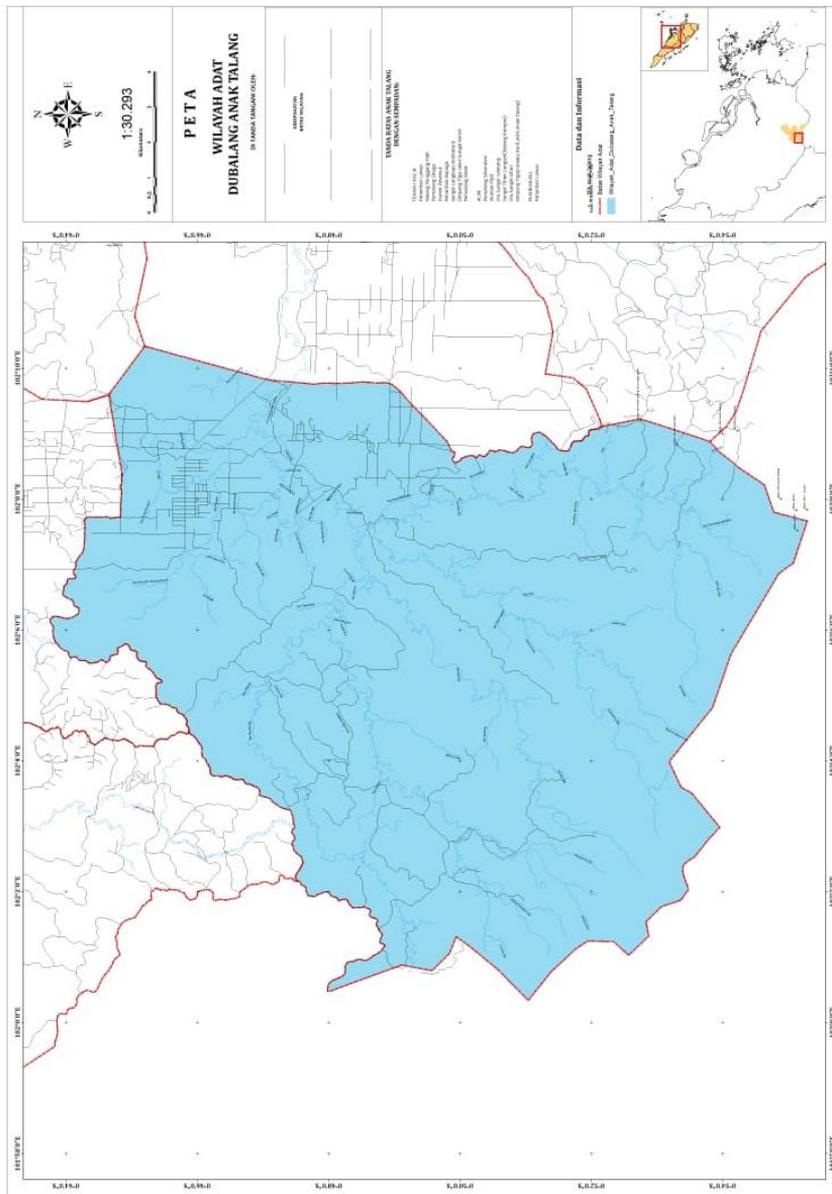
Keseharianku diisi dengan kegiatan berladang, baik menggarap ladang milik keluarga maupun lahan komunal yang dikelola bersama kawan-kawan. Pada 2019, kami mendapat tanah seluas satu hektar yang diwariskan oleh seorang ahli waris dari Komunitas Masyarakat Adat Talang Jerinjing. Tanah tersebut diwariskan kepada kami untuk ditanami padi dan sayur. Kami mengajak para pemuda adat untuk mempraktikkan cara berladang sesuai dengan kearifan leluhur.

Pada 2020 lalu, kami juga bergotong royong mengelola tanah seluas empat hektar yang diwariskan oleh Nenek Mamak dan Datuk Muslimin sebagai pemimpin adat kami. Kegiatan bertani itu dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Kami memulainya dengan menanam 1.000 bibit pisang. Selain perawatannya yang mudah, pisang juga lebih mudah dijual, sehingga dapat memperkuat ekonomi dan mendukung gerakan pemuda adat melindungi wilayah adatnya.

Anak Talang dikenal dengan ungkapan “*Ayam tagas benteng aduan, kalau duduk menajam rajau, kalau togak maninjau jarak.*” Pemimpin Masyarakat Adat Anak Talang bergelar *dubalang*. Orang Talang Mamak menyebutnya dengan *Dubalang Anak Talang*, yaitu orang yang *baga* (berani dan keras). Karakternya yang keras dari orang Anak Talang, tidak bisa dipisahkan dari peran di dalam struktur adat Talang Mamak.

Kelembagaan adat yang ada di komunitas kami, terdiri dari *dubalang* atau *datuk raja pangulu, mangku, monti*, dan *bubungan*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat (*pokat dapat undingan tasuo*).

Dubalang Anak Talang Datuk Muslimin bercerita bahwa Masyarakat Adat Anak Talang memiliki banyak falsafah, mulai dari cara menentukan batas wilayah adat sampai dengan menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya berladang.



Peta Wilayah Adat Dubalang Anak Talang.

Tahapan pertama dalam berladang, dinamakan *singkil kalo kalo*. Dalam tahapan itu, akan diambil kayu bercabang sebesar ibu jari, lalu dikaitkan ke cabang kayu yang berdiri. Tujuannya untuk memberi tanda bahwa akan ada yang berladang di tempat itu. Setelahnya, barulah dilakukan tahapan *melambas*, yakni ritual adat untuk memberi tahu makhluk gaib di sekitar ladang agar kita tidak diganggu. Jika makhluk gaib melarang kita berladang di tempat itu, akan ada keganjilan, seperti tanah yang berbau tanah makam atau tanaman yang kita tanam tidak hidup. Jika tidak ada tanda-tanda seperti itu selama tiga hari, maka proses berladang dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelahnya, barulah dilakukan tahapan *melambas*, yakni ritual adat untuk memberi tahu leluhur di sekitar ladang agar aktivitas baumo dilindungi. Jika leluhur melarang kita berladang di tempat itu, akan ada keganjilan, seperti tanah yang berbau tanah makam atau tanaman yang kita tanam tidak hidup. Jika tidak ada tanda-tanda seperti itu selama tiga hari, maka proses baumo atau berladang dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah tiga bulan, barulah membuat *landang* atau yang disebut sekat bakar agar api pembakaran tidak merembet ke tempat lain. Ketika akan membakar, diadakan ritual adat dengan sesajen *ancak*, limas. Tujuan ritual tersebut memberi tahu kepada yang gaib dan kepada binatang, seperti semut, serangga, dan semua yang ada di areal ladang yang akan dibakar agar menghindar untuk sementara. Ritual itu disebut *Merabun Langit Memolas Bumi*.

Setelah beberapa hari selesai membakar, dilakukan ritual *Menurun Bonih*, di mana orang yang melakukan ritual itu adalah orang yang mengerti tentang padi. Lalu, kami melakukan *menugal basolang* atau menanam padi ramai-ramai. Setelah tiga bulan, dilakukan *menangkal* agar padi terhindar dari hama dengan ritual yang bernama *Lengkiso*. Jika ritual *Lengkiso* tidak dilakukan, biji padi yang masak akan kosong, bahkan padinya pun bisa hilang.

Setelah musim panen datang (kami disebut *menuai*), sehari sebelum menjemput padi, orang akan memasang pelepah salak, duri rukam, duri *timbun tai*, dan bambu *temiang* di sudut-sudut ladang untuk menangkal hama dan kekuatan gaib.



Ketika panen tiba, para pemuda adat berperan penting dalam tradisi *menuai*.

Seseorang yang menjemput padi, harus mengenakan pakaian yang bagus (bersih dan baru), kain panjang, dan peci. Lalu, padi yang dijemput itu akan digendong ke rumah. Kemudian, sehari setelah ritual, menjemput padi dilakukan lagi - kami menamainya dengan *menuai pengiring* - oleh satu orang. Setelah itu, padi yang dituai tersebut, dipisahkan kulit dengan beras untuk dimasak dan dimakan. Kami menyebut kegiatan itu dengan *makan bungo padi*. Pada proses memisahkan kulit padi dengan beras, dahulu masih menggunakan cara manual yang disebut *menumbuk belosung*. Tetapi, sekarang sudah menggunakan mesin. Setelah selesai *makan bungo padi*, barulah dilakukan menuai ramai-ramai atau *menyangga*.

Menyangga sudah dilakukan pada zaman nenek moyang kami dan masih dilaksanakan sampai sekarang. *Menyangga* terdiri dari dua bagian: pertama, *menyangga ikuk taun kepalo taun* dan kedua, *menyangga* ketika ada seseorang yang sakit. Tujuan melakukan ritual *menyangga ikuk taun kepalo taun* yakni agar terhindar dari penyakit musiman, serangan binatang buas, *balak*, dan agar kampung damai. Pepatah menyebut: *sakit barubat, domom nak bauras, poning nak bapupuk*. *Menyangga* ini tidak akan bisa hilang. Jika hilang, maka hilanglah adat dari Anak Talang.

Pada proses persiapan, dilakukan *penyurungan pesiriah* (memberikan alat sirih) yang bertujuan “*pogi bapadah balik bakoba, ngambik mintak nyoncang batanyo*” yang artinya adalah memberi tahu kepada yang tua (*Datuk Dubalang*). Setelah itu, barulah *tuo longkop* (ketua untuk urusan perlengkapan alat-alat ritual) mengarahkan kepada orang yang paham pekara itu untuk menyiapkan ayam panggang, nasi kuning, darah ayam, limas yang terbuat dari daun pisang, beberapa jenis bunga, macam-macam kue, pucuk aren, *lengkonai*, bambu, kayu, rotan, kelapa, pulut, lilin, telur ayam, selasih, kemenyan, dan leman.

Semua biaya ditanggung oleh Masyarakat Adat Anak Talang dengan bergotong royong yang disebut: “*Ayik di baka angus, bungo di karang dak rampai. Sadokak bak batu, lah sadoncing bak bos, lah saikat bak kayu, sagulung bak daun lah saiyo bak anak jantan sakato bak anak batino*.” Itu pepatah untuk penyebutan kesepakatan semua Masyarakat Adat. Jika mufakat sudah didapat, barulah alat-alat ritual dikumpulkan.

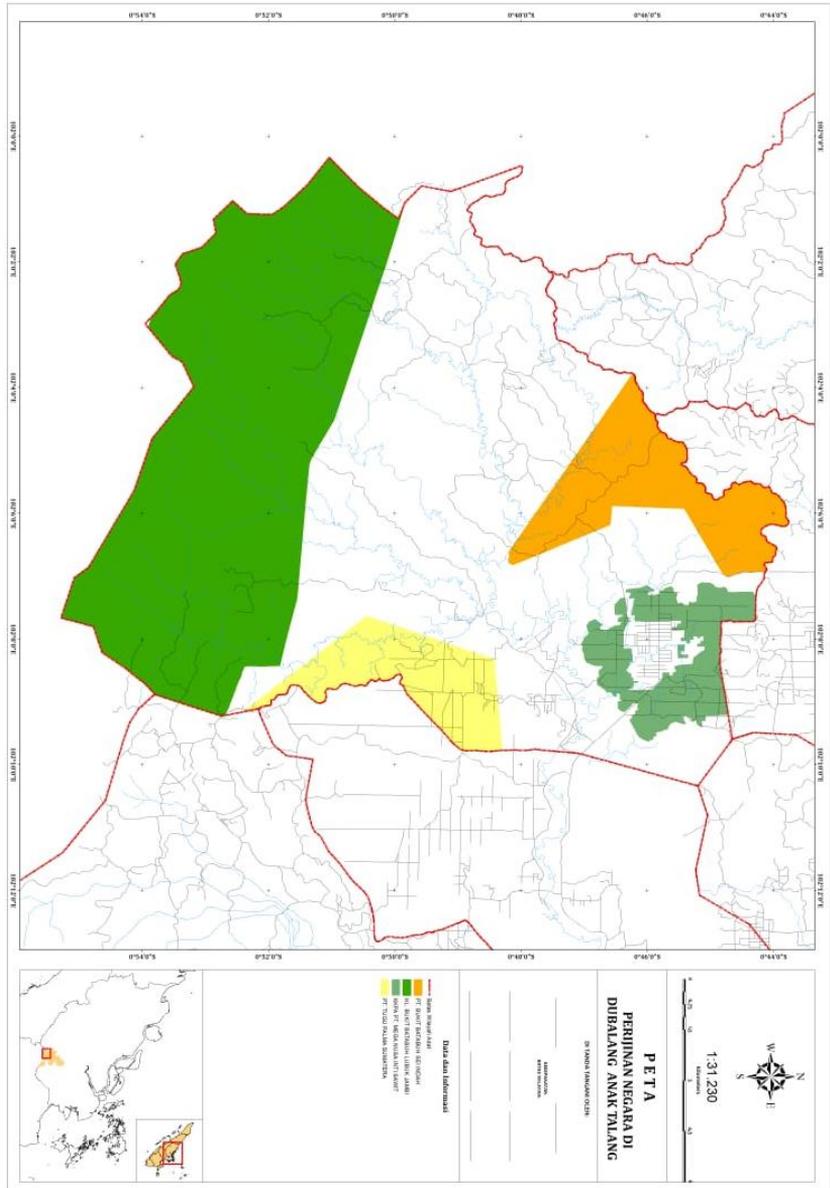
Setiap tahun, kami mengadakan pesta besar yang disebut *Gawai Gedang*. Dalam kegiatan itu, ke-29 kebatinan (komunitas) di dalam Suku Talang Mamak, akan menggelar berbagai tradisi, seperti sabung ayam, pernikahan, dan sebagainya. Hari bangkitnya Masyarakat Adat kami, adalah saat kami mulai memikirkan nasib kami: hak kami atas wilayah adat dan bagaimana kami bisa mempertahankan budaya yang terancam di tengah perkembangan zaman.

Menolak Punah



Hutan adalah paru-paru dan tanah kami. Namun, kini hutan tak lagi tersisa. Kelekatan Masyarakat Adat dengan alam, berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Suku kami termasuk dalam kategori yang terancam punah karena sebagian wilayah adat kami dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit. Saat ini, para pemuda adat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hutan dan keutuhan alam.

“Hutan sudah tidak ada karena dijual dengan skala luas dan perambahan hutan oleh perusahaan,” ujar Aan Pardinata, salah satu temanku sesama pemuda adat.



Peta Perizinan Negara di Wilayah Adat Dubalang Anak Talang.

Salah satu bentuk perjuangan kolektif pemuda adat dalam menjaga hutan, adalah dengan melakukan patroli hutan adat. Kami menyebut diri sebagai Pemuda Sembilan Penjaga Hutan. Alkisah, dahulu terdapat sembilan pemuda yang ditokohkan oleh Suku Talang Mamak. Dari situ, kami terinspirasi. Berbekal semangat dan tekad yang kuat, aku, Darsen, Aan Pardinata, Seki, Joni, Bujang Hadi, Alri, Dedi Asmar, dan Edi menginisiasi kegiatan patroli hutan adat sejak 2014.

Kami rutin melakukan patroli mengelilingi hutan seluas 23 ribu hektar. Kami berjalan kaki menyusuri pepohonan untuk memastikan tidak ada kegiatan penebangan liar. Kami biasanya mulai berjalan jam delapan pagi sampai empat sore. Setelah itu, istirahat dan dilanjutkan keesokan hari. Kami melakukannya dua kali dalam sebulan.

“Agar anak cucu kelak masih bisa melihat Hutan Adat Anak Talang,” ucap sahabatku, Aan. Sebagai pemuda adat, Bende dan kawan-kawan bertekad melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hutan. Berbekal semangat, kami mulai lakukan semua yang dibutuhkan untuk itu.

Ancaman kekerasan adalah hal yang kerap kami hadapi. Mulai dari oknum militer sampai perusahaan besar, pernah kami lawan. Peristiwa yang paling tidak terlupakan adalah saat kami menahan dua alat berat (buldoser) PT Runggu Prima Jaya yang beroperasi di Desa Anak Talang pada 2016 silam. Masyarakat Adat menolak kehadiran perusahaan itu karena melakukan penebangan kayu di kawasan hutan adat tanpa memiliki izin. Selain merusak hutan, pihak perusahaan juga merusak sumber mata air yang menjadi tempat bagi ribuan orang dari Suku Talang Mamak untuk mencuci, mandi, dan minum.

Tentu ada perasaan takut. Pernah suatu kali kami diancam akan dibunuh dan diburu ke kampung-kampung.

“Pada saat kami melakukan aksi pengamanan terhadap alat berat perusahaan yang merusak hutan kami, saya merasa takut karena ada ancaman dari perusahaan tersebut. Itu adalah kali pertama kami berhadapan secara langsung dengan perusahaan perusak hutan kami. Aku dan Supriadi pergi berbulan-bulan meninggalkan kampung karena intimidasi dari pihak perusahaan. Sampai saat ini masih teringat,” ungkap Aan.



Alam Raya Sekolah Kami

Selain melakukan patroli adat, para pemuda adat juga melestarikan sejarah dengan menelusuri jejak-jejak leluhur melalui diskusi-diskusi dengan para tetua atau mengunjungi situs-situs yang memiliki arti penting bagi kami. Pengetahuan yang kami dapat dari aktivitas itu, telah kami tuliskan dalam buku berjudul *Dubalang Anak Talang*.



Bagian dari bentang wilayah adat.

“Sekarang, tidak banyak pemuda adat yang peduli dan berminat dengan sejarah kampung. Berangkat dari situlah, saya mulai terlibat dalam kegiatan menggali sejarah dan bertanya kepada para tetua. Karena jika dibiarkan, sejarah kampung saya akan hilang,” ujar Eti Lestari, seorang pemuda adat.

Eti adalah salah satu perempuan adat yang terlibat aktif dalam gerakan pelestarian sejarah. Ia bercerita tentang bagaimana awalnya ia ikut terlibat dalam gerakan tersebut. Menurut penuturan Eti, hal itu dimulai ketika sekelompok pemuda adat di Talang Mamak, melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, seperti makam keramat dan hutan keramat. Rasa penasaran yang muncul secara perlahan, berubah menjadi semangat juang. Berbagai rintangan dalam aktivitas kunjungan penggalian sejarah, seperti jarak dan cuaca, tidak menyurutkan semangatnya.

Saat ini, Eti bertutur bahwa dalam setiap pertemuan kampung, kaum perempuan adat sudah mulai dilibatkan, baik dalam kegiatan pertemuan adat maupun pertemuan kampung lainnya. Eti berharap, kampungnya dapat kembali seperti sedia kala, di mana hutan lebat dan sungai bersih. Ia selalu dan terus berharap agar pemuda adat di kampung mau bersatu untuk berjuang mempertahankan kampung dan menggali sejarahnya.

Dalam konteks pandemi Covid-19, kami mengambilnya sebagai kesempatan untuk merawat ingatan dalam menanam dan meramu obat. Sejak awal pandemi, kami sibuk menanam tanaman obat di lahan adat yang dihibahkan oleh tetua. Kami menggali informasi kepada tetua adat dan mengumpulkan tanaman-tanaman untuk meramu obat. Setelah bahan terkumpul, kami mulai meramunya dengan merebus dalam panci besar, kemudian airnya dikemas. Selain untuk daya tahan tubuh, ramuan itu dapat menyembuhkan penyakit, seperti pegal atau luka. Masyarakat Adat Anak Talang memiliki kearifan pengobatan tradisional lainnya, seperti *menyangga*, *badukun togak*, dan *merancak* ramuan dari alam.

Dubalang Anak Talang Datuk Muslimin berujar, “Apa yang mereka (para pemuda adat) lakukan, adalah bagian dari apa yang sudah kami lakukan dahulu. Kurang lebih itulah arti dari pepatah “*Orang tua bak napuh di ujung tanjong, ilang sikuk berganti sikuk.*”

“Tugas kami hanya menyampaikan, tugas kami hanya memberi tahu. Sementara yang menjalankannya, adalah anak-anak muda tersebut,” ucap Datuk Muslimin memaknai arti pepatah.

Masyarakat Adat Talang Mamak, termasuk para pemuda adat, bertekad untuk terus berjuang. Kami menegaskan, “Kami tidak (akan) membiarkan pohon ini menjadi pohon terakhir.”

Tekad itu ditujukan bagi semua pohon. Semua yang ada di hutan adat kami di Talang Mamak.

* * *



12

Kisah dari Bulutana: Menjadi Sehat Itu Murah

Oleh Mustaqim bersama Margareth Aritonang

Pengobatan tradisional bukan hal baru buat saya. Saya sudah seringkali mendengar tentang pengobatan tradisional. Obat-obatan tradisional biasa dipakai, misalnya untuk sunatan atau untuk membantu proses melahirkan. Warga di sekitar tempat tinggal saya juga banyak yang bercerita bagaimana mereka bisa sembuh dari penyakit tertentu setelah mendapat pengobatan tradisional. Selain untuk mengobati penyakit, pengobatan tradisional juga dipakai untuk gangguan fisik non-medis, seperti kena teluh atau guna-guna, yang kami sebut *doty*.

Saya Mustaqim, seorang pemuda adat dari Komunitas Masyarakat Adat Bulutana. Saya telah lama mengenal beberapa tanaman herbal yang sering digunakan warga. Dan, saya tahu tanaman-tanaman itu tumbuh bebas di hutan adat di wilayah adat kami di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tempat saya dilahirkan. Akan tetapi, saya baru menyadari keberadaan “harta karun” itu setelah beberapa kali mendengar cerita mengenai warga yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terdekat. Meski kami katakan terdekat, namun untuk mencapai Puskesmas tidak mudah karena akses ke lokasi yang sangat terbatas.

Saya sering mendengar cerita bagaimana warga bergotong-royong memapah orang yang sakit. Mereka harus berjalan kaki menerabas jalanan berlumpur di tengah malam yang gelap gulita untuk mencapai klinik di kecamatan. Jarak klinik dari lokasi masing-masing komunitas Masyarakat Adat di Gowa, sekitar 15 kilometer.

Terdapat 11 komunitas Masyarakat Adat di Gowa. Selain Bulutana yang menjadi tempat asal saya, ada juga Komunitas Masyarakat Adat Teko, Tabuakkang, Garassi, Syiriah, Pattalassang, Matteko, Suka, Balassuka, Baliti, dan Bolaromang.

Meski jarak klinik dari lokasi masing-masing komunitas Masyarakat Adat itu kurang lebih sama, tantangan yang harus dilalui untuk bisa sampai ke sana, berbeda-beda. Klinik memang terbilang jauh dari tempat asal saya, tetapi aksesnya sudah lumayan bagus. Sudah ada jalur jalan. Berbeda dengan lokasi-lokasi komunitas Masyarakat Adat lainnya, di mana belum dibangun jalan yang menghubungkan ke Puskesmas. Maka, jika ada warga dari komunitas Masyarakat Adat yang sakit, mereka harus berjalan kaki memapah si sakit ke klinik. Atau, warga yang sakit ditandu menggunakan sarung dan bambu karena mobil tidak bisa masuk. Yang sempat sampai ke klinik dengan selamat, sudah ditunggu oleh ongkos berobat yang tinggi. Yang tidak bisa tiba ke klinik dengan selamat, akan dibawa pulang untuk dimakamkan. Sungguh, menjadi sehat itu mahal.



Menjadi Sehat bersama Alam

Sekitar Desember 2019 lalu, kami anak-anak muda dari semua komunitas Masyarakat Adat berkumpul. Kami membicarakan banyak hal, namun terpusat pada satu tema: apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan kami. Apa yang bisa kami manfaatkan dari harta karun yang sudah lama ada dan tersimpan di hutan-hutan adat kami. Kami sepakat untuk bekerja sama membangun fasilitas kesehatan, terutama obat-obatan agar lebih terjangkau untuk semua komunitas Masyarakat Adat.

Semua yang kami perlukan sudah tersedia di hutan adat. Pada saat itu, kami tidak tahu harus memulai dari mana dan apa yang harus kami lakukan dengan tanaman herbal yang tumbuh liar di hutan. Kami mengenal beberapa jenis tanaman tersebut, tetapi kami tidak tahu namanya, apalagi khasiat dan cara meramunya. Kami menyadari bahwa kami tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ditopang oleh Masyarakat Adat secara keseluruhan. Kami menyadari bahwa kami harus bergotong-royong. Oleh karena itu, kami mengajak semua warga kami masing-masing, termasuk ketua adat, tokoh masyarakat, dan dukun peramu obat yang biasa kami sebut *sanro*.



Aktivitas gotong-royong di kampung bersama para pemuda adat.

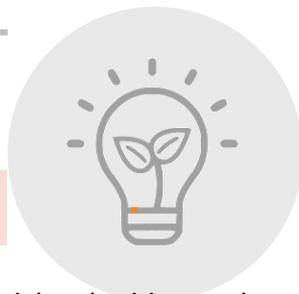
Kami mulai dengan mengumpulkan semua tanaman herbal yang tersebar dan tumbuh liar di hutan adat di masing-masing komunitas Masyarakat Adat. Kami kumpulkan semuanya dalam satu lokasi yang kami sebut kebun herbal. Kebun herbal kami berada di wilayah adat di Masyarakat Adat Pattalassang di tengah Sungai Tangka di Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao. Lokasinya berada di tengah-tengah, sehingga cocok sebagai tempat berkumpul. Kami menyebut tempat itu dengan Arangangia atau tanah yang ada di tengah sungai. Pada mulanya, Arangangia itu hanya berupa semak belukar. Sekarang tempat itu sudah berubah menjadi surga obat-obatan herbal - sebuah surga kecil di tengah sungai.

Meskipun kebun herbal itu ada di Pattalassang, namun kebun itu menjadi milik bersama. Semua komunitas memiliki peran masing-masing yang khusus. Tanaman herbal yang ada di situ semua berasal dari hutan-hutan adat kami.

Di awal prosesnya, para pemuda adat - lelaki maupun perempuan - dari 11 komunitas Masyarakat Adat, sepakat berbagi tugas. Masing-masing mengidentifikasi lima jenis tanaman herbal dari hutan adat masing-masing dan membawanya ke kebun herbal bersama. Sedangkan *master plan* denah kebun, adalah hasil kreativitas pemuda adat dari Suka. Sedangkan semua fasilitas yang ada di dalamnya, mulai dari jembatan untuk mengakses kebun, *bedengan* atau media tanam, kolam ikan, WC, aula pertemuan, hingga kamar sederhana untuk istirahat, merupakan hasil kerja sama semua pemuda adat. Semua bangunan terbuat dari bambu dan daun rumbia.



Aktivitas menanam dengan media tanam berupa *polybag* dengan para pemuda adat.



Belajar Mengenal Kekayaan Sendiri

Proses pengembangan kebun herbal berjalan beriringan dengan proses pengembangan pengetahuan kami tentang kekayaan alam milik kami sendiri. Meskipun kami telah mengenal hampir semua tanaman herbal yang ada, bahkan sering memakai beberapa di antaranya, namun tetap saja banyak tanaman herbal yang tidak kami ketahui namanya.

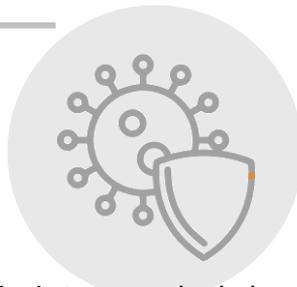
Cidong-cidong balaho, misalnya. Tanaman itu memiliki daun berwarna hijau. Bentuknya bulat, sering dideskripsikan menyerupai ginjal manusia. Batangnya lunak dan beruas. Tanaman itu menjalar hingga ketinggian satu meter serta terkenal bisa menyembuhkan batuk. Kami cukup merebus daunnya dan meminum air rebusannya. Daunnya bisa juga bisa digunakan untuk obat luar. Saya sudah lama mengenal *cidong-cidong balaho*. Tapi, saya baru tahu tumbuhan itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan daun pegagan.

Cidong-cidong balaho hanya satu dari sekian banyak tanaman herbal yang bisa kami identifikasi bersama dengan bantuan teknologi. Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkenalkan kami dengan sebuah aplikasi, yaitu *PlantSnap*, yang bisa mengidentifikasi tanaman. Jika kami menemukan satu tanaman yang tidak kami ketahui namanya, tinggal difoto menggunakan aplikasi itu. Setelahnya, akan muncul nama tanaman dalam bahasa Latin. Kami lantas mencari dengan Google untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia.

Setelah berhasil mengidentifikasi jenis dan nama tanaman tertentu, kami akan berdiskusi dengan para *sanro*, para dukun peramu obat, untuk tahu khasiat dan cara meramunya menjadi obat. Pak Dusun, peramu obat dari Pattalassang, bercerita bagaimana dia menggunakan berbagai jenis tanaman herbal sebagai antibiotik.

“Proses sunatan telah berkali-kali dilakukan dengan menggunakan alat potong dari bambu dan menggunakan antibiotik dari berbagai jenis tanaman herbal,” katanya dalam bahasa Makassar.

Tak jarang kami berdiskusi dengan akademisi pengajar di universitas yang ada di sekitar Gowa. Semua hasilnya kami kumpulkan ke dalam satu *database*. Kami memiliki rencana untuk menuliskannya menjadi satu buku dan akan kami bagikan ke semua masyarakat, baik masyarakat yang ada di dalam maupun di luar komunitas Masyarakat Adat kami.



Bertahan dari Pandemi

Di masa pandemi Covid-19, beberapa jenis tanaman herbal itu banyak kami gunakan untuk menangkal virus Covid-19 sebab banyak warga takut berobat ke dokter. Pandemi membuat warga kembali ke pengobatan alami yang menggunakan tanaman di lingkungan sekitar. Hanya warga yang melahirkan atau mengalami luka terbuka saja yang berobat ke Puskesmas atau ke klinik.

Banyak orang dari berbagai kalangan di luar komunitas kami, datang berkunjung ke Arangangia, surga tanaman herbal kami. Mereka sengaja datang untuk belajar bersama tentang khasiat kekayaan alam ini. *Baroga* (aula) kebun kami menjadi tempat diskusi rutin. Meski banyak kalangan sudah merasakan manfaat kebun herbal itu, pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap peran Masyarakat Adat masih sangat minim. Banyak Masyarakat Adat di berbagai penjuru Indonesia yang justru mengalami intimidasi dan perampasan wilayah adat. Gerakan kami di Gowa, dalam mengembangkan kebun obat herbal, merupakan salah satu dari banyak advokasi terhadap Masyarakat Adat. Tujuannya yaitu agar pemerintah mengakui, melindungi, dan memberdayakan Masyarakat Adat di Indonesia. Hal itu akan terwujud apabila Pemerintah Indonesia segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.



Kisah dari Suku Rambang Kapak Tengah: Berdaulat dengan Menanam

13

Oleh Walton Praniko Al Jebo bersama Sapariah Saturi

Di depan mata, terhampar lahan yang menghijau oleh berbagai tanaman sayur dan bumbu. Ada katuk, kangkung, sereh, cabai, ubi jalar, terung, terung asam, jahe, kunyit, serai, dan bumbu lainnya. Di sebelahnya, tampak lahan menghijau oleh pohon buah-buahan, seperti pisang, durian, petai, jengkol, karet, dan banyak lagi. Suasananya sejuk. Kicau burung bersahutan terdengar dari kejauhan.

Wilayah adat kami dari Komunitas Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah sekarang lebih hijau. Tanamannya pun semakin beragam dengan adanya gerakan pemuda adat berdaulat di wilayah adat. Kami mulai bercocok tanam lagi. Pada mulanya, hanya untuk memenuhi pasokan pangan sendiri, namun ternyata hasilnya berlebih, sehingga bisa dijual.

Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah secara administrasi masuk Dusun I, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah, selain Suku I, juga terdapat Suku II dan Suku III.

Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah terdiri dari tujuh *talang*, yakni Talang Padangan, Ciknong, Hengas Swah, Telage, Rumpuk Ubi, dan Tebat Rawas. Populasi penduduk Suku I sekitar 1.000 jiwa. Kami menghuni kawasan yang luasnya kira-kira 2.500-3.000 hektar.

Mata pencarian kami mayoritas dari karet di lahan sekitar 2.000 hektar dan dari sawit. Sementara itu, hanya sekitar lima persen warganya yang menjadi guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berbagai pekerjaan lain.

Saya, Walton Praniko, lahir dari keluarga petani atau pekebun. Sejak usia belia, saya sehari-hari biasa ikut berkebun dengan kedua orangtua. Orangtua saya punya lahan dua hektar yang dijadikan kebun karet. Dulu, hanya ada satu atau dua jenis tanaman di sela karet.

Saat SD, dari usia delapan tahun, saya sudah ikut menyadap dan bantu orangtua, terutama saat libur sekolah. Saya membantu bersih-bersih kebun dari rumput liar. Kadang, ikut menyemprot juga. Kami biasanya berangkat ke kebun sekitar pukul 06.30 pagi dan kembali ke rumah pukul 10.00. Tak jauh beda dengan pemuda adat yang lain. Itu rutinitas kami.

Kami *menabah* getah karet setetes demi setetes ke dalam batok kelapa yang sudah dibelah dua. Ketika getah mengering, itu berbentuk kepingan. Agar tetesan getah tidak luber ke mana-mana, digunakan belahan bambu sebagai saluran getah.

Setelah selesai *menabah* getah karet, batok kelapa berisi getah akan kami kumpulkan pada bak papan berukuran 80 x 60 cm atau 40 x 60 cm. Setelah itu, getah dibawa pulang dan kami simpan di gudang untuk dijual pada pengepul.

Pengepul masuk ke kampung kami sebulan sekali. Dalam satu bulan, apabila cuaca bagus, tak banyak turun hujan, kami bisa menghasilkan 10 keping getah. Berat satu keping sekitar 20-30 kilogram. Harga karet kering 60 persen sekitar Rp11 ribu per kg.

Terkadang, pengepul datang lebih awal, setiap minggu atau setiap dua minggu. Karet belum lama panen pun bisa kami jual dengan harga lebih murah, yakni Rp1-2 ribu per kg. Itu dikarenakan karet yang masih basah, jadi belum banyak menyusut.

Dengan mengandalkan hanya pada karet, kehidupan kami kadang terasa sulit. Terlebih, kalau harga sedang turun atau kondisi cuaca tak bersahabat. Berkali-kali menghadapi masalah turunnya harga karet, kami mulai berpikir kalau kami menanam beragam tanaman, sehingga kami akan memiliki banyak sumber pangan sekaligus sumber ekonomi.



Gerakan Menanam

Gerakan untuk kembali berdaulat di wilayah adat mulai disuarakan pada 2012. Saat itu, gagasan penguatan pemuda adat agar berdaulat di wilayah adat, muncul dari Ketua Komunitas Masyarakat Adat Wawan Dipkarso.

Wawan menilai, itu menjadi hal penting bagi pemuda adat, apalagi kehidupan Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah belum aman. Sebab, wilayah adat kami belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Selain karena wilayah adat kami yang sebagian masuk sebagai kawasan hutan, beberapa *talang* juga diklaim lokasi konsesi perusahaan.

Banyak kasus lahan terjadi di wilayah adat kami. Perjuangan kami melawan perkebunan kayu anak perusahaan PT Musi Hutan Persada sejak bertahun-tahun lalu, hingga kini belum usai. Upaya-upaya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak, salah satunya hak atas wilayah adat, masih harus kami perjuangkan.

Menyadari keterancaman itu, ketua komunitas kami memandang penting warga, terutama pemuda adat, untuk memperkuat diri dengan berdaulat di wilayah adat. Wilayah adat kami terus diincar oleh pemodal maupun penguasa. Izin di wilayah adat kami bisa keluar kapan saja.

“Harus kuat menjaga dan merawat maupun mengelola wilayah adat. Tak menyewakan, apalagi memperjualbelikan,” kata Wawan.



Potret hutan adat di wilayah adat kami.

Kala itu, saya selaku pemuda adat bersama AMAN di Sumatera Selatan, antusias sekali dengan gagasan ketua komunitas kami. Begitu juga kawan-kawan pemuda adat lain. “Gerakan pemuda adat ini juga sebagai alat pemersatu kami untuk tetap mempertahankan hak wilayah adat di Komunitas Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah yang kami cintai dan banggakan sampai akhir hayat,” kata Juara Feriski, pemuda adat Suku Rambang Kapak Tengah.

Pengurus komunitas Masyarakat Adat pun mulai mengadakan pertemuan-pertemuan buat penguatan muda dan mudi adat agar bisa berdaulat di di wilayah adat sendiri. Contoh sederhana, berbagai keperluan hidup sehari-hari sebenarnya bisa tersedia atau bisa dipenuhi sendiri, seperti bermacam sayur, bumbu, umbi, buah, serta sumber protein berupa ikan di sungai maupun ternak. Kalau hasil tanam berlebih, maka bisa jadi sumber ekonomi bagi kami.

Edukasi dan penguatan kepada komunitas, terutama pemuda adat, juga mencakup penguatan kesadaran akan pentingnya merawat lahan. Tidak untuk dijual atau untuk digadaikan. Sesungguhnya kehidupan warga itu ada di lahan. Dalam tiap diskusi atau pertemuan, kami terus mengingatkan soal wilayah adat. Wilayah adat itu merupakan hak kami, bukan milik perusahaan atau siapa pun, maka harus tetap dipertahankan.

Kami para pemuda adat dari Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah juga ikut organisasi Masyarakat Adat. Sementara itu, ketua adat kami pun turut aksi turun ke jalan menentang perampasan wilayah adat. Aksi menolak perampasan wilayah adat terus berlangsung.

“Termasuk melalui Forum Komunikasi Masyarakat Rambang,” kata Herauwati. Pengurus adat terus menggalakkan kampanye untuk berdaulat di wilayah adat kami sendiri. Tujuannya adalah agar para muda-mudi adat tergerak dan tak malu kembali ke wilayah adat. Wilayah adat adalah sumber segala yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan kami.

Awal mulanya, kami membuat diskusi terfokus mengenai bagaimana memanfaatkan waktu luang di *talang* dengan kegiatan yang produktif dan konstruktif. Dalam diskusi itu, kami banyak mendapatkan ilmu, baik tentang kepemudaan, cara bermasyarakat, dan cara bersosialisasi, termasuk mengenal teknologi maupun menggunakan media sosial. Aktivitas itu diawali dengan forum diskusi dan berujung pada rencana aksi dan berpuncak pada aksi. Setelah mulai berkumpul dan diskusi pada 2012 lalu, kami mulai beraksi sekitar 2013-2014.

Pada mulanya, kami membuat percontohan di ladang (*ume*) di Talang Telage. Para pemuda adat dari *talang* lain turut terlibat. Kami membaur di tujuh *talang* itu. Tak lama, beberapa lahan adat mulai panen.

Kemudian, mulai tanam di *talang-talang* yang lain. Kami sebagai penggerak lapangan bersama pengurus komunitas Masyarakat Adat, melakukan pemantauan dan kunjungan lapangan dari *talang* ke *talang*. Kami sempat dapat bantuan benih kacang panjang dari kepala desa. Kami meminta jagung awalnya, tapi karena tak ada, jadi dapat kacang panjang. Rasa kebersamaan pun makin menguat. Sekitar 400-an pemuda adat ikut terlibat dalam gerakan pertanian dan perikanan di Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah.

Dalam mengerjakan *ume* atau ladang sayur-mayur, kami melakukannya dengan cara bergotong-royong. Kalau ada yang mau tanam, kami kerjakan bersama-sama. Begitu juga saat panen tiba. Semua lahan kami kerjakan secara bersama dan bergiliran. Sebelum mulai tanam di *ume*, ada ritual yang disebut *Sedekah Cuek*. Ritual itu semacam doa agar tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen banyak.

Setelah ritual, baru mulai proses *nugal* atau proses penanaman bibit atau benih, baik sayur-mayur maupun padi. Saat panen pun, kami gunakan alat-alat tradisional dari bahan bambu atau rotan.

Para pemuda adat bekerja bersama di ladang. Kami saling berbagi peran. Para pemuda adat mulai dengan *nugal*, membuat lubang, lalu kawan-kawan kami yang perempuan adat akan memasukkan bibit atau benih tanaman. Kami pergi ke *ume* setelah *nakok* atau *nabah* (sadap) karet. Biasanya, sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Pulang dari *ume* sekitar pukul 17.30 petang.

“Andai pagi hari atau pada malam harinya hujan deras, para pemuda adat maupun perempuan adat ke ladang atau *ume* pada pagi hari. *Nabah* tak bisa (dilakukan) kalau pohon karet basah,” kata seorang pemuda adat bernama Wedi Mashum Siddik.

Dari kegiatan menanam, kami bisa penuhi keperluan pangan kami sendiri. Ada sayur-mayur, seperti kangkung, katuk, dan cabai. Juga ada bumbu-bumbu, seperti jahe, lengkuas, serai, dan lain-lain. Panen paling banyak yaitu sayur-mayur dan cabai.

“Cabai sekali panen bisa sampai 5-10 kg. Kalau banyak bisa belasan kg,” kata pemuda adat di kampung.

Kami juga menanam atau merawat tanaman keras berupa buah-buahan, seperti petai, jengkol, mangga, durian, manggis, rambutan hutan, lengkung hutan, duku, dan kabau. Kami olah beberapa hasil panen menjadi produk pangan olahan, misalnya jengkol yang kami olah menjadi kerupuk atau rendang jengkol. Sekarang, kami sudah sering panen.

“Dalam setahun, setidaknya kami panen jengkol dua kali. Kalau petai, setahun dua kali. Jengkol atau *jering* itu satu pohon yang lebat, panennya bisa sampai empat atau lima karung ukuran 20 kg. Kalau petai, pohon yang paling lebat itu sekali panen bisa sampai 3-4 karung dengan berat per karung 20 kg.”



Panen dari kegiatan bertani atau berladang di wilayah adat kami.

Tetua-tetua adat sangat mendukung gerakan kami. “Bagus itu. Wilayah adat itu warisan leluhur. Ini perjuangan dengan menanam. Bagus itu,” kata Amat Syamsudin, sesepuh adat atau Pemangku Adat Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah Talang Padangan.

Dengan gerakan menanam yang dilakukan para pemuda adat, wilayah adat kami menjadi terkelola dengan baik, semakin berdaulat di wilayah adat, sekaligus mandiri untuk pangan komunitas.

“Sebelum ini, masih belum ada sayur-mayur. Sekarang sudah terpenuhi, ada kacang, cabai, kangkung, dan tanaman sayur-mayur.”

Yang lebih penting, gerakan menanam menguatkan kebersamaan di antara pemuda-pemudi adat.

“Bercocok tanam, beternak, itu langkah mandiri. Politik mandiri. Dulu, semua hanya jalan sendiri-sendiri, kerja sendiri. Atau, hanya berkaret saja. Setelah ada gerakan pemuda adat, jadi lebih banyak kegiatan,” kata Amat.

Infrastruktur Buruk



Gerakan berdaulat pemuda-pemudi adat kini semakin menguat. Meski begitu, kami menghadapi kendala infrastruktur yang terbilang buruk di wilayah adat kami. Salah satunya jalan sebagai sarana transportasi warga yang kondisinya masih belum memadai.

Kala musim penghujan, jalan menuju Wilayah Adat Suku Rambang Kapak Tengah dan antar-*talang* bak kubangan atau menyerupai danau. Tanah becek, licin, dan banyak lubang besar tak beraturan yang seringkali penuh air.

Tak ada pilihan. Mau menunggu pakai mobil *double gardan*, biaya mahal. Sepeda motor pun jadi pilihan. Kami kesulitan kalau pakai sepeda motor (tipe) bebek biasa, jadi mesti menggunakan sepeda motor *trail* untuk medan berat itu. Kalau terpaksa naik sepeda motor biasa, tak pelak, kadang sepeda motor susah berjalan karena sebagian bannya terbenam ke dalam lumpur. Kondisi itu menyebabkan Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah kesulitan membawa hasil panen keluar kampung, terutama di musim penghujan.

“Semoga ada perhatian dari pemerintah. Kami tak perlu jalan yang lebar, tak perlu yang muluk-muluk. Yang penting lalu lintas bisa lancar walau di musim hujan,” harap Wawan.

Penerangan listrik juga belum terpenuhi seluruhnya di tujuh *talang*. Baru satu *talang* yang dilayani oleh PLN. Begitu juga sarana komunikasi. Baru ada satu tower komunikasi yang menjangkau paling jauh 10 km. Padahal, tujuh *talang* di Masyarakat Adat Suku Rambang Kapak Tengah itu ada yang berjarak hingga 40 km. Akses komunikasi, termasuk internet pun masih sangat terbatas. Kami perlu mencari lokasi-lokasi tertentu untuk dapat sinyal telepon genggam dan internet.



Pandemi dan Mandiri Pangan

Sejak awal 2020, Covid-19 melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam masa pandemi, kami semakin kuat dalam menjaga kebersamaan di dalam komunitas.

“Tetap solid dalam setiap kegiatan yang dilakukan di komunitas,” kata perempuan adat Suku Rambang Kapak Tengah, yaitu Rini Antika Sari. Di masa pandemi pun semangat mewujudkan kemandirian pangan makin kuat. Muda-mudi adat Rambang Kapak Tengah makin giat menanam.

Pada masa krisis, kata Rini, keperluan sehari-hari, seperti sayur-mayur dan buah-buahan, terbatas karena ada pembatasan pergerakan masyarakat. Dalam kondisi pandemi, akan sulit apabila kami hanya menggantungkan diri dari pihak luar, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk itulah, komunitas Masyarakat Adat terdorong untuk lebih giat menghasilkan bahan pangan sendiri dengan menanam atau mengelola sendiri wilayah adat.

“Jadi, keperluan kami bisa terpenuhi dari menanam.” Tak hanya menanam. Di masa pandemi, kami juga mulai berternak. Kami cenderung melakukan budi daya ikan air tawar, seperti lele dan nila.

Dengan lahan yang ada, walau hanya di pinggir rumah atau pekarangan rumah, kami membuat kolam dari terpal. Awalnya, mulai di Talang Telage. “Saya dan satu atau dua pemuda adat mulai. Yang lain melihat dulu contoh ini, kemudian mengikuti di *talang* masing-masing.”

Satu kolam terpal berukuran 2 x 1 meter dan 3 x 1 meter dengan isi sekitar 200-500 bibit ikan. Panen ikan budi daya rata-rata tiap tiga bulan sekali. Sebagian budi daya ikan kami, sudah mulai bisa dipanen. Ke depan, selain usaha pembesaran ikan, kami juga akan melakukan pembibitan ikan.

Para pemuda adat antusias dalam menanam maupun melakukan budi daya ikan. Di sisi lain, kami masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala, seperti kurangnya dana pembelian pupuk dan bibit ikan. Selain itu, “Pengadaan bibit ikan atau pupuk sering terlambat karena jarak yang cukup jauh,” kata Wedi. Hasil panen pun tak selalu bagus. Kadang-kadang, kami juga gagal panen atau hasil panen tak sesuai harapan. “Musim kemarau dan hujan yang tidak menentu mengakibatkan tanaman atau ternak ikan gagal.”



Aktivitas berladang yang turut dimotori oleh pemuda adat.

Hasil panen kami, selain untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan komunitas, juga untuk masyarakat umum. Setelah kami memenuhi kebutuhan kami sendiri, sebagian hasil panen kami jual. Di kampung, ada pasar yang buka tiap Rabu dan jadi salah satu sarana bagi kami pasarkan hasil panen.

Selain itu, walau dengan akses internet terbatas, kami berupaya menampilkan beragam hasil panen di akun media sosial, seperti Facebook. Dari sana, muncul respon bagus dan mulai banyak yang memesan. “Kami *posting* sayur-mayur, lalu mereka dari Facebook tanya pasokan. Kalau ada, kami kirim. Lumayan banyak dan cepat laku.”

Kalau tanaman tahunan, seperti jengkol atau petai, berbagai rumah makan di kota terdekat, dengan mudah menyerap panen kami. Kami merasakan manfaat gerakan berdaulat di wilayah adat. Kebutuhan sehari-hari Masyarakat Adat tercukupi tanpa harus membeli di pasar dan pasokan pangan dijamin sehat dan bergizi.

“Uang yang biasa buat beli lauk-pauk dan sayur-mayur dapat dihemat untuk kebutuhan lain,” kata Wedi.

Dengan hasil panen lebih dari cukup untuk keperluan sendiri dan sebagian dijual, itu jadi mata pencarian tambahan bagi kami. Kami pun makin memahami untuk bertahan. Kami harus berdaulat di wilayah adat.

Kami harus tetap mempertahankan wilayah adat. Wilayah adat adalah tempat penghidupan kami turun-temurun. Berdaulat pangan itulah satu cara kami berjuang dan melawan.



14

Kisah dari Kesu': Tutur Sejarah dan Gerakan Pulang Kampung

Oleh Lidong Sarungallo dan Aldio Parante
bersama Amilia Buana Dewi Islamy

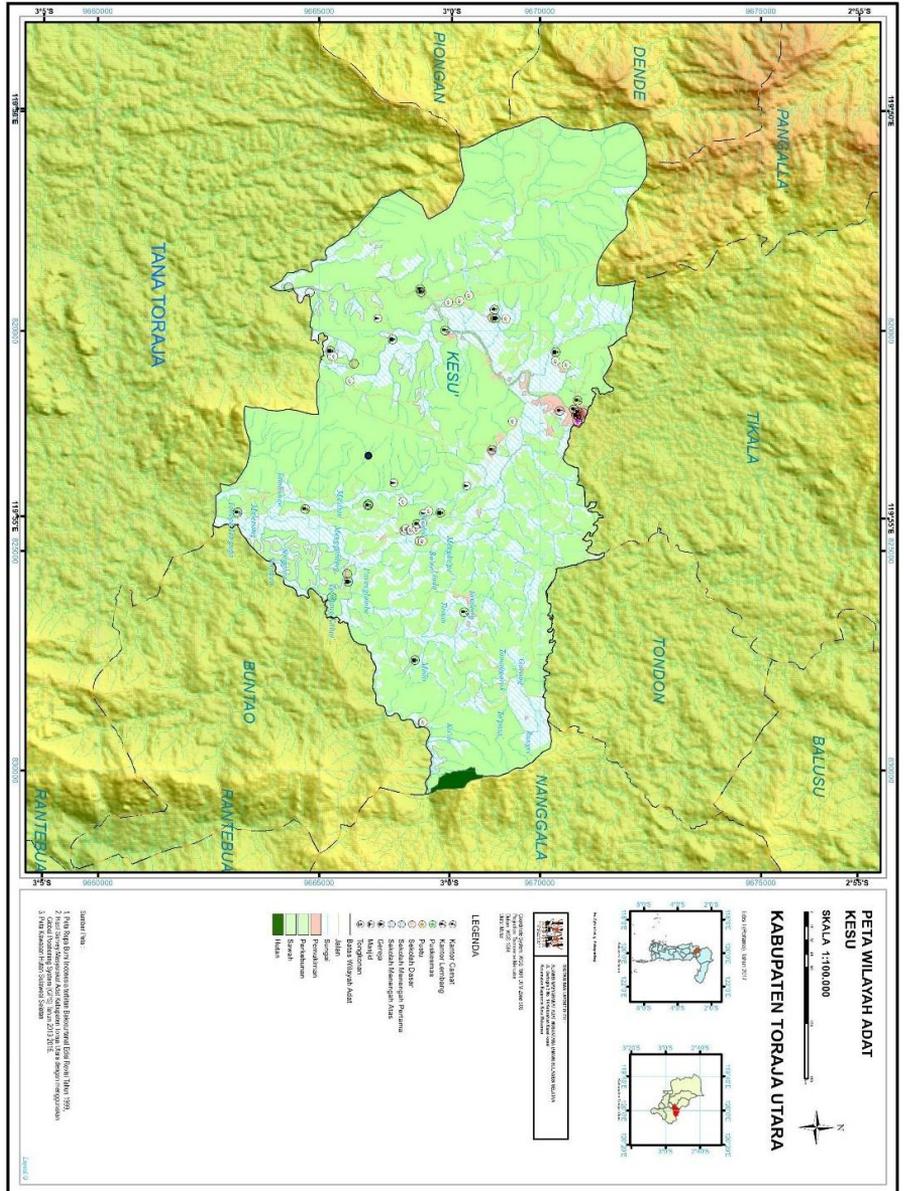
Komunitas Masyarakat Adat Kesu' merupakan bagian dari Masyarakat Adat Toraya. Wilayah Adat Kesu' sudah dipetakan secara partisipatif pada 2014 sampai 2019 dengan luas mencapai 8.722,17 hektar. Kampung Kesu' sendiri berada di daerah lembah dan bukit yang diisi oleh 8.700 kepala keluarga (KK).

Masyarakat Adat Kesu' menyebut satuan wilayah adat dengan *buah*. Secara administratif negara, Wilayah Adat Kesu' terbentang di Kecamatan Kesu', Sanggalangi', dan Sopai (Nonongan), dan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Kisah ini merupakan perpaduan dari kisah yang telah ditulis oleh Lidong Sarungallo tentang profil dari Komunitas Masyarakat Adat Kesu' dan uraian mengenai aktivitas para pemuda adat di dalam Gerakan Pulang Kampung yang diutarakan oleh Aldyo Parante.



Tongkonan, rumah tradisional budaya Masyarakat Adat Toraya, Sulawesi Selatan (sumber : sebutkanitu.blogspot.com)



Peta Wilayah Adat Keso'.



Sejarah Masyarakat Adat Kesu'

Berbicara tentang asal-usul Kesu', tidak terlepas dari cerita turun-temurun mengenai riwayat kejadian alam atau *ossoran tipamulanna lino*. Leluhur orang Kesu', yaitu Puang Ri Kesu', dipercaya sebagai dewa yang turun dari langit atau *To Manurun di Langi'*. Puang Ri Kesu' menikah dengan To Bu'tu Ri Uai, kemudian melahirkan Puang Ri Beloara'. Puang Ri Beloara' menikah dengan Tanomandasi melahirkan Puang Ambun Di Kesu'. Puang Ambun Di Kesu' menikah dengan Puang Mora, lalu melahirkan Manaek. Manaek inilah yang kemudian ke Nonongan dan menetap di sana bersama keturunannya sampai saat ini. Puang Ambun Di Kesu' juga menikah dengan Pabane' Di Kesu'. Pabane' adalah anak dari Buen Manik dan Tangdilino'. Keduanya berasal dari keturunan Puang Di Mulatau, di mana kakek dan neneknya berasal dari langit. Pabane' dan saudara-saudaranya tersebar dan *manglili' tondok* (menandai wilayah kekuasaan) di kawasan Toraja. Sebagian besar saudaranya menyebar di daerah selatan, sementara Pabane' ke utara.

Pernikahan Pabane' dan Puang Ambun Di Kesu' melahirkan Polo Padang yang menikah dengan Deatanna, seorang perempuan cantik yang berasal dari langit (*To Dao Mai Langi'*). Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak bernama Pairunan. Dalam pernikahannya, Deatanna sempat marah dan meninggalkan Polo Padang dengan membawa Pairunan kembali ke langit karena Polo Padang dianggap melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Polo Padang kemudian berpetualang untuk membawa pulang Deatanna dan Pairunan kembali ke bumi.

Pairunan kemudian menikah dengan Arrang Di Bangkudu, lalu melahirkan Pabisangan. Pabisangan menikah dengan Tibian Ri Sa'dan, lalu melahirkan Ampang Ri Sa'dan. Ampang Ri Sa'dan menikah dengan Tumba' Mangkaranga yang kemudian melahirkan Palidan. Palidan yang menikah dengan Salikunna (keturunan dari Manaek), melahirkan beberapa anak yang tersebar dan *manglili' tondok* di wilayah-wilayah utara Toraja. Dua di antaranya adalah Soge' dan Kullu yang mendiami wilayah Kesu'. Soge' ke La'bo' dan Kullu ke Tikunna Malenong.

Beberapa versi sejarah menyatakan kalau Kesu' (tepatnya Tongkonan Kesu') merupakan salah satu sumber adat (*sukaran aluk*). Dipercaya bahwa Pabane' ke Kesu' membawa dan *Aluk 7777 (Aluk Sanda Pitunna)* yang diartikan secara harafiah sebagai "aturan serba tujuh." *Aluk Sanda Pitunna* adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara berhubungan antara manusia dan Tuhan (dewa-dewa). Itu merupakan pula bekal bagi mereka yang diturunkan ke bumi. Konon, jumlah aturan tersebut tersebut adalah *pitu lise'na, pitu pulona, pitu ratu'na, pitu sa'bunna, pitu kotekna, pitu tampangna, pitu sariunna (7777777)*. Tetapi, mereka yang harus membawa *aluk* itu, tidak sanggup memikul seluruhnya turun ke bumi, maka yang dibawa hanya 7777, bahkan ada yang mengatakan hanya 777.

Penggunaan lahan kami saat ini, mencakup hutan, sawah, ladang, pemukiman, sungai, dan wilayah perairan lain yang ada di wilayah adat. Kami memiliki pembagian ruang yang khas menurut aturan adat kami.

Pembagian ruang itu terdiri dari bermacam hal, antara lain (1) *Banua Tongkonan* merupakan rumah adat milik rumpun keluarga dalam wilayah adat yang memiliki jabatan fungsi dan peran sosial tertentu; (2) *Banua Rapu* atau *Banua Sangbidang* adalah rumah milik rumpun keluarga khusus satu garis keturunan; (3) *Batua' A'riri* adalah rumah adat yang tidak memiliki fungsi sosial atau memegang satu jabatan dalam wilayah adat, tetapi tempat perserikatan satu rumpun keluarga besar dari satu garis keturunan; (4) tanah *Tongkonan* adalah tanah yang dimiliki dan dikelola secara bersama, seperti sawah dan hutan bambu, namun ada juga yang dimiliki dan dikelola secara individu melalui pewarisan, seperti sawah dan tanah kering milik orangtua, atau dari *nenek todolo* (nenek moyang) yang merupakan warisan turun-temurun; (5) *mana'* atau tanah pusaka adalah tanah milik rumpun keluarga, seperti *kombong* (hutan bambu), *rante* (tanah tempat area upacara adat *Rambu Solo*), tanah pekuburan, dan area *panglambaran* (pengembaraan ternak); (6) tanah milik pribadi adalah tanah yang diperoleh melalui warisan atau jual-beli tanah; (7) tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Kesu' secara bersama (tanah komunal); dan (8) *alang* atau lumbung padi.

Sistem Penguasaan dan pengelolaan maupun bentuk-bentuk kepemilikan tanah, diatur oleh lembaga adat. *Tongkonan* memiliki hak penguasaan terhadap tanah. Disebut *Tongkonan* jika memiliki semua komponen yang ada dalam pembagian tata ruang. Kami pun memiliki sistem pewarisan tanah kami sendiri yang khas.

Kami memiliki kelembagaan adat yang kami sebut *Kaparenggesan*. Struktur kelembagaan adat kami terdiri atas beberapa komponen. Pimpinan tertinggi dari kelembagaan adat, adalah *Pennuluan* (kepala adat di Wilayah Adat Kesu') yang dibantu oleh beberapa pemangku adat yang memiliki tingkatan atau peran masing-masing di *Tongkonan* yang memiliki fungsi sebagai *Kapeindoran (To Indo')*, *Sokkong Bayu*, dan *Parengge*. Dari sistem adat yang ada di Kesu', *Pennuluan* bersama pemangku adat lainnya diberi kekuasaan oleh *To Ma' Rapu* (rumpun keluarga) untuk mengatur dan mengurus hal-hal terkait dengan pemerintahan adat pada masing-masing wilayah kekuasaannya.

Selain *Pennuluan* yang menjadi sumber utama pemerintahan dalam mengatur dan penentu setiap keputusan adat (hakim penentu dan pendamai) dalam memelihara adat istiadat, *To Indo'* (pengatur ritus keagamaan), *Sokkong Bayu* (koordinators pemerintahan adat dan penanggung jawab di setiap upacara adat), dan *Parengge'* (pelaksana harian yang mengatur dan bertanggung jawab dalam pranata sosial dan ritual adat), ada juga *Anak Patalo* (pendamping *To Parengge'* dalam setiap kegiatan adat dan berfungsi sebagai pengayom untuk berani mengatakan benar atau tidak saat mengambil keputusan) dan *Patulak* (asisten pelaksana adat dalam setiap ritual adat).



Mangriu batu yang didominasi oleh para pemuda adat pada upacara adat *Rambu Solo'* yang diselenggarakan di *Lolok Batu* di *Keso'*.

Wilayah Adat Kesu' memiliki beragam sumber daya, salah satunya keanekaragaman hayati. Ekosistem darat kami didominasi dengan ekosistem hutan hujan tropis. Sementara itu, ekosistem air didominasi oleh ekosistem air tawar serta memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Ada pula sawah, pengairan atau bendungan, perkebunan, hutan tanaman produksi, dan lain-lain.

Bagi kami, kelestarian wilayah adat kami telah mendatangkan banyak manfaat, termasuk nilai biologi, pendidikan, estetika, budaya, ekologi, dan religius. Hampir seluruh kebutuhan utama kami, berasal dari wilayah adat, seperti pangan, sandang, obat, bahan bangunan, dan lain-lain. Banyak dari kami yang hidup dari bertani, berkebun, dan berternak. Kami memiliki banyak potensi dari beragam tanaman pangan yang mengandung karbohidrat, meliputi bermacam padi, umbi-umbian, jagung, dan sagu. Selain itu, ada pula tumbuhan yang mengandung protein, misalnya kacang-kacangan. Kami memiliki banyak jenis tanaman sayur, buah, dan obat yang dapat dibudidayakan.



Kebun sayur di wilayah adat kami.



Gerakan Pemuda Adat Pulang Kampung

Sebagai bagian dari Masyarakat Adat Kesu', kami tidak pernah benar-benar mengira bahwa awal tahun 2020, kami harus menghadapi perubahan besar. Mau tak mau keadaan itu menuntut kami untuk beradaptasi ketika pandemi datang.

Kampung kami terbentang di antara bukit dan gunung. Udaranya sejuk. Kami pun mempunyai kekayaan budaya dan keunikan tradisi yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di Wilayah Adat Kesu', sektor pariwisata menjadi hal yang menjanjikan. Melalui sektor tersebut, kami bisa mengenalkan berbagai macam kerajinan dan pilihan paket wisata bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya Toraja. Tentu, faktor yang mendasari itu adalah bahwa budaya ini harus kami jaga, bukan hanya berkenaan dengan potensi wisatanya. Lebih dari itu, semua adat budaya di Toraja merupakan identitas yang harus kami jaga.

Letak kampung kami berjarak hanya sekitar 20 menit dari pusat kota apabila ditempuh menggunakan sepeda motor. Mungkin tidak seperti komunitas Masyarakat Adat lain yang berada jauh dari pusat kota, sehingga sehari-hari kami hidup berdampingan dengan teknologi dan gaya hidup khas masyarakat kota. Tentu, akulturasi budaya juga terjadi dengan cepat.

Selain keuntungan-keuntungan, seperti kemudahan akses pendidikan, fasilitas umum, dan pelayanan publik lainnya, ada hal-hal yang menjadi tantangan bagi kami. Banyak pemuda adat kemudian memilih untuk merantau dan mengadu nasib di pusat kota. Oleh karena itu, kampung terasa sepi dari kegiatan-kegiatan pemuda adat. Akibatnya, banyak dari kalangan pemuda adat yang mulai lupa akan adat dan budayanya.

Dengan masalah itu, kami merasa harus ada terobosan dari kami sendiri sebagai pula pemuda adat untuk mengatasi kekhawatiran itu. Kami melihat jawabannya melalui Gerakan Pulang Kampung. Menurut kami, itu adalah buah dari perenungan kala Covid-19 datang. Gerakan Pulang Kampung terjadi karena ada satu fenomena yang kita sama-sama alami, yaitu pandemi.

Berbicara tentang membangun kembali negeri, bisa dikatakan bahwa memang banyak pemuda yang kemudian pulang, memberikan inspirasi dari tempat-tempat lain, seperti halnya dengan cara bercocok tanam untuk melakukan pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Namun, dari jerih juang yang pemuda tunjukkan pada saat ini, - jika kami berbicara di tempat kami, di kampung kami - itu adalah salah satu upaya yang kemudian dilakukan dalam mengantisipasi, bahkan menetralsisir arus perkembangan ekonomi yang begitu surut akibat pandemi.



Aktivitas pemuda adat berladang tanaman cabai.



Para pemuda adat berdiskusi dengan Ketua BPH AMAN Daerah Toraya Romba' Marannu Sombolinggi.

Pemuda adat pun ikut bergerak karena dalam kondisi pandemi, kita tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa tinggal saja di rumah. Tetapi, diam di rumah itu juga jadi persoalan karena memutus kegiatan ekonomi pariwisata yang sebelumnya sangat diandalkan oleh kami. Sehingga, para pemuda adat di kampung berusaha untuk memikirkan bagaimana pola perkembangan ekonomi agar tidak terlalu terpuruk. Maka, tercetuslah terobosan tentang pengembangan perkebunan. Upaya itu menjadi bagian dari Gerakan Pulang Kampung yang digagas oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Dan momentum itu menjadi tepat sebab, ketika pandemi datang, ada banyak pemuda adat - lelaki maupun perempuan - yang memutuskan pulang. Dan di saat itulah, kami menguatkan pengorganisasian di kalangan pemuda adat untuk berkebun.

“Awalnya, kita diberi tugas untuk mencari lokasi di mana kita bisa berkebun, kemudian kita diberi dukungan untuk mengelola kebun tersebut,” ungkap Randika Pakambi’, seorang pemuda adat menceritakan bagaimana mulanya para pemuda adat bergerak. Kawan-kawan pemuda adat yang tergabung dalam BPAN, juga bekerja sama dengan organisasi Pemuda Gereja Toraja dan organisasi mahasiswa.

Randi menjelaskan bahwa setelah kebun dibuka, para pemuda adat juga membangun pondok. Tanaman yang pertama-tama dikembangkan adalah bermacam sayur yang bisa dipanen dalam jangka waktu pendek, seperti kangkung, sawi, kol, dan lainnya. Sementara itu, cabai juga ikut ditanam dan kini telah panen sebanyak dua kali. Kami terus melakukan eksplorasi untuk menemu-kenali ragam tanaman yang cocok dengan karakter lahan dan tata kelola yang bisa kami bangun.

Namun, Gerakan Pulang Kampung dengan upaya untuk mendorong para pemuda adat ke ladang atau kebun, punya berbagai tantangan. Pada awalnya, para pemuda adat begitu antusias, tapi ada kalanya semangat itu juga perlu dirawat. Sebab, ada kalanya kami menghadapi berbagai kendala, di mana kawan-kawan yang bertahan mengembangkan perkebunan hanya lima orang. Meski begitu, kini kami sedang merencanakan penanaman kembali untuk cabai sambil memperbaiki dan menggemburkan lahan kembali karena ada sebagian yang terkena longsor.

“Para pemuda adat sudah gengsi berkebun,” kata Romba’ Marannu Sombolinggi, Ketua BPH AMAN Daerah Toraya dalam menyinggung tantangan yang dihadapi pemuda adat untuk berkebun. Ia juga bilang kalau selama ini, aktivitas berkebun telah ditinggalkan karena ada banyak pemuda adat yang sibuk sekolah dan kerja di perusahaan. Ada stereotipe yang dibangun oleh orang-orang perkotaan terhadap “orang kampung” sebagai petani.

Selain itu, menurut beliau, ada tantangan-tantangan lain, termasuk keterampilan, ketekunan, dan dukungan yang perlu terus ditumbuhkan. Di tempat kami, ada banyak pemuda adat yang sejak dini merantau ke luar kampung untuk sekolah, sehingga memiliki jarak dengan kampung. Banyak dari kami telah kehilangan kemampuan untuk berkebun, sehingga kami perlu belajar lagi.

Meski menghadapi situasi yang menantang, kami masih tetap bertahan untuk bisa terus mengembangkan kebun-kebun di kampung maupun wilayah adat kami.

“Saya salut (karena) Gerakan Pulang Kampung bisa mengajak pemuda adat untuk kembali mengolah tanah dan mau bertani, padahal itu sudah hampir ditinggalkan,” ungkap Ketua BPH AMAN Daerah Toraya.



15

Kisah dari Kasepuhan Ciptamulya: Tangguh dengan Bertani

Oleh Odih Kustiandi bersama Zulyani Evi

“Kalau semua gagal, maka pertanian adalah kuncinya”. Nasihat yang saya dapatkan dari salah seorang Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), mengembalikan keyakinan saya untuk pulang, kembali ke kampung untuk menggarap sawah dan kebun. Kini, tak ada satu hari pun saya lewatkan dengan tidak pergi ke kebun.

Bertani merupakan mata pencaharian utama Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptamulya. Cara mengelola lahan, mulai dari persiapan awal (*beberes*) hingga pesta panen (*Serentaun*), tercantum jelas dalam hukum adat yang masih dilakukan hingga saat ini.

Kasepuhan Ciptamulya secara administratif terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Orang Kasepuhan atau *kaolotan* adalah orang-orang yang masih menganut aturan adat, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tata cara pengelolaan lahan. Kepercayaan asal kami, yaitu Islam Pangandika Gusti Rasul.

Mata pencaharian Masyarakat Adat adalah bertani (sawah dan huma) serta memanfaatkan hasil hutan. Berbeda dengan praktik pertanian pada umumnya, orang Kasepuhan hanya bertani sebanyak satu kali dalam setahun. Di balik itu, kami percaya bertani satu kali dalam setahun dapat menjaga zat hara yang terkandung dalam tanah agar tidak habis, sehingga tanah akan tetap subur.

Pada masa istirahat setelah panen padi, kami biasanya akan melakukan pekerjaan sampingan, yakni menanam tanaman jangka pendek, seperti tomat, jagung, cabai, dan sayuran lainnya. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kami juga menjualnya ke pasar-pasar terdekat.

Guru pertanian saya adalah sosok yang konsisten menggeluti pertanian selama 13 tahun terakhir. Ia adalah Kang Epul. Tanpa hadirnya sosok mentor seperti Epul, - akrab saya panggil Kang Epul - barang tentu sulit bagi anak muda untuk terjun ke dalam pertanian.

“Sudah sekitar tiga orang anak muda yang menjadi anak didik saya, yang awalnya pengangguran sampai sekarang menggeluti pertanian. Sudah banyak anak muda lainnya yang juga bergabung dan dididik oleh teman saya,” kata Kang Epul.

Dia menerapkan aturan adat dalam setiap proses bertaninya, mulai dari menanam hingga memanen. Pertama-tama ia akan mencari hari, tanggal, dan jam yang bagus ketika hendak menanam. Ritual lain seperti syukuran juga akan dilakukan sebelum menanam dan sebelum masa panen (*mipit*).



Serentaun

Padi dipanen ketika sudah menguning. Namun tidak sembarangan, dalam budaya Kasepuhan, ada tata cara yang harus dilakukan sebelum padi dipanen. Pertama adalah ritual kepada nenek moyang, meminta agar hasil panen melimpah dan bermanfaat. Ritual ini dilakukan masing-masing keluarga di kediamannya, bisa di rumah atau di saung sawah (*huma*). Setelah ritual selesai dan hari baik sudah ditentukan, barulah padi bisa dipanen.

Padi yang sudah dipanen, tidak langsung dibawa ke rumah, melainkan dijemur terlebih dahulu di *lantayan* selama 30 hari. Setelah padi kering, baru padi dipikul atau *ngunyal* dengan bergotong royong. Saling membantu adalah tradisi warga Kasepuhan yang masih dijaga dan dipertahankan sampai sekarang.

Sebelum dimasukkan ke lumbung (*leuit*), ada ritual khusus yang disebut *Nganyaran*. *Nganyaran* dilakukan dengan membagi-bagikan nasi yang baru dipanen kepada tetangga dan orang sekampung. Orang lain juga melakukan hal demikian, sama-sama saling memberi. Hal ini dilakukan agar rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Setelah ritual *Nganyaran* selesai dilakukan, barulah padi yang sudah dirapikan di masukan ke dalam *leuit*.



Leuit Si Jimat.

Bukan Kasepuhan namanya kalau tidak ada upacara adat *Serentaun*. Upacara adat *Serentaun* merupakan upacara adat terbesar yang dilakukan satu tahun sekali setelah masa panen.

Serentaun bisa disebut juga *ampih pare ka leuit*. Hasil panen Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptamulya sebagian dikumpulkan di lumbung besar yang diberi nama Leuit Si Jimat. Lumbung ini digunakan untuk membantu Masyarakat Adat yang kurang mampu, apabila mereka kekurangan pangan dapat meminjam dari Leuit Si Jimat.

Leuit Si Jimat paling besar yang berada di dekat *Imah Gede* (rumah ketua adat) dalam acara *Serentaun*, bertuliskan "*Nyoreang alam katukang nyawang alam anu bakal datang.*" Artinya, mengevaluasi yang telah berlalu dan menyambut masa yang akan datang. *Serentaun* dilakukan selama tiga hari tiga malam dengan berbagai hiburan, seperti permainan angklung, *rengkong*, *jipeng*, topeng, wayang golek tari, debus, *laes*, dan lain-lain.



Imah Gede.



Menggarap Tanah Sengketa

Lahan yang kami kerjakan dibagi menjadi tiga, yakni hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan garapan. Hutan titipan merupakan daerah yang tidak boleh dimasuki atau hutan larangan. Sedangkan hutan tutupan, adalah hutan yang boleh digarap dengan seizin pemangku adat.

Wilayah ini biasanya dimanfaatkan untuk keperluan membangun rumah. Lalu, ada hutan garapan atau hutan yang menjadi mata pencaharian sehari-hari Masyarakat Adat, berupa persawahan, ladang, dan kebun.

Tanah yang kami gunakan adalah wilayah adat. Namun, wilayah adat ini diklaim oleh pemerintah melalui penetapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada 2004. Ketika itu keluar, Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Pengalihan Fungsi dari Perum Perhutani menjadi milik TNGHS.

Sejak wilayah adat diklaim oleh TNGHS, warga Kasepuhan mulai terusik. Tidak hanya lahan yang berupa hutan yang terganggu, tetapi juga seluruh lahan yang berupa persawahan dan pemukiman Masyarakat Adat. Pemerintah membagi lahan menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi. Patok larangan dipasang oleh pihak TNGHS yang bertuliskan sederetan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran.

“Meskipun tanah tersebut masih dalam sengketa, tapi jarang terjadi konflik. Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptamulya bebas menggarap lahan dengan syarat tidak boleh membuka hutan,” tutur Kang Epul.



Peran Perempuan Adat dan Pemuda Adat

Di Kasepuhan Ciptamulya, tak hanya pada tetua adat yang berperan. Pemuda adat dan perempuan adat pun turut ambil bagian. Mereka berperan aktif, baik dalam pelestarian adat maupun aktivitas pertanian. Apalagi, di tengah krisis pandemi Covid-19 saat ini, tidak ada yang lebih bisa bertahan (resilien) dibanding dengan aktivitas bertani.

Saya sendiri demikian termotivasi untuk membentuk kelompok tani bersama beberapa pemuda adat di kampung, salah satunya adalah Liga. Liga adalah pemuda adat yang tegar, tak mudah menyerah.

Jalan yang sempit, sulit, berlumpur, dan juga berbahaya karena berada di sisi tebing, adalah satu-satunya akses jalan yang harus dilalui. Liga yang merangkap menjadi ojek gunung tidak gentar melalui rute sulit dan berbahaya itu. Sudah 10 tahun, Liga menghidupi keluarganya dari pekerjaan sebagai ojek gunung, mengantar alat atau kebutuhan kebun.



Liga di atas sepeda motornya.

Namun, kini menjadi ojek gunung hanyalah pekerjaan sampingan saja. Saat ini, Liga fokus bertani. Cabai adalah tanaman yang saat ini dirawatnya. Bagi Liga, pertanian bukan hanya menjadi pekerjaan orang-orang tua saja, tetapi juga anak-anak muda.

Liga mengatakan, “Awalnya anak muda di Kasepuhan Ciptamulya tidak peduli dengan pertanian. Kebanyakan anak muda hanya peduli dengan *gadget*-nya, tapi sekarang mereka mulai mengurangi ketergantungan terhadap *gadget* dan mulai terlibat dalam pertanian. Dari tahun ke tahun, jumlah anak muda yang terlibat dalam pertanian semakin bertambah.”

Bertani, bukan berarti lepas dari tantangan. Berbagai hal seperti kurangnya perhatian pemerintah, naik-turun harga, minimnya modal, dan mahalnya harga pupuk, menjadi kendala yang mesti ditelan. Meski begitu, harapan Liga agar lebih banyak lagi anak muda yang terlibat dalam pertanian, tidak pernah meredup.

“Dulu anak muda berpikir bahwa bertani hanya sebatas memegang cangkul. Sekarang ini, ketika orangtua mereka pergi ke kebun atau ladang, maka mereka akan membantu orangtuanya dan bekerja bersama. Melihat itu, saya merasa sangat senang,” ujar Liga.

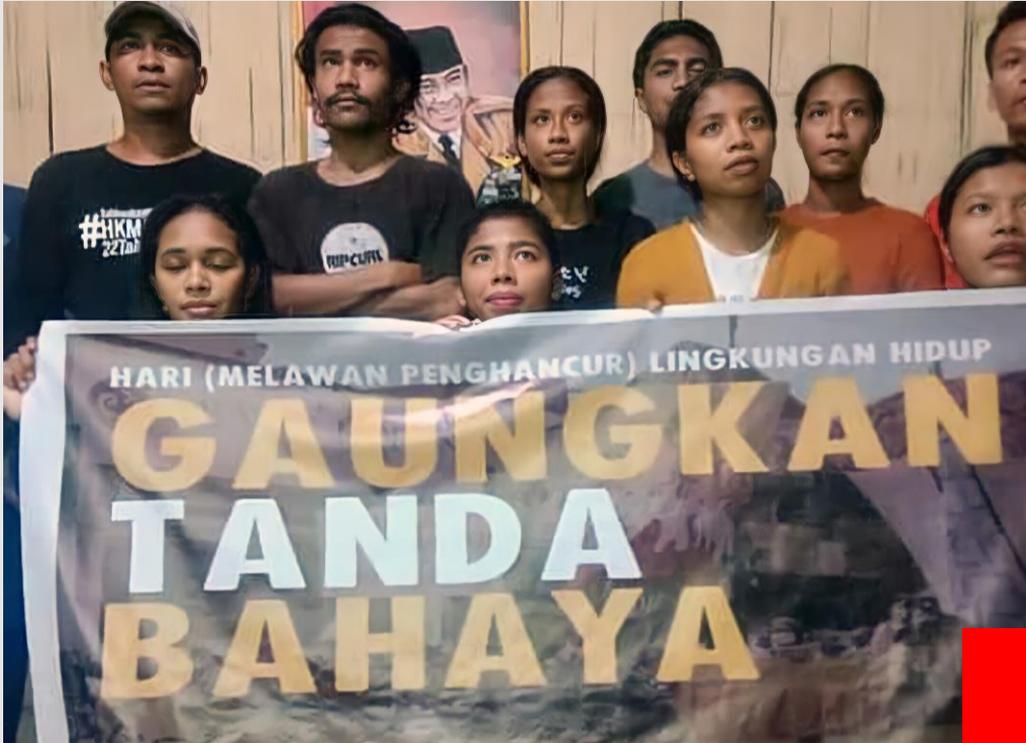
Bertani bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Para perempuan adat di komunitas adat kami juga berperan penting dalam pertanian. Teh Nengsih salah satunya. (“Teh” adalah sapaan kami untuk kakak perempuan.) Ia berbagi peran dengan suaminya dalam merawat kebun yang mereka garap.

“Dalam bidang pertanian, saya dan suami mempunyai tugas masing-masing, tugas suami menyiapkan lahan dan melakukan penyemprotan, tugas saya membersihkan rumput liar. Suami saya fokus di tanaman cabai dan saya fokus di tanaman sayuran,” tutur Teh Nengsih.



Ningsih (sebelah kanan) tengah berkebun cabai bersama suami.

Bukan hanya dalam proses bertani, dalam setiap ritual yang dilakukan, juga tidak lepas dari peran perempuan adat. Teh Ningsih terlibat aktif dalam berbagai ritual, seperti *Serentaun*, *Pongokan*, dan *Ngayaran*.



16

Kisah dari Kampung Koker: Pemuda Adat Pulang Kampung

Oleh Adrianus Lawe bersama Nurdiyansah Dalidjo

Saya Adrianus Lawe, seorang pemuda adat dari Kampung Koker di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya saat ini menjadi Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Flores Bagian Timur.

Saya akan berkisah tentang kampung saya, tentang aktivitas kawan-kawan pemuda adat di tempat tinggal saya. Saya juga akan bercerita tentang awal mula Gerakan Pulang Kampung yang kami lakukan tahun 2017-2018.

Kabupaten Sikka, di mana Kampung Koker berada, secara geografis terletak di antara 8°22'-8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40"-122°41'30" Bujur Timur. Daratan kabupaten ini merupakan daerah pantai dan perbukitan dengan luas 1.713,91 km². Di sebelah utara, Sikka berhadapan dengan Laut Flores dan di sebelah selatan, berhadapan dengan Laut Sawu. Sikka diapit oleh Kabupaten Flores Timur di sisi timur dan Kabupaten Ende di sisi barat.

Masyarakat Adat Sikka memiliki tiga suku bangsa yaitu Ata Lio, Ata Krowe, dan Ata Tana Ai. Dalam bahasa setempat, "*ata*" berarti orang. Yang membedakan Ata Krowe, Ata Lio, dan Tana Ai (Muhang) yaitu penguasaan wilayah, bahasa, dan cara pandang terhadap sistem perkawinan.

Dari sisi penguasaan wilayah, Ata Lio menguasai dan mendiami wilayah barat Sikka, Ata Krowe menguasai dan mendiami wilayah tengah Sikka, dan Ata Tana Ai mendiami wilayah timur Sikka. Dari bahasa yang digunakan sehari-hari, Ata Lio menggunakan Bahasa Lio, Ata Krowe menggunakan Bahasa Krowe, dan Ata Tana Ai menggunakan Bahasa Muhang.

Ata Krowe dan Ata Lio menganut sistem patrilineal, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, hak sosial, dan penguasaan warisan. Menurut hukum adat Ata Krowe, ketika seorang perempuan dari suku lain menjadi istri lelaki Ata Krowe, maka ia wajib meninggalkan orangtuanya dan tinggal bersama suaminya. Laki-laki memiliki kekuasaan lebih dibandingkan kaum perempuan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian warisan.

Sedangkan di Ata Tana Ai, menganut pola budaya matrilineal dalam perkawinan. Posisi perempuan adat Ata Tana Ai menjadi lebih penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat maupun pembagian warisan.

Kehidupan Masyarakat Adat Lio, seperti Komunitas Masyarakat Adat Mbengu; Masyarakat Adat Krowe, seperti Komunitas Masyarakat Adat Koker dan Ruha Nukak; serta Masyarakat Adat Tana Ai, seperti Komunitas Masyarakat Adat Natargahar, Runut, dan Tana Tukan Eko, begitu dinamis dan berupaya mengikuti perkembangan situasi dalam menentukan dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum adatnya. Kami terus berjuang memperkuat kemandirian dan kedaulatan wilayah adat kami demi memperoleh pengakuan, penghormatan, dan perlindungan dari negara.



Wilayah Adat Koker

Sementara kampung saya, yang didiami Komunitas Masyarakat Adat Koker masuk ke dalam wilayah administrasi Dusun Koker, Desa Pogon, Kecamatan Waigete di Kabupaten Sikka, NTT. Satuan wilayah adat kami disebut sebagai Natar Koker. Kondisi wilayahnya lengkap, lengkap. Mulai dari wilayah yang bergunung, perbukitan, bentang dataran rendah, hingga bentang pesisir.

Beberapa waktu lalu, kami melakukan pendataan untuk menghasilkan data yang komprehensif, AMAN bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan pendataan untuk menghasilkan data yang komprehensif tentang Masyarakat Adat di Indonesia. Dengan pengalaman itu tidak sulit bagi saya bercerita tentang Komunitas Masyarakat Adat Koker. Saya tinggal mengacu pada pendataan yang sudah kami lakukan.

Di sisi utara, wilayah adat kami berbatasan dengan Ne Blo, Gak Herat, Wai Ti (Pantai Wairita) dan Laut Flores; di sisi selatan dengan Watusoking (batu) dan wilayah adat Romanduru; di sisi timur dengan Napun Huler (sungai), Halar Watat, Tilu Robong, Tara Gahar, Tara Buluk, Urun Bega (kawasan pegunungan dan hutan lindung), dan wilayah adat Lua; dan sisi barat berbatasan dengan Koli Wutut, Roka Mahet (batu artefak peninggalan Moan Roka), Pantai Desa Wairbleler, dan wilayah adat Sogelaka. Luas wilayah adat kami sekitar seribu hektar atau kurang lebih 50 km².

Di kampung, terdapat kurang lebih 400 kepala keluarga dengan populasi sekitar 1.500 jiwa. Mata pencaharian utama kami umumnya adalah petani.



Toba dan Roka

Menelusuri sejarah asal-usul kami tidak begitu sulit. Sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh kawan Paulus Ronal pada Formulir Pendataan Komunitas Adat, inilah sejarah asal-usul kampung kami.

Dahulu kala, ada dua orang berpasangan, Ipir Wodon dan Tou Teren. Mereka memiliki dua orang anak Lo'eT Bawak, laki-laki, dan Koi Meni, perempuan. Sewaktu muda, Lo'et Bawak pergi berburu dan baru kembali pulang setelah usia dewasa. Saat kepulangannya itu, ia tidak lagi mengenali saudari perempuannya, Koi Meni. Dan mereka pun saling menyukai satu sama lain, dan akhirnya mereka menjadi suami-istri. Setelah sekian lama hidup berkeluarga, pada akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung.

Ketika kebenaran itu terungkap, terjadilah bencana besar di Wolo Wodon. Menurut kepercayaan, bencana terjadi karena kejadian *pire* (haram) akibat dari hubungan *bahut*, yaitu hubungan yang terlarang bagi kami, yaitu hubungan suami istri di antara saudara kandung. Akibat bencana tersebut, anak mereka, Toba dan Roka, memutuskan untuk melarikan diri. Mereka pindah ke arah barat Maumere yang meliputi area dari Napun Huler sampai Koli Wutut yang merupakan batas timur dan batas barat Masyarakat Adat Koker.

Mereka tak selamanya mendiami tempat itu. Mereka berpindah-pindah, membuka lahan garapan dari Halar Watat, Tilu Robong, Tara Gahar, Tara Buluk, Urun Bega, dan selanjutnya mereka memutuskan berpindah lagi ke Rotat. Di tempat baru tersebut, mereka memberi tanda dengan menancapkan *o'le*. Tempat itu sekarang diberi nama Rotan Olet. Kedua bersaudara tersebut lantas menggarap dan membuka lahan sampai ke arah selatan, di Watusoking.

Suatu ketika, keduanya sepakat untuk berbagi tugas dalam wilayah tersebut. Roka sebagai anak sulung mengatakan pada Toba: “*Au reta ilit wali mam, ma bapa ha plamang ha*” yang artinya Toba disuruh menuju ke selatan menyusuri wilayah bagian lereng gunung. Sedangkan apa yang ditunjukkan pada Roka: “*Au lau urut wawa mam, pere ha pleder ha*” yang artinya engkau ke arah barat sampai utara menyusuri pesisir.

Wilayah tugas Roka kemudian diadopsi oleh Suku Wodon. Mereka dikenal dengan istilah *ruha taran*, maksudnya sebagai yang tertua. Mereka kemudian lebih dikenal dengan sebutan *tana pu'an* (penguasa wilayah adat) yang keturunannya kemudian menjadi sub-Suku Wodon Gebin. Sementara Toba, dikenal dengan istilah *ai kaet* yang kemudian menjadi sub-Suku Wodon Waihi. Setelah pembagian tugas itu, mereka tinggal menetap dan beranak cucu di wilayah garapan mereka, mulai dari Napun Huler sampai Watusoking. Seluruh tempat garapan itulah yang kelak diberi nama “Koker.”

Memahami seluruh aktivitas yang dilakukan, mulai dari membuka lahan dan bercocok tanam, sampai sambil terus berkembang dengan beranak cucu, mereka mulai menyadari dan meyakini akan adanya hal lain. Mereka mulai yakin bahwa di atas semua hal yang telah mereka lakukan melalui segala aktivitas mereka, ada sesuatu yang lebih berkuasa yang mendukung dan menopang kehidupan mereka. Yang lebih berkuasa yaitu *Ina Nian Tana Wawa* (tanah atau daratan yang mereka tempati) dan *Ama Lero Wulan Reta* (langit yang memberi panas dan hujan untuk keberlangsungan hidup mereka).

Dari keyakinan itu, akhirnya mereka menciptakan ritual untuk menyembah dan mensyukuri apa yang mereka peroleh. Ritual itu mereka sebut dengan *Piong Tewok*. Ritual itu dilakukan dengan menyiapkan sesajen dengan menyediakan pangan hasil pertanian (*pare lele*), binatang untuk disembelih. Semua sesajian tersebut ditaruh di atas *watu mahang*. Ritual tersebut masih kami terapkan sebagai salah satu ritual kami hingga saat ini.



Proses ritual adat.



Capaian di Tengah Ketidakadilan

Ketidakadilan yang dialami Masyarakat Adat Sikka, khususnya Krowe dan Tana Ai, telah berdampak langsung terhadap pemuda adat. Pemuda adat saat ini menghadapi berbagai persoalan serius.

Mereka mengalami keterpurukan ekonomi akibat pembangunan yang tidak adil sebagai dampak negatif dari globalisasi, diskriminasi akses, dan tidak dipenuhinya hak-hak dasar pemuda adat atas pendidikan dan kesehatan secara mudah dan gratis, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA). Akibatnya, banyak pemuda adat menjadi buruh di tanah sendiri dan menjadi miskin di tengah kekayaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Lebih parah lagi, mereka dianggap penjahat dan dikriminalisasi ketika memperjuangkan dan mempertahankan wilayah adat. Pemuda adat menjadi marjinal akibat agresi pembangunan yang tiada henti.

Hal-hal itulah yang dialami pemuda adat Koker. Dengan posisi mereka yang ideal di dalam suku atau komunitas Masyarakat Adat, seharusnya hak-hak dasar laki-laki dan perempuan Krowe ini setara. Hak-hak yang dimaksud antara lain, hak untuk mendapatkan pendidikan formal, pekerjaan yang layak, upah yang layak, dan pelayanan kesehatan gratis.

Namun, semua hak yang berkaitan dengan hak-hak itu berbanding terbalik dengan realita yang mereka hadapi. Mereka, pemuda adat dari dua sub-etnis dan dari dua komunitas Masyarakat Adat yang ada, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka yang dijumpai adalah potret buram.

Dengan usia yang ideal untuk mengenyam pendidikan, para pemuda adat, baik lelaki maupun perempuan, justru terpaksa dirumahkan atau tidak melanjutkan sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Jarak menuju lokasi sekolah juga relatif jauh. Selain itu, pemuda adat yang masuk dalam kategori remaja atau belum berkeluarga juga cenderung tidak diberikan ruang dalam pengambilan keputusan, baik dalam musyawarah adat maupun musyawarah di tingkat dusun ataupun desa.

Saya mencoba melakukan musyawarah dengan kelompok pemuda adat. Kami mulai memetakan masalah utama yang muncul dalam kehidupan pemuda adat di Koker. Kami menemukan sejumlah fakta, bahwa:

- a. Pemuda adat tidak bisa melanjutkan studinya karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga tidak bisa mengakses pendidikan. Banyak pemuda adat, setelah tamat SMP atau SMA, tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Pemuda adat yang telah bersekolah di kota, enggan untuk pulang kampung, sehingga banyak kebun di kampung tidak terurus.
- c. Pemuda adat, perempuan, dan lelaki tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan, termasuk musyawarah.
- d. Para pemuda adat sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki akses. Ada pandangan bahwa mereka yang sudah selesai menempuh pendidikan sulit mendapatkan pekerjaan di kampung. Sementara, bagi Masyarakat Adat, lapangan pekerjaan di kampung sebenarnya ada, yaitu berkebun. Cara pandang itu berkaitan dengan belum adanya kesadaran, bahwa mengurus kampung adalah bagian dari pekerjaan atau sumber penghidupan.

Sejak tahun 2017-2018, kami para pemuda adat telah banyak melakukan kegiatan dan memperoleh capaian, antara lain:

- a. Menginisiasi pendirian organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Flores Bagian Timur.
- b. Melakukan perekrutan anggota di setiap komunitas Masyarakat Adat.
- c. Melaksanakan pertemuan daerah di Kampung Natargahar.
- d. Melaksanakan program pendokumentasian wilayah adat, terdiri dari penulisan 11 profil komunitas Masyarakat Adat.

- e. Mengadvokasi tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) Nanghale Patiahu.
- f. Menginisiasi pembentukan organisasi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), yaitu Pengurus Harian Daerah (PHD) Flores Bagian Barat dan Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Natarmage.
- g. Menjalankan dan membantu Komunitas Masyarakat Adat Natargahar dan Natarmage dalam pengajuan Program Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat.
- h. Melakukan pemasangan plang di wilayah-wilayah komunitas Masyarakat Adat.

Plangisasi Wilayah Adat



Saya bersama pemuda-pemuda adat berniat mewujudkan apa yang telah kami lakukan terkait wilayah adat kami. Kami telah memetakan wilayah adat kami sehingga kami berpikir, penting untuk menandai wilayah adat-wilayah adat tersebut. Maka, saya dan pemuda-pemuda adat yang tergabung di dalam BPAN, melakukan plangisasi sekaligus pendataan komunitas Masyarakat Adat. Hal itu merupakan bagian penting dari upaya pendokumentasian wilayah adat yang turut diinisiasi oleh BPAN secara nasional.

Pendataan itu kami lakukan melalui proses pengumpulan dan penulisan data antara lain profil komunitas Masyarakat Adat. Hasil profil itulah yang menjadi bahan penting dalam upaya saya membuat tulisan ini. Selain pendataan, kami melakukan plangisasi, yaitu pemasangan plang-plang papan nama komunitas Masyarakat Adat sebagai anggota AMAN. Kami melakukannya di 11 wilayah komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di Kabupaten Sikka.

Bersamaan dengan pemasangan plang, kami juga menyertakan bendera AMAN, BPAN, dan PEREMPUAN AMAN di komunitas-komunitas Masyarakat Adat tersebut. Papan nama dan bendera itu menjadi bagian dari upaya kami memperkuat identitas kami sebagai Masyarakat Adat.

Dulu, para orangtua kami menyebutkan keberadaan berbagai komunitas Masyarakat Adat maupun batas-batas wilayah adatnya secara lisan. Dengan cara itu, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui persisnya letak dan cakupan wilayah dan masyarakat suatu komunitas Masyarakat Adat. Namun, hari ini, saat ini, semua orang sudah bisa mengetahui dengan jelas tentang nama komunitas Masyarakat Adat dan alamatnya. Kami sudah dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis dan wilayah administratif wilayah adat suatu komunitas Masyarakat Adat, beserta batas-batasnya. Semua itu kami lakukan melalui gerakan plangisasi yang kami buat. Bersama BPAN, kami telah mendokumentasikan wilayah adat lewat penulisan profil komunitas Masyarakat Adat di Flores Bagian Timur, khususnya Sikka, di mana kini terdapat 11 komunitas Masyarakat Adat yang sudah kami data.

Plang-plang tersebut saat ini telah kami pasang. Plang-plang itu kami pasang begitu kami selesai melakukan pendataan profil komunitas Masyarakat Adat. Bentuknya sederhana berupa spanduk dengan ukuran dua kali satu meter. Dalam pemasangannya, terkadang kami melibatkan warga sekitar yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Biasanya, kami memasang plang di depan rumah adat atau rumah pemimpin wilayah adat atau kepala suku. Setelah plang-plang dipasang, kami merasakan bahwa Masyarakat Adat mulai percaya diri. Ada banyak orang datang bertanya tentang keberadaan Masyarakat Adat. Mereka ikut memberikan dukungan dan lain-lain. Sekarang, setelah plang-plang terpasang di tempatnya masing-masing, sejauh ini tidak ada konflik antara pemerintah atau perusahaan dengan Masyarakat Adat.

Pendataan profil dan plangisasi komunitas Masyarakat Adat itu sebetulnya bertujuan untuk memperkuat identitas kami sebagai Masyarakat Adat yang sudah ada secara turun-temurun. Kedua hal itu dibuat karena ada sebagian orang yang menganggap kalau bicara mengenai Masyarakat Adat berarti berbicara tentang sesuatu yang usang dan dianggap tua. Maka, dengan menghadirkan keberadaan kami sebagai Masyarakat Adat, profil, dan wilayah adat kami melalui tulisan dalam plang tersebut, kami berharap stigma buruk terhadap kami bisa hilang. Mereka yang awalnya berprasangka terhadap Masyarakat Adat dapat menghormati budaya kami. Dan bagi kami, para pemuda adat, semoga juga mencintai budaya kami.

Gerakan Pulang Kampung



Pada mulanya saya dan teman-teman sesama pemuda seringkali pergi-pulang ke kota dan ke kampung untuk urusan pendidikan dan urusan pekerjaan. Namun kini kami telah memutuskan untuk pulang kampung. Sejak tahun 2017-2018 kami memperkenalkan Gerakan Pulang Kampung. Kami tidak lagi pergi-pulang. Justru kami yang berada di luar kampung akan kembali pulang. Gerakan itu mendapatkan rohnya ketika saya bersama teman-teman terlibat dan menjadi bagian dari Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Daerah Flores Bagian Timur.

Di kampung, melalui BPAN, kami ikut menggerakkan pemuda-pemuda adat untuk kembali ke kampung untuk menjaga dan mengelola wilayah adat. Pemuda yang pulang kampung ini adalah anak-anak adat yang sempat mengenyam pendidikan di kota.

Ada di antara kami yang malas kembali ke kampung. Setelah bergabung dengan AMAN, kami terpanggil mendirikan BPAN dan mulai melakukan konsolidasi ke teman-teman lain yang sudah selesai menempuh pendidikan untuk bergabung pulang ke kampung dan mengurus kampung. Kami sebagai pemuda adat mulai bercocok tanam atau berkebun dan terlibat dalam advokasi hak Masyarakat Adat. Khususnya di Kampung Natargahar, kawan-kawan pemuda terlibat dalam mengelola ternak babi dan kebun sayur. Kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi kemahasiswaan dalam mendengarkan Indonesia darurat iklim.

Mewakili pemuda adat Koker, Januarius mengungkapkan, tantangan pemuda adat hari ini adalah ketika teman-teman yang sudah selesai kuliah, itu enggan ke kampung untuk urus kebun dan kekayaan di kampung. Saat ini, BPAN sedang terus mendorong teman-teman pulang ke kampung lewat berbagai kegiatan atau cara, seperti seminar, diskusi, penyebaran pamflet, dan spanduk yang mencoba menginspirasi pemuda adat untuk mau kembali ke kampung. Hal itu merupakan upaya kami dalam memberikan pendidikan adat kepada generasi sekarang. Selain itu, kami juga sedang berproses untuk membangun sekolah adat di Koker.



Potret pemuda adat dari Kampung Koker.

Selama kurang lebih dua tahun, kami menginisiasi pendirian BPAN bersama dengan pengurus AMAN. Gerakan Pulang Kampung menjadi slogan bersama yang digaungkan di kampung dan seluruh pengurus. Pada tahun 2018, kami, para pemuda adat melakukan pertemuan dan mendapat Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Nasional BPAN dan Pengurus Besar (PB) AMAN. Kami kemudian Pertemuan Daerah AMAN dan terciptalah kepengurusan BPAN yang dipilih secara musyawarah mufakat.

Karena sudah mendapatkan legitimasi dari Pengurus Nasional BPAN, kami mulai mengadakan kerja-kerja organisasi. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah advokasi persoalan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berkapasitas 40 megawatt (MW) dan tanah ulayat Patiahu-Nanghale yang berada di wilayah Masyarakat Adat Koker dan Natarmage.

Tahun 2020 lalu, kami juga membantu komunitas Masyarakat Adat Natarmage dan Natargahar untuk mengakses Program Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat. Kedua komunitas Masyarakat Adat itu pun bisa mendapatkan bantuan bibit, seperti sorgum, kacang hijau, jagung, dan beberapa fasilitas lain untuk mendukung kerja-kerja komunitas dalam meningkatkan ekonomi dan hasil pangan lokal. Januarius Dunia mengungkapkan kalau dia bersama dengan teman-teman BPAN, telah memiliki kebun cokelat, sayur, padi, dan jagung. "Kami mengelola kebun ini secara kolektif dan juga terlibat dalam Tim Gugus Tugas #AMANKanCovid19 di level kampung hingga kabupaten," katanya..



Pemuda dan Pandemi

Selain mendukung kegiatan-kegiatan terkait kedaulatan pangan dan ekonomi, secara bersamaan para pemuda di kampung juga terlibat aktif dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan dampak-dampak lain dari situasi pandemi.



Pemberian bantuan di masa pandemi.

Lusia Eritha, seorang perempuan adat dari Komunitas Masyarakat Adat Natargahar yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan desa, menjelaskan bahwa dirinya bersama teman-teman pemuda adat lainnya telah terlibat aktif dalam penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah adat lewat sosialisasi, pembagian masker dan *hand sanitizer* kepada warga adat. Mereka juga menginisiasi penutupan atau *lockdown* wilayah adat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran dan meningkatnya Covid-19 di wilayah adat. Lusia pun berkisah tentang suka dukanya dalam upaya penanganan Covid-19. Ia sempat terpapar virus tersebut dan mendapatkan perawatan dan menjalani karantina mandiri selama 20 hari.

“Upaya yang harus dilakukan seluruh pemuda adat saat ini adalah memberikan edukasi kepada para orang-orang tua dan saudara-saudari yang ada di kampung tentang bahaya Covid-19,” ungkapnya.

Selain mematuhi protokol kesehatan (prokes), kami pun berusaha membatasi aktivitas pelaku perjalanan untuk orang masuk dan keluar kampung. Kami menghimbau agar warga mengonsumsi makanan bergizi dan buah-buahan untuk meningkatkan imunitas. Dengan demikian, secara bersama kami di wilayah adat bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketika tulisan ini ditulis pada pertengahan tahun 2021, vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Adat di kampung, belum ada. “Sebagai pemuda adat yang berprofesi sebagai perawat, saya berharap lebih, supaya Masyarakat Adat bisa mendapatkan vaksinasi untuk mengurangi angka positif dan angka kematian di wilayah adat yang disebabkan Covid-19,” tegas Lusia. Pemuda pulang kampung menjadi tumpuan harapan bagi keberlanjutan kampung. Merekalah yang bakal meneruskan kehidupan di kampung dengan membangun ketahanan pangan dan ketahanan terhadap serangan pandemi.

* * *



Kisah dari Kampung Adat Malaumkarta: Dari Sasi Laut dan Gereja

17

Oleh Yoab Ulimpa bersama Alisa Qottrun

Saya ingin memperkenalkan kampung saya, Kampung Adat Malaumkarta. Kampung adat ini terletak di pesisir pantai di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kampung Malaumkarta terbilang unik karena ada berada di tepi pantai dan lokasinya berdekatan dengan hutan. Konservasi yang dilakukan telah dilakukan secara merata di laut dan di darat. Tempat tinggal Masyarakat Adat Malaumkarta dijadikan daerah konservasi laut dengan aktivitas ekowisata di Pulau Um.

Kampung Adat Malaumkarta - yang juga biasa disebut dengan Malaumkarta Raya - terdiri dari lima lima wilayah, yaitu Kampung Malaumkarta, Kampung Suatolo, Kampung Mibi, Kampung Suatuk, dan Kampung Malagufuk. Secara administratif, Kampung Malaumkarta yang didirikan pada 1991, berada di samping Kampung Suatuk. Sejak dulu, Kampung Malaumkarta dihuni oleh Masyarakat Adat yang umumnya dikenal dengan Suku Moi. Suku lain yang berdiam di Kampung Malaumkarta, biasanya tinggal karena ada kepentingan seperti pekerjaan, salah satunya menjadi guru.

Malaumkarta memiliki dua organisasi, yakni Perkumpulan Generasi Malaumkarta (PGM) dan Ikatan Kampung Malaumkarta Raya (IKMR). PGM bergerak pada hal-hal yang bersifat teknis, misalnya pemetaan kampung, pembangunan sumber daya manusia, dan kerja-kerja lain. Tak hanya itu, PGM juga bertugas menjalin relasi ke luar, termasuk dengan organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO) dan pemerintah. Sedangkan IKMR, berkiprah pada ranah kerohanian dan anak-anak di Malaumkarta.



Sekretariat PGM.



Pemetaan Wilayah Adat

Seiring berjalannya waktu, Kampung Malaumkarta yang penduduknya terdiri dari 14 marga, mengalami pemekaran wilayah. Wilayah yang pertama kali mengalami pemekaran, adalah Kampung Kalaluk. Ia masuk ke dalam Distrik Klaili. Kemudian pada 2016-2017, dua kampung dimekarkan lagi, yaitu Kampung Suatolo dan Kampung Mibi. Dari pemekaran itu, menghasilkan enam kampung, termasuk Kampung Klatomok yang masuk ke wilayah Malagufuk. Namun, seiring berjalannya waktu, Kampung Klaktomok dipindahkan ke pinggir jalan raya. Akibatnya, Kampung Malagufuk kembali berstatus “kampung” dan kini masih disiapkan untuk dicatatkan secara administratif.

Saat ini, Kampung Malaumkarta dihuni oleh beberapa marga, baik Suku Moi maupun suku lain, seperti Suku Biak yang sebagian besar adalah keluarga guru. Suku Moi pun terdiri dari banyak marga, antara lain Magablo, Mobalen, Su, Malasamuk, Salamala, Kalami, Do, Ulimpa, dan Sapisa.

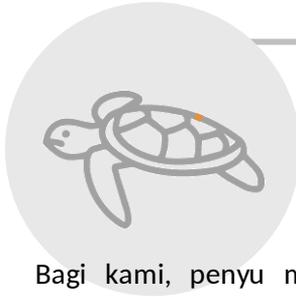
Untuk mengamankan wilayah adat kami, PGM bersama Masyarakat Adat Malaumkarta melakukan pemetaan wilayah untuk memperjelas batas antar-marga sekaligus memetakan potensi yang ada di setiap wilayah. Pemetaan dilakukan dengan metode pemetaan partisipatif, yaitu dengan menelusuri secara langsung dan tak semata mengandalkan citra satelit. Metode itu dipilih agar kami bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Citra satelit tidak akan mampu mengungkap kekayaan yang tersimpan di dalam tanah atau kehidupan di balik pepohonan.



Suasana di Kampung Adat Malaumkarta.

Potensi-potensi yang terkandung di setiap wilayah marga, berbeda-beda. Misalnya, marga tertentu bisa memiliki potensi berupa kekayaan akan satwa burung, sementara marga lain berupa gua dan sebagainya. Selain itu, dari menjalankan proses pemetaan batas-batas antar-kampung itu, - dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan - kami dapat menemukan kerusakan hutan yang meliputi luasan yang besar. Kami belum berhasil memperkirakan luasannya.

Kegiatan pemetaan itu menghasilkan peta wilayah adat dari Masyarakat Adat dan peta wilayah secara administratif. Salah satu marga, yaitu Do, ternyata tinggal di Asbaken yang berada di luar wilayah Kampung Malaumkarta. Hal itu terjadi karena, sebelum pemekaran, Masyarakat Adat dari marga itu memiliki tempat di Asbaken. Ketika terjadi pemekaran, mereka memilih untuk kembali ke Malaumkarta. Dengan demikian, orang-orang yang bermarga Do, selain tinggal di Malaumkarta, juga tetap memiliki wilayah adat di Asbaken.

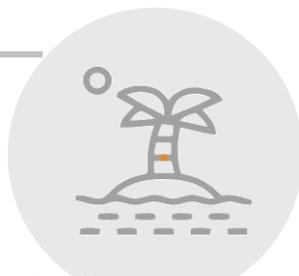


Merawat Penyu

Bagi kami, penyu memiliki tempat tersendiri dalam konstruksi kehidupan. Kami berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, baik di laut maupun darat. Di laut, kami melakukan konservasi terhadap penyu yang sedang bertelur. Sedangkan di darat atau hutan, kami melakukan pelarangan penggunaan ketapel untuk anak-anak karena dapat mengganggu kehidupan burung-burung.

Ketika penyu mulai naik ke daratan untuk bertelur, Masyarakat Adat Malaumkarta akan bahu membahu mengamankan telur-telur tersebut. Mereka akan menelusuri jejak penyu, lalu mengambil telurnya untuk diamankan dari predator maupun pencurian oleh manusia yang diam-diam mengambil telur atau mengambil penyu untuk dikonsumsi dagingnya. Selang sebulan atau saat telur menetas, bayi penyu (tukik) akan dipindahkan ke bak.

Ketika tukik-tukik telah siap secara fisik, mereka akan dilepaskan ke laut. Mereka dilepas agak jauh dari bibir pantai agar bisa berjalan merayap menuju laut. Hal itu bertujuan agar kelak dewasa, mereka mampu mengingat bekas kakinya di pantai tempat mereka menetas. Penyu biasanya akan kembali untuk bertelur di tempat mereka mengawali kehidupannya.



Daya Pikat Pulau Um

Pulau Um menjadi salah satu destinasi wisata di Malaumkarta. Letaknya kurang lebih 10 kilometer dari Pantai Malaumkarta. Pulau itu dapat dijangkau dengan menggunakan perahu. Penamaan Pulau Um berasal dari bahasa Moi, yaitu “um” yang artinya kelelawar. Pulau Um dihuni oleh kelelawar. Pulau tersebut kosong, tidak ada manusia yang menghuni. Oleh karena itu, Pulau Um juga disebut Pulau Kelelawar.

Ketika mengunjungi Pulau Um, mata akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih, gerombolan kelelawar, dan burung camar. Kelelawar di Pulau Um, berbeda dengan cara hidup kelelawar yang selama ini kita kenal. Kelelawar Pulau Um hidup bergelantungan di dahan pohon, bukan di gua.

Masyarakat Adat percaya Pulau Um dijaga secara bergantian oleh beragam satwa. Pada siang hari, pulau itu dijaga burung camar, sedangkan di malam hari, kelelawar menjaganya. Pengunjung Pulau Um, selain dapat menikmati keindahan pulau, juga bisa menikmati pemandangan bawah lautnya dengan cara *snorkeling* atau *diving*. Kehidupan bawah laut di sekitar Pulau Um, terjaga karena sikap dan persepsi Masyarakat Adat Malaumkarta terhadap alam. Kami tidak merusak keindahan alam. Salah satu caranya adalah dengan mempraktikkan *sasi*.



Sasi Laut dan Pembangunan Gereja

Sasi adalah larangan mengambil sumber daya alam tertentu demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Larangan itu dilakukan pada periode tertentu. *Sasi* - atau kami menyebutnya dengan *egek* - telah mendapatkan pengakuan dari negara melalui Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Di Malaumkarta, hasil laut yang di-*sasi*, meliputi udang, teripang, dan ikan dugong (duyung).

Sasi bukan hanya urusan administrasi pemerintah, namun juga bagian dari kehidupan gereja. *Egek* atau *sasi* laut menjadi cara yang dipilih untuk mengumpulkan dana pembangunan GKI Silo Malaumkarta. *Sasi* laut dibuka ketika gereja membutuhkan dana besar untuk pembangunan atau keperluan lain terkait dengan kepentingan Masyarakat Adat. Misalnya, pembangunan pastoran atau rumah untuk pendeta di gereja. Oleh karena itu, kapan *sasi* mulai dilakukan, juga diputuskan melalui Sidang Jemaat Gereja. Jenis sumber daya laut yang ditangkap dan kapan masa *sasi* dibuka, ditentukan oleh sidang tersebut. *Sasi* dibuka dengan doa bersama di gereja.



GKI Silo.

Sehari sebelum *sasi* dimulai, dilakukan doa bersama di gereja. Keesokan harinya, mulailah pencarian batas waktu *sasi*. Misalnya, *sasi* dibuka dengan masa satu bulan ketika doa hari Minggu, maka hari Senin mulai mencari, dan Sabtu dijual. Penjualan dilakukan per minggu. Apabila dana untuk pembangunan gereja belum terpenuhi, maka *sasi* bisa diperpanjang.

Hasil tangkapan pun diserahkan seluruhnya ke gereja. Namun, jika ada kebutuhan mendesak dari masing-masing individu, hasil tangkapan akan dibagi sesuai kebutuhan individu walaupun sebagian besar hasilnya tetap diserahkan ke gereja. Pada prinsipnya, hasil tangkapan saat *sasi*, akan disimpan di gereja. Untuk menjaga keawetan, hasil tangkapan tersebut diasapi atau dikeringkan. Hasil laut yang disimpan, dijual sesuai waktu yang disepakati.

Sasi laut tidak hanya menasar pada tangkapan laut, melainkan juga alat-alat yang digunakan, misalnya jaring, bom, alat peledak, dan obat dilarang keras digunakan untuk menangkap ikan. Hal itu dikarenakan jaring akan menangkap seluruh ikan, termasuk yang masih kecil. Selain itu, alat-alat tersebut dilarang karena berpotensi merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, nelayan di Malaumkarta sampai sekarang masih menangkap ikan dengan menggunakan panah, senapan, atau pancing.

Apa yang dilakukan Masyarakat Adat Malaumkarta melalui *sasi*, tak hanya bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi, juga bermanfaat untuk keimanan kami. *Sasi* adalah praktik perilaku ekonomi berkelanjutan karena populasi ikan dapat terjaga dan kondisi laut tetap sehat dan subur. *Sasi* menjadi perwujudan iman yang didasarkan pada ajaran untuk menghormati semua ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan dan kebijakan Masyarakat Adat Malaumkarta, *sasi* dan gereja adalah dua hal yang tak terpisahkan. Yang satu ada karena yang lain.



18

Kisah dari Negeri Manusela: Menjaga Adat Menjaga Bumi

Oleh Yosis Sentris Lilihata
bersama Amilia Buana Dewi Islamy

Negeri Manusela, begitulah kami menyebut kampung kami. Manusela adalah “negeri di atas awan” sebab berada di tengah Pegunungan Seram Utara di bawah kaki Gunung Murkele dan Gunung Amalea. Di negeri inilah, kami dilahirkan dan dibesarkan. Negeri kami dikelilingi hutan. Karena itulah, kehidupan kami sangat dekat dengan alam. Alam telah mencukupi segala kebutuhan kami, mulai dari rumah, pangan, hingga obat-obatan. Dengan kemurahan yang diberikan kepada kami, tentu saja kami harus membalas budi kepada alam dan sekaligus harus banyak belajar darinya.

Negeri Manusela secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Secara geografis, ia terletak di wilayah hutan adat. Kurang lebih ada 440 jiwa tinggal di Manusela dengan 110 kepala keluarga. Kaum laki-laki di Manusela biasa berkebun dan berburu untuk mencukupi kebutuhan pangan, sedangkan para perempuan adat pun banyak berkebun dengan menanam sayuran dan umbi-umbian. Tentu, perempuan adat juga sangat pandai memasak. Jadi, orang-orang luar yang berkunjung ke Manusela, harus mencicipi hidangan khas daerah kami.

Untuk mencapai Manusela, dibutuhkan setidaknya empat hari jalan kaki dari pusat kecamatan. Manusela tidak dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan, bahkan sepeda motor sekali pun.

Perjalanan ke Manusela harus melewati tebing, hutan, dan sungai. Khas perjalanan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, orang-orang yang menuju Manusela akan disugahi dengan pemandangan yang indah. Beragam tumbuhan dan hewan akan menemani mereka hingga tujuan. Setelah bertolak dari pusat kecamatan, lambat laun hutan akan semakin lebat dan kian terasa suasana alamnya. Semakin jauh kaki melangkah masuk ke dalam hutan, semakin jauh pula orang itu dari kemudahan teknologi, misalnya jaringan telepon, apalagi internet.

Tidak adanya jaringan internet di Manusela, tidak lantas membuat hidup kami menjadi kurang berwarna. Kami hidup dengan adat dan budaya yang beragam, mulai dari upacara adat, pakaian, makanan, hingga permainan tradisional, semuanya memiliki makna yang penting bagi kami.

Salah satu permainan tradisional yang masih lestari adalah *pasulaha*. Permainan itu kami mainkan saat musim bunga buah-buahan, seperti durian dan lainnya. Maksud dari permainan itu adalah untuk menghindarkan kami dari penyakit-penyakit yang biasanya datang saat musim buah berlangsung. Gangguan kesehatan itu bisa berupa gatal-gatal, sakit kepala, dan demam.

Selain itu, dengan memainkan permainan itu, diharapkan bunga bakal buah-buahan mampu bertahan hingga musim panen untuk mencukupi kebutuhan pangan kami. Permainan itu khusus untuk laki-laki semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selain *pasulaha*, ada banyak pula tradisi yang kami jalankan untuk menghormati alam.

Adat dan budaya itulah yang membuat kami menjadi Masyarakat Adat Manusela yang utuh. Kehidupan kami dekat dengan alam. Alam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sebab kehidupan kami berada di hutan. Kami berburu, mengumpulkan buah-buahan, dan mencari tanaman obat di sana. Banyak manfaat lain yang kami dapatkan dari hutan.



Menjelajah hutan adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Sekolah bagi Masyarakat Pelindung Hutan

Kami tak hanya ingin mengambil manfaat. Kami pun berperan menjadi pelindung hutan. Kami merawat hutan dan menjaganya tetap asli. Ya, hanya ada kami dan alam. Namun, kami juga tidak lupa bahwa pendidikan adalah hal penting dan tak terpisahkan dari kami. Pendidikan diperlukan untuk menjaga identitas Manusela.

Suara Tifa yang ditiup menandakan sekolah akan segera dimulai. Anak-anak dan para remaja di Negeri Manusela lantas bergegas mengenakan ikat kepala yang kami sebut dengan *asope*. Mereka juga dengan penuh semangat mengenakan selendang berwarna merah. Itu atribut adat kami yang bernama *asope tepai-tepai*.

Kemudian, mereka mulai berjalan menuju ke sebuah bangunan rumah adat yang mereka banggakan, yaitu *Ama Lilinusa*. Setiap Minggu sore pukul 16:00 Waktu Indonesia Timur, rumah adat itu beralih fungsi menjadi Sekolah Adat Patanata.

Sekolah Adat Patanata berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Sebab, apa yang dipelajari para siswa di sana, adalah budaya dan adat kami sendiri. Tidak ada pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Kimia, dan pelajaran lain sebagaimana yang dipelajari di sekolah dengan kurikulum nasional.

Sekolah itu kami dirikan sendiri - termasuk, bersama para pemuda adat - pada 30 Desember 2019 dan diresmikan oleh pemerintah pada 31 Januari 2021. Prosesnya melibatkan banyak pihak: AMAN, para tetua adat, para Saniri Negeri (semacam badan atau lembaga adat yang terdiri dari para pemuka atau tokoh di Negeri Manusela), dan seluruh warga Masyarakat Adat Manusela.

Saat ini, ada 83 siswa belajar di sana. Usia siswa di Sekolah Adat Patanata bervariasi, yaitu dari usia tujuh hingga dua puluhan tahun. Pengajarnya pun berasal dari berbagai kalangan adat, yaitu pemuda adat, tetua adat, Saniri Negeri, dan warga kami sendiri.

Pada awalnya, kami resah karena anak-anak adat sudah mulai lupa mengenai tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan nenek moyang kami. Seringkali, kami melihat anak-anak adat kami tak lagi menyapa orang-orang tua ketika bertemu di jalan. Mereka juga tidak banyak mengenal jenis tumbuhan obat yang ada di negerinya sendiri. Berangsur-angsur, hubungan hutan dan anak-anak adat tak lagi terasa seakrab dulu. Banyak hal mulai hilang. Kebanggaan anak-anak adat kami akan identitas negeri kami sendiri, tak bisa dipungkiri, mulai luntur.

Mereka secara perlahan mengenal dekat sesuatu yang jauh, budaya yang berada di luar Manusela. Sebaliknya, mereka justru semakin menjauh dari identitas sendiri.

Kami memang tak bisa menolak kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Kami justru bersyukur akan adanya kemajuan tersebut. Akan tetapi, kami juga tidak ingin budaya dan adat Negeri Manusela dilupakan oleh manusianya sendiri. Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi tak bisa dihindari. Kondisi itu kami jadikan sebagai tantangan bagi kami untuk berpikir mengenai solusi yang konkret. Kondisi itulah yang mendorong kami mendirikan Sekolah Adat Patanata.



Sekolah Adat Patanata bersama para murid anak adat.

Ide pendirian sekolah adat pada awalnya datang dari saya. Setelah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Ambon dan Universitas Pattimura Ambon, saya pulang ke Manusela. Saya melihat banyak hal telah berubah dan terasa berbeda. Segera terasa bahwa banyak hal tidak lagi seperti ketika saya kecil. Ketika saya bertumbuh bersama alam. Saya lantas membicarakannya dengan teman-teman sesama pemuda adat, antara lain Demianus Hendrik Lilihata, dan Maya Amelia Ilela. Ternyata, kami memiliki keinginan yang sama: anak-anak adat harus dikenalkan lagi dengan apa yang menjadi milik kami.

Pembahasan itu berlangsung selama setahun. Sejak 2019, kami memimpikan sebuah sekolah adat berdiri di Manusela. Tentu, sebuah cita-cita tidak bisa diwujudkan hanya dalam satu kedipan mata. Banyak hal yang harus kami lalui dan perjuangkan. Kami berbincang dengan tetua adat untuk meminta dukungan dan saran. Diskusi yang panjang pun akhirnya berlangsung antara kami, tetua adat, Saniri Negeri, dan semua elemen Masyarakat Adat Manusela.

Sebelum Sekolah Adat Patanata berdiri, hanya ada satu sekolah formal di Negeri Manusela, yaitu Sekolah Dasar YPPK Manusela. Apabila anak-anak adat kami ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak adat kami harus merantau terlebih dahulu ke pusat kecamatan, di mana akses sekolah lebih banyak dan lebih mudah. Namun, baik tetua adat maupun Saniri Negeri, benar-benar menyadari bahwa sekolah formal saja tidaklah cukup untuk dapat membendung segala dampak negatif globalisasi, terutama terkait luntarnya budaya dan identitas.

“Kami dari tua-tua adat sangat setuju dengan Sekolah Adat Patanata Manusela. Itu berdasarkan alasan supaya adat kami yang sudah ada sejak dulu, dapat dipertahankan,” ujar Danci Maloi, salah satu tetua adat. “Kami juga berterima kasih kepada AMAN. Karena melalui perjuangan AMAN untuk Manusela, sehingga budaya-budaya kami bisa diangkat,” lanjutnya.

Dukungan moral dari tetua adat, tentu saja membuat kami para pemuda adat semakin bersemangat mewujudkan sekolah adat. Selain itu, kami juga dibantu oleh tetua adat selama berjalannya proses pembelajaran di Patanata.

Banyak tetua adat yang menjadi pengajar. Pengetahuan para tetua adat tentang kebudayaan dan adat Manusela serta nilai-nilai luhur yang melekat, menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi seluruh siswa sekolah adat. Sebab, adat bukan hanya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Namun, lebih dari itu ada makna filosofis yang harus dihidupkan dan dipahami oleh kami karena hal itu adalah merupakan warisan yang penuh kebaikan. Kebaikan bukan hanya untuk kehidupan kami sendiri, namun juga untuk lingkungan kami.

“Menurut kacamata kami sebagai tetua adat, pendirian sekolah adat ini penting supaya tertanam budaya yang sejak dulu ada dan itu dapat dipertahankan. Sebagai tetua adat kami punya tugas mutlak untuk memberikan pendidikan kepada generasi muda Masyarakat Adat Manusela dari masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Danci.



Potret anak-anak adat kami dengan pakaian adat.

Dukungan untuk sekolah adat ini tak hanya datang dari tetua adat. Saniri Negeri amat penting untuk memberikan materi pembelajaran. Saniri Negeri adalah salah satu unsur terpenting dalam perkembangan wilayah adat, terutama yang berkaitan dengan pemerintah.

Adalah Frans Masaonang, Ketua Saniri Negeri, yang juga merasakan bahwa pelaksanaan pendidikan terkait adat dan budaya Manusela, sangat perlu untuk diadakan. Ia dan anggota Saniri Negeri lain resah sebab adat leluhur kami mulai hilang akibat banyaknya budaya luar yang masuk dan menggeser adat dan budaya kami.

“Kami berpikir, adat ini sudah mau menghilang karena perkembangan teknologi. Dengan adanya perjuangan pemuda-pemuda adat kami yang dibantu oleh AMAN sekarang ini, kami bisa mempertahankan kembali adat budaya setempat. Bisa mengembangkan, menggali, dan melaksanakan kegiatan di sekolah ini,” ujar Frans.

Selama ini, mulai dari perencanaan sampai saat sekolah adat sudah berjalan, Saniri Negeri selalu membantu para pemuda adat, terutama yang berkaitan dengan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah adat.

Sekolah Adat Patanata tidak berjalan sendiri secara eksklusif. Sekolah adat kami berjalan berdampingan dengan SD YKPP Manusela. Dukungan pun datang dari Sekolah Dasar tersebut. Kedua sekolah saling melengkapi. Guru-guru yang ada di SD YKPP Manusela pun sangat mengapresiasi adanya Sekolah Adat Patanata di akhir pekan. Hal itu karena mengingat bahwa mereka menghadapi masalah yang sama, yaitu budaya yang mulai hilang.



Mengembalikan Adat yang Hilang

Sekolah Adat Patanata mengajarkan beberapa hal yang mencerminkan adat Manusela. Hingga saat ini, ada tujuh hal yang menjadi fokus sekolah adat kami, yaitu pelajaran menganyam atau biasa kami sebut dengan *akanana*, membuat sayur kering atau *eioku motoe*, mengenal obat herbal alam atau *eihaue*, memasak tradisional atau *akatonu*, pelajaran sejarah atau *soua*, nyanyian tradisional atau *makua sewa karisaa*, dan pelajaran bahasa daerah atau *sou upaa*.

Saat ini, tenaga pendidik terdiri atas para tetua adat, anggota Saniri Negeri, staf pemerintah, dan juga warga Masyarakat Adat Manusela yang bersedia berbagi ilmu, termasuk Sepnat Amanukuany, Andris Lilihata, Apolos Maloy, Danci Maloy, Lea Ilelapotoa, Arnol Etalo, Tinus Etalo, dan Frets Masauna.



Para tenaga didik di sekolah adat tengah melakukan pertemuan atau musyawarah.

Dalam kelas menganyam, siswa-siswa diajarkan untuk membuat beberapa benda khas Manusela, salah satunya *lopa-lopa*. *Lopa-lopa* atau dalam bahasa Manusela juga disebut *salata*, yaitu tas tradisional yang terbuat dari pelepah sagu. Selain *salata*, ada juga anyaman berupa wadah, seperti *besek* untuk menaruh makanan dan barang-barang.

Kegiatan di Sekolah Adat Patanata, seperti menganyam dan pelajaran tentang obat-obatan tradisional, dilakukan dengan memanfaatkan kebaikan alam. Tujuannya, untuk mengenalkan betapa pentingnya alam sekaligus memberikan pengertian bahwa Masyarakat Adat Manusela berkewajiban menjaga alam dan kelestariannya.

Arlina Lilihata (20 tahun), Alviana Amanukuany (20 tahun), dan Alvian Latumutuany (11 tahun) adalah tiga peserta didik di Sekolah Adat Patanata. Mereka belajar dengan penuh semangat karena ingin mengenal lebih jauh tentang negeri di mana mereka dilahirkan dan kekayaan negeri sendiri.

“Sebelumnya, saya tidak tahu bagaimana cara membuat anyaman dari pelepah sagu,” ujar Alfiana sambil malu-malu. Ia dan teman-temannya mengatakan, senang bisa mempelajari hal-hal yang tak dikenal sebelumnya. Bersama anak-anak adat lain di Manusela, kami berharap anak-anak adat akan menjadi orang-orang yang mencintai adatnya dan menjaganya dengan baik untuk dikenalkan pada generasi selanjutnya di Negeri Manusela. Kami berharap di masa depan Masyarakat Adat Manusela tetap ada dan hidup sejahtera karena kami telah merawat dan melindungi alam.

* * *



19

Kisah dari Desa Runtu: Ketika Ladang Beralih Jadi Perkebunan Sawit

Oleh Ardi Pratama Syahputra bersama Alisa Qottrun

Desa Runtu merupakan bagian dari wilayah Masyarakat Adat Kutaringin yang di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa tersebut dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang heterogen dari berbagai suku, di antaranya Suku Dayak, Melayu, dan beberapa lainnya dari Jawa. Di sana ada beberapa potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti batu, ikan, buah sawit, dan kayu.

Menyadur dari laman *runtu.desa.id*, sebanyak 167 orang dari 1.078 orang, bekerja sebagai petani atau pekebun. Namun, tidak ada rincian mengenai komoditas apa yang ditanam atau hanya menjadi buruh industri pertanian atau perkebunan. Persoalannya, sekarang wilayah Desa Runtu dikelilingi oleh perkebunan sawit.

Masuknya perusahaan perkebunan sawit membuat pergeseran mata pencaharian Masyarakat Adat. Dahulu, kami berladang di *huma* untuk mencukupi makan sehari-hari. Kami juga memanfaatkan sungai dengan baik, mencari ikan di sana untuk dijadikan lauk pauk atau memeliharanya di tambak ikan. Namun, sekarang masyarakat lebih memilih menjadi buruh di perkebunan sawit.

Komoditas alam di Desa Runtu sangat melimpah ruah, salah satunya kayu. Kayu dimanfaatkan untuk bahan baku membuat rumah. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai diekspor ke luar Pulau Kalimantan sejak tahun '80-an. Hal itu menyebabkan penebangan kayu marak terjadi di Desa Runtu.

Kemalangan alam Desa Runtu tidak hanya diakibatkan oleh penebangan kayu yang dilakukan setiap hari dengan jumlah besar. Tanaman sawit mulai memasuki desa, membawa krisis iklim dan sengketa tanah di wilayah adat kami.

Tahun '90-an, masyarakat mulai berkenalan dengan sawit. Pada mulanya, kami mengabaikannya, namun lama-kelamaan menjadi menjadi akrab sejak tahun 2000-an. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa kami mulai menjual tanah untuk pihak perkebunan sawit. Ladang-ladang mata pencaharian Masyarakat Adat sekarang berganti rupa menjadi perkebunan sawit.



Perkebunan Sawit Merebut Lahan Masyarakat Adat

Tidak semua pengalihan hak atas tanah berlangsung baik dan disepakati semua pihak yang terlibat. Sepenggal kisah perubahan wajah Desa Runtu menggambarkan hal itu. Sejak 2008, PT Surya Sawit Sejati (SSS) membuka lahan perkebunan sawit di beberapa desa di Kotawaringin Barat, salah satunya di Desa Runtu.

Praktik mengubah wilayah adat menjadi perkebunan sawit, bukan kejadian yang ingin kami lihat. Ketika membuka lahan perkebunan sawit, perusahaan mendatangkan empat bulldoser yang kemudian tanpa ampun menggilas wilayah adat kami.

Melansir dari *Kabar Indonesia* dalam artikel berjudul “Usut Tuntas Penyebab Pemukulan Warga Runtu,” dijelaskan tentang perampasan wilayah adat di Desa Runtu oleh PT SSS.

Ketika itu warga bernama Suriansyah beserta beberapa anggota keluarga, tengah menggarap balok penyangga rumah dari kayu ulin. Tanpa mereka ketahui, empat bulldoser datang dan langsung menggilas lahan perkebunannya. Secara spontan, mereka mencoba menghentikan aksi empat bulldoser tersebut. Mereka meneriaki dan menghadang operator agar menghentikan aksinya. Sayangnya, teriakan dan usaha menghadang laju bulldoser itu berakhir sia-sia.

Lantas, Suriansyah mendatangi aparat desa dan perwakilan PT SSS untuk menghentikan aksi bulldoser tersebut. Hasilnya bisa ditebak. Upaya itu menemui kesia-siaan. Mereka tidak menggubris permohonan Suriansyah. Hal tersebut berlangsung terus menerus, Suriansyah memohon, namun aparat desa dan PT SSS tetap diam membisu tak bereaksi.

Hendra, anak Suriansyah, pada suatu kesempatan memukul salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Runtu yang turut bertanggung jawab atas pembukaan lahan pertanian sawit oleh PT SSS. Ia geram melihat usaha ayahnya yang selalu menemui kebuntuan. Akibat pukulan itu, Hendra diganjar dengan penangkapan oleh kepolisian dan dijebloskan ke penjara.

Sengketa wilayah adat milik Masyarakat Adat yang dirampas PT SSS itu terus berkepanjangan. Pada 2014 lalu, Masyarakat Adat menutup jalan utama perkebunan sawit PT SSS. Penutupan dilakukan dengan merangkai beberapa bambu dan kayu membentuk tanda silang dengan mengibarkan bendera merah putih di tengah-tengahnya.

Penutupan jalan dilakukan dengan tujuan untuk mendesak PT SSS agar mengembalikan wilayah adat yang diambil secara paksa. Selain itu, janji yang telah disepakati pun tidak kunjung direalisasikan, sehingga turut memicu aksi tersebut. Namun, hal itu tetap tidak menemukan titik terang. Wilayah adat tetap dirampas.



Potret ibu dan anak-anaknya yang tengah duduk di teras rumah dekat perkebunan sawit.



Dampak Kehadiran Perkebunan Sawit

Kehidupan di Desa Runtu berubah, tak menjadi lebih baik. Kehadiran perkebunan sawit menyengsarakan Masyarakat Adat pemilik wilayah adat dan merusak lingkungan. Serbuan perusahaan perkebunan sawit pun tak terbendung.

Alih fungsi lahan milik pribadi dan kolektif untuk menjadi lahan perkebunan sawit, terjadi karena tingginya permintaan pasar akan kebutuhan minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak dengan seribu manfaat serta menjadi bahan dasar atau bahan baku, mulai dari berbagai produk makanan, keperluan rumah tangga, hingga produk kecantikan.

Ketika hutan-hutan ditebang habis untuk perkebunan monokultur sawit, maka terjadilah pelepasan gas karbon atau gas rumah kaca. Kondisi perubahan iklim pun semakin memburuk. Suhu bumi meningkat karena hutan ditebas habis.

Hutan menjadi tempat pendinginan evaporatif, cara kerjanya seperti manusia ketika kepanasan dan berkeringat. Di hutan, penguapan oleh tumbuhan dan tanah ke atmosfer lebih banyak daripada perkebunan sawit. Hal itu menandakan tanah hutan lebih sejuk daripada tanah perkebunan sawit yang gersang.

Hutan adalah pula rumah bagi beragam flora dan fauna. Kehidupan mereka pun turut terganggu. Mereka terusir dari rumahnya, bahkan mati di habitatnya. Hal tersebut akan mengganggu ekosistem di dalamnya. Selain itu, adanya perkebunan sawit juga berdampak pada minimnya ketersediaan air selama musim kemarau dan api yang mudah tersulut, sehingga mudah memicu kebakaran hutan dan lahan. Kerugian yang amat besar yang mencapai ratusan triliun rupiah dan kerugian petani karena kehilangan penghidupannya, menjadi titik gelap perkebunan sawit.



20

Kisah dari Sanggar: Bersama untuk Berdiri di Kaki Sendiri

Oleh Taufikurahman bersama Margareth Aritonang

Dulu saya tidak suka membicarakan soal budaya dan adat karena menurut saya soal-soal seperti itu sudah bukan zamannya. Pembicaraan adat dan budaya di zaman modern ini, di era teknologi yang canggih, terasa sangat ketinggalan zaman. Lagipula, menurut saya adat dan budaya itu terlalu spiritual, berseberangan dengan ajaran agama yang saya anut. Akan tetapi, semuanya berubah total dua tahun lalu ketika saya bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bima.

Menjadi bagian dari komunitas Masyarakat Adat, membawa saya banyak terlibat dalam diskusi dengan anggota lain yang akhirnya membuat saya semakin tertarik untuk lebih mengetahui tentang adat dan budaya saya sendiri. Mata saya semakin lama semakin terbuka. Budaya dan adat tidak bertentangan dengan agama. Melestarikan adat dan budaya berarti menjaga dan merawat peninggalan sejarah. Terlebih lagi, menjaga wilayah adat berarti menjaga alam, hal yang paling dibutuhkan semua makhluk hidup di zaman ini.

Pertemuan dan diskusi rutin saya dengan pemuda dan pemuda adat lainnya melahirkan kelompok kecil beranggotakan 25 orang anak muda dari Komunitas Masyarakat Adat Sanggar - tempat asal saya - dan Komunitas Masyarakat Adat Donggo Ele. Kami semua tergabung dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Di Bima, BPAN resmi berdiri tahun 2019. Visinya adalah menjaga wilayah adat agar komunitas Masyarakat Adat bisa mandiri.

Saya terlibat sebagai pengurus di bidang kepemudaan. Peran itu saya lakoni di sela-sela aktivitas sehari-hari sebagai petani. Kami menggalang inisiatif kolektif agar komunitas-komunitas Masyarakat Adat bisa berdiri di kaki sendiri dengan cara memaksimalkan manfaat dari kekayaan alam di sekitar kami, yang sudah ada sejak dulu. Kami juga bergandeng tangan dalam menghadapi ancaman dari luar terhadap komunitas kami. Ancaman tersebut seringkali hadir dalam wajah perusahaan-perusahaan besar. Mereka merenggut tanah di wilayah adat dengan bantuan pemerintah dan menjadikannya sebagai aset bisnis mereka.

Salah satu dari perusahaan itu adalah PT Sanggar Agro. Perusahaan produsen minyak kayu putih itu beroperasi di Desa Oi Katupa yang menjadi bagian wilayah adat dari Masyarakat Adat Sanggar. Jauh sebelum kelompok pemuda adat kami ada, perusahaan itu sudah kerap kali menjadi pusat pemberitaan dan sumber kegelisahan warga karena menggusur dan merusak kebun warga.

Selama bertahun-tahun kami bergerak secara serabutan dengan cara kami sendiri untuk memprotes keberadaan dan aktivitas bisnis perusahaan itu yang merugikan warga.

Sekarang, para pemuda adat bersama-sama mengorganisasikan upaya kampanye dan advokasi. Kami bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih berpihak pada masyarakat sekitar. Kami sadar, tidak mungkin mengusir perusahaan itu dari wilayah adat kami karena jaringan dan relasi mereka yang amat luas, terutama dengan pihak-pihak pengambil kebijakan.

Selain menjaga wilayah adat dari pihak luar, di saat yang bersamaan kami juga bersama-sama mencari solusi agar komunitas kami bisa bertahan. Kami berupaya untuk bertahan dan terus berkembang pada era, di mana sekat-sekat semakin kabur karena semua terhubung oleh teknologi. Bagi kami, ada dua hal yang penting kami pertahankan agar kami bisa tetap eksis yaitu, identitas dan kemandirian ekonomi.



Proses diskusi dan musyawarah bersama para pemuda adat.



Sekolah Adat untuk Mempertahankan Identitas

Kami menamakannya Sekolah Adat Jambu Ra Limbi Sanggar. Sekolah itu berdiri tahun 2021 dan berlokasi di wilayah adat dari Masyarakat Adat Sanggar yang secara administrasi merupakan Desa Kore. Jangan membayangkan sekolah itu seperti sekolah pada umumnya yang memiliki gedung kokoh, kurikulum yang terprogram dengan baik, serta jam belajar mengajar yang teratur.

Sekolah adat yang kami gagas itu berlangsung di sebuah rumah kecil, bekas tempat tinggal salah satu warga. Sampai saat ini, ada 12 orang murid, baik anak-anak perempuan maupun laki-laki, berusia antara delapan dan sembilan tahun. Mereka berkumpul setiap hari Minggu untuk belajar bahasa Bima dan budaya lewat dongeng atau tari-tarian. Hari Minggu dipilih agar tidak mengganggu jam sekolah biasa.

Saat ini, hanya ada satu orang guru yang mengajar, yaitu Arion Zulkifli, dan satu orang kepala sekolah, yaitu Atriawansyah. Sama halnya seperti saya, mereka berdua juga bagian dari BPAN.

Keseluruhan aktivitas sekolah adat berjalan dengan prinsip keikhlasan. Kepala sekolah dan guru menjalankan tugasnya mengajar tanpa dibayar. Murid-murid juga belajar tanpa membayar. Semua dilakukan untuk satu tujuan: melestarikan budaya dan ajaran adat istiadat dengan cara meneruskannya ke generasi muda.

Sayangnya, meskipun tidak dipungut bayaran, tidak banyak anak yang berminat belajar di sekolah adat. Buat mereka, bermain dengan telepon genggam dan segala kecanggihan teknologi komunikasi yang ditawarkan, dianggap jauh lebih menarik.

Dalam salah satu pembicaraan kami, Atriawansyah mengatakan, “Salah satu tantangan bagi kita di pelosok ini, ya karena baru mengenal produk era modern, maka nilai-nilai budaya ditinggalkan, *ngga* dibicarakan lagi.”

Untuk mengajak lebih banyak anak adat untuk bergabung, kami berbagi tugas mendatangi setiap rumah untuk mensosialisasikan sekolah adat ke semua orangtua yang ada di komunitas. Kami ajak mereka berdiskusi tentang pentingnya melestarikan adat dan budaya. Karena hampir semua orangtua adalah petani, maka sosialisasi hanya bisa dilakukan pada malam hari setelah mereka usai bertani.

Meski prosesnya tidak gampang, kami yakin suatu hari nanti Sekolah Adat Jambu Ra Limbi Sanggar akan besar karena akan semakin banyak anak adat yang bergabung.

Di sekolah itu nantinya, menurut rencana, anak-anak akan belajar bahasa Kore. Bahasa tersebut hampir punah. Saat ini, sangat sedikit warga yang masih mengenal dan fasih berbahasa Kore. Sanggar Azis adalah salah satu yang masih menetap di Bima dan berusia 60 tahun. Ia sangat ingin bahasa Kore bisa hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan itu menjadi tugas bersama dengan kami para pemuda adat.



Aktivitas bersama di antara para pemuda adat, baik itu lelaki maupun perempuan, di sekolah adat.



Usaha Bersama untuk Mandiri Ekonomi

Saat ini, di tengah semakin banyaknya orang yang gandrung kopi, ketenaran madu dan kopi Bima sudah tersebar ke seantero Indonesia. Madu dan kopi merupakan dua kekayaan yang dianugerahkan alam untuk Masyarakat Adat di Bima, termasuk kami di dalamnya. Sayangnya, kekayaan alam itu tidak serta merta membuat warga sejahtera, apalagi kaya. Tantangan terbesarnya, yaitu pemasaran.

Pada saat panen madu, biasanya kami akan mengemas madu dalam botol plastik bekas air mineral dan menjajakannya begitu saja, tanpa ada campuran atau pengemasan yang lebih baik. Penjualan dilakukan secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli, bisa tetangga atau pejabat daerah. Tidak ada standar harga yang dijadikan patokan. Juga tidak ada standar kemasan. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian pula dengan kopi.

Saat panen kopi, warga akan menjual kopi secara eceran di mana saja dan ke mana saja. Menitipkan dagangan ke pengecer adalah salah satu cara untuk memasarkan produk. Yang sering terjadi, madu dan kopi tidak laku. Alhasil, kopi dan madu dibagikan secara gratis kepada siapa pun yang mau menerima.



Berburu dan memanen madu di hutan adat.

Melihat persoalan tersebut, BPAN dan AMAN menginisiasi Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) Sanggar Mandiri di awal 2021. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu solusi agar warga bisa mendapat pemasukan yang stabil. Badan usaha itu berbasis koperasi yang beroperasi dari rumah salah satu anggota Masyarakat Adat Sanggar di Desa Boro. Sahamnya dimiliki Masyarakat Adat. Koperasi menjual semua hasil alam yang merupakan produk olahan Masyarakat Adat, seperti madu, kopi, teh, dan jambu mete. Selain itu, semua hasil pangan dari kebun kami, seperti jagung, sayur-sayuran, dan hasil ternak, juga dijual di sana.

“Berangkat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Komunitas Masyarakat Adat Sanggar, yang (selama ini) tidak dimanfaatkan dengan baik, maka penting untuk membentuk lembaga ekonomi untuk membuat hasil pertanian dan perkebunan di wilayah adat (agar) bisa bernilai,” kata Fahmi, Ketua BUMMA Sanggar Mandiri.

Sejak berdirinya koperasi itu, masyarakat tidak perlu bersusah payah memikirkan cara menjual hasil panen. Yang melegakan, bisa dipastikan tak ada satu pun hasil panen yang terbuang sia-sia. Pihak BUMMA Sanggar Mandiri langsung membeli tunai semua hasil panen langsung dari anggota Masyarakat Adat. Dengan demikian Masyarakat Adat akan tetap mendapat penghasilan dari panennya. Masalah pemasaran dikelola oleh koperasi.

Setelah membeli hasil panen kami, Sanggar Mandiri akan mengemas produk menjadi lebih menarik sebelum menjualnya di koperasi. Selain lewat koperasi, pemasaran produk juga dilakukan lewat pelelangan. Untuk madu misalnya, hasil panen langsung dari sarang milik Masyarakat Adat dilelang dengan harga dipatok paling sedikit Rp10 juta.

Dengan mengelola sumber daya alam secara bersama, nasib kami setiap pasca-panen tidak lagi “begitu-begitu saja.” Kondisi keuangan kami juga lebih stabil dan berangsur-angsur bisa mandiri secara ekonomi.

Mandiri secara ekonomi sudah sebagian tercapai. Kami yakin, dengan kepercayaan dan keteguhan tekad kami para pemuda adat yang didukung masyarakat, kemandirian secara adat dan kemartabatan secara budaya pun akan tercapai. Warisan leluhur akan bisa terawat dan dilestarikan. Itu semua bisa terwujud dengan memanfaatkan lebih baik apa yang sudah tersedia selama ini di alam dan di tengah kami.

* * *

Bagian III
Kisah Perjuangan
Perempuan Adat





21

Kisah dari Haringen: Sehat itu dari Hutan

Oleh Yeryana bersama Permata Adinda

Saya Yeryana. Saya salah satu dari perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maanyan. Saya akan berkisah tentang perjuangan perempuan adat Dayak Maanyan. Kisah kami adalah kisah perempuan yang melahirkan, yang mengurus soal pangan, dan yang juga terlibat dalam urusan merawat kearifan lokal.

Masyarakat Adat Dayak Maanyan adalah salah satu sub-suku dari Masyarakat Adat Dayak di Nusantara, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Permukiman Masyarakat Adat Dayak Maanyan tersebar di Kabupaten Barito Timur dan sebagian Barito Selatan. Desa Haringen sendiri adalah kampung yang dihuni oleh Masyarakat Adat Dayak Maanyan. Lokasinya berada di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Komunitas Masyarakat Adat Haringen merupakan turunan Damung Sayu dan Damung Tandru.

Kami Masyarakat Adat Dayak Maanyan punya cara tersendiri dalam membantu ibu melahirkan. Kami punya pengetahuan warisan leluhur yang dipegang oleh bidan kampung atau bidan tradisional Dayak Maanyan. Rasa sakit pada seorang perempuan yang sedang dalam proses bersalin dapat dipindahkan ke orang lain. Ketika dia sudah melemah dan tidak kuat lagi mengejan, biasanya rasa sakit itu akan dipindahkan. Bisa dipindahkan ke sang suami atau anggota keluarga sang perempuan yang bersedia. Ketika nyeri yang dirasakan sang calon ibu mereda, otomatis akan lebih mudah bagi dirinya untuk kembali mengejan.

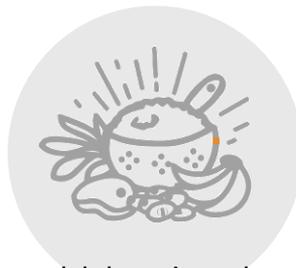
Perempuan Adat Dayak Maanyan lebih nyaman melahirkan di rumah dibandingkan pergi ke fasilitas layanan kesehatan. Kami lebih percaya melahirkan dengan didampingi bidan di rumah sendiri yang dapat membuat kami merasa aman. Para bidan menguasai kemampuan untuk memeriksa bukaan tanpa membuat si perempuan kesakitan. Ada kearifan-kearifan lokal yang mempermudah proses persalinan, seperti teknik *air lunsur* (memberikan air yang sudah berisi rendaman kayu *lunsur* atau mengandung mantra *pilunsur* untuk mempercepat ketuban pecah dan bukaan jalan lahir), *kata walut* (memberikan air yang sudah dimantrai untuk memudahkan persalinan yang diibaratkan menjadi “selicin belut”), hingga mantra untuk memutar bayi yang sungsang di dalam rahim tanpa membahayakan janin dan ibu.

Terlepas dari kearifan-kearifan lokal tersebut, pergi ke fasilitas layanan kesehatan juga membutuhkan usaha dan biaya yang besar. Jarak dan infrastruktur jalan dari kampung kami yang terletak di antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, masih banyak yang tak memadai. Perempuan-perempuan adat yang hendak melahirkan terpaksa melakukan perjalanan jauh dengan sangat tidak nyaman karena kondisi jalan yang buruk.

Perjalanan ke fasilitas layanan kesehatan bisa membahayakan keselamatan, baik calon ibu maupun sang bayi di kandungan. Selain itu, tidak semua perempuan adat memiliki BPJS Kesehatan, sehingga untuk bersalin di fasilitas layanan kesehatan butuh biaya besar. Ada juga ketidaknyamanan secara psikologis saat melahirkan di fasilitas kesehatan, seperti proses pemeriksaan bukaan vagina yang terlalu dalam. Sering juga dokter yang membantu adalah lelaki. Itu membuat perempuan adat merasa risih dan tidak nyaman.

Dengan kondisi-kondisi tersebut, kebijakan pemerintah setempat yang mewajibkan perempuan adat Dayak Maanyan untuk melahirkan di fasilitas layanan kesehatan, telah mempersulit hidup kami. Jika tidak melahirkan di bidan yang sudah memiliki lisensi, anak kami akan dianggap tidak ada oleh negara. Hak anak kami untuk mendapatkan akta kelahiran, dihilangkan. Bidan di kampung yang membantu persalinan para perempuan adat juga terancam hukuman pidana.

Di tengah pandemi Covid-19, situasi menjadi lebih rumit. Masyarakat Adat Dayak Maanyan menghindari untuk keluar kampung agar terhindar dari penularan virus. Namun, hal itu jadi sulit dilakukan karena ada kebutuhan untuk pergi ke fasilitas layanan kesehatan untuk memeriksa kandungan dan melakukan persalinan. Perempuan hamil pun akan semakin rentan terpapar Covid-19.



Ladang Sumber Gizi Perempuan Hamil

Masyarakat Adat Dayak Maanyan bukannya menolak kemajuan dan pembangunan seperti yang dituduhkan oleh pemerintah. Ada kearifan lokal yang menjadi bagian dari keseharian kami dan ilmu tersebut telah diwariskan secara turun-temurun. Upaya menjaga kearifan lokal itu, pada saat yang sama juga turut menjaga dan melindungi kelangsungan hidup perempuan adat.

Kami sebagai perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maanyan, punya hubungan yang lekat dengan ladang. Ladang ibarat *minimarket* yang jadi tempat kami memperoleh kebutuhan-kebutuhan harian, mulai dari sumber makanan hingga obat-obatan.

Perempuan adat, terutama yang sedang hamil, wajib mendapat makanan yang bergizi dan nikmat. Untuk bisa memperoleh itu, warga bergantung dari sumber pangan yang tumbuh dari ladang. Perempuan yang hamil akan selalu mengonsumsi sayur dan buah segar yang diambil langsung dari ladang. Begitu pula ikan segar yang langsung diambil dari sungai. Kami memiliki kesadaran bahwa makanan-makanan yang datang bukan dari ladang, dikhawatirkan mengandung pengawet dan pestisida yang tidak baik bagi janin. Kami juga menghindari makanan-makanan yang dihangatkan. Semuanya harus segar. Pasca-melahirkan atau masa nifas selama sekitar 40 hari, konsumsi makanan dan kesehatan perempuan adat dijaga ketat.

Di masa nifas, kami tidak boleh mengonsumsi garam berlebihan, memakan makanan instan, daging merah, atau makanan yang digoreng. Para perempuan di masa nifas juga tidak boleh terkena hujan, angin, dan sinar matahari langsung.

Kami taat berpantang pada masa hamil dan masa nifas. Berpantang tidak berakhir ketika kami sudah melahirkan bayi yang sehat. Kami sadar bahwa kesehatan diri harus terus dijaga. Dengan cara hidup seperti itu, perempuan adat yang berusia di atas 40 tahun pun pada umumnya masih terlihat bugar. Kami terhindar dari gangguan kesehatan, seperti hipertensi, diabetes, mata kabur, atau kulit keriput.



Benih padi ladang kami.

Hutan Kehidupan Kami



Bagi Masyarakat Adat Dayak Maanyan, hutan adalah kehidupan kami. Proses berladang adalah sebuah rangkaian sikap menghormati hutan. Sebelum membuka lahan, kami melakukan ritual *Nyuwuk Jumpun* yang fungsinya adalah memohon izin kepada entitas penjaga hutan: kami menyiapkan sesajen yang berisikan beras, logam, telur ayam kampung, dan daun *rirung*. Persembahan itu diletakkan di bawah pohon di pagi hari sambil dibacakan doa-doa warisan leluhur kami, lalu dibiarkan di sana selama tiga hari.

Pada hari ketiga, warga kembali ke hutan untuk menengok persembahan tersebut dan memeriksa apakah kami diizinkan untuk membuka lahan di sana atau melihat ciri-ciri tertentu. Ketika kami mendapatkan pertanda bahwa penjaga hutan mengizinkan untuk membuka lahan, barulah kami secara berhati-hati melakukan proses-proses berikut: *tamaruh* (menebas pohon); *neweng* (menebang pohon); *hanradah* (memotong ranting pohon); *iranrang* (penumpukan kayu, ranting, dan daun-daun); dan *nutung* (membakar).

Proses *tamaruh* dimulai dari satu titik yang disebut sebagai *Bata Piharungan*, yaitu titik tempat memulai kerja, mengasah alat kerja, sekaligus sebagai tempat istirahat. Proses *tamaruh* berlangsung selama tiga hari berturut-turut tanpa jeda agar kelak pertumbuhan padi di ladang juga tidak tersendat-sendat.



Sesajen Nyuwuk Jumpun.

Setelah itu, barulah proses *neweng* dilakukan: pohon-pohon akan ditebang dari arah matahari terbit (timur) ke arah matahari tenggelam (barat). Proses itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, proses menebang pohon satu per satu. Kedua, proses menebang pohon dengan ukuran paling besar yang arah jatuhnya pohon, adalah ke pohon-pohon lainnya yang lebih kecil, sehingga pohon-pohon akan tumbang dengan sendirinya seperti kartu domino yang direbahkan. Setelahnya, dilakukan proses *hanradah* atau memotong ranting. Potongan kayu dan ranting yang telah dipotong-potong, kemudian akan melewati proses *iranrang*, yaitu penumpukan potongan-potongan tersebut di beberapa titik untuk dikeringkan terlebih dahulu sebelum dibakar. Potongan-potongan kayu yang telah ditumpuk itu, adalah bagian dari metode sekat bakar yang bertujuan mencegah api agar tidak meluas ketika kami membakar. Kami juga membuat tanggulan di tiap batas luar lahan agar pembakaran atau proses *nutung* berlangsung aman.

Proses pembakaran hanya dapat dilakukan selama Agustus-September dan awal November. Berdasarkan pengalaman para leluhur, pembakaran pada Oktober sangat dihindari. Sebab, aliran angin cenderung rendah, sehingga api lebih mudah menyebar. Selain lewat penentuan tanggal,antisipasi kebakaran juga dilakukan dengan melakukan kegiatan secara bergotong-royong serta mencari lokasi pembukaan lahan yang tidak jauh dari sumber mata air agar warga dapat dengan mudah memadamkan api jika api menyebar.

Menghormati Hutan Demi Kesejahteraan Sesama



Masyarakat Adat Dayak Maanyan melakukan proses berladang, mulai dari membuka ladang hingga bertanam dengan bergotong-royong. Kami menyebutnya *ipangandrau*. Para perempuan adat akan mulai menyiapkan benih tanaman pada masa *Wulan Matueh* atau sekitar minggu kedua November. Penandanya yaitu saat masa bulan bersinar penuh di langit. Pada kondisi itu dipercaya bahwa para roh memberikan restu agar padi tumbuh dengan subur. Ritual *Pilah Wini* juga dilakukan di masa ini. Ritualnya yaitu kami meletakkan sebuah tonggak yang akan diletakkan di tengah ladang dan menaruh sesajen telur ayam yang isinya sudah dikosongkan. Lewat ritual itu, kami berdoa agar benih bisa tumbuh subur, dan proses menugal atau membuat lubang untuk menanam benih berjalan lancar.

Dalam proses perladangan, jika laki-laki lebih banyak berperan dalam membuka lahan dan membuat lubang benih, perempuan adat lebih banyak berperan dalam perawatan ladang. Kami akan membersihkan rerumputan di sela-sela tanaman padi, sayur, dan buah yang ditanam. Kami kerap menanam obat-obatan herbal.



Proses perladangan yang dilakukan secara kolektif, di mana perempuan adat memainkan peran strategis.

Masyarakat Adat Dayak Maanyan tidak hanya mengambil dari hutan, tetapi juga memastikan bahwa proses pengelolaan kami berkelanjutan, sehingga hutan dapat terus memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Kami tidak akan memasak beras yang telah dipanen jika belum semua padi telah selesai dipanen. Itu dilakukan demi mencegah padi terbuang percuma dan tersia-siakan. Sebelum beras dapat dikonsumsi, kami melakukan ritual *Nahampe* yang secara simbolik menyajikan sesajen beras dan lauk yang telah dimasak kepada roh leluhur sebagai bentuk syukur atas berkat yang mereka berikan. Setelah ritual, barulah makanan-makanan dapat dinikmati bersama keluarga dan para tetangga.

Jika wilayah adat, termasuk tanah adat, hutan adat, dan sungai kami habis dikuasai oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan, sesungguhnya hal itu adalah pembunuhan perlahan-lahan bagi kami. Hidup kami amat bergantung pada sungai. Ketika sumber pemenuhan kebutuhan rumah tangga kami tercemar, maka kami, terutama perempuan adat, menjadi rentan terkena penyakit kulit, bahkan kesehatan reproduksi dan kesehatan anak-anak kami pun terancam.

Ketika kami dilarang membuka ladang, kami tidak dapat mandiri dalam hal pangan di tanah leluhur kami sendiri. Kami rentan kehilangan kearifan, ritual, pengobatan tradisional, dan seni anyaman yang merupakan bidang kerja kami sebagai perempuan adat. Kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kami miliki, tetapi ketika sandang dan pangan dapat kami peroleh dari wilayah adat, termasuk hutan adat kami. Kami tidak menolak kemajuan dan pembangunan. Kami hanya meminta hak kami sebagai Masyarakat Adat dan warga negara yang telah merdeka. Hak atas ruang hidup di wilayah adat kami yang merupakan warisan dari leluhur kami. Kami hendak mengelolanya secara berkelanjutan demi generasi pewaris kami.



22

Kisah dari Hoana Gura: Buranyita Inspirasi Perempuan

Oleh Rasmiyanti Umar bersama Apriadi Gunawan

“Wange Nena Hatio Iyarehe Tongone.” Slogan itu hingga kini masih dipegang teguh oleh Komunitas Masyarakat Adat Hoana Gura sebagai motivasi diri dalam menapaki hidup yang lebih baik.

Saya Rasmiyanti Omar, perempuan adat yang berasal dari Hoana Morodina. Saya sontak termotivasi ketika seorang tokoh adat menyampaikan makna dari slogan tersebut yang berarti: “Hari ini dilewati untuk esok yang lebih pasti.” Menurut tuturan kami, slogan itu sudah ada sejak lama, tepatnya ketika Buranyita masih hidup ratusan tahun lalu. Saya hendak berbagi kisah tentang legenda Buranyita.

Sosok Buranyita



Buranyita adalah seorang perempuan yang sangat terkenal dari Pulau Kakara, salah satu pulau yang berada di Hoana Gura, Halmahera Utara. Legenda tersebut sangat menginspirasi perempuan adat, termasuk saya. Kisah hidupnya sangat heroik. Buranyita tetap relevan untuk dijadikan teladan bagi kehidupan perempuan-perempuan di Tanah Air saat ini, terutama spirit juang dan keberaniannya.

Alkisah, pada zaman penjajahan Belanda, lahirlah seorang anak perempuan yang oleh orangtuanya diberi nama Buranyita. Dalam bahasa Tobelo, disebut “*Bura Njita*” yang berarti “pertanda fajar menyingsing.”

Pada saat Buranyita dilahirkan, terdengar ramai hiruk pikuk ayam berkokok. Tangisan bayi Buranyita seperti menyambut datangnya matahari pagi sebagai tanda kehidupan baru. Dari kecil sampai dewasa, masa hidup Buranyita banyak dihabiskan di laut karena mengikuti orangtuanya berpetualang, *canga*. Mereka menantang ganasnya samudra, berlayar ke pulau-pulau seberang untuk menegakkan harkat dan martabat kaumnya yang pada waktu itu terjebak perang.

Bagi orang Tobelo, seorang *moholehe* atau anak perempuan yang beranjak dewasa harus mempunyai keterampilan membuat *o kiarono* atau *saloi*, yaitu tempat barang yang selalu dipanggul oleh seseorang ketika bepergian. Juga membuat *o tatapa de o tate*, yaitu *sosiru* dan *aya-aya* sebagai tempat menapis dan mengurai bahan makanan yang akan dimasak. Anak perempuan juga harus terampil membuat *o tapi-tapi*, yaitu tempat bahan-bahan makanan yang baru dipetik atau dipanen. Kepandaian lain adalah membuat *o tikara* (alas tidur) serta membuat *o gayako*, yaitu kain dari kulit kayu atau daun pandan untuk selimut atau bahan pakaian.

Karena sering berada di tengah lautan, Buranyita belajar semua keterampilan tersebut saat di atas perahu *kalulu*. Perahu itu adalah perahu orang Tobelo untuk melaut satu keluarga dan berkapasitas 20-30 orang. Buranyita adalah anak laut. Dia cakap dalam *o harimi* (mendayung alat mendayung perahu), *o hidete* (mengembangkan layar), *hidupulono* (menentukan arah serta membaca tanda-tanda alam dan membaca cuaca). Dia juga terampil menggunakan *huhoho* (alat penangkap ikan). Bukan hanya keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan di laut, Buranyita pun memiliki kemampuan berburu. Dia banyak membuat *o batoko de o huputu* (perangkap dari bambu untuk menangkap hewan). Sebagai perempuan, Buranyita ahli menggunakan senjata tradisional, seperti *humaranga*, *dadatoko*, *kuama*, dan *toimi*.

Perempuan yang serba bisa itu, dalam kesehariannya juga mencari daun dan pucuk *o mayana*, *o biraro*, *o harihongana*, *o cinga-cinga*, *o loloro*, atau *gumi guraci*, yaitu jenis-jenis tanaman merambat yang merupakan tanaman obat untuk membantu proses kelahiran. Tanaman itu biasa ditanam di halaman rumah adat kami.

Buranyita bukan hanya perempuan serba bisa yang terampil dan tangguh. Dia berparas cantik menawan. Rambutnya bak mayang mengurai hingga ke bawah pinggul. Belum usai kita tuturkan kelebihan Buranyita. Dia adalah perempuan yang cerdas. Sebagai sebuah pribadi, dia adalah pribadi ulet dan tangguh.

Hingga menikah dan memiliki anak, jiwa pengembara dan semangat *canga* terus dipegang teguh dengan dukungan keluarganya. Suatu ketika, perahu yang dinaiki Buranyita beserta suami dan anak-anaknya terjebak di antara dua kapal tentara Belanda yang mengejar perahu kelompok bajak laut asal Papua. Begitu berjumpa dengan perahu Buranyita, kapal Belanda langsung menyerang. Kapal-kapal Belanda menghujani dengan peluru.

Perempuan tangguh itu digambarkan dengan gagah berani berdiri di atas anjungan perahu sambil memegang *dadatoko* dan *tapi-tapi*. Dia menangkis *uoro* atau peluru-peluru musuh. Alkisah, dia berhasil menghalau 44 butir peluru. Buranyita dan keluarganya masih dilindungi oleh Gikirimoi (Tuhan Sang Pencipta) sesuai keyakinan para leluhur kami.

Keberanian Buranyita dalam melindungi keluarganya itu menjadi kisah yang terus dituturkan dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi berikutnya.

Setelah kemenangannya tersebut, semua keluarga dan warga Pulau Kakara melaksanakan *O Ngale* yaitu pesta adat yang meriah. Buranyita didudukkan di tempat khusus untuk menjalani ritual *Moyoka*. Tradisi itu dikenal dengan sebutan *Ami You Yaihoru*, yaitu upacara cuci kaki.

Sebagai simbol suka cita adat, seorang *Gogere Mahaeke* atau kepala kampung yang bertindak sebagai pelindung (*gogoko*), mengalungkan rangkaian uang Belanda sebanyak 60 keping pada leher Buranyita. Di konde rambutnya, disisipkan *tombo* atau hiasan dari bulu burung cendrawasih, tanda mata dari kaum bajak laut Papua. Prosesi adat itu adalah simbol penghargaan terhadap semangat juang Buranyita yang menjadi kebanggaan orang Tobelo di pesisir maupun di pulau-pulau seberang.

Burnyita adalah teladan bagi keluarganya serta orang-orang kampungnya. Dia meninggal di Pulau Kolorae Morotai karena usia lanjut. Buranyita dikuburkan di pulau itu dengan ritual adat Tobelo. Makamnya masih ada dan dirawat oleh anak cucunya.

Buranyita melegenda dan menjadi sumber inspirasi bagi anak cucu dan masyarakat di seantero Halmahera Utara sampai Morotai. Tak lekang oleh waktu. Namanya banyak diabadikan dan mengilhami banyak orang dalam menamai anak mereka. Mereka berharap keturunan mereka itu menjadi *Moholehe*, seorang yang berjiwa besar, sekaligus tangguh, tegar, dan perkasa untuk melawan ketidakadilan. Seseorang yang cerdas dan mampu meraih mimpi.



Inspirasi dan Pembangkit Spirit

Kisah heroik Buranyita menjadi inspirasi dan pembangkit semangat Masyarakat Adat Hoana Gura dalam menapaki kehidupan. Jesaya R. Banari, sekretaris dari Rumah Adat Hibualamo, menceritakan kehidupan Masyarakat Adat Hoana Gura saat ini yang banyak dipengaruhi oleh perilaku Buranyita di masa hidupnya. Jesaya, seorang pria berusia 55 tahun, masih mempunyai hubungan saudara dengan Buranyita. Bapaknya adalah saudara serahim dengan ibunda Buranyita.

Jesaya adalah juga salah seorang tokoh adat yang turut mendirikan AMAN. Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga perilaku hidup Buranyita yang menjadi pendorong spirit dari perempuan adat di Hoana Gura, yaitu jiwa ksatria, jiwa petualang, dan jiwa kreatif.

Pertama, tentang jiwa ksatria. Kehidupan Buranyita yang berani melawan musuh, bahkan melindungi suami dan anak-anaknya serta orang-orang lain yang bersama mereka, menjadi cemeti bagi perempuan adat di Hoana Gura dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam keluarga maupun komunitas.

Kedua, tentang jiwa petualang. Di kepulauan, sehari-hari warga Hoana Gura harus menghadapi tantangan terkait lingkungan, salah satunya gelombang laut. Semasa hidupnya, Buranyita kerap menyeberang samudra, sehingga generasi penerusnya pun kini termotivasi untuk menyeberangi lautan.

Ketiga, tentang jiwa kreatif. Buranyita selalu memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk diubah menjadi beragam jenis produk demi keberlangsungan hidup keluarga maupun pelestarian budaya. Hal itu diwarisi oleh perempuan adat yang terdorong untuk terus berinovasi. Kami berinovasi untuk bisa terus menciptakan hal-hal baru demi keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas.

“Sampai saat ini, *spirit* Buranyita tersebut melekat, bahkan telah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh perempuan adat di Hoana Gura,” tutur Jesaya.



Jesaya, tokoh adat kami.



Penerus Buranyita

Saat ini, ada dua perempuan adat dari Pulau Kakara yang menjadi penerus Buranyita. Keduanya masih bersaudara dengan Buranyita, yaitu Laudara Labada yang berumur 92 tahun dan Priskila Banari yang berumur 87 tahun. Keduanya kini dipanggil dengan sebagai Mama LL untuk Laudara Labada dan Mama Pere untuk Priskila Banari. Ayah kedua mama itu saudara serahim dengan ibunda Buranyita, sehingga Mama LL dan Mama Pere merupakan sepupu Buranyita.

Keduanya tampak sehat di usia lanjut dan menjadi legenda dari Pulau Kakara karena sejak muda Mama LL dan Mama Pere sudah terlibat dalam berbagai pergolakan menentang penjajah. Semangat juang yang tinggi membawa keduanya menjelajah ke berbagai pulau besar di Indonesia, seperti Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan, menjejaki Belanda, Tiongkok, dan Amerika Serikat untuk memperkenalkan budaya Tobelo.

Itu sebabnya kami tak heran apabila Mama Pere dan Mama LL menjadi simbol dan diberikan penghormatan pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada 2019 lalu.

Saya beruntung bisa bertemu dengan kedua mama yang memiliki riwayat luar biasa itu. Butuh perjuangan untuk bisa bertemu mengingat tempat tinggal keduanya yang cukup jauh di Pulau Kakara.

Saya harus menyeberang dari pelabuhan kota ke Pulau Kakara dengan menggunakan *ketinting* atau perahu di tengah cuaca buruk. Meski hanya 15 menit, namun itu menjadi 15 menit terlama yang pernah saya rasakan. Perjalanan yang sungguh menakutkan. Ombak besar dan cuaca buruk berangin sewaktu-waktu bisa membalikkan *ketinting* kami. Namun, semua rasa takut itu sirna manakala saya bertemu dengan kedua penerus Buranyita.

Saya berterima kasih kepada Mama Pere dan Mama LL sebab dari merekalah saya bisa mengetahui kisah Buranyita, gumam saya dalam hati sesuai mewawancarai keduanya di kediaman Mama LL dan Mama Pere di Pulau Kakara.

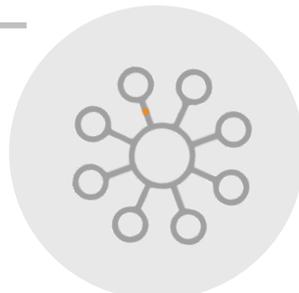
Mama LL dan Mama Pere sangat bersemangat saat menceritakan kisah Buranyita kepada saya. Ingatan keduanya masih kuat dalam mengisahkan perjalanan hidup Buranyita.

“Saya bangga punya saudara perempuan di keluarga seperti Buranyita,” tutur Mama Pere bangga. Mama Pere mengaku, selama ini dia banyak belajar dari Buranyita.

“Kami sangat berterima kasih kepada Buranyita. Banyak yang bisa kami contoh darinya, termasuk keberaniannya,” kata Mama LL yang sehari-hari menghabiskan waktu dengan berkebun bersama Mama Pere. Keduanya adalah pemimpin untuk berbagai ritual adat di dalam maupun di luar kampung.



Berfoto bersama para perempuan adat pemimpin.



Pelaku ritual

Hoana Gura adalah salah satu *hoana* (kampung) dari 10 *hoana* di Halmahera Utara. Setiap *hoana* memiliki tugas dan peran tersendiri dalam komunitas Masyarakat Adat di Halmahera Utara yang disebut sebagai Komunitas Hibualamo. Gura adalah nama pulau yang terletak di tengah-tengah Talaga Lina.

Hoana Gura mempunyai tugas *O'niata Mangale*, yaitu melakukan ritual-ritual sesuai kepercayaan orang Tobelo. Misalnya, ritual *Gomatere* untuk membuka lahan kebun, memanen, membangun rumah, dan menghadapi perang. Sementara secara spiritual, orang Hoana Gura juga mampu membaca tanda-tanda alam, seperti musim hujan, musim kemarau, dan bencana alam. Kami sudah mengetahui saat akan terjadi gempa tektonik yang menyebabkan Pulau Gura tenggelam. Karena kemampuan orang Hoana Gura, orang-orang dari Pulau Gura sebelum gempa mengungsi ke Kanaba, suatu lokasi di dekat Talaga Lina.

Kanaba berada di Hoana Gura wilayah pesisir utara. Lokasi itu menjadi tempat transit. Setelah gempa, orang-orang Hoana Gura banyak yang akhirnya menetap di beberapa pulau di seberang Tobelo.

Karena kemampuan spiritual kami, kami yakin bahwa di mana pun kami berada, kami akan selalu dilindungi oleh *Jou Madutu* (Tuhan Yang Maha Kuasa). Dengan keyakinan itu, kami berani bertualang ke berbagai penjuru bumi.

Hoana Gura tersebar di 13 desa. Ketiga belas desa tersebut dipimpin seorang Ketua Hoana serta 13 Ketua Gogere (pemimpin setingkat desa). Desa-desa tersebut berada di Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau Kumo, Pulau Kolorae, Pulau Rorangane, Pulau Paole, dan Pulau Tutupu.

Hoana Gura yang berada di pulau-pulau serta beberapa desa di Tobelo, sebagian besar lokasinya di pesisir pantai. Perkembangan pembangunan Kota Tobelo telah berdampak pada rusaknya kawasan pesisir dan hutan bakau. Menyikapi itu, kami para pemuda adat di Hoana Gura membentuk sebuah komunitas untuk membudidayakan hutan bakau. Komunitas itu kami namai Wayamato Lestari. Wayamato adalah nama mata air di kawasan hutan bakau di Desa Gura, Kecamatan Tobelo.

Hutan bakau telah ada sejak dulu kala. Di zaman nenek moyang kami, hutan bakau disebut *pilawang madoto* atau *tanjung pilawang*. Hutan bakau difungsikan sebagai serambi penyangga abrasi pantai.

Untuk penyelamatan pesisir, Wayamato Lestari membuat persemaian benih, menanam anakan bakau serta menjaga, memelihara, dan membersihkan sampah-sampah di sekitar bakau. Upaya Wayamato Lestari membuahkan hasil. Tanaman di hutan bakau telah tumbuh kembali, bahkan berkembang menjadi destinasi wisata. Anggota Wayamato Lestari juga ada yang menjadi pemandu wisata. Wayamato Lestari menjaga dan mengamankan hutan bakau dari tangan-tangan jahil. Hutan bakau telah menjadi alternatif aktivitas ekonomi.

Budaya Laut yang Merekatkan



Kehidupan di Hoana Gura, terutama yang tinggal di pulau-pulau, telah mewarisi darah petualang Buranyita. Kelompok petualang laut itu dikenal sebagai *canga*. Itu juga diartikan perahu-perahu yang digunakan untuk melawan penjajah. Ketika semuanya masih bergabung dengan Kesultanan Ternate dan Tidore, kelompok-kelompok *canga* bisa berlayar sampai ke Pulau Seram, Papua, Ambon, bahkan Sulawesi.

Di masa sekarang, kekerabatan antar-pulau lebih banyak mewujudkan melalui mata pencaharian, misalnya menangkap ikan bersama yang disebut *tau gumi*. Dalam *tau gumi*, masyarakat dari berbagai pulau pergi melaut saat pasang besar. Kami membawa alat-alat berburu tradisional dan musik. Kami pun lantas bernyanyi bersama sampai air surut dan menangkap ikan-ikan yang terjebak di bebatuan. Hasilnya dibagikan merata bagi semua warga.

Apabila wilayah laut tempat berburu masuk ke suatu kawasan tertentu, kami akan meminta izin dulu kepada penghuni pulau sebab setiap pulau memiliki teritori masing-masing. Sistem adat itu disebut *Bobangu*, yaitu peraturan adat yang memberlakukan sanksi berupa denda bagi yang melanggar.

Meski legenda dan berbagai ritual banyak berkaitan dengan laut, itu belum cerita keseluruhan tentang nenek moyang kami. Kehidupan sebagai masyarakat petani dengan beragam ritual, juga menjadi warisan kami. Salah satunya adalah ritual panen dengan menggunakan *saloj*, yaitu tas atau keranjang untuk menaruh hasil panen. *Saloj* melambangkan kemakmuran. Ritual panen dipresentasikan dengan tari *saloj* yang menggambarkan kegembiraan *moholehe-moholehe* (gadis-gadis) Hoana Gura saat membawa pulang hasil panen. Pada masa sekarang, kesakralan tarian itu telah memudar. Kini, tarian tersebut biasa dipentaskan pada acara-acara seremonial atau sebagai seni pertunjukan di panggung-panggung hiburan.



Konflik Lahan Berkelanjutan

Cerita konflik sudah menjadi cerita lama. Sejak zaman para leluhur, telah terjadi berbagai konflik di wilayah Hoana Gura. Pada uraian berikutnya, saya akan mengutarakan perjalanan konflik yang melibatkan Masyarakat Adat Hoana Gura.

Di zaman ketika bangsa Portugis datang mencari rempah-rempah, wilayah Hoana Gura di Pulau Halmahera telah menjadi bagian dari Jalur Rempah karena kaya akan cengkeh dan pala. Terjadi perebutan lahan antara orang Portugis yang dibantu Kesultanan Ternate dan orang Hoana Gura yang telah menghuni lahan sejak dulu. Orang Portugis dan Kesultanan Ternate menetapkan semua kawasan hutan ke dalam wilayah perdagangan mereka. Hutan-hutan di Hoana Gura direbut direbut Kesultanan Ternate, sehingga terjadi pertikaian. Konflik berkepanjangan pun merenggut korban meninggal di kedua belah pihak.

Kesultanan Ternate di Pulau Ternate memperluas wilayah kesultananannya sampai ke Pulau Halmahera dan memasuki wilayah Tobelo. Hoana Gura tidak mau tunduk, sehingga terjadi pertempuran. Ada legenda Pulau Tulang tentang pertempuran antara Hoana Gura dan prajurit Kesultanan Ternate. Itu adalah pulau tempat pembuangan tulang belulang.

Pada zaman penjajahan Belanda, sebagian besar hutan milik Hoana Gura di Tobelo diambil alih dan dijadikan lahan perkebunan kelapa oleh perusahaan dagang Belanda bernama VOC. Perang pun tak dapat dihindarkan antara Masyarakat Adat dan VOC. Daerah bekas perkebunan perusahaan kelapa tersebut kini telah menjadi desa. Dulu namanya *Morotai Klapper Cultuur Maatschappij* (MKCM).

Kemudian, masuknya agama-agama besar, seperti Islam dan Kristen, telah mengubah sistem kepercayaan asli kami. Akan tetapi, beberapa istilah dalam sistem kepercayaan para leluhur masih dipegang teguh hingga sekarang. Misalnya, *O Gikiri Moi* merujuk pada Sang Pencipta Alam Semesta, *O Jou Madutu* pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan *higi* atau *sigi* adalah sebutan untuk rumah pemujaan atau tempat beribadah.

Di Halmahera, sekitar abad ke-13, terdapat Kerajaan Moro yang berpusat di Galela. Hoana Gura terkena dampak dari perpecahan Kerajaan Moro yang kemudian terbagi dua, yaitu Morodina dan Morotai. Sebagian orang dari Hoana Gura berpindah ke Hoana Morotai dan bermukim di Desa Juanga Wawama dan Sabatai.

Di era Indonesia sekarang, banyak terjadi pemekaran desa. Hal itu sering melahirkan konflik di tapal batas antara Hoana Gura dan *hoana* yang lain. Misalnya, pemekaran Desa Wari dan Desa Gorua di Kecamatan Tobelo yang merupakan perbatasan Hoana Gura dan Hoana Mumulati. Hingga sekarang, kedua *hoana* itu masih berkonflik soal perbatasan.



Politik dan Pembebasan Lahan

Hoana Gura yang berada di tengah-tengah Kota Tobelo, memiliki lahan yang diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun. Saat ini, kami memiliki masalah yang berkaitan dengan perluasan wilayah kota yang berakibat pada masuknya penduduk dari luar Tobelo. Pembangunan kantor-kantor pemerintah dan infrastruktur pendukungnya pun membutuhkan lahan, sehingga terjadi pembebasan lahan secara besar-besaran.

Saat ini, Kantor Bupati Halmahera Utara dan kawasan kantor pemerintah lainnya sudah dibebaskan. Sebagian berada di dalam teritori wilayah adat kami. Hoana Gura juga memiliki beberapa pulau tak berpenghuni yang menjadi bagian dari wilayah adat kami.

Kota Tobelo merupakan ibu kota dari Kabupaten Halmahera Utara. Sejak pemekaran pada 2003, Bupati Halmahera Utara berasal dari Hoana Gura. Pada pemilihan bupati definitif tahun 2005, kembali terpilih orang dari Hoana Gura. Hingga pemilihan keempat kalinya hingga masa jabatan 2025, bupati terpilih juga dari Hoana Gura.

Orang Hoana Gura juga ada yang menjabat di DPRD: empat orang di tingkat DPRD Kabupaten dan dua orang di DPRD Provinsi.

Dari kondisi yang ada, dengan aktifnya Masyarakat Adat di bidang politik, muncul harapan bahwa ke depan kami dapat sepenuhnya menentukan nasib kami sendiri dan tak lagi menjadi objek dari Proyek Strategis Nasional (PSN) atau pembangunan demi kepentingan investasi. Kami berharap dapat berdaulat atas kehidupan kami sendiri. Semoga harapan kami terwujud!



23

Kisah dari Negeri Honitetu: Perempuan Mata Sagu

Oleh Jomima Ihalewey bersama Permata Adinda

Dini hari itu, Masyarakat Adat Negeri Honitetu di Desa Uraur masih ramai. Semua orang sudah terjaga. Kami mempersiapkan sebuah ritual adat. Kaum laki-laki sibuk ke hutan berburu babi ataupun rusa. Mereka juga menyempatkan diri menebang pohon bambu untuk membakar daging buruan dan menangkap ikan di sungai.

Hasil buruan itu akan dibawa kepada kami, para perempuan adat yang sudah berkumpul di pusat *negeri*. Para perempuan adat memasak daging hasil tangkapan dengan kayu bakar yang telah dibawakan kaum pria. perempuan-perempuan adat juga mencari dan memotong daun *riuk* dan sirih pinang untuk keperluan ritual.

Penyematan Gender



Hari itu, seorang bayi baru saja lahir dan perlu disiapkan untuk menghadapi dunia luar. Itulah mengapa ritual *Tana Ile* dilakukan: sebelum seorang bayi boleh keluar rumah dan berbaur dengan masyarakat, ia harus mengikuti serangkaian upacara adat yang dipercaya akan membawakan berkah untuknya. *Mama Biang*, sebutan bagi bidan atau dukun beranak yang membantu melahirkan sang anak bayi, akan bertanggung jawab untuk menggendong di dalam rumah.

Ritual *Tana Ile* menyematkan peran gender yang spesifik bagi seorang anak. Jika bayi tersebut adalah perempuan, *Mama Biang* akan membawakan pisau dan *garuru* sebagai tanda bahwa ia akan tumbuh besar dengan keahlian berkebun dan memasak. Sementara, jika anaknya adalah laki-laki, *Mama Biang* akan membawakan parang sebagai tanda bahwa si anak laki-laki akan punya keahlian berburu.

Saya, Jomima Ihalawey, saya perempuan adat Negeri Honitetu yang berdomisili di Desa Uraur, bagian dari Negeri Adat Honitetu. Pada 30 tahun lalu, saya juga menjalani ritual itu. Peran perempuan adat disematkan pada saya dan masih saya pegang hingga saat ini.

Saya mengawali aktivitas setiap pagi dengan memasak dan membersihkan rumah sambil suami bersiap untuk kerja dan anak saya berangkat sekolah.

Namun, di sisi lain, Negeri Adat Honitetu yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, tidak memberlakukan peran itu secara tegas. Pagi hari, setiap saya melakukan aktivitas rumah tangga, suami dan anak saya akan turut serta membantu. Suami saya ikut memasak dan menyapu, sedangkan anak saya mencuci piring. Di malam hari, ketika keduanya telah pulang ke rumah, mereka tidak serta-merta beristirahat dan membiarkan saya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga sendirian. Keduanya ikut mencuci baju, memasak makan malam, ataupun aktivitas-aktivitas domestik lainnya.

Saya sengaja membiasakan anak laki-laki untuk melakukan tugas-tugas domestik sejak kecil. Saya menginginkan, suatu hari kelak saat berumah tangga, anak lelaki saya tidak akan membiarkan istrinya bekerja sendirian.

Perempuan adat di Negeri Honitetu diibaratkan sebagai “mata sagu.” Mata sagu akan menciptakan rumpun sagu dengan jumlah berkali-kali lipat. Perempuan adat, sebagaimana mata sagu, adalah sumber kehidupan. Ia mesti dihargai dan dilindungi setiap saat.

Ada sistem matriarki yang berlaku di Masyarakat Adat Honitetu. Perempuan adat punya posisi sebagai kepala mata rumah manakala dia menikah dengan laki-laki dengan marga berbeda. Pihak perempuan akan meneruskan marganya ke anak-anaknya. Selain itu, ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan adat asal Negeri Adat Honitetu, ia mesti tinggal di kampung si perempuan.

Sebagai seorang perempuan adat, hidup saya tidak hanya berkutat di perihal rumah tangga. Setelah suami saya, seorang guru SMA, dan anak saya berangkat sekolah, inilah waktu di mana kesibukan saya yang sebenarnya dimulai. Saya bersama dengan perempuan-perempuan adat lain akan mengorganisasi berbagai aktivitas di *negeri* kami. Kegiatan itu termasuk kegiatan bersama sesama perempuan adat, ritual adat, ataupun peribadatan di gereja.

Saya mengawali aktivitas di luar rumah itu dengan pergi ke warung dan kebun kolektif yang saya kelola bersama dengan dengan 20 perempuan adat di *negeri*. Kebun seluas setengah hektar milik ayah saya, akan kami bersihkan terlebih dahulu, sehingga layak untuk ditanami. Kami akan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di sana, termasuk jagung, pisang, dan kacang.



Perempuan adat di Desa Uraur memanen hasil kebun kolektif.

Ketika sudah waktunya panen, sebagian hasil kebun itu akan kami jual. Keuntungannya akan kami tabung untuk kebutuhan organisasi dan anggota, sedangkan sebagian lainnya akan kami bagikan ke orang-orang di sekitar yang membutuhkan, terutama kaum perempuan. Saya bagikan kepada ibu-ibu, termasuk yang sudah tidak punya suami dan sangat membutuhkan.

Jika tidak ke kebun, saya akan pergi ke warung milik saya, juga mengurus kegiatan peribadatan ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan gereja melalui unit atau sektor pelayanan. Ada organisasi perempuan di gereja.

Selain beribadah, organisasi perempuan yang beranggotakan perempuan adat ini punya fokus untuk memberdayakan sesama perempuan. Kami mengadakan kegiatan pelatihan pangan lokal dengan tujuan agar perempuan adat dapat mengutamakan sumber pangan di wilayah adat kami untuk dikelola. Jenis-jenis pangan, seperti ubi, singkong, dan sagu, kami coba olah kreatif mungkin. Misalnya, dijadikan sumber karbohidrat sebagai pengganti nasi, atau kami olah menjadi kue.

Di Komunitas Masyarakat Adat Honitetu, dari semuanya itu terlihat juga pentingnya peran perempuan adat di kelembagaan adat atau yang biasa disebut sebagai *Saniri*. Negeri Honitetu terdiri dari sembilan kampung, sehingga wilayah adat ini juga disebut sebagai *Nudua Siwa* yang berarti “sembilan mulut” atau “sembilan suara.” Sembilan kampung itu adalah Rumatita, Imabatai, Honitetu, Sokawati, Ursana, Uraur, Nunaya, Nui, dan Lakubutui. Kampung-kampung tersebut terdiri dari sembilan *soa*, yaitu Soa Lattu, Soa Moly, Soa Titta, Soa Mauwene, Soa Tebiary, Soa Laiuluy, Soa Tayane, Soa Taniwel, dan Soa Hokoate.

Perwakilan *soa* inilah yang nantinya akan menjabat di *Saniri* atau kelembagaan adat yang berperan mengayomi hukum adat. Kepala *Soa* Mauwenen haruslah seorang perempuan karena memiliki peran yang krusial, yaitu keputusan akhir di level adat ada di tangannya. Jika ia tidak setuju, maka keputusan tidak bisa dijalankan. Itu bukan disebabkan kepala *soa* dari Mawene punya posisi tertinggi dibandingkan kepala-kepala *soa* lainnya di *Saniri*. Hal itu diatur demikian karena Masyarakat Adat Honitetu amat menghargai perempuan. Jadi, segala keputusan terakhir selalu ditanyakan kepada saudara perempuan. Kalau perempuan bilang tidak bisa, maka tidak akan dilakukan.



Tradisi yang Hilang

Desa Uraur, tempat saya tinggal, masuk wilayah Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan merupakan bagian dari wilayah adat Negeri Honitetu. Desa ini terdiri dari penduduk dengan lima marga asli, yaitu Ihalawey, Latumadina, Serihollo, Tayane, dan Rumahmale.

Pada mulanya, desa ini menjadi salah satu dari sembilan kampung yang ada di Negeri Honitetu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak pendatang yang menetap dan tinggal bersama penduduk asli. Dengan semakin membesarnya Uraur dan semakin membengkaknya anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan publik lainnya, maka Uraur dimekarkan menjadi sebuah desa sejak 2001. Dari yang awalnya desa persiapan, Desa Uraur resmi menjadi desa definitif sejak 2007.

Meski telah terpisah secara administrasi dari Negeri Honitetu, secara adat Desa Uraur masih menjadi bagian dari kesatuan wilayah adat Negeri Honitetu. Desa Uraur merupakan pintu masuk wilayah adat dari Masyarakat Adat Honitetu. Masyarakat Adat yang tinggal di Desa Uraur punya keleluasaan sebagaimana Masyarakat Adat Honitetu lainnya untuk mengakses hutan adat dan mengambil kebutuhan pangan dari sana.



Perempuan adat dari Negeri Honitetu Desa Uraur mengumpulkan dan mengolah hasil panen untuk dijual dan dibagikan ke warga yang membutuhkan.

Terlepas dari itu, semakin banyaknya pendatang yang menetap di Desa Uraur juga berpengaruh ke semakin terkikisnya tradisi dan kepercayaan adat yang telah diteruskan turun-temurun oleh Masyarakat Adat Honitetu.

Para pendatang, misalnya, tak semua menganut sistem matriarki. Banyak dari mereka yang tumbuh besar dengan menganut sistem patriarki dan membawa kepercayaan dan keseharian itu ke Desa Uraur. Ketika orang tersebut menikah dengan perempuan dari marga asli Honitetu, perempuan tersebut kerap “mengalah.” Ia bisa saja ikut ke kampung suaminya dan tinggal di sana dan tidak lagi menjalani hidup, seperti tradisi asli Honitetu agar pasangan suami-istri itu bisa tinggal di kampung sang istri. Peran kepala rumah tangga juga bisa beralih ke laki-laki, tidak lagi ada di pihak perempuan sebagaimana tradisi Masyarakat Adat Honitetu.

Dalam beberapa kasus, fenomena tersebut berdampak ke dinamika suami dan istri di keluarga. Relasi mereka menjadi tidak setara. Warisan orangtua yang semestinya diberikan kepada perempuan, beralih menjadi hak laki-laki sepenuhnya. Suami yang percaya bahwa tugas perempuan sepenuhnya adalah di dalam rumah, juga bisa mengekang sang istri untuk berkegiatan dan bersosialisasi di luar rumah. Dinamika inilah yang membuat masih ditemukannya perempuan adat di Negeri Honitetu, khususnya di Desa Uraur, yang enggan berorganisasi bersama perempuan adat lain atau menjadi pemimpin di desa.

Di sisi lain, situasi ekonomi membuat banyak perempuan adat di Desa Uraur tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi, sehingga mereka tidak cukup percaya diri dalam meningkatkan kapasitas diri mereka. Akses transportasi yang terbatas dan jarak sekolah yang jauh membuat banyak warga Masyarakat Adat Desa Uraur putus sekolah di bangku SMP, bahkan SD. Fenomena ini paling banyak dialami penduduk berusia 40-50 tahun ke atas, yaitu mereka yang tumbuh besar ketika sarana dan prasarana publik di Desa Uraur, belum memadai. Saya melihat banyak di antara mereka yang berusia di bawah 30 tahun, rata-rata setidaknya sudah lulus SMA, bahkan tingkat sarjana.



Kekhawatiran yang Mendera

Kendala-kendala yang saya uraikan itu, diperparah dengan belum adanya pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Kami, dengan sejumlah wilayah adat yang telah diklaim sebagai hutan negara atau hutan lindung oleh pemerintah, menyimpan ketakutan bahwa wilayah adat dan sumber penghidupan kami di Negeri Honitetu, akan dirampas dan dijadikan industri perkebunan atau pertambangan.

Kecurigaan itu kembali membesar ketika Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan perintah agar pemilihan kepala desa dijalankan secara serentak dengan melibatkan semua desa adat. Itu berarti calon-calon kepala desa, bisa dari mana saja dan tidak lagi mesti orang bermarga asli Honitetu.

Sementara itu, ada tradisi di Masyarakat Adat Honitetu, termasuk di Desa Uraur, agar kepala desa dipilih berdasarkan marga keturunan *raja* atau kepala desa sebelumnya. Kekhawatiran terbesar saya yaitu ketika jabatan kepala desa dapat diduduki oleh siapa saja, maka bisa saja wilayah adat kami tidak lagi dianggap sebagai wilayah adat, tetapi disebut desa. Kalau menjadi desa, bisa jadi seluruh wilayah hutan kami diklaim sebagai hutan negara.

Kekhawatiran itu sangat beralasan. Meski belum ada konflik vertikal dengan negara di kalangan Masyarakat Adat Honitetu, tetapi belum disahkannya Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat dengan wilayah adatnya, menyebabkan kami berada di posisi rentan.

Banyak cara yang kami lakukan untuk memperjuangkan negeri kami. Strategi-strategi itu melibatkan perempuan secara aktif dan - pada saat yang sama - memberdayakan kaum perempuan. Di level kebijakan, kami juga melakukan audiensi dengan pimpinan daerah. Kami berencana akan membuat aksi besar bersama Masyarakat Adat lain dengan harapan pemilihan kepala desa tidak perlu dilakukan secara serentak.



Pembagian hasil panen dan sembako kepada perempuan adat kepala keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Di level komunitas, kami para perempuan adat membicarakan strategi untuk mengembalikan tradisi adat dan mempertahankan wilayah adat kami di tengah kegiatan berkebudayaan kolektif. Bekerja sama dengan Pemerintah Desa maupun *Saniri*, kami sepakat untuk membangun sekolah adat dengan kurikulum yang isinya memperkenalkan kembali generasi muda dengan asal-usul dan budaya, di mana kami dilahirkan dan tumbuh besar, salah satunya bahasa adat.

Keluarga di Masyarakat Adat Honitetu percaya bahwa pendidikan berperan penting bagi hidup seorang anak. Ketika orangtua seorang anak mampu secara ekonomi, maka akan mendukung anak-anak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, terlebih untuk anak perempuan. Perempuan adat di sini ibarat mata sagu. Saya amat mengharapkan perempuan adat yang bersekolah, akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya. Tujuan utamanya, lagi-lagi, adalah demi melestarikan budaya Negeri Adat Honitetu. Saya tidak akan lupa dan saya bangga, kami adalah mata sagu.

* * *



24

Kisah dari Suku Osing Desa Kemiren: Kisah Mak Sus dan Sekolah Adat Osing

Oleh Susiati Ningsih dan Ilham Saifulloh
bersama Nurdiyansah Dalidjo

Saya Ilham Saifulloh. Saya pemuda adat dari Suku Osing, Banyuwangi. Umur saya 21 tahun dan saya lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 11 Januari 2000.

Di masa pandemi ini, kegiatan saya sehari-hari berada di Sekolah Adat Osing yang kami namakan Pesinauan. Saya bersama Susiati Ningsih, yang saya panggil Mak Sus, dan kawan-kawan lainnya banyak melakukan kegiatan di sana. Lokasi Pesinauan adalah sawah milik Mak Sus. Kami melakukan berbagai kegiatan Bersama. Mulai dari belajar tentang ritual, sekolah adat, masakan ritual atau makanan khas, hingga bercocok tanam.

Saya dan Mak Sus akrab karena kami masih bersaudara. Ia kakak ibu saya, jadi dalam bahasa Osing dipanggil Wak Sus. Dalam penulisan kisah ini saya bersama Mak Sus menuliskan kisahnya sebagai perempuan adat sekaligus tentang kampung kami.

Asal-usul Kemiren



Kemiren adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Penamaan tersebut berasal dari kata “kemirian” yang berarti banyak tumbuh pohon kemiri. Masyarakat Adat setempat akhirnya akrab menyebut tempat tinggal kami itu dengan Kemiren.

Desa Kemiren diperkirakan berdiri tahun 1830-an dengan kepala desa pertamanya bernama Walik pada masa pemerintahan Bupati R. T. Wiryo Adi Danuningrat. Sebelumnya, Desa Kemiren hanya berupa sawah dan kebun milik masyarakat Cungking yang *medok* (bertani dengan tinggal di sawah atau ladang) hingga beranak pinak di sana. Maka, dibabatlah hutan untuk dijadikan perkampungan.

Desa Kemiren terletak pada ketinggian 144 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan bentuk lahan berbukit dan dibelah oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Gulung dan Sungai Sobo. Desa Kemiren memiliki luas 177.052 hektar dengan penduduk sekitar 2.560 jiwa.

Nama “Kemiren” juga kerap dimaknai sebagai kepanjangan dari “kemroyok mikul rencana nyata” yang dihubungkan dengan prinsip “bersama-sama dan gotong royong.” Kemiren pun memiliki berbagai keunikan, mulai dari adat, tradisi, kesenian, kuliner, serta pola hidup Masyarakat Adat yang masih menjaga tradisi yang ada sejak dulu.



Para pemuda adat tengah berkumpul di halaman sekolah adat.

Secara historis genealogis-sosiologis, desa kami masih memperlihatkan tata kehidupan sosio-kultural yang mempunyai kekuatan nilai tradisional Osing. Sehingga, pada saat kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, Desa Kemiren ditetapkan menjadi kawasan wisata Desa Adat Osing. Osing merupakan suku asli Banyuwangi yang tersebar di sekitar sembilan kecamatan di Banyuwangi. Dalam lingkup lebih luas, Osing merupakan Masyarakat Adat yang menjadi salah satu bagian dari sub-etnis Jawa.

Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan yang berkembang di daerah ujung timur Pulau Jawa. Keberadaan Masyarakat Adat Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan.

Orang Osing menurut Andrew Beatty dalam buku *The Variety of Javanese Religion*, diduga adalah keturunan sisa-sisa penduduk tahun 1768. Meski begitu, dokumen sebelumnya tidak menyebutkan nama itu. Para ahli sejarah lokal cukup yakin bahwa julukan "Osing" itu diberikan oleh para imigran yang menemukan bahwa kata "tidak" dalam dialek lokal, adalah "osing" - yang berbeda dari kata "ora" dalam bahasa Jawa. Maka, kami disebut Osing saja atau juga disebut Jawa Osing.

Kehidupan di Desa Kemiren



Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan kekhasan yang melekat pada Masyarakat Adat Osing. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa itu menegaskan bahwa desa ini berwajah Osing dan diproyeksikan sebagai Cagar Budaya Osing. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh desa kami, di antaranya penggunaan bahasa yang khas, yaitu bahasa Osing. Bahasa ini memiliki ciri khas dengan adanya sisipan "y" dalam pengucapannya. Contohnya, *madang* (makan) itu dalam bahasa Osing menjadi *madyang*, *abang* (merah) dalam bahasa Osing menjadi *abyang*.

Masyarakat desa kami masih mempertahankan bentuk rumah sebagai bangunan yang memiliki nilai filosofi. Adapun bentuk rumah tersebut, meliputi rumah *tikel balung* atau beratap empat yang melambangkan bahwa penghuninya sudah mantap, rumah *crocogan* atau beratap dua yang mengartikan bahwa penghuninya adalah keluarga yang baru saja membangun rumah tangga dan atau oleh keluarga yang ekonominya relatif rendah, dan rumah *baresan* atau beratap tiga yang melambangkan bahwa pemiliknya sudah mapan dan secara materi berada di bawah rumah bentuk *tikel balung*. Ketiga jenis rumah adat Suku Osing itu masih bisa ditemui di Desa Kemiren, salah satunya di Sanggar Genjah Arum milik salah satu budayawan Banyuwangi. Bangunan-bangunan di sana berusia hingga ratusan tahun dan dirancang secara unik dengan struktur utama susunan berupa empat tiang *saka* (kayu) menggunakan sistem tanding tanpa paku, sehingga tahan gempa.

Keunikan lain dari Desa Kemiren, adalah mayoritas penduduk memiliki tempat tidur berupa “kasur” dengan motif dan warna yang sama, yaitu hitam di bagian atas dan bawah serta merah di tepinya. Kasur ini akan dimiliki oleh pasangan pengantin yang didapat dari orangtuanya. Hal ini memiliki filosofi tersendiri, warna merah yang berarti sosok seorang ibu dan hitam melambangkan kelanggengan. Artinya, kasih sayang seorang ibu kepada keluarga itu tidak ada batasan. Pada satu momen, seluruh Masyarakat Adat Kemiren mengeluarkan kasur tersebut untuk di jemur di sepanjang jalan desa. Tradisi itu dinamakan *Mepe Kasur* dan dilakukan karena kami percaya sumber segala penyakit berasal dari tempat tidur. Sehingga, itu dilakukan untuk mengusir segala macam penyakit. Tradisi tersebut merupakan satu rangkaian dari tradisi *Tumpeng Sewu* atau umumnya disebut ritual bersih desa yang dilaksanakan pada bulan Zulhijah.

Mayoritas Suku Osing bermata pencaharian sebagai petani. Kami memiliki sumber air yang melimpah dan kami juga menjaga alam. Itu terbukti dari sistem pengairan pada sawah yang terbentang sepanjang perjalanan menuju Desa Kemiren. Sistem pengolahan sawah juga masih mengacu pada adat dan tradisi. Persawahan kami memiliki ciri khas seperti pondok di tengah atau pinggir sawah dengan empat tiang penyangga utama dari bambu. Pada pondok terdapat alat musik berupa angklung, alat musik itu kami sebut angklung *paglak*. Selain itu, terdapat sebuah baling-baling dari bambu yang disebut *kiling* yang bertujuan untuk menentramkan petani dan pengingat - diambil dari kata "*kiling*" (*iling*). Setiap musim panen tiba, kami melakukan upacara tradisi dengan memainkan musik khas Suku Osing bersama dengan sajian kuliner khas, yaitu *pecel pitik*. Alunan musik angklung *paglak* pun mengiringi petani saat memanen padi.

Selain bertani, ada banyak dari kami yang berprofesi sebagai seniman, seperti seniman tari, seniman musik tukang ukir, dan lainnya. Ada juga tukang kayu yang biasanya membuat rumah dan perabotan tradisional Osing. Sementara itu, para perempuan adat banyak pula yang berjualan (memproduksi) kue khas Suku Osing, seperti *kelemben* (bolu bakar), *bagiak*, *gerubi*, *sato*, *cempani*, *taliabrem*, *getihan kacang*, *slengkreg*, *bangket*, dan jajanan pasar yang khas lainnya.

Keistimewaan Desa Adat Kemiren adalah kami masih menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang. Ada tradisi Barong Ider Bumi, Tumpeng Sewu, serta arak-arakan maupun seni barong lainnya. Kami hidup berdampingan dengan jiwa gotong royong dan tradisi musyawarah yang terus terjaga. Tahun 2013 lalu, Masyarakat Adat Osing di Kemiren mencetuskan acara *ngopi* bersama dengan nama "Ngopi Sepuluh Ewu."



Musyawahar yang dilakukan pemuda adat bersama para tokoh dan tetua Masyarakat Adat Osing.

Masyarakat Adat Osing juga masih menjaga ritual daur hidup atau peralihan usia kedewasaan individu, seperti *Tingkeban* (saat usia kandungan tujuh bulan), *Nyukit Lemah* dan *Cuplak Puser* (saat ari-ari terlepas), *Selapan Lahir* (saat 36 hari setelah kelahiran), *Mudun Lemah* (saat usia tujuh bulan), *Kekah (aqiqah)*, *Ruwatan*, *Sunatan* dan *Dikalani*, *Nikahan*, *Sadok*, *Kosek Ponjen* (untuk anak semata wayang dan anak terakhir), *Kembang Kuro*, *Sepasar* (saat lima hari setelah akad), *Selapan Nikah* (saat 44 hari setelah akad), *Nyelameti Putu* (setelah memiliki cucu), *Geblak* (kematian), dan lain-lain.

Selain ada lembaga pemerintahan, Desa Kemiren juga memiliki lembaga adat yang mengatur masalah tradisi dan ritual. Ketua Adat Osing Desa Kemiren bernama Suhaimi atau lebih akrab disapa Pak Imik. Laki-laki berumur 58 tahun itu sehari-hari bekerja pada bidang pertukangan kayu, baik untuk rumah maupun furnitur khas Suku Osing, misalnya lemari *jamang*, *penggawangan* atau ranjang tidur kayu, kursi antik, meja *damar kambang*, dan *gebyog*. Pak Imik juga sesepuh yang dipercaya untuk memimpin ritual, seperti *Sadok* (ritual pernikahan *temu manten* yang dilakukan saat *surup* atau senja) dan *Mocoan Lontar Yusup*.

Pak Imik bercerita bahwa Kemiren merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih memegang teguh *pitutur* orang tua zaman dahulu, sehingga adat dan tradisi masih sangat terjaga di Desa Kemiren. Selain ritual, juga masih ditemui kesenian tradisional, seperti *barong*, *gandrung*, *kuntulan*, *mocoan*, *burdah*, dan lainnya. Keunikan tradisi dan kesenian tersebut membuat desa kami sebagai Desa Wisata Adat Osing, di mana dengan adanya wisata adat dapat membantu perekonomian masyarakat kami melalui *homestay* dan beberapa produk produk lain, seperti kue, kerajinan, kain batik, dan sebagainya.

Para pemuda pemudi adat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kemiren aktif mengelola pariwisata dan kesenian Desa Kemiren. Kami menyuguhkan berbagai kesenian yang ada di Desa Kemiren, seperti Tari Gandrung, Barong Kemiren, Tabuan Gede (Gamelan Jawa), Bordah, Kuntulan, Gedhogan (semacam kesenian memainkan lesung), Mocoan, dan tari-tari tradisional lainnya. Para pemuda juga memberikan pembelajaran terkait adat kepada para pengunjung, seperti cara *nyingkal* atau membajak sawah dan *tandur* atau menanam padi. Pengunjung disajikan berbagai makanan khas Osing, seperti *pecel pitik*, *uyah asem*, *sekul wuduk*, *sego golong*, *tumpeng srakat*, dan *jenang abang*.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor yang ada di Desa kemiren, termasuk pariwisata, ekonomi, dan sosial-budaya. Sektor pariwisata menjadi terganggu akibat tidak adanya pengunjung yang datang. Itu berdampak langsung terhadap perekonomian kami, di mana masyarakat yang biasanya bekerja pada sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelola tempat penginapan, warung makan, dan pelaku seni, menjadi terganggu. Mereka hanya bisa mengandalkan pemasukan dari sawah dan kebun, menjadi tukang dan kuli, pekerjaan serabutan, dan pesanan kue dan masakan khas Osing yang tidak sebanyak sebelum masa pandemi. Perempuan adat yang aktif bekerja di sawah juga merasakan dampak Covid-19. Namun, kami tidak banyak merasakan dampak karena dalam situasi apa pun, kami tetap pergi bekerja ke sawah setiap pagi.



Tari Gandrung.

Kisah Mak Sus



Susiati Ningsih nama saya. Saya akrab dipanggil Mak Sus yang katanya saya adalah perempuan adat yang tangguh dalam situasi apa pun dari Suku Osing Desa Kemiren. Saya lahir pada tanggal 10 Februari 1965 di Banyuwangi memiliki dua orang anak. Yang pertama, Slamet Dihardjo atau dipanggil Samsul atau Cak Sul. Samsul menggeluti tari tradisional dan mendapatkan gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya. Karya yang dihasilkan Slamet Dihardjo, di antaranya Tari Lundoyo, Sawung Alit, Bal-balan, Digar, Panji Blambangan, dan Paman Iris. Sejak kecil, Slamet Diharjo hidup pada lingkungan seni, baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Samsul sejak kecil telah mendapat tugas merawat dan menjadi joki *Jaran Kencak* milik kakeknya, Nang Lrik, yang juga seorang pemaju gandrung. Saat ini, Slamet menjadi guru sekaligus Ketua Jurusan Tari di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Selain bidang tari, Samsul juga menggeluti bidang seni lain, seperti pembuatan pakaian tari dan karnaval serta menjadi pelaku Mocoan Lontar Yusup. Ia juga menjadi *pengarep* atau Kepala Sekolah Adat Osing Pesinauan.

Anak kedua saya bernama Ayu Aning Susanti atau akrab dipanggil Mbok Santi. Keseharian Mbok Santi adalah ibu rumah tangga serta membantu saya membuat masakan khas Osing, baik kue tradisional maupun masakan ritual.

Saya sering menerima pesanan kue khas Osing, seperti *kelemben*, pisang goreng, *sumping* atau *nogosari*, *sumping pati*, *jongkong ijo*, *contong*, *kucur*, *precet*, dan gulali dari gula aren. Resep *kelemben* saya khas, terdiri dari sepuluh butir telur (bebek atau ayam), satu kilogram tepung terigu, satu kilogram gula pasir, irisan gula aren, satu sendok teh soda kue, dan satu sendok teh garam halus tiap satu resep *kelemben*. Selain *klemben* dan *klemben gulo abang*, terkadang saya mendapat pesanan *klemben* rasa jahe dengan menambahkan lima ratus gram parutan jahe maupun *keningar* (kayu manis) dengan tambahan dua sendok teh *keningar*. Saya mendapatkan upah tiap resep yang dibuat atau bisa juga dengan membeli *kelemben* per kilogramnya. Saya terkadang juga mendapatkan pesanan untuk menggoreng atau menyangrai kopi dan membuat tape. Tape yang menjadi ciri khas kami, adalah tape *buntut* (ekor) yang menggunakan daun kemiri sebagai pembungkus - dengan tidak memotong tangkainya yang menjadikan bungkus tape memiliki bagian serupa ekor.

Saya sering mendapat pesanan nasi kuning, *jenang abang*, *tumpeng serakat*, *sego golong*, dan *pecel pitik*. Khusus untuk olahan *tumpeng* yang digunakan untuk *Ngaturi Dahar* di Buyut Cili, memiliki aturan yang harus dipatuhi, seperti memasak dalam keadaan bersih atau tidak sedang halangan dan berwudu dan tidak boleh dicicip. Ayam yang digunakan merupakan ayam kampung jantan, sedangkan untuk dua *tumpeng*, menggunakan sepasang *pitik lanang lan wadon* atau ayam jantan dan betina. Untuk bumbu yang digunakan, terdiri dari kacang, kemiri, cabai, terasi, garam halus, gula pasir, jeruk limau, ampas atau parutan kelapa, dan air kelapa. Selain hidangan *tumpeng*, *weragat* atau *uborampe* juga biasa saya siapkan *kembang telon* atau bunga tiga warna yang terdiri dari bunga mawar, bunga *pecari* atau cempaka, dan bunga kenanga.

Saya memiliki beberapa petak sawah pemberian orangtua yang terletak di perbatasan Desa kemiren dengan Dusun Joyosari di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah. Sawah itu sudah saya berikan kepada anak pertama yaitu Cak Sul. Keseharian saya adalah mengolah lahan yang ada di sawah, seperti menanam kacang, kentang, ubi, serta sayur mayur, seperti mentimun, kacang koro, terong, cabai, dan tomat. Saya juga memanfaatkan salah satu petak sawah menjadi lahan tumbuhnya semanggi yang tiap dua hari *diperut* atau dipanen. Sebelumnya, sawah tersebut saya sewakan per tahun dan garapan atau tiap panen karena tidak ada yang bisa merawat meskipun dulu saya adalah seorang buruh *tandur* atau menanam bibit padi dan buruh *nggebros* atau merontokkan padi dari batangnya. Samsul menjadikan sawahnya sebagai Sawah Art Space dengan tujuan sebagai wadah seniman, seperti teater, tari, musik, dan kesenian lainnya. Sawah tersebut acapkali dijadikan tempat pementasan Teater Suluk 2, Workshop Kepenarian bersama STKW, serta tempat pengambilan gambar beberapa film. Januari lalu, Sawah Art Space dijadikan tempat Pesinauan Sekolah Adat Osing.



Pesinauan Sekolah Adat Osing

Kehadiran Sekolah Adat Osing dengan nama Pesinauan ini merupakan terobosan dalam memperkokoh jati diri Masyarakat Adat, terutama generasi muda. Sekolah Adat Osing merupakan wahana pewarisan nilai-nilai kearifan lokal antar-generasi agar kemandirian Masyarakat Adat Osing terwariskan kepada generasi penerus dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Pesinauan dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan generasi muda tanpa mempengaruhi waktu kegiatan belajar di sekolah-sekolah formal. Materi yang diberikan kepada peserta Pesinauan, bahkan diharapkan memberikan tambahan asupan ilmu pengetahuan dan perilaku positif berbasis adat.

Pesinauan Sekolah Adat Osing berkomitmen mengembangkan pendidikan adat untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang cerdas, berdaulat, mandiri dan bermartabat. Sebuah sistem pendidikan yang mampu menciptakan generasi penerus yang setia menjaga wilayah adat, tradisi, budaya, adat istiadat, dan lingkungannya; memperjuangkan hak Masyarakat Adat; serta mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai pengetahuan leluhur Masyarakat Adat berasas keberagaman. Kami menyadari bahwa kaum muda adat berperan sangat penting dalam pengembangan sistem pendidikan adat. Sebagai penggerak utama, kaum muda adat harus meningkatkan perannya dalam upaya menjaga pengetahuan adat dari gempuran atau pengaruh luar melalui pemetaan wilayah adat, penggalian sejarah, pertahanan tradisi dan budaya, serta mengampanyekan pendidikan adat. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari gerakan untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.

Pesinauan Sekolah Adat Osing bertujuan untuk memperkuat jati diri Masyarakat Adat, terutama pemuda adat Osing agar berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal leluhur, sehingga generasi yang akan datang benar-benar menjadi masyarakat Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Keberadaan Pesinauan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas Masyarakat Adat dalam mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Secara khusus, tujuan dari pembelajaran Pesinauan adalah mewadahi sistem pendidikan berbasis pengetahuan adat dalam mewariskan pengetahuan leluhur kepada pemuda adat agar menjaga wilayah adat, tradisi, budaya, adat istiadat, dan lingkungannya.

Kegiatan Pesinauan Sekolah Adat Osing merupakan upaya alternatif dari para tetua dan pemuda adat Osing dalam pewarisan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah banyak ditinggalkan oleh para penerima warisan. Upaya ini juga merupakan bagian dari respon terhadap perubahan perilaku masyarakat yang berakibat semakin lunturnya jati diri Masyarakat Adat serta semakin meningkatnya intoleransi di kalangan masyarakat yang pada gilirannya mengancam pada perpecahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan di sana tidak mungkin akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak, utamanya Masyarakat Adat dan para pemangku adat serta pemangku kebijakan di daerah masing-masing.



Upacara bendera yang dilakukan di lingkungan Pesinauan Sekolah Adat Osing.

Di Pesinauan Sekolah Adat Osing, saya menjadi salah satu pemateri yang memberikan wawasan kepada para pemuda adat. Saya memberikan materi terkait *aren godhong*, yaitu wadah pembungkus makanan dari daun (khususnya daun pisang). Tradisi mengemas atau membungkus makanan sebenarnya sudah ada sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Dalam perkembangannya, kini makin banyak inovasi dalam bentuk maupun bahan pengemas produk yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Orang Osing mengenal berbagai daun untuk bahan pembungkus makanan yang disebut sebagai *aren*. Membungkus makanan dengan bahan daun bersifat ramah lingkungan karena daun merupakan bahan organik yang mudah terurai.

Beberapa penelitian menyebutkan daun yang digunakan untuk membungkus makanan memiliki lapisan yang cenderung lebih tebal dan berserat alami serta mampu menahan makanan dari panas dan menjaga suhu dari udara luar, sehingga lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Kearifan lokal Orang Osing dalam wujud *aren* itu merupakan bagian dari warisan leluhur dalam menjaga kelestarian alam serta membawa dampak yang positif bagi lingkungan.

Saya juga memberikan wawasan terkait pertanian kepada pemuda-pemudi adat di Pesinauan Sekolah Adat Osing. Mak Sus mengajarkan cara mengelola lahan, mulai dari cara menyiapkan lahan, seperti *ndangir* (kegiatan membersihkan rumput liar menggunakan cangkul) dan *ngesrik* (kegiatan membersihkan rumput di sekitar tanaman dengan cangkul kecil); memupuk lahan; membuat gulutan atau gundukan tanah untuk media menanam tanaman sayur; serta membuat *lanjaran*, yaitu media rambat untuk tanaman yang merambat. Mak Sus juga mengajari kami cara membuat *winih* atau bibit tanaman yang akan ditanam, seperti timun, kacang koro, terong, cabai, sayur, dan tanaman lainnya. Mak Sus selalu mengingatkan disaat perlu *ngocor* atau menyirami tanaman, baik itu yang berada di *gulutan*, di saat perlu memupuk, maupun di saat tanaman siap panen.

Saya juga mengajarkan pemuda-pemudi adat cara menggoreng atau menyangrai kopi, membuat tape, serta memasak kue *kelemben* dan makanan tradisional sehari-hari, seperti *adang* atau menanak nasi menggunakan dandang dan kukusan (mulai dari *mucusi* atau mencuci beras, *napung* beras atau memasukan beras ke dalam kukusan, *nyansam* atau menyiram beras di kukusan menggunakan air panas, *nyencem* atau memindahkan nasi setengah matang ke dalam wadah lalu disiram dengan air panas dan ditunggu hingga nasi mengembang, *napung karon* atau memasukan nasi setengah matang ke dalam kukusan hingga matang.

Di sekolah adat itulah kami belajar memasak untuk meneruskan seni dan budaya kami. Ada banyak kue atau makanan tradisional yang kini telah bisa dibuat oleh pemuda adat, seperti *jangan lembarang*, *jangan kesrut*, *jangan bening*, *jangan kangkung*, *jangan semanggi*, *jangan kelor*, tumis buncis, kering tempe, bumbu kuning untuk memasak ikan atau lele goreng dan nasi goreng *keluwek*, serta masakan sehari-hari lainnya. Pada dasarnya saya mengajarkan semua adat-istiadat dan kearifan lokal untuk mengikat anak muda tetap bertahan dan berbangga akan kekayaan budaya kami yang membentuk jati diri kami.

* * *



25

Kisah dari Dayak Benuaq: Perempuan Juga Bisa Menjadi Pemimpin

Oleh Pipi Supeni bersama Nurdiyansah Dalidjo

Saya Pipi Supeni dari Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kampung Dingin. Saat ini saya berdomisili di Kampung Lambing. Melalui tulisan ini, saya membagi kisah dari dua kampung, yaitu Kampung Lambing dan Kampung Sembuan. Komunitas kami hidup di dua kampung itu, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Di kedua kampung itu kami masih mempraktikkan ritual adat.

Dalam menuliskan kisah kami, saya dibantu sahabat saya Olvy Octavianita Tumbelaka, Olvy nama panggilannya. Dia berasal dari Komunitas Masyarakat Adat Benuaq di Kampung Jengan Danum.

Kampung Lambing merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di kampung ini terdapat sekitar 527 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 879 jiwa dan perempuan sebanyak 901 jiwa. Kampung Lambing berupa dataran rendah dan perbukitan. Masyarakat Adat hidup dengan berladang, berkebun, dan berternak, namun ada sebagian yang bekerja di perusahaan pertambangan.

Sebagai ibu kota kecamatan, posisi Kampung Lambing amat strategis. Di situ terdapat jalur sungai dan sudah terdapat jalur daratan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Hulu. Penduduk kampung hidup tersebar di Lambing bagian dalam di tepian Sungai Kedang Pahu dan di Lambing bagian luar yaitu di pinggir Jalan Trans Kalimantan.

Untuk berkunjung ke Kampung Lambing kami harus melewati Jembatan Kedang Pahu 1. Jembatan itu menjadi pemisah dengan kampung tetangga, yaitu Kampung Muara Lawa. Warga di bagian dalam kampung pada umumnya memanfaatkan sungai untuk kebutuhan air sehari-hari dan mencari ikan. Masyarakat Adat yang tinggal di Kampung Lambing memiliki rumah panjang yang disebut *Lou Tolan* oleh Orang Benuaq. Rumah itu hingga kini masih berfungsi sebagai tempat berlangsungnya segala bentuk kegiatan budaya dan adat. Ketika terjadi banjir, di sanalah warga mengungsi sementara.

Masyarakat Adat Dayak Benuaq masih menjaga dan melestarikan adat dan budayanya. Mereka menganyam rotan, menyulam *tumper* (kain sulam khas Dayak), menjalankan berbagai ritual, seperti *beliatn*, *kwangkey*, *nalitn tautn*, ritual pernikahan adat, dan sebagainya. Sekolah Adat Benuaq Toletn berada di kampung itu.

Sementara itu, Kampung Sembuan masuk wilayah Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kampung ini dihuni 174 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 511 jiwa. Luas wilayah adat di sini 87.691,22 hektar, terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan lahan basah. Batas-batas wilayah adat mencakup gunung, sungai, *baroh*, *luntuq* (punggung gunung), dan danau. Seperti Masyarakat Adat di kampung tetangganya, mereka yang tinggal di Kampung Sembuan juga tetap menjaga dan mempraktikkan adat istiadat maupun ritual, seperti *beliatn*, upacara adat kematian, upacara adat pernikahan, dan sebagainya.

Berada di kampung ini saya merasa seakan berada di dua kampung sebab Sungai Nyuatan membelahnya menjadi dua. Sehari-hari, warga menggunakan perahu atau *klotok* untuk beraktivitas. Sembuan juga memiliki hutan dan ada Gunung Muaria yang hendak dikembangkan sebagai aktivitas ekowisata. Di sana, terdapat danau-danau kecil yang dimanfaatkan untuk mencari ikan.

Semua Masyarakat Adat di kedua kampung itu tetap hidup gotong-royong seperti yang dicontohkan nenek moyang mereka. Hal itulah yang menguatkan kami dalam menghadapi pandemi Covid-19. Komunitas secara swadaya melakukan ritual tolak bala di kampung. Ketika terjadi kedukaan, seperti ada warga yang meninggal dunia, mereka datang bekerja bergotong-royong di rumah duka. Kami tetap mempraktikkan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional dalam Masyarakat Adat kami tidak terpisahkan dengan ritual adat pengobatan bagi mereka yang sakit.



Salah satu potret ritual adat di kampung kami.

Prinsip Kesetaraan



Dalam tatanan sosial pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq posisi perempuan setara dengan kaum laki-laki. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin spiritual. Upacara adat atau ritual sesuai adat merupakan bagian dari upaya menjaga, melindungi, dan memanfaatkan alam secara berkelanjutan. Masyarakat Dayak Benuaq percaya bahwa ritual adat adalah penghubung manusia dengan sesama, dengan alamnya, dengan wilayah adatnya, dan dengan leluhur.

Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, hampir semua kampung di Kutai Barat membuat ritual tolak bala. Kami memanggil roh para leluhur serta penghuni langit, pelangi, tanah, hutan, air, dan sebagainya yang dipercaya bisa menjaga dan melindungi kami. Ketika penulisan ini dimulai, kasus Covid-19 tengah naik jumlahnya di komunitas, sehingga sulit untuk melakukan wawancara secara langsung untuk mencegah perluasan penularan. Kami banyak melakukan wawancara melalui telepon. Ibu Patmawati, salah satu perempuan adat yang menjadi narasumber kami, saat itu terserang virus Corona. Banyak warga melakukan isolasi mandiri. Untuk melawan Covid-19 mereka mengonsumsi ramuan obat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di hutan adat, seperti *betimung*, daun *sungkai*, kulit kayu *kaser*, jahe merah, akar *kelagit*, dan lain-lain. Dengan cara seperti itu kami akhirnya dapat menghimpun kisah dari para perempuan pemimpin ritual di kampung.

Untuk mendalami peran perempuan dalam Masyarakat Adat Dayak Benuaq, pada 25 Juli 2021 saya berkunjung ke rumah Ibu Atin. Beliau adalah perempuan adat pemimpin ritual pengobatan di Kampung Lambing. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di rumahnya karena kebetulan saya sedang ada di kampung yang sama. Saya disambut dengan suara gong yang menandai adanya kematian. Seseorang telah meninggal dunia. Pada awalnya, saya sempat ragu melanjutkan kunjungan. Namun, seorang warga mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Saya bisa memanggil saja orang yang ada di dalam rumah. Rumah kedukaan berada tepat di belakang rumah Ibu Atin.

“*Mek jariq ateu apaq,*” ucap Bu Risti yang menemani saya. Itu sapaan kami ketika bertamu. Jika tuan rumah menjawab *jariq*, maka ia tidak sedang menerima tamu. Tetapi, jika dibalas dengan *apaq*, artinya boleh berkunjung.

Orang di dalam rumah bilang, “*Apaq, engket sua belai!*” Kami disambut. Ibu Atin bisa menerima kami dan ia mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Kami lantas mengobrol di tengah rumah. Saya menyampaikan tujuan kedatangan kami dan meminta kesediaan beliau untuk menuliskan kisah tentang perempuan adat pemimpin ritual.

Bu Atin menyambut dengan ramah. “Saya senang kalian datang dan meminta izin lebih dulu untuk menulis,” katanya. “Namun, sayang, saya tidak bisa membantu kamu saat ini karena kalau mau menulis tentang ritual, harus pada saat ada upacara ritual dan kamu ikut dalam ritual.”

Pelaksanaan ritual itu pun ada syaratnya, di mana kami harus membawa *lalus temai* (mahar yang diberikan kepada *penutus*) dan buku untuk menulis mantra-mantra dan *namu tujuuq* (ketemu tujuan).

“Kalau tidak saat ritual, saya takut, karena ada nama roh, mantra-mantra, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan ketika tidak saat ritual. Saya takut kena tulah atau *puluuq* (meninggal pada usia muda). Jadi, kalau kamu mau menulis cerita tentang ritual, datang saja saat saya memimpin ritual,” ucap Ibu Atin sambil tersenyum. Ia menambahkan kalau saya datang saat ia memimpin ritual dan membawa syarat-syaratnya, maka saya juga akan bisa menjadi pemimpin ritual sepertinya.

Mendengar semua itu, sebetulnya saya sangat penasaran.

“Kalau kamu memang berjodoh dengan saya, kamu akan datang saat saya memimpin ritual dan kamu bisa naik atau *tumakng* atau *tutus* (berguru menjadi pemimpin ritual) menjadi pemimpin ritual,” tambahnya sambil ia mengelus-elus kakinya. Seakan beliau sedang membaca berbagai pertanyaan yang mengiang di benak saya.

Maka, saya tidak bisa menceritakan kisah tentang Ibu Atin kali ini. Saya sendiri belum siap jika harus ikut menjadi pemimpin ritual. Hal itu saya utarakan padanya. Ia kemudian memberikan saya referensi perempuan adat lain yang kemungkinan bisa berbagi kisah dan membantu saya menulis.

Esoknya, saya dan kawan yang menemani melanjutkan perjalanan untuk menemui Ibu Patmawati dan Ibu Martina Saban.

Beruntung bagi saya. Ibu Martina Saban yang akrab disapa Bu Mar di Kampung Lambing, bersedia berbagi pengalaman.

”Menjadi pemimpin ritual seperti penggilan hidup,” kata perempuan adat berusia 67 tahun itu. “Tidak semua perempuan adat bisa menjadi pemimpin ritual. Ada tanda dan keinginan dalam hati dan jiwa si perempuan adat sehingga dia bisa menjadi pemimpin ritual. Kemudian, ada orangtua yang mau mengajari (*tutus*) anaknya tentang ritual, maka seseorang bisa menjadi pemimpin ritual dari garis keturunan.” *Tutus* yang dilakukan bersama orangtua di rumah, sama seperti kita sekolah: ada guru yang mengajar murid hingga lulus.

Bu Mar melanjutkan kisahnya.

“Saya ada nenek dan mamak yang mengajari saya tentang ritual *Ngentas* untuk mencari tahu tentang penyakit yang dialami: apakah penyakit disebabkan oleh *belih* atau *benatekng* (sejenis roh dan binatang, baik yang dapat dilihat mata maupun tidak) atau penyakit yang diderita harus diobati di rumah sakit.” Bu Mar bertutur sambil tersenyum. Kami menikmati teh hangat dan singkong goreng.

Tutus yang dilakukan bersama orangtua (*tuhatn emputn*) akan berbeda dari *tutus* yang dilakukan dengan pemimpin ritual lain yang bukan orangtua sendiri. Jika bersama orangtua, ada yang wajib kita bayar yaitu *lalus temai* atau *bolig* (mahar yang diberikan kepada penutus) dan ada yang tidak memakai *bolig* (semacam upah), tapi bukan untuk ritual *Beliatn*. Jika bersama pemimpin ritual lain, ketika kita *engket tutus* (berguru), kita wajib membayar *bolig*, berupa *antakng*, *belokokng*, *lumah*, *robet*, dan *mancik duak buti* sebagai *pengelewai* (bahan dan alat mahar). *Lalus temai* ini berbeda-beda ukurannya sesuai tingkatan ritual apa yang akan kita *tutuskan*.

“Ada ritual yang saya *tutuskan* dan saya membayar *lalus temai* atau *bolig* kepada *pemeliatn* yang me-*nutus* saya. Saya guru agama dulu,” lanjut Bu Mar. “Banyak yang bilang kalau menjadi pemimpin ritual itu menyembah berhala. Tidak bisa menjadi guru agama. Maka, saya memutuskan tidak menjadi guru agama. Saya sekarang sebagai *pengentas* (tenung).” Ritual *Ngentas* dilakukan sebelum memulai ritual pengobatan yang tujuannya untuk mencari tahu penyakit: apakah harus ke rumah sakit atau diobati dengan cara ritual.

Dulu, meski saya tidak menghitungnya, banyak perempuan adat yang bisa menjadi pemimpin ritual. Saya sempat melihat dan tahu ada yang namanya Nenek Atin yang memimpin ritual di Kampung Lambing. Saat ini, hanya ada sedikit perempuan adat pemimpin ritual yang tersisa. Yang saya tahu, ada Mamak Yanus dan Mamak Giet yang bisa *Beliatn* (ritual kesembuhan orang sakit). Sekarang telah banyak pemimpin ritual yang telah meninggal dunia. Di sisi lain, anak-anak muda enggan menjadi pemimpin ritual karena sekarang agama-agama dari luar Masyarakat Adat atau kampung kami sudah begitu dominan. Para penganutnya pun ada yang malah menyebut kami-kami yang masih melakukan ritual ini sebagai penyembah dewa, jin penghuni pohon, berhala. Mereka bilang, sebaiknya itu tidak boleh dilakukan lagi. Ketika memperbincangkannya, saya melihat ada raut sedih pada wajah Bu Mar.

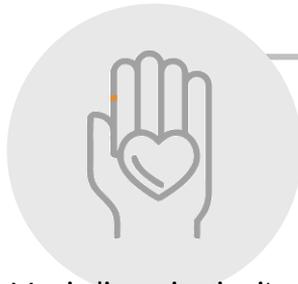


Potret hutan adat yang menjadi sumber berbagai tanaman obat di wilayah adat.

Ada ritual-ritual *Beliatn* yang bisa dipimpin oleh perempuan adat, seperti *Beliatn Jamu*, *Beliatn Lalepes* yang khusus untuk perempuan, *Beliatn Rinik Bawe*, *Beliatn Sentiu*, *Beliatn Bawo*, dan *Beliatn Pakatn Lati Tana* (nama-nama *Beliatn*). Pemimpin ritual perempuan bisa melakukan ritual sesuai dengan apa yang ditutuskan. Selain ritual *Beliatn*, ada juga ritual lain, seperti mendoakan padi (*umak tautn*).

Jika ada perempuan adat yang mau menjadi pemimpin ritual, ia harus bertanya dulu pada pemimpin ritual yang akan dijadikan *guruq* atau *penutus* ritual tentang persyaratannya. Si *penutus* akan menyampaikan berapa *boliq* yang harus disiapkan untuk upah si *penutus*. Seperti pasien berobat ke dokter, saya sebagai calon pemimpin ritual misalnya, akan bertanya bagaimana dokter tahu obat untuk penyakit tertentu. Jadi, saya tahu kalau saya mau *tutus*, mau belajar sesuatu, ketika si *penutus* mengatakan bisa dan akan mengajari, barulah saya akan mulai untuk *tutus* sesuai kesepakatan waktu dan jumlah *boliq*-nya. *Penutus* tidak boleh menentukan *lalus temai* atau *boliq* karena sudah ada ketentuan nilai yang diakui secara adat. *Penutus* pun tidak bisa mengambil *boliq* lebih dari yang dia berikan kepada *penutus* yang *menutus* dirinya dulu. Namun, sekarang banyak barang untuk *boliq* yang sudah tidak ada, sehingga itu bisa diuangkan.

Di Kampung Lambing ada ritual adat yang dikecualikan bagi perempuan pemimpin adat yaitu, perempuan adat tidak boleh menjadi pemimpin ritual kematian seperti menjadi *pengewara*, *penyentangih*, dan *penuikng* karena dipercaya akan *puluuq*. *Puluuq* artinya mereka yang melakukannya bisa mati muda. Setidaknya begitulah yang pernah disampaikan orangtua kepada saya dan itu kami percayai turun-temurun. Namun, ada beberapa daerah di mana perempuan bisa memimpin ritual kematian. Misalnya, daerah Muara Tae, Kampung Belusuh, dan Tunjung.



Tidak Harus Keturunan

Menjadi pemimpin ritual tidak harus keturunan pemimpin ritual. Menjadi pemimpin ritual merupakan panggilan hati dan jiwa.

Tanpa saya sangka-sangka Ketika kami mengobrol, Ibu Martina bertanya kepada saya, “Apakah kamu mau menjadi pemimpin ritual?”

Saya hanya bisa tertawa lepas. Kaget bercampur heran. Saya hanya bisa meminta maaf karena saya masih belum siap. Beliau mengatakan, sebenarnya menjadi pemimpin ritual adalah satu bentuk langkah kita menolong orang lain. Mereka yang sakit, terutama penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit. Memang di kalangan Masyarakat Adat kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh rumah sakit. Menurut Ibu Martina, ada banyak penyakit yang hanya bisa disembuhkan melalui ritual. Contohnya, gangguan *belih*, *benateng*, *kutuk tumak*, dan lainnya.

“Menjadi pemimpin ritual sama halnya kita seperti guru, memberikan ilmu, dan seperti dokter yang menyembuhkan orang sakit,” ucapnya sambil tertawa dan minum teh.

Beliau menyampaikan kepada saya bahwa seandainya ia tidak berguru dan menjadi pemimpin ritual, siapa lagi yang akan meneruskan pengetahuan yang dimiliki keluarganya.

“Saya memiliki panggilan untuk menjadi pemimpin ritual karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara sekarang, yaitu melalui rumah sakit.” Setelah mendengar kisah Ibu Martina, saya semakin penasaran. Ingin tahu lebih banyak cerita tentang pemimpin ritual perempuan dan tentang komunitas adat kami.

Tapi, waktu kurang berpihak pada saya rupanya. Berkali berkunjung selalu ada saja kejadian yang menjadikannya batal. Padahal kami tinggal di kampung yang sama. Pertama kali berkunjung ke rumahnya, ternyata beliau sedang *jariiq* (*tuhing*) karena baru selesai *Beliatn* untuk pengobatan mamaknya. Tidak lama kemudian, ada berita duka. Mamaknya dipanggil pulang ke sisi Yang Maha Kuasa karena Covid-19.

Di Komunitas Masyarakat Adat Benuaq, ketika ada orang meninggal, maka kita harus menunggu masa berkabung selesai untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan karena ada ritual-ritual untuk kematian yang harus dilakukan keluarga. Belum cukup rupanya kejutan bagi saya. Saya dikejutkan dan sekaligus prihatin karena mendengar kabar bahwa Ibu Patma pun terkonfirmasi positif Covid-19.

Dua minggu kemudian, setelah Ibu Patma berhasil mengatasi serangan Covid-19 saya akhirnya bisa berjumpa dengan beliau. Saya kembali berkunjung dan kami pun melanjutkan perbincangan yang tertunda.

Ibu Patma mengatakan, “Saya belajar memimpin ritual, (awalnya) saya juga tidak paham untuk memimpin ritual, tapi ada sarana yang ditinggalkan oleh orangtua secara turun-temurun. Jadi, untuk meneruskan itu semua, mau tidak mau, saya harus belajar menjadi pemimpin ritual karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa memimpin. Tapi, saya lakukan ini tidak terpaksa karena saya menyadari pemimpin ritual ini harus dilanjutkan secara turun-temurun.” Selain belajar dari mamaknya, ia mendalami itu dari kakeknya.

“Di daerah kami tidak ada pemilahan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin ritual. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama bisa memimpin ritual,” kata Ibu Patma. Pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq, dari dulu memang dibolehkan perempuan memimpin ritual. Perempuan bisa memimpin di hampir semua ritual adat. Misalnya, ritual adat *Ngumak Ngentautn* (berladang) selain laki-laki, perempuan juga bisa memimpin. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu perempuan tersebut harus berasal dari Dayak Benuaq, bukan dari luar komunitas Masyarakat Adat Benuaq dan harus mentaati syarat-syaratnya.



Para perempuan adat tengah berkumpul.

Ada cerita, dulu ada perempuan asing yang meneliti budaya di daerah kami dan dia mencoba ikut ritual, tapi roh-roh tidak mau memasukinya. “Dia dinyatakan gagal menjadi *pemeliatn*, meskipun dia sudah menguasai *bukuuq* (mantra). Karena itulah, banyak masyarakat yang menilai bahwa ilmu dan ritual adat kita, tidak dapat diwariskan secara sembarangan dan hanya bisa diwariskan kepada suku kita Tunjung/Benuaq saja.”

“Dulu, ada tiga sampai empat orang perempuan yang bisa memimpin ritual,” kata Ibu Patma. “Biarpun kami tidak bisa ritual *Beliatn*, tapi kami perempuan adat justru banyak bisa memimpin ritual lain, seperti kasih makan dan berterima kasih pada roh-roh para penjaga hutan, penjaga tanah, dan para leluhur kami. Menurut kami, itu pekerjaan perempuan dan penting bagi kami perempuan.”

“Pada ritual adat, ada peran perempuan yang disebut sebagai *jenyakaq*, yang akan melayani, menyiapkan, dan menata ramuan-ramuan pada proses ritual yang diperlukan oleh pemimpin ritual.” Bu Seliani mencontohkan jika saat ritual berlangsung *pemelian* perlu *selolo*, maka *jenyakaq* akan memberikannya. Untuk menjadi *jenyakaq*, seseorang juga harus melakukan *tutus* adat seperti pemimpin ritual.

“Yang paling utama, kita telah melakukan *tutus/tunakng* dan telah *penengkapaq*. *Penengkapaq* ini dilakukan jika kita mau lihat buku adat istiadat atau kita mau tahu sesuatu. Kita harus *penengkapaq* dengan membuat ritual khusus untuk itu, supaya kita bisa melihat dan membaca buku-buku yang ditulis tentang Adat istiadat. (Menurut bahasa kami, itu dibilang *pesiwah*. Artinya, mengizinkan atau membolehkan untuk membaca buku adat istiadat tersebut,” tambah Ibu Patma.

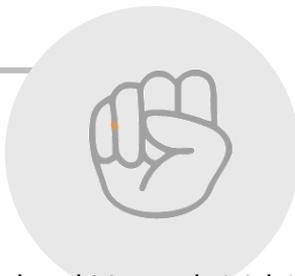
Menurut beliau, pemimpin ritual harus tahu tata cara memimpin ritual dan melakukan *tutus* adat, sehingga roh-roh mau tinggal pada kita yang *tutus*. Pemimpin ritual juga harus bisa berbicara kepada roh-roh yang akan kita tuju saat melakukan ritual dan itu menggunakan bahasa ibu terkait mantra-mantra.

Seperti telah disinggung, untuk menjadi pemimpin ritual, kita harus *tutus*. Ritual pun ada tingkatannya dan tergantung kita mau *tutus* ritual yang mana. Yang paling tinggi, ada yang *tutus* dengan membayar mahar hingga lima *antakng* (guci besar). Untuk usia di bawah 50 tahun, kita hanya bisa *tutus* dengan nilai paling banyak empat *antakng*. Namun itu juga tergantung pada kemauan dan panggilan hati masing-masing.

Akan tetapi, ada beberapa ritual yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh perempuan, yaitu ritual-ritual kematian dari yang tingkat rendah sampai yang *saneq* (tinggi) yang disebut *Kwuangkey* (ritual kematian). Itu adalah ritual-ritual yang kami percaya sebagai ritual untuk mengantar roh-roh ke surga.

Dalam perkembangannya, pada masa sekarang banyak pemuda adat, khususnya yang perempuan, tidak mau menjadi pemimpin ritual. Sepanjang yang saya ketahui dan kenali, para perempuan pemimpin ritual yang ada saat ini usianya di atas 30 tahun dan kebanyakan justru berusia sekitar 60 tahun atau di atas 60 tahun.

Saat ini hanya tinggal satu dua orang saja pemimpin ritual yang masih hidup. Mereka sudah usia lanjut dan biasanya memimpin ritual pengobatan.



Teguh Memegang Adat

Ibu Patma juga bercerita tentang asal-usul Masyarakat Adat Benuaq. Dinamai Benuaq karena berasal dari Benuaq Tementekng. Dahulu, terjadi perkawinan perempuan bernama Tumpekng asal dari daerah Tementakng dan laki-laki bernama Ulau asal Pererawetn (Hulu Sungai Piraq) yang bergelar Macan Gunung. Ulau mendirikan rumah panjang pertama kalinya di daerah Bernama Benuang yang diberi nama Lamin Lampau. Ulau punya dua *ripatn* (semacam budak atau pembantu) yang dibawanya dari Pererawetn. Kedua budaknya itu adalah laki-laki bernama Tolatn dan Tori. Tolatn adalah budak kesayangan Ulau.

Dalam perjalanannya, Tolatn mati terbunuh oleh Tori. Ulau lalu membawa mayat Tolatn dalam gendongannya dan membawanya ke teluk di Sungai Kedang Pahu untuk dimandikan. Sebagai penghormatan terhadap budak kesayangannya itu, maka Ulau memberi nama teluk tersebut dengan nama Teluk Tolatn. Ritual kematian pun dilaksanakan oleh Ulau dan penghuni rumah panjang untuk mengantar arwah Tolatn ke tempat yang layak sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang dipegang secara teguh di tempat mereka. Untuk menghormati Tolatn, maka Ulau mengubah nama Lamin Baloq menjadi Lamin Tolatn. Dari kejadian itu kami kemudian menyebut diri kami Suku Benuaq Tolatn.

Sejak 1991, mulai terjadi perubahan di Kampung Lambing. Jalan besar mulai dibangun. transportasi. Tahun itu, mulai ada mobil yang melintasi kampung. Saat itu mulai bermunculan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, kami menggunakan Sungai Kedang Pahu sebagai jalur transportasi satu-satunya. Tahun 1963 adalah tahun kelahiran saya, hingga usia sekolah, praktis tidak ada perubahan mencolok.

Dulu, jalur sungai adalah jalur transportasi utama. Sekarang, warga lebih memilih jalan darat atau naik kendaraan bermotor, sepeda motor atau mobil, karena dianggap lebih cepat. Sekarang sudah banyak pendatang. Mereka adalah para pekerja di perusahaan tambang dan sawit. Saya tidak bisa bercerita banyak tentang kondisi kampung itu di masa lalu. Banyak terjadi perubahan. Ibu Martina bercerita, sekarang di kampung sudah banyak warung dan mobil. Dulu untuk jalan keluar kampung saja susah karena transportasi hanya menggunakan *ketinting* (perahu kayu).



Situasi kampung di tepian sungai.

Di sisi lain, dalam menjalankan adat istiadat, kami tetap memegang teguh warisan pengetahuan dari nenek moyang kami. Nyaris tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Ritual-ritual adat pengobatan orang sakit (*Beliatn*), adat pernikahan, adat meninggal, dan lain-lainnya masih tetap sama. Kami juga tetap menggunakan bahasa Benuaq untuk berkomunikasi. Dalam berpakaian, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan pakaian yang banyak dijual di pasar. Namun, setiap orang - tua maupun muda, bahkan anak-anak - memiliki pakaian adat. Pakaian itu kami kenakan setiap kali kami menjalankan ritual. Melalui ritual adat itulah kami terhubung dengan leluhur kami, Sang Pencipta, dan alam semesta.

Kami masih melakukan ritual adat kami dalam kehidupan sehari-hari, seperti ritual untuk *ngumak ngentautn* (berladang) dengan tujuan meminta izin pada leluhur dan roh untuk membuka ladang, mulai dari menebas, menebang, sampai membakar. Kemudian, saat kita akan *menugal*, kita akan menanam benih di atas tanah kita. Itu pun ada ritualnya. Kami percaya tanah ada penghuninya. Kami sebut *Tak Benturatn Tana* dan *Kakah Benturatn Tana* (nama-nama bagi penghuni tanah yang akan menjaga ladang dan kebun supaya berhasil atau panen). Maka, kami harus mohon izin mereka atas apa yang kita makan. Pada hari kita tanam, kita harus menguburkan makanan yang kita makan ke dalam tanah sebagai bentuk kita memberikan makan kepada roh-roh penghuni tanah. Kita juga membuat ritual agar roh-roh jahat tidak mengganggu kita dalam proses dari menanam padi sampai panen. Saat panen, kita juga buat ritual untuk berterima kasih kepada leluhur yang membantu kita membuat ladang, termasuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Dewi Padi.

Proses dan bahan-bahan ritual dari hutan tidak ada yang berubah. Dulu, banyak proses kita lalui untuk menyiapkan makanan ritual, misalnya beras dan padi yang harus kita rendam dulu sampai lembek untuk kemudian kita tumbuk. Saat ini, sudah bisa pakai tepung yang beli di warung. Begitu pula dengan aneka kue tradisional yang bisa diperoleh di pasar. Dulu, *perangkakng* (ayam panggang) untuk korban ritual, harus menggunakan ayam peliharaan dari bawah kolong rumah yang ditangkap, dipotong, dan dipanggang, sedangkan sekarang itu bisa dibeli. “Itu ‘kan menunjukkan perbedaan ya,” kata Ibu Patma tertawa.

Selain itu juga ada beberapa bahan ritual yang berubah. Dulu, bahan-bahan yang digunakan untuk mengikat misalnya, selalu berbahan berbau dasar rotan dan akar. Kini, kita bisa menggunakan tali rafia, benang wol, dan paku untuk mengikat *baley*, *longan* (bahan ritual) dan bahan ritual lainnya. Kemudian, kayu untuk menggantung *longan* (bahan ritual), dulu menggunakan kayu sungkai, atau balok berukuran kecil.

“Sebagai Masyarakat Adat dan generasi penerus, kalian harus tahu bahan-bahan untuk ritual yang ada dalam hutan dan harus dilestarikan dan dijaga. Itu sangat penting,” Bu Seliani berpesan. Katanya, dengan kita tahu kayu-kayu adat yang ada di hutan, maka otomatis kita akan menjaga dan melestarikan hutan atau wilayah adat kita agar tetap utuh untuk sumber pengetahuan, penghidupan, dan pengobatan. Sebagai perempuan adat, ia menguasai 12 macam mantra ritual.

Memang banyak hal telah berubah. Namun, ada beberapa perkara yang masih tetap sama yaitu makanan tradisional dan bahan-bahan seperti dedaunan dari hutan dan kayu untuk balai, masih tetap sama. Dalam suatu ritual ada makanan khusus yang harus ada, antara lain nasi *sentiriq* (nasi warna-warni yang dibentuk secara khusus) dan *mate ore* (patung dari beras) yang akan menjadi silih tubuh orang yang akan kita ritualkan. Demikian pula pakaian, tidak ada yang berubah. Pemimpin ritual memakai pakaian adat yang penuh variasi dan berwarna-warni karena bahan-bahan seperti benang semakin mudah untuk didapat. Maka, kini pemimpin ritual tampak berwibawa dan kian keren ketika menggunakan pakaian adat lengkap.

Di Kampung Sembuan yang berada di tepian sungai dan berbukit-bukit daerahnya, saya bertemu Ibu Seliani. Orang-orang sering menyebut Masyarakat Adat yang mendiami kampung tersebut dengan Suku Dayeq. Suku Dayeq itu orang-orang dari keturunan Muray Madekng dan kami percaya sebagai keturunan manusia langit yang diturunkan ke bumi. Hal itu diketahui berdasarkan silsilah yang seringkali dirahasiakan dengan alasan tertentu.

Kami dari dulu hingga sekarang masih menggunakan bahasa Dayeq sebagai bahasa ibu. Kehidupan sosial kami masih terjaga seperti dulu: adat-istiadat, berbagai ritual, gotong-royong, dan kebudayaan yang dari dulu ada dan hidup di tengah masyarakat tidak ada yang berubah. Kami tidak hanya menjaga, namun kami tetap melestarikan dan mempraktikkannya. Sebagai contoh, apabila kami mendapat hewan buruan maka kami akan *mirikng* atau membaginya ke keluarga dan tetangga.

Untuk mengetahui perihal suku-suku yang hidup di kampung kami dan kampung tetangga, saya menemui Pak Fidelis Nyongka (47 tahun) selaku Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Kutai Barat.

“Tentang suku, kita memang sub-Suku Dayak Benuaq yang memang bermacam-macam,” katanya menjelaskan keragaman Masyarakat Adat Dayak. “Ada Suku Benuaq Ohokng. Ada Suku Benuaq saja yang mendiami bagian tengah, seperti di daerah Lambing. Ada Suku Dayak yang di hulu sungai. Ada Suku Dayak Benuaq Sokekng di daerah Kampung Kelauq, tapi tetap kita disebut sebagai Suku Dayak Benuaq. Untuk Kampung Sembuan, Lingau dulunya disebut dengan Dayak Benuaq Dayaq, tapi sekarang komunitas di sana menyebutkan dirinya bukan lagi Dayak Benuaq Dayeq, tapi Dayak Dayeq berdasarkan penelitian silsilah dan sejarah komunitas melalui asal-usul dan wilayah domisili.”

Pada mulanya Kampung Lambing memang hanya dihuni Masyarakat Adat Benuaq. Sayangnya saya tidak bisa mengetahui sejarah asal-usul mereka secara detail.



Kemerdekaan Indonesia Membawa Perubahan

Perubahan mulai terjadi seiring waktu, terutama setelah Indonesia merdeka. Berbagai aspek kehidupan kami tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan dan agama.

“Sejak itu mulai terjadi perubahan pola pikir di masyarakat. Pada awalnya, (kami) menggunakan pakaian khas daerah (berupa) kain tenun dan kulit kayu (*udoq*, *nakatn*, *pentutn*, dan *siretn*) sebagai bahan pakaian,” ungkapnya. Ibu Seliani melanjutkan, “(Itu) Dibilang primitif, tidak pakai baju. Akhirnya kami mencoba-coba pakai baju dari kain. Saya ingat dulu ada namanya *belet/cawat/cancut*, ada *belet kasa batokng* (lilitan lain yang panjang sampai ke dada dan berwarna putih), ada *belet beramuq* berbentuk rumbai sampai ke mata kaki (dari kulit kayu atau serat nanas atau disebut *doyo*).”

Perubahan lainnya yaitu bangunan rumah kami. Rumah kami dulu berupa bangunan dengan dinding kulit kayu, atapnya dari daun *jemiaq* (daun sagu). Rumah kami sekarang telah berbahan dasar beton, seng untuk atap, dan kayu.

Cara hidup kami pun berubah. Pemerintah mulai menerapkan sistem keluarga inti. Kami diharuskan tinggal di kampung (dulu permukiman kami tersebar di hutan, sungai, dan lainnya) dan di dalam satu rumah yang hanya bisa dihuni satu keluarga. Padahal, dalam Rumah Panjang, di antara kami ada yang terbiasa tinggal hingga berpuluh-puluh keluarga. Melalui Program Keluarga Berencana kami juga hanya diperbolehkan memiliki dua anak saja. Sejak kemerdekaan kami juga diperkenalkan pada sistem pendidikan melalui sekolah. Dulu, dari kampung kami jarang yang bersekolah karena jaraknya jauh.



Salah satu rumah adat di kampung kami.

Perubahan lain yaitu diperkenalkannya agama-agama yang menurut kami baru. Masuknya berbagai agama tersebut juga menimbulkan tantangan. Setelah agama masuk ke kampung kami, ketika Masyarakat Adat melakukan ritual, mereka kerap dianggap pemuja dewa atau roh penguasa kegelapan dan dianggap kami percaya kepada kuasa lain selain Tuhan. Kami tersinggung, kepercayaan kami dikaitkan dengan animisme dan dinamisme.

Selain Bu Selianu, ada pula Bu Ratnati. Keduanya sama-sama menegaskan berbagai perubahan terjadi karena pengaruh dari luar komunitas, seperti dari pemerintah, agama, dan orang luar yang datang ke kampung-kampung lewat berbagai program.

Di luar kehidupan adat dan budaya kami, perubahan terbesar dalam masyarakat kami adalah sumber penghasilan (mata pencaharian) kami. Dulu, kami berpenghasilan dari berladang dan berkebun. Saat rotan ada harga, kami potong rotan untuk beli gula, garam, dan kebutuhan lain. Sekarang rotan tidak ada harganya. Kini hanya karet yang bisa menghasilkan uang. Sekarang banyak orang hingga anak-anak muda di kampung menjadi karyawan di perusahaan pertambangan. Di Kampung Lambing tidak ada yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit. Kini, luasan perkebunan karet sudah lebih besar daripada ladang dan kebun kami. Meski demikian, masih tetap ada warga yang berjualan dari hasil perikanan dan perladangan di pasar, seperti ikan dan pakis.

Secara perlahan, kata Ibu Seliani, jenis ritual yang diadakan pun sudah berkurang macam dan jenisnya. Ada beberapa ritual yang mulai jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi dilakukan.

Proses ritual adat juga berubah. Banyak yang disesuaikan karena dianggap terlalu sadis, seperti *Belietn Rantau* yang tidak kami lakukan lagi. Dalam ritual itu babi yang akan menjadi korban ritual digantung di tengah rumah lalu dipotong pancung.

Menurut dia, jumlah pawang ritual saat ini sudah sedikit karena banyak yang meninggal, berumur tua, dan sakit, sementara orang-orang muda tidak banyak yang memiliki panggilan hidup untuk meneruskan profesi tersebut.

Di komunitas, mereka yang belajar ritual harus memilih ritual mana yang akan menjadi pilihan sesuai dengan minat dan panggilan hidup. Kemudian, mereka harus menyiapkan fisik dan mental yang tanpa pamrih untuk membantu sesama kapan saja dibutuhkan serta bersedia menyiapkan mahar untuk berguru yang telah bisa diuangkan karena sebagian barang atau bahan memang sudah tidak ada lagi.

Setelah mendengar berbagai pengetahuan yang dituturkan oleh para narasumber, satu hal yang amat menarik saya yaitu adanya kaum perempuan pemimpin adat. Tentang mereka ternyata ada peribahasa yang berbunyi: *“Ulutn sanik rantil manik ulutn tena maliata ulutn panei untai lawei adeq lawei luluk luse so’okng bawe durai sinai.”* Artinya, “Ada kesejajaran posisi perempuan adat dengan laki-laki adat di Suku Dayak Benuaq”. Kalimat itu saya dapatkan dari Pak Manar, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat.

* * *



26

Kisah dari Montomisan: Melaut untuk Lipu, Berkebun untuk Rumah

Oleh Munira bersama Fadiyah Alaidrus

Nama saya Munira, biasa dipanggil Mira. Saya adalah seorang anak, ibu, istri, dan guru Taman Kanak-kanak (TK). Saat menuliskan kisah ini, saya dalam keadaan hamil anak kedua saya yang diperkirakan akan lahir pada awal September 2021. Namun, di tengah kondisi pandemi, masalah ekonomi selalu menjadi kecemasan tersendiri. Saya kerap merasa takut apabila membayangkan tak ada makanan untuk anak saya. Terlebih, saat saya harus berhenti bekerja sebagai guru TK untuk sementara karena kehamilan yang sudah besar.

Masalah ekonomi tak hanya muncul di rumah tangga saya, melainkan juga sebagian besar masyarakat di tempat tinggal saya, yakni Montomisa, lipu (sebutan yang mengacu pada wilayah adat kami) tertua di Pesisir Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kepala desa kami, Pak Tole Latani, juga menyampaikan hal serupa.

“Kalau melihat dampak pandemi, ya, cukup besar. Dampaknya, dalam hal pelibatan ekonomi, termasuk mengganggu ekonomi juga. Tahun-tahun sebelumnya, saat Covid belum masuk ke daerah kita, pemasaran rumput laut itu luas, sampai-sampai pembeli dari luar negeri bisa masuk. Namun, dengan adanya Covid, rumput laut ini agak menurun harganya,” ujar Pak Tole saat saya temui sekitar Juni 2021.

Sementara, jujur saja, jika berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah pun rasanya sia-sia. Akhirnya, selama pandemi, kami lebih banyak bekerja keras sendiri.

Mayoritas Masyarakat Adat Montomisan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan mengelola rumput laut. Secara khusus, rumput laut termasuk salah satu komoditas yang menjadi penggerak ekonomi kami. Rumput laut pertama kali masuk ke Montomisan sekitar 1989 pada masa pemerintahan Soeharto.

Suludani, seorang tokoh di Masyarakat Adat kami, menjadi salah satu orang yang melihat bagaimana rumput laut mulai masuk ke Montomisan. Ia mengisahkan awalnya baru beberapa orang yang mencoba. Itu pun mereka perlu mengambil bibitnya ke Pulau Bangkuring yang terletak di selatan Montomisan.

“Masih terbilang langka dan masih banyak dari kami yang meragukan rumput laut karena kami masih awam dengan hal itu. Bagaimana tidak? Saat itu, belum ada kapal pengangkut ke kota dan juga belum ada pembeli,” ujar Suludani.

Rumput laut baru mulai banyak dibudidayakan di Montomisan setelah 1990. Perangkat dan fasilitas untuk pembudidayaannya pun mulai dikembangkan. Tak ada yang menyangka bahwa perkembangan budi daya rumput laut berlangsung dengan pesat, bahkan berhasil menjadi sumber penghasilan terbesar Masyarakat Adat Montomisan.



Area budi daya rumput laut.

Sebelum masuknya rumput laut di Desa Montomisan, kami biasa berkebun ubi banggai, keladi, dan umbi-umbian lainnya. Hasil perkebunan tersebut kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Jika ada ubi banggai yang berlebih, biasanya akan kami tukar ke nelayan dengan makanan dari laut, seperti ikan kering.

Namun, sejak sekitar tahun 2000, tradisi pertukaran makanan tersebut sudah tak lagi dijalankan. Makanan pokok pun menjadi semakin beragam, mulai dari nasi, ubi banggai, serta singkong. Olahan singkong parut dan kukus menjadi makanan tambahan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat selain ubi-ubian.

Hingga kini, mayoritas kami, khususnya perempuan adat, tetap melakukan kegiatan berkebun. Kami berkebun agar tetap dapat memenuhi kebutuhan makan, sehingga apabila rumput laut sedang gagal panen, kami bisa tetap makan.

Penegak Tonggak Ekonomi



Berbicara soal perkembangan rumput laut di Montomisan, tentu tak lepas dari peran para perempuan adat. Sekitar 70 persen dari pengelolaan rumput laut yang ada, dilakukan oleh perempuan adat. Mayoritas kami melakukan berbagai pekerjaan, seperti pembersihan tali sebelum digunakan untuk berlayar, pengambilan air bersih, dan sebagainya. Sementara itu, kaum laki-laki turun berlayar untuk menaburkan bibit rumput laut.

Namun, ada sejumlah perempuan yang melakukan segala proses pengelolaan rumput laut sendirian, salah satunya adalah Haji Jia. Saya biasa memanggilnya Tata Haji. Ia berusia 58 tahun serta lahir dan besar di Montomisan. Begitu pun dengan kedua orangtuanya. Tata Haji sudah mulai bekerja untuk mengembangkan rumput laut sejak 1999 saat berusia 36 tahun.

“Kalau macam saya ‘kan, ya, saya semua yang mengerjakan. Tapi, bagi yang punya suami, laki-laki cuma ambil bibit, sementara kalau perempuan ‘kan masak, yang mengurus dan mengikat tali (untuk rumput laut). Apalagi, kalau ada anak, urus anak sekolah,” ungkap Tata Haji saat mengisahkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di Montomisan.

Tata Haji merupakan salah satu perempuan tangguh yang saya kagumi di sini. Ia hidup seorang diri dan bekerja keras hingga mampu menjalankan ibadah naik haji. Tata Haji menjadi perempuan pertama dari Desa Montomisan yang berangkat haji. Hal itu mendorong saya untuk berbincang lebih jauh dengan Tata Haji.

Jika pada musimnya atau cuaca sedang mendukung, Tata Haji bisa menjual rumput laut sekitar 800 kilogram (kg) hingga satu ton setiap musim. Saat itu, ia menjualnya dengan harga Rp4.500 per kg.

Harga jual rumput laut di Montomisan memang fluktuatif, tetapi kecenderungannya naik terus. Saat awal-awal rumput laut masuk ke Montomisan, harga jual masih berkisar Rp3.000 per kg. Harga terus naik dan mencapai titik tertinggi pada 2018, yakni Rp21.000 per kg. Selepas itu, harga turun hingga berkisar Rp14.000 di titik ini.

Segala uang yang dihasilkan dari panen rumput laut, ia tabung untuk kehidupan selama beberapa bulan. “Kalau ada kelebihan, saya simpan untuk naik haji,” ujarnya.

Umumnya, perempuan di sini akan berlayar ke laut saat masa panen untuk mengambil hasil rumput lautnya. Kemudian, kami akan menjemurnya di daratan. Selepas dijemur, kami memikul hasil panen untuk ditimbang dan dibawa ke tengkulak untuk dijual. Perjalanan menuju tengkulak, menuruni bukit sekitar satu kilometer dari perumahan warga. Biasanya, dalam satu kali perjalanan, perempuan di sini memikul sekitar 25-30 kg. Mereka akan bolak-balik menaiki dan menuruni bukit dalam proses dari panen hingga penjualan rumput laut.

Saat cuaca sedang mendukung, kami bisa panen dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Sementara, jika cuaca sedang tak mendukung, kami bisa gagal panen sepanjang tahun dan mengalami kerugian karena modal yang keluar lebih besar daripada rumput laut yang dihasilkan sebagaimana yang terjadi sejak tahun 2018.

Jika dipikir-pikir, peran rumput laut begitu besar bagi para perempuan adat dan secara luas bagi Masyarakat Adat Montomisan. Mengutip yang disampaikan salah satu teman saya, Arbia (37 tahun), “Kalau bukan agar (rumpaut laut), ya, orang-orang di Desa Montomisan mungkin *ngga* bisa membiayai anak sekolah, tidak bisa punya rumah.”



Warga bergotong-royong mengikat rumput laut sebelum melepaskannya ke lokasi pembibitan di laut.



Dari Dapur ke Laut

Suatu siang di awal Juli 2021, saya, Arbia, dan Hasrawati berkumpul di rumah tantenya Hasrawati. Jarak rumah kami tak begitu jauh. Awalnya, kami berkumpul untuk memasak ubi banga dan ikan kuah, lalu membahas rumput laut. Namun, karena ternyata ikan sedang tak ada, kami memakan ubi dan mi kuah. Selepas makan, kami saling menceritakan pengalaman mengenai pengelolaan rumput laut di Montomisan.

Hasrawati, seorang ibu dari tiga anak, sudah mengelola rumput laut sejak 11 tahun lalu. Ia lahir dan tumbuh di Montomisan, sementara suaminya merantau untuk bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebelum mengelola rumput laut, Hasrawati sudah bekerja selepas lulus dari Sekolah Dasar (SD). Ia sempat bekerja untuk perusahaan sawit sebagai buruh harian dengan upah Rp7.500 per hari. Kemudian, ia merantau ke Makassar, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah untuk menjadi pekerja rumah tangga.

“Bertemu jodoh pun di perantauan. Terus kawin umur 20 tahun,” ucapnya.

Selepas pulang dari perantauan, Hasrawati tertarik untuk mengembangkan rumput laut. Ia belajar dengan melihat cara pengelolaan yang dilakukan oleh teman-teman sesama perempuan adat.

“Saya mendayung sendiri ke tengah laut. Panas, hujan seharian, kadang bisa berhari-hari,” kisahnya.

Kemudian, Hasrawati mengisahkan bagaimana keseharian yang kini dijalannya dengan bekerja sebagai ibu rumah tangga, berkebun, dan mengelola rumput laut.

Hasrawati biasa bangun tidur sekitar pukul 04.30 pagi. Selepas bangun tidur, ia merapikan rumah, memasak untuk sarapan keluarga, serta menjalankan ibadah salat Subuh. Apabila sedang musim panas, maka di sela-sela paginya tersebut, ia menyempatkan diri menuruni bukit sekitar satu kilometer untuk mengambil air agar bisa masak, mandi, dan sebagainya.

Pada saat anak-anaknya telah berangkat sekolah, Hasrawati akan kembali memasak. “Jadi kalau mereka pulang sekolah, makanan sudah siap.”

Sekitar pukul delapan pagi, Hasrawati akan kembali menuruni bukit untuk berangkat melaut dan mengurus rumput laut. Perjalanan melaut biasanya menghabiskan waktu sekitar delapan sampai sepuluh jam dalam sehari, bergantung dari seberapa banyak bibit yang ia tanam. Dalam perjalanan ke laut, ia juga membawa sejumlah pakaian kotor, sehingga apabila ia selesai melaut sebelum malam tiba, maka ia bisa menyempatkan diri untuk mencuci pakaian di penampungan air yang ada di pantai.

“Pulang *capek-capek* dari rumput laut, masih perlu *capek-capek* cari air lagi, cuci piring, memasak, apalagi kalau mati lampu. Belum lagi kalau minyak tanah tidak ada,” ujar Hasrawati sembari tertawa.

Mendengar jadwal keseharian Hasrawati yang sangat padat, saya refleksi berkata, “*Capek* juga, ya, perempuan”.

“*Capek* sekali, ya Allah,” balas Hasrawati sembari menghela napas. “Tapi, sudah terbiasa, *toh*.”

Masalah keterbatasan akses terhadap air, menjadi masalah yang membuat perempuan adat memiliki beban yang semakin berat. Saat musim panas atau kering, kami harus berjalan naik-turun bukit untuk sekadar memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari, seperti mandi, masak, cuci piring, cuci baju, dan sebagainya.

“Kalau ada air, jadi *ngga* terlalu *capek* memikul. Itu prioritas nomor satu untuk perempuan adat di Montomisan. Jadi, kalau pulang *capek-capek*, itu bisa langsung masak dan sebagainya. *Ngga* perlu bolak-balik ambil air lagi ke laut,” ungkap Hasrawati. “Kebutuhan nomor satu itu air.”



Terpuak Hama dan Cuaca

Keletihan yang dialami Hasrawati selama beberapa tahun ke belakang, tak tergantikan dengan keuntungan yang setimpal. Hasrawati justru mengalami kerugian dalam pengelolaan rumput laut. Padahal, apabila mengingat kondisi beberapa tahun yang lalu, ia sempat mengalami panen sukses.

“Dalam satu kali panen, bisa mendapatkan sampai Rp20 juta lebih, hampir satu ton. Tiga tahun kemarin, 2018 itu. Tapi, tahun kemarin, *ngga* mencukupi. Sampai sekarang ini, belum ada hasil,” ungkapnya.

Kegagalan rumput laut bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ketika ada lumut yang menjadi hama dan mengganggu perkembangan rumput laut. Namun, lumut yang tak terlalu parah masih bisa diatasi dengan cara dibawa ke dekat pondok warga dan dibentangkan di sana. Rumput laut akan didiamkan di sana agar lumut itu dimakan oleh ikan. Apabila lumutnya sudah berkurang atau tidak ada, maka akan dikembalikan ke lokasi pembibitan.

Faktor kedua, yang paling sulit dikendalikan, adalah cuaca. Perubahan iklim membuat cuaca semakin tak menentu dan tak bisa ditebak. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi perkembangan rumput laut di Montomisan.

“Kalau angin terlalu kencang, rumput laut banyak jatuh, dan dimakan ikan. Kalau terlalu banyak curah hujan, dia jatuh dan rusak juga. Jadi, dia pasnya di musim yang sedang-sedang saja, angin sepoi-sepoi, tidak terlalu hujan, tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas, juga bisa bermasalah,” jelas Hasrawati.



Kondisi rumput laut yang rentan patah, terutama ketika ada ombak besar. Ini biasanya terjadi karena kualitas bibit yang buruk.

Cuaca yang tak menentu dan kerap kali datang secara ekstrim, seperti hujan deras, atau mendadak sangat kering, berpengaruh bagi pendapatan kami. Akibatnya, beberapa tahun belakangan, pendapatan kami turun. Terlebih, dengan kondisi pandemi, kami semakin sulit pergi ke mana-mana untuk mencari penghasilan lain.

“Tiga tahun ini macet dan tidak ada modal,” ungkap Hasrawati. “Kalau ada modal, mungkin jadi. Terus mau mencari modal untuk keluar, juga susah karena Covid.”

Tak hanya Hasrawati, Arbia juga menyampaikan permasalahan yang serupa. “Sekarang masalahnya modal tidak ada,” tuturnya.

Berbeda dari Hasrawati, Arbia tinggal seorang diri di Montomisan. Ia memang asli dari Montomisan, begitu pun dengan ayah dan ibunya. Arbia sudah menghabiskan sekitar 20 tahun mengelola rumput laut, sejak 17 tahun.

“Sekarang tidak ada rumput laut. Mau mendapatkan uang di mana? Kalau laki-laki kerja di bangunan (menjadi buruh harian), kalau perempuan di pasar atau apa?”

Arbia merasa semakin sulit mencari uang di tengah kondisi pandemi dan rumput laut yang terus gagal selama beberapa tahun ini. Kondisi Arbia jelas menggambarkan masalah yang kami hadapi di Montomisan. Kini, Arbia berusaha mencari cara lain untuk mendapat uang, salah satunya dengan menjadi buruh harian di Kabupaten Banggai untuk membersihkan kebun. Upah yang didapatnya beragam, mulai dari Rp50.000-70.000 per hari. Selain itu, Arbia juga tetap berkebun.

“Kalau berkebun memang rutin, biarpun tidak ada uang. Tapi, yang penting ada makanan, ada ubi,” kata Arbia.



Solidaritas Perempuan Adat

Saya bukan asli dari Montomisan, melainkan baru tinggal di sini sejak 2019. Kampung asal saya berjarak sekitar 75 kilometer dari Montomisan. Saya pindah ke sini mengikuti suami. Namun, kini Montomisan juga telah menjadi rumah saya.

Saat pindah ke Montomisan, saya merasa disambut dengan baik oleh Masyarakat Adat di sini, terutama para perempuan adat. Bersama mereka, saya banyak belajar untuk memahami proses pengembangan rumput laut. Tak jarang pula mereka memberikan bibit rumput laut untuk saya. Saat berbicara dengan Arbia, saya semakin memahami mengapa hubungan sesama perempuan adat sangat erat.

“Kalau saya *ngga* punya agar, terus ada yang punya, ‘kan gampang. Bisa saling *kasih* bibit, saling membantu. Saya juga begitu, semisal ada yang *ngga* punya bibit dan saya ada, saya *kasih* atau teman yang lain kasih,” jelas Arbia.

Kami, para perempuan adat di Montomisan, juga kerap kali bertemu satu sama lain atau berkumpul. Biasanya, kami saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengelolaan rumput laut, termasuk perihal dari mana bibit yang bagus, bagaimana kondisi cuaca belakangan ini, bagaimana trik agar rumput laut tetap berhasil dipanen, dan bagaimana cara mendapatkan uang apabila rumput laut gagal.

Tak terasa, percakapan saya dengan Arbia dan Hasrawati di hari itu telah memakan waktu beberapa jam. Tak terasa hari sudah sore. Selepas bercakap dan bertukaran pikiran dengan mereka, saya menyadari bahwa perempuan adat adalah perempuan-perempuan yang luar biasa kuat, lincah, dan tekun. Kami menghabiskan banyak waktu, mulai dari bekerja di dapur, di kebun, hingga di laut. Di tangan kami, sebetulnya denyut kehidupan terus terjaga.

* * *



Kisah dari Kampung Montong Baan: Kedaulatan Pangan untuk Kedaulatan atas Wilayah Adat

27

Oleh Rosa'adah bersama Safina Maulida

Sejarah kami, Masyarakat Adat Montong Baan, bermula dari masyarakat Kedatuan Desa Laek dan Kerajaan Selaparang. Sejarah itu selama ini disampaikan secara lisan secara turun-temurun. Perjuangan dan pergulatan di awal leluhur kami tinggal di daerah ini, tak banyak diketahui.

Saat ini, kami telah bertambah banyak hingga mencapai sekitar 7.000 jiwa dengan 2.700 kepala keluarga. Saya Rosa'adah adalah salah satu perempuan adat di Kampung Montong Baan. Saya akan menuturkan peran perempuan adat dalam menegakkan kedaulatan pangan.

Sebagian wilayah adat, kami kelola secara komunal dan bersama-sama. Hasilnya pun kami nikmati bersama. Ada sebagian yang dikelola secara individu atau keluarga. Dalam Masyarakat Adat, kami ada beberapa bentuk kepemilikan tanah sesuai peraturan adat kami. Ada tanah-tanah yang diatur oleh lembaga adat untuk dikerjakan secara komunal, namun ada juga yang dikelola oleh kelompok keturunan atau individu pewaris. Misalnya, sawah ladang yang dimiliki secara turun-temurun dari nenek moyang. Peraturan adat tentang pengelolaan tanah, termasuk sumber daya alamnya, di dalam wilayah adat, kami atur dengan semboyan *Tunah Bareng-bareng*. Semboyan itu bermakna bahwa kita bersama-sama memelihara dan menjaga warisan leluhur dengan baik agar bisa diwariskan kembali ke anak dan cucu.

Sistem pertanian di Montong Baan sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, baik dari peralatan yang digunakan maupun cara bercocok tanam hingga cara panen. Banyak dari rangkaian praktik yang menggunakan kearifan lokal. Sedangkan pemanfaatan halaman tempat tinggal atau pekarangan rumah, dijalankan secara maksimal, sehingga kami bisa mandiri dalam urusan pangan. Tanaman yang ada di halaman kami, kebanyakan adalah sayur-mayur, seperti cabai, terong, tomat, brokoli, bayam, dan kacang-kacangan.

Saat berbicara tentang kerja secara komunal, kaum perempuan adat adalah elemen penting dalam Masyarakat Adat kami. Dalam hayatan Masyarakat Adat Montong Baan, peran terbesar perempuan adat adalah dalam hal pengelolaan pangan. Pengelolaan pangan nyaris tidak disentuh oleh kaum lelaki.

Pengelolaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam prinsip kedaulatan pangan yang kami junjung tinggi. Sebab, dari panganlah ada keberlanjutan, keharmonisan, dan kehidupan adat yang dapat terus berjalan. Mengelola pangan bukan berarti melulu sekadar menyediakan makanan. Mengelola makanan, termasuk di dalamnya menyediakan makanan, adalah presentasi dari peran kami sebagai pengampu kehidupan.

Pelaksanaan adat juga bermula dari pangan. Politik pangan, seperti seni dan ilmu khusus dalam menyiapkan makanan terbaik untuk agenda tertentu, harus disiapkan oleh kaum perempuan adat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan adat kian dipahami sebagai bagian vital dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan adat itu sendiri.

Menyajikan makanan menjadi salah satu bentuk kedaulatan pangan. Itu merupakan salah satu upaya para perempuan adat mengorganisasi diri untuk lebih berdaya, memiliki daya keberlanjutan dalam hidup, dan membentuk perempuan adat menjadi sosok yang mandiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

Begitu juga dengan kegiatan *banjar*, *mate*, *merariq*, dan *begawe* yang selalu melibatkan pangan di dalamnya. Bentuknya biasanya berupa beras, hasil hutan, dan hasil pertanian lain sebagai bagian dari kedaulatan pangan yang diambil dari hasil alam sekitar di wilayah adat kami. Dalam ragam adat dan prosesi yang panjang, ada unsur pangan yang telah menyebabkan terbentuknya kebersamaan. Salah satu contohnya ada pada saat kelahiran. Ibu yang baru saja melahirkan, akan banyak dijenguk tetangga ataupun kerabat yang membawa hasil bumi dari panen untuk kebutuhan ibu dan bayi. Proses adat dan cara kedaulatan pangan itu membawa begitu banyak kebaikan.

Yang menjadi pertanyaan, “Bisakah kami mempertahankan kedaulatan pangan ini?” Saya rasa, tak hanya kedaulatan pangan yang akan dipertaruhkan, tetapi juga nilai silaturahmi dan gotong-royong juga terancam hilang. Dalam agama, itu bisa mengakibatkan buta mata dan hati.

Ketersediaan pangan kami ditopang oleh apa yang disediakan alam. Sebagai pengelola pangan, perempuan adat hidup dan tumbuh dengan alam. Kedekatan kami dengan lingkungan, adalah kedekatan yang dinyatakan dengan tekad untuk merawat dan melestarikan alam. Kami tak hanya memanfaatkan alam.



Berawal dari Bertanam Padi

Ketersediaan pangan sebagai muara kedaulatan pangan, bisa ditilik dari hayatan tentang bercocok tanam. Kedaulatan pangan, misalnya diawali dari cerita menanam padi, mulai dari proses menyiapkan bibit padi (*binek pare*), menyemai (*ngampar*), mencabut bibit padi dari persemaian (*reas*), hingga menanam padi di sawah (*lowong*). Setelah ditanam, beberapa minggu kemudian para perempuan adat akan membersihkan gulma di tanaman padinya (*ngome/ngeder*). Selanjutnya, juga tugas perempuan adat untuk memanen (*matak*) hingga memasukkan hasil panen itu ke lumbung pangan. Jadi, kesimpulannya bahasa keterlibatan bukan kalimat yang tepat untuk kaum perempuan adat, melainkan perempuan adat-lah pemeran utama dalam proses kedaulatan pangan. Ketelatenan perempuan adat itu tidak kalah dengan laki-laki. Biasanya, perempuan adat menjadi lebih teliti, rapi, dan bersih atau kami sebut *lindi* dan *seriri*.

Panen adalah peristiwa yang sakral, di mana kita sebagai manusia menerima pemberian alam. Dalam struktur sosial dan budaya kami, panen menjadi hal penting dalam isu keberlangsungan kehidupan kami, tradisi kami, dan ritual adat kami. Dalam sejarah Montong Baan, perempuan adat memiliki peran penting pada tradisi khusus untuk masa panen. Kami memegang patokan berdasarkan kalender Sasak (*urige perhitungannya*) untuk menetapkan waktu yang tepat kapan memulai bercocok tanam.

Bulan satu pada kalender kami, biasanya jatuh pada Mei dan itu ditandai dengan munculnya bintang *rowot* secara berangsur-angsur. Biasanya, kami mulai menanam padi pada bulan sembilan sampai sepuluh. Masyarakat Sasak memercayai bahwa menanam padi pada bulan-bulan itu akan memberikan kelimpahan hasil panen. Semboyan kami mengatakan “*penok iwak, penok bulu.*” Itu sekaligus menjadi nama untuk padi-padi lokal kami.

Tugas perempuan adat berlanjut ke proses panen yang dilakukan dengan cara tradisional. Proses panen padi *bulu* yang ditanam, menggunakan *rangkap* atau sabit untuk memotong bagian tangkai padi. Apabila menanam bibit bukan jenis itu, maka proses panen tetap menggunakan cara tradisional, yaitu dengan cara memukul padi yang sudah disabit menggunakan *penggabah* yang terbuat dari kayu dan bambu. Pada saat panen, kami biasanya saling membantu untuk meringankan biaya dan beban. Dalam bahasa kami, itu kami sebut *siru* atau *berisu* (kerja bergantian).

Jika waktu panen bersamaan dan tidak bisa saling bantu, maka akan diupahkan dengan sistem panen yang disebut *bederep* dan *begae*. *Bederep* artinya memberikan upah dengan dengan hitungan *nyelikur* (dua puluh satu) dan *nyolas* (sebelas). Artinya, jika hasil panen yang didapatkan dua puluh satu ikat, maka satu ikatnya untuk tenaga yang melakukan panen. Begitu juga dengan sistim *nyolas*. Jika mendapatkan sebelas ikat, maka satu ikat untuk tenaga panen dan sepuluh ikat untuk pemilik padi.

Setelah hasil panen dibawa pulang, sebelum naik ke lumbung, hasil panen dirapikan terlebih dahulu dengan mengikat padi berderet lima (satu ikat seberat sekitar lima kilogram). Hal itu untuk memudahkan penghitungan jumlah yang didapatkan. Setelah diikat dan dibersihkan, baru diajar untuk dijemur sampai kering. Sebelum disimpan di lumbung padi, biasanya ada ritual *Roah*, artinya memberikan doa selamat atas rezeki yang diterima dan menzakatkan harta benda yang didapatkan.



Padi yang menjelang matang.

Setelah hasil panen masuk ke lumbung padi, kegiatan berikutnya adalah membersihkan sawah atau ladang untuk persiapan tanaman berikutnya, seperti palawija, biji-bijian, ubi tanah, dan lain lain. Setelah panen tanaman di musim kemarau, kami menunggu datangnya musim hujan. Kaum laki-laki biasanya mengadakan *peresean*, yaitu salah satu permainan tradisional Suku Sasak menggunakan perisai yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau dan rotan. Para lelaki akan saling pukul. Kami percaya bahwa bila banyak darah yang keluar akibat pukulan, maka hujan akan cepat turun.

Menurut kalender kami, datangnya musim hujan (*turun taun*) adalah saat matahari tegak lurus (*tumbuk jelo*) dan tepat berada di atas kepala pada siang hari. Sekitar tanggal 6-8 pada bulan *Komariah* atau Oktober. Sehari setelahnya, Masyarakat Sasak menyebutnya *bao daye*, artinya sudah *turun taun*. Pada saat itu, kami harus bersiap-siap *pentun sampi* dan *pentun binek*. Di sanalah, awal kami mulai sibuk, terutama kaum perempuan adat, dalam menyiapkan dan menurunkan bibit dari lumbung. Kemudian, mempersiapkan *bubus pare* melalui ritual *Pentun Sampi* dalam menyambut datangnya musim hujan.

Pernah pada suatu kali, lahan pertanian mengalami kekeringan akibat kurangnya curah hujan, sehingga mengakibatkan gagal panen. Bahkan, pernah juga terjadi krisis pangan. Musim paceklik itu mengakibatkan banyak orang mati kelaparan. Kendati demikian, meski hujan turun hanya sekali pada musim tanam, namun tetap menyebabkan tanah menjadi subur setelah kering sekian lama. Ketika disiram air hujan, tekstur tanah berubah menjadi gembur dan subur lagi. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, karena pengaruh cuaca dan pola tanam yang dilakukan empat kali dalam setahun, cenderung menyebabkan tanah menjadi kurus walaupun mendapat banyak air hujan.



Adat dan Agama dalam Narasi Iman Dialogis

Bagi Masyarakat Adat Montong Baan, adat selalu berdampingan dengan agama. Budaya gotong royong masih kental dengan keseharian kami. Misalnya, dalam adat perkawinan, di mana segala proses seperti dua sisi mata uang sebab agama dan adat tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah upacara *Sorong Serah Aji Krame* yang merupakan acara sakral yang memiliki nilai-nilai agama dan filosofi yang cukup luas dan mendalam.

Dari sisi filosofis, agama senantiasa berdampingan dengan adat secara utuh dan menyeluruh. Peran adat dan agama sangat penting di tengah-tengah Masyarakat Adat. Jika berjalan selaras, maka akan tercipta suasana masyarakat yang damai dan harmonis. Karena, pada dasarnya, adat dan agama tidak bisa terpisahkan. Selain mengatur tata cara dan perilaku manusia, keduanya juga dapat menjadi tuntunan kehidupan.

Agama dan adat tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu hal saja kurang, maka akan terjadi ketimpangan. Kita sebagai manusia - dari sejak dalam kandungan, lahir, hingga pada kematian - memiliki fase-fase yang harus kita tempuh. Dalam fase-fase kehidupan tersebut, senantiasa terdapat proses adat dan agama secara bersamaan. Dalam Masyarakat Adat Montong Baan, keduanya selalu dijalankan.

Saat ini, tradisi kami masih menggunakan pola-pola tradisional yang hasilnya tak kalah dengan sistem modern. Walaupun semua proses tersebut memakan waktu dan tenaga, tetapi tidak menghilangkan kearifan lokal yang mesti dipertahankan sebagai warisan para leluhur. Proses sebelum penanaman padi misalnya, tahap demi tahap harus dilakukan dengan teliti, mulai dari menyiapkan bibit padi pilihan, menyiapkan penyemaian, membajak sawah, hingga memanen dan memasukkan hasil panen ke lumbung pangan. Setiap tahapan dalam proses tersebut, senantiasa dilakukan dengan menjalankan ritual-tual adat dan berdoa sesuai ajaran agama sebagai bentuk permohonan kepada Sang Maha Kuasa.

Adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, akal pikiran, dan - lebih-lebih dengan - hukum. Secara garis, ada tiga fungsi besar adat, yaitu pertama, mengatur manusia di segala aspek; kedua, menjadi garis kontrol agar tidak keluar dari garis ketentuan adat yang diwariskan leluhur; dan menegak-teguhkan kepribadian sebagai orang Sasak, di mana kepribadian kami adalah berwacana manis, bertingkah halus, bertata krama *tindih*, dan berhati mulia.

Bahasa yang sopan santun dan lemah lembut, menjadi bagian penting yang perlu dipertahankan. Sifat dan karakter yang ada pada diri kita tentang kebaikan dan kebenaran, harus tetap ada. Semuanya muncul tidak serta merta, namun harus melalui proses belajar. Kami meyakini bahwa dari keselarasan agama dan adat itulah bergulir keharmonisan yang lantas bisa mewujudkan.



Perempuan Adat Sebagai Peristiwa

Dalam Masyarakat Adat Montong Baan, sejak dahulu sudah menjadi satu keharusan bagi para perempuan adat untuk terlibat dalam semua kegiatan adat, salah satunya adalah saat pesta (*begawe*). Perempuan adatlah yang banyak terlibat, mulai dari memasak, menyiapkan makanan, sampai membersihkan peralatan yang digunakan saat acara. Kami bukan hanya terlibat, tetapi memegang peran penting apapun bentuk kegiatannya, baik budaya, pertanian, maupun berdagang. Perempuan adat ada di garda paling depan.

Peran perempuan adat tidak hanya sampai di situ. Dapat dilihat pada saat *bejango* (mengunjungi kerabat), baik yang sakit maupun melahirkan, biasanya dalam adat kami, yang diutus ialah perempuan adat terlebih dahulu. Urusan pesta pun begitu. Jika perempuan tidak terlibat, maka terasa tidak lengkap. Perempuan adat mengarahkan sisi ucapan, tingkah laku, tindak tanduk, dan perbuatan ke arah yang baik.

Dari sisi pengetahuan dan peran, perempuan adat sudah hampir sama dan setara dengan kaum laki-laki. Beberapa kepemimpinan sudah terisi oleh keterwakilan perempuan. Hal itu bisa dilihat di beberapa jabatan dalam kepemimpinan, di mana sudah ada keterwakilan perempuan dan sudah didukung oleh pemerintah setempat. Saat ini, keterlibatan kaum perempuan, baik dalam instansi pemerintah maupun lembaga lain, sudah mulai dilirik karena sudah muncul pemahaman bahwa tanpa perempuan, maka semua kegiatan terasa tidak utuh.



Aktivitas berkebun yang dilakukan oleh para perempuan adat.

Ada satu contoh di masa lampau, di mana seorang pimpinan perang jika hendak pergi berperang, maka perempuan (istri) menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari pakaian, senjata, hingga bekal kebutuhan selama berperang. Selain itu, para perempuan juga yang mendoakan suaminya, kemudian mengantar suaminya sampai ke tapal batas. Setelah ditinggalkan, dia harus menjaga rumah, harta benda, menjaga anak, dan dirinya sendiri dari gangguan.

Saat ini, kondisi perempuan adat di kampung kami, sudah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Perempuan adat sudah memiliki peran tidak hanya sebatas menyiapkan konsumsi di dapur. Kami pun berani berpartisipasi dan bergabung dengan para lelaki dalam segi apa pun.

Banyak contoh tentang peran perempuan adat di kampung, salah satunya pada acara kematian. Peran perempuan adat sangat dibutuhkan dari hari pertama hingga hari kesembilan. Pada hari kedua, biasanya kegiatan para perempuan adat adalah menampi beras, membuat aneka jajan yang dibutuhkan, dan melakukan pelaksanaan *gawe* di hari kesembilan. Hari kesembilan merupakan puncak acara. Pada hari tersebut, kesibukan para perempuan adat sangat banyak, mulai dari menyiapkan makanan hingga membuat *dulang penamat* yang diisi berbagai jenis makanan dan hasil bumi, baik biji-bijian maupun umbi-umbian.

Jika dilihat dari perannya, kontribusi perempuan adat selama ini sudah banyak. Selain mampu menjaga kelestarian alam, perempuan adat juga memberikan peran dalam berbagai kegiatan adat. Tidak hanya sebatas tenaga dan pikiran, melainkan memberikan ide-ide kreatif yang mendukung kemajuan adat ke depannya.

Saat ini, perempuan adat sudah bisa menghimpun diri dalam sebuah organisasi adat dan mampu mengorganisasi semua anggota dalam adat istiadat yang ada di lingkungan Masyarakat Adat. Kami mengorganisasi diri melalui kaderisasi, sosialisasi, dan pertemuan-pertemuan lintas perempuan di kampung. Berbagi cerita dan pengalaman menjadi bagian dari cara untuk mendekatkan diri pada para perempuan adat di kampung-kampung. Kami membahas isu-isu strategis dan mencari solusi ragam masalah yang dihadapi perempuan adat. Posisi perempuan adat dalam kepemimpinan adat, dapat dilihat pada lembaga-lembaga adat yang didirikan di tingkat kampung untuk mengurus adat istiadatnya secara baik. Tidak jarang, perempuan adat menjadi pemimpin. Selain itu, di beberapa kegiatan adat, termasuk ritual, para perempuan adat pun menjadi salah satu kelompok yang berada di barisan terdepan sebagai pemandu dan pemimpin jalannya upacara.

Di Montong Baan, terdapat salah satu komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN. Para perempuan adat kemudian membentuk sebuah persekutuan yang anggotanya khusus perempuan dan sudah bergerak kurang lebih dua tahun, yakni PEREMPUAN AMAN. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh kami sebagai gerakan nyata, mulai dari pemberdayaan, pengelolaan wilayah adat hingga kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan sangat perlu dipertahankan di Montong Baan. Hasil dari kegiatan Masyarakat Adat dalam bidang pangan rata-rata secara berangsur-angsur juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Kini, kami juga semakin mampu membiayai kebutuhan lain di luar kebutuhan dasar: sandang, pangan, dan papan. Sekarang, semakin banyak warga Desa Montong Baan yang mampu memperbaiki tingkat pendidikan anak-anak. Dan semua kegiatan terkait pangan dan kedaulatan pangan itu tak terhenti oleh pandemi Covid-19.



Foto bersama para perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN.

Perempuan adat berperan penting meningkatkan perekonomian keluarga. Biasanya kami bercocok tanam di sawah, ladang, atau kebun. Di samping itu, kami juga memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing untuk menanam cabai, terong, bayam, dan jenis sayur lainnya. Perempuan adat juga sudah bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun ekonomi mandiri dalam bentuk produksi kerajinan, anyaman, makanan, dan pembuatan obat tradisional sejenis jamu. Selain itu, kami juga telah memiliki Kelompok Wanita Tani, di mana ada sekitar 50 perempuan perempuan telah bergabung. Dalam pengelolaannya, semua dilakukan dengan dasar kesepakatan dan pembagian pendapatan dibagi secara adil.

“Selain itu, hasil dari kedaulatan pangan yang dihasilkan dalam bentuk materi oleh para perempuan adat, dapat dikelola dengan baik, paling tidak bisa mendirikan koperasi Masyarakat Adat yang melayani simpan pinjam bagi anggotanya,” tutur Ketua PEREMPUAN AMAN PHKom Montong Baan saat saya minta pendapatnya tentang peran perempuan adat di kampung kami. “Untuk meneruskan rencana tersebut, Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Montong Baan berkoordinasi langsung dengan Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Timur mengenai mekanisme dan syarat-syarat administrasi yang harus disiapkan. Jika telah terbentuk koperasi tersebut, diharapkan bisa membantu jalannya usaha para anggota untuk menunjang peningkatan perekonomian secara mandiri. Saya selaku ketua PHKom Montong Baan, sangat mendukung penuh program ini, berharap ke depan jauh lebih maju dan terorganisir, sehingga apa yang dicita-citakan para leluhur kita, bisa tetap terjaga, dilestarikan dan dipertahankan.”

Senada dengan itu, Sahraeni, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Baan Selatan, yang bekerja menjadi guru atau pendidik menegaskan, “Saat ini, kondisi perempuan adat di kampung, jika dilihat dari beberapa aspek, sudah mengalami perkembangan. Dari sisi peran, baik dari segi pendidikan maupun peningkatan kemajuan perekonomian. Perempuan adat di kampung adalah semua perempuan yang masih terikat atau memilih adat istiadat sebagai dasar dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, peran kami (adalah) sebagai akar atau pondasi dalam berbagai kegiatan yang masih dijalankan dalam kampung itu sendiri.”

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, Pemerintah Desa telah membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Masyarakat Adat. Salah satu poinnya adalah tentang adat perkawinan. Perdes tersebut menitik beratkan pada pencegahan pernikahan dini untuk menghindari *stunting* dan gizi buruk. Apabila ada salah satu warga yang melanggar aturan tersebut, kami juga akan memprosesnya secara hukum. Secara keseluruhan, perempuan adat di Montong Baan telah mengambil peran penting dari berbagai aspek demi masa depan generasi mendatang, lingkungan dan sumber daya alamnya, serta penghormatan terhadap hak kami sebagai perempuan adat.

* * *



28

Kisah dari Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Percut Saentis: Perempuan Melawan Penjajah Wilayah Adat

Oleh Mahyuni bersama Gemma Holliani Cahya

Kemerdekaan adalah kata yang ingin dirasakan hampir setiap individu. Kemerdekaan Indonesia pun demikian: menjadi cita-cita para bapak bangsa dan mereka yang berjuang untuk lepas dari kekuasaan penjajah Belanda. Namun, rupanya bagi bagi Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Percut Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kemerdekaan membawa cerita lain.

Kemerdekaan membawa cerita derita, terutama bagi para perempuan adat di Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Kemerdekaan melahirkan luka yang tersimpan hingga kini. Mereka menyimpan bekas luka dan kisah kekerasan. Luka dan kekerasan yang mereka alami saat mereka berjuang melindungi wilayah adat, keluarga, dan rumah mereka.

“Ini tanah kami sejak dahulu. Wilayah adat kami. Kalau kami diusir dari sini, lalu bagaimana lagi kami bisa hidup?” kata Mahyuni membuka luka.

Mahyuni adalah seorang warga Kampung Percut. Usianya 59 tahun. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Mahyuni masih dengan sepenuh hati dan seluruh semangat yang ada terus melakukan apa pun yang dia bisa lakukan untuk mempertahankan wilayah adat.

Mahyuni menjabat sebagai Petua Adat Kampong Percit Saentis Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Organisasi itu dibentuk tahun 1953 oleh Masyarakat Adat Rakyat Penunggu untuk menyatukan kekuatan dan pikiran serta merebut kembali wilayah adat. Pembentukannya dibutuhkan karena Masyarakat Adat hidup tersebar di berbagai kampung di Kabupaten Deli.

Di dalam tulisan ini, Mahyuni mengisahkan apa yang telah dialami dan diperjuangkan oleh Masyarakat Adat untuk merebut kembali wilayah adat.

* * *

Saya Mahyuni. Tidak mudah untuk menceritakan kembali semua kisah yang telah kami alami selama berjuang. Semua terasa menyakitkan. Di kampung ini, kami menyimpan mimpi besar bahwa suatu saat kedamaian dan ketenangan akan tercipta kembali di wilayah adat kami. Kami berharap, kelak anak cucu kami akan hidup dengan sejahtera di atas wilayah adat yang kami kelola bersama.

Nenek moyang kami telah bermukim dan tinggal di wilayah itu sejak dahulu. Tanah di sini subur. Masyarakat Adat hidup dari bercocok tanam serta menikmati hasil bumi dari kampung ini.



Perkebunan Tembakau Belanda

Semua ketenangan dan kedamaian hidup kami, lenyap. Segalanya berubah ketika Belanda mulai menjajah bumi pertiwi. Memasuki tahun 1920, Belanda menyewa wilayah adat kami yang dikenal sebagai Akte Van Konsesi dan mengubahnya menjadi perkebunan tembakau yang luas. Perkebunan itu tumbuh pesat, sehingga Belanda harus mendatangkan buruh kontrak dari Tiongkok, India, dan Pulau Jawa.

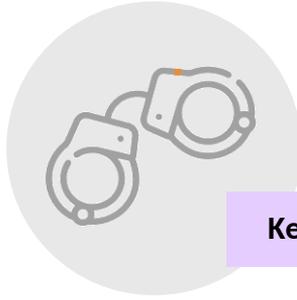
Sejak masa itulah, nama “Percut Saentis” disematkan; nama yang artinya kampung tempat para ahli pertanian berkumpul.

Sebelum Belanda masuk ke wilayah adat kami, nenek moyang warga Percut Saentis mempraktikkan sistem bertanam dengan cara berpindah-pindah dari satu sisi hutan ke sisi hutan lain atau yang biasa kami sebut dengan tradisi berladang *reba*. Namun, sejak penjajah Belanda masuk dan mereka menguasai lahan kami, Masyarakat Adat tak bisa lagi melakukan perladangan berpindah. Pada masa itu, kami hanya bisa bertanam di atas areal perkebunan tembakau yang telah dipanen.

Sepanjang penjajahan Belanda, hanya satu harapan warga Kampung Saentis, yaitu, suatu hari nanti Indonesia, negeri tercinta ini, akan merdeka. Kami bermimpi bahwa dengan kemerdekaan itu kami bisa kembali sepenuhnya mengelola wilayah adat kami.



Tanaman padi di lahan yang berada di dalam wilayah adat.



Kemerdekaan yang Menyakitkan

Kemerdekaan yang diimpi-impikan berpuluh-puluh tahun itu akhirnya tiba. Penjajah Belanda akhirnya benar-benar pergi. Namun, alih-alih mengembalikan wilayah adat ke tangan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Percut Saentis, negara Indonesia-lah yang justru merebut wilayah adat kami.

Seluruh wilayah adat, termasuk kebun tembakau milik Belanda itu, lalu dinasionalisasikan dan menjadi milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN). Masyarakat Adat Rakyat Penunggu sejak itu dilarang untuk bertanam di lahan itu. Nasib kami lebih buruk dibandingkan saat dijajah Belanda. Pihak PTPN dan preman-premanya yang menjaga area tersebut tidak segan membakar rumah dan ladang warga, mengintimidasi, menangkap, dan melukai kami.

Kemerdekaan yang kami impi-impikan rupanya hadir dengan wajah penjajahan baru.

Kali ini, terasa lebih sakit karena yang melakukannya adalah saudara sendiri, negara sendiri, yang seharusnya melindungi kami yang hidup di Kampong Percut Saentis.

Perempuan Adat dari Kampung Percut Saentis



Tak sekali dua kali kami berbondong-bondong masuk ke lahan yang sudah dikuasai PTPN, mulai dari bertanam hingga mendirikan rumah hanya untuk kemudian diusir keluar kembali.

Usaha Masyarakat Adat Rakyat Penunggu lewat BPRPI untuk menyelesaikan konflik agraria dengan PTPN, telah dilakukan berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, belum ada hasil yang memuaskan dan bisa menjawab tuntutan kami.

Saya terkenang akan peristiwa demi peristiwa pengusiran dan konflik yang kami hadapi dengan jelas seperti baru terjadi kemarin. Saya bisa mengingat betul setiap tanggal kejadian-kejadian perlawanan kami.

Pada Rabu, 10 Mei 1995, sekitar 200 orang warga kampung masuk ke wilayah yang telah dikuasai PTPN. Di sana, kami menanam tanah dengan jagung dan kacang.

Beberapa bulan kemudian, saat tanaman kami sudah mulai tumbuh tinggi datanglah preman-preman PTPN II. Lalu, mereka merusak dan membat habis semua tanaman itu. Kami diusir oleh mereka. Banyak warga kampung yang ketakutan, lalu pergi. Tersisa sekitar 100 orang dari kami yang masih bertahan, termasuk saya. Saya tidak bisa pergi dari situ. Saya tidak punya pilihan lain. Anak saya banyak. Hanya dengan bertani di situlah kami bisa makan.

Pada, Selasa, 20 Agustus 1996, preman-preman kembali memporakporandakan ladang dan rumah warga di area tersebut. Banyak rumah dibakar dan tanaman pun ditebas. Padahal, saat itu tinggal menunggu 15 hari lagi jagung kami siap dipanen.

Kami tidak menyerah. Kami tidak punya pilihan lain. Meski takut dan khawatir, kami tetap maju dan pelan-pelan kami kembali mencoba untuk menanami lahan tersebut.

Kami, para perempuan adat, yang selalu berdiri paling depan karena kami tahu kalau kami biarkan laki-laki kami yang maju, maka akan terjadi yang lebih parah lagi. Mungkin akan jatuh korban jiwa. Jadi, kami perempuan adat ini yang selalu di depan.



Para perempuan adat membersihkan bibit padi.

Tahun 1997, konflik kembali terjadi. Kali itu, tak hanya sebatas membakar tanaman kami. Saat itu, saya hendak membersihkan tanah adat saya. Saya melihat preman-preman PTPN II sudah berdiri di pos tempat biasa kami berkumpul. Saya dan beberapa perempuan adat datang mendekat dan bertanya dengan sopan apa keperluan mereka. Kami malah diserang. Ibu-ibu hamil didorong sampai terjatuh dan terluka. Seseorang dari mereka memukul keras mulut saya hingga gigi saya patah. Banyak korban yang mereka pukul sampai harus dibawa ke rumah sakit, termasuk saya. Ketua kampung kami waktu itu, Pak Ramadi, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara 10 tahun lamanya.

Amarah warga kampung seketika membara. Beberapa dari mereka menyiram bensin ke selusin sepeda motor para preman yang menyerang mereka, lalu membakar semua kendaraan itu.

Erlin Erlina yang berusia 40 tahun, anak pertama saya, berkata bahwa segala kenangan buruk tentang serangan-serangan pihak PTPN itu membuatnya trauma hingga sekarang.

“Umur saya masih belasan tahun saat itu. Saya masih kecil. Saya melihat sendiri bagaimana preman-preman menyerang ibu-ibu hamil dan memukul kami dengan balok kayu. Saya melihat ibu saya dikeroyok dan dipukul lima laki-laki. Wajah ibu saya berdarah-darah. Beberapa giginya patah hingga ia harus memakai gigi palsu sampai sekarang. Melihatnya diperlakukan seperti itu, benar-benar membuat saya marah dan sedih,” kata Erlin.

Meski banyak yang terluka dan trauma, namun perempuan adat dan warga Kampong Percut Saentis tak bisa lama-lama bersedih karena kami harus selalu siaga dan siap melawan serangan-serangan yang ditujukan pada kami.

“Tahun 2012, rumah yang saya bangun di wilayah adat kami didatangi beberapa anggota PTPN II,” kata Victoria Juntak, salah satu perempuan adat yang aktif mempertahankan wilayah adat di Kampong Percut Saentis.

“Mereka bilang, saya tidak boleh bangun rumah di area itu. Jantung saya berdebar-debar kencang menghadapi mereka. Tetapi, saya tidak mengalah begitu saja. Saya lawan mereka, saya tidak mau meninggalkan rumah saya yang saya dirikan di atas wilayah adat kami. Karena itu, saya harus bolak-balik urus masalah ini di kantor polisi dan kantor desa,” kata Victoria.

Tak hanya mengintimidasi warga kampung, PTPN II juga mencabuti papan-papan yang berlogo dan bertuliskan BPRPI di seluruh kampung. Sejak kemerdekaan negeri ini, kampung kami tak pernah lagi terasa aman. Pilihannya hanya melawan atau terusir. Dan kami, perempuan-perempuan adat di Kampong Percut Saentis memilih yang pertama.

“Selama 10 tahun, saya tinggalkan anak laki-laki saya di rumah ibu saya, sementara saya tinggal di atas tanah adat (wilayah adat) ini. Alasan saya memilih keputusan yang berat ini, adalah karena saya ingin melanjutkan perjuangan mendiang suami saya untuk merebut kembali hak kami atas tanah adat kami. Saya tidak bisa melepas begitu saja perjuangan ini,” kata Renta Uli, salah satu perempuan yang aktif berjuang untuk wilayah adat.

Keputusan Renta untuk bermukim di lahan itu tahun 2007, tidak lantas membuat perjuangan menjadi mudah. Dia pun merasakan serangan-serangan intimidatif yang dilakukan oleh pihak PTPN II kepadanya.

“Baru lima bulan saya tinggal di situ, ada lima tentara yang memasang plang-plang penanda agar saya tidak menanam atau membangun rumah di situ. Saya marah, plang-plang itu saya cabut dan buang di selokan. Melihat itu, tentara-tentara yang membuat penanda itu marah dan hampir menampar saya,” kata Renta.

Kami Siap Mati



Konflik dan perjuangan tak henti-hentinya terjadi di sekitar lahan adat. Kantor BPRPI sempat dibakar habis oleh PTPN II, alat-alat berat didatangkan untuk meluluhlantakkan semua rumah dan perkebunan yang sudah dibangun warga.

“Tapi, kami kompak. Kami kumpulkan masyarakat desa dan kami melawan. Kami hadang itu alat-alat berat yang dibawa masuk ke lahan adat kami. Apa yang kami perjuangkan ini penting bagi kami. Maka, walaupun kami harus mati di atas tanah adat kami, kami siap,” katanya.

Tak hanya kepada warga kampung sendiri, peran perempuan adat di Kampong Percut Saentis juga besar bagi perjuangan Masyarakat Adat di kampung-kampung sekitarnya. Bela rasa dan semangat gotong-royong yang kami miliki, membuat perjuangan melawan relasi kuasa yang begitu mengintimidasi tersebut menjadi lebih ringan.

Ada 67 kampung yang menjadi tempat tinggal Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Dan kami kelompok perempuan adat ini sering merasa bahwa kami seperti lebah yang setia kawan. Kalau ada sarang lebah lain yang diserang atau membutuhkan bantuan, maka kami segera berbondong-bondong membantu. Kami hanya bisa melanjutkan perjuangan kalau kami saling membantu dalam melawan tekanan-tekanan ini.

Ramadi, Ketua Kampong Percut Saentis, yang sempat dikriminalisasi hingga dipenjara 10 tahun karena perlawanannya terhadap PTPN II, turut menggarisbawahi pentingnya peran perempuan adat dalam perjuangan.

Saya menemui Ramadi dan dia mengakui, perempuan adat mempunyai peran penting dalam menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga Kampung Percut Saentis akhirnya mendapatkan pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Kampung Percut Saentis. Proses pengakuan itu berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021.

Pengakuan itu adalah pencapaian dan hasil perjuangan kami semua. Sampai hari ini, saya sangat bangga dengan pengakuan itu. Semoga dengan pengakuan tersebut, kami bisa lebih mudah melaporkan atau meminta bantuan ketika ada suatu kejadian. Sebelumnya, ketika kami diserang, kami melapor polisi atau ke Pemda pun mereka tidak menanggapi permintaan tolong kami.

“Tak hanya perjuangan melawan PTPN, kaum perempuan adat juga besar andilnya dalam mengorganisir diri untuk membuat kebun kolektif untuk menjaga kedaulatan pangan di kampung, terutama selama masa pandemi,” kata Ramadi.



Para perempuan adat menanam padi.

Babak Baru Perjuangan



Kami sadar bahwa perjuangan kami para perempuan adat di Percut Saentis, belum selesai. Ancaman baru telah muncul di depan mata. Wilayah adat kami kini terancam digusur demi merealisasikan rencana perusahaan Ciputra Group. Ada sebuah proyek pembangunan properti yang diberi nama Proyek Deli Megapolitan.

Perusahaan properti itu akan mendirikan kompleks perumahan dan kawasan industri premium di atas wilayah adat kami. Proyek tersebut ini telah dirancang sejak tahun 2011 dan akan mulai dibangun pada 2021.

Perusahaan Ciputra Group akan menjalin kerja sama dengan PTPN II. Mereka bakal membangun di atas tanah seluas 8.077 hektar dan akan menelan biaya sekitar Rp128 triliun. Semua warga di Kampung Percut Saentis sudah tahu tentang itu.

Saya memohon, tolong kami, jangan biarkan Deli Megapolitan merampas wilayah adat kami!

Kami tetap berharap bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat dapat segera disahkan. Lalu, wilayah adat kami bisa menjadi rumah dan sumber hidup bagi anak-anak kami. Mimpi kami adalah kami bisa hidup tanpa gangguan perusahaan apa pun lagi. Jangan ancam-ancam kami lagi! Biarkanlah kami hidup damai di sini. Kami sudah lelah.



29

Kisah dari Punan Dulau: Yang Dulu Terusir dan Kini Pulang

Oleh Ririn Mesi Noviana bersama Gemma Holliani Cahya

Bagi saya, mengenang Ayah adalah juga mengenang sejarah Punan Tugung di Desa Punan Dulau. Ada bagian yang gelap, yang terang, dan yang abu-abu, di mana itu menjadi hal yang sedang kami perjuangkan.

Ayah saya - seperti banyak warga Masyarakat Adat Suku Punan Tugung - tidak pernah mengenyam pendidikan. Namun, kepada saya, anak pertamanya yang perempuan ini, dia berpesan agar saya bersekolah tinggi, sehingga saya bisa memiliki hidup yang lebih baik darinya. Dia amat mendukung saya untuk kuliah.

Tapi, kami bukan keluarga berada. Membayar uang kuliah bukan hal yang murah, bahkan di universitas negeri sekali pun. Saya teringat bahwa untuk persiapan membayar Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) saja, kami tidak punya cukup dana. Tesnya memanglah gratis, tapi kami tidak punya cukup uang untuk membiayai transportasi saya ke kota, di mana tempat tes itu diadakan.

Maka, dua hari sebelum rencana keberangkatan saya ke kota untuk tes SMPTN, sejak pagi Ayah masuk ke hutan. Malam itu, Ayah pulang. Wajahnya lelah, namun senang. Dia membawa dua ekor babi hutan besar yang diburu dan ditangkapnya sendiri di hutan. Besoknya kedua babi langsung dijual dan seluruh uangnya diserahkan pada saya.

Kalau bukan karena dua babi hutan yang ditangkap Ayah itu, saya tidak akan punya cukup uang, bahkan untuk berangkat tes. Saat tahu saya lolos SMPTN dan akhirnya berhasil masuk jurusan Ekonomi Pembangunan, Ayah menjadi yang paling bersemangat.

Saya masih ingat pesan beliau sebelum saya berangkat kuliah. Kepada saya, dia mengingatkan untuk terus bersemangat kuliah. Kepada saya, dia berjanji untuk membantu sekuat tenaganya agar saya bisa lulus kuliah. Saya masih ingat pesannya sebelum saya berangkat kuliah.

“Tidak ada cukup harta yang bisa saya tinggalkan untuk kamu. Yang saya bisa beri, adalah pendidikan,” katanya.

Maka, sepanjang saya kuliah, Ayah bekerja ekstra keras; lebih banyak mencari madu, lebih sering berburu, lebih rajin mencari ikan di sungai. Begitu banyak jalan yang dilaluinya untuk demi mimpi besar yang dititipkannya pada saya.

Saat akhirnya saya lulus kuliah dan wisuda tahun 2018, Ayah bukan main bangganya. Setahun kemudian, Ayah meninggal dunia.

Saya bukan saja anak pertama yang berhasil dihantarkan Ayah hingga menggapai gelar sarjana, tapi saya juga adalah perempuan pertama di Masyarakat Adat Punan yang dihantarkannya meraih gelar sarjana. Kini, saya melayani Masyarakat Adat Punan dengan menjadi bagian dari Perangkat Desa di Desa Punan Dulau.

Saya senang karena setelah saya lulus, makin banyak adik perempuan di Punan Dulau yang mengikuti langkah saya untuk berkuliah juga.



Pengusiran

Keinginan Ayah untuk menyekolahkan saya dan memberikan kehidupan yang lebih baik darinya, sangatlah beralasan. Ayah telah mengalami sendiri betapa susah payahnya bertahan hidup di tanah yang asing serta dicerabut dari hutan dan kebahagiaan masih kecilnya.

Masyarakat Adat Punan Tugung telah mendiami wilayah adat di Kalimantan Utara selama bertahun-tahun dalam damai. Masyarakat Adat hidup berdampingan dengan alam yang memberikan apa yang dibutuhkan dan kami menjaga bumi sebagai sumber hidup.

Orang Punan hidup dengan damai dan berkecukupan dengan berburu dan berladang secara nomaden yang merupakan tradisi dan mata pencaharian kami secara turun menurun. Hutan menyediakan tumbuhan obat-obatan, bahan pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Semuanya baik dan cukup.

Namun, pada 1972, sekitar 130 jiwa warga Punan Tugung yang mendiami hutan adat di Punan Dulau seluas 22.139 hektar di hulu Sungai Magong, dipaksa pindah oleh pemerintah ke sebuah desa di luar hutan adat dengan alasan agar warga dekat dengan lokasi pelayanan administrasi pemerintah setempat.

Ayah yang saat itu masih kanak-kanak beserta orangtuanya, adalah salah satu keluarga yang diusir dari hulu Sungai Magong. Tidak terlalu banyak detail yang Ayah ingat tentang pemindahan itu. Namun, Kakek Tawang, seseorang yang dituakan di komunitas adat kami, mengatakan pada saya bahwa dia mengingat masa itu dengan jelas. Kepada saya, Kakek Tawang bercerita bahwa pemerintah mengatakan kalau pemindahan tersebut adalah bentuk perhatian kepada Suku Punan agar warga Punan bisa terjangkau program pembangunan pemerintah dan tinggal dekat dengan sekolah dan mengenal agama (bukan agama leluhur kami).

Pemerintah, dalam wujud para tentara, mendatangi Masyarakat Adat Punan yang hidup berkelompok di dalam hutan dan menyampaikan perhatian mereka ini dengan dibarengi berbagai ancaman. Beberapa orang yang menolak, dibuat lemas dengan cara direndam di dalam sungai berjam-jam lamanya. Itu dilakukan agar Masyarakat Adat takut dan patuh.

Ada juga yang diancam kalau tak turut pindah, maka akan dianggap sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia) atau musuh bangsa. Beberapa warga bahkan sampai membujuk dan mencoba menyogok tentara dengan memberikan mereka ayam hidup untuk dibawa pulang agar para tentara tidak terlalu memaksa mereka untuk pindah.

Selama bertahun-tahun, banyak dari Masyarakat Adat tetap bertahan di dalam hutan untuk menghindari dari ancaman dan bujukan. Kata Kakek Tawang, bahkan membangun rumah hingga enam kali untuk menghindari para tentara. Tapi, tentara semakin sering datang dan menekan.

Pakaian tradisional yang dipakai pun dipaksa untuk diganti. Laki-laki Punan biasanya menggunakan *ifei* (sebutan untuk bawahan serupa kancut sederhana yang dibuat dari kulit kayu), namun sejak pindah ke desa, para lelaki dipaksa menggunakan celana kain. Sementara para perempuan adat, saat itu menggunakan sarung dan kain untuk baju. Saat pindah, baik yang laki-laki maupun perempuan adat, diminta untuk mengganti baju dengan celana dan baju kain. Laki-laki Punan yang berambut panjang juga dipotong rambutnya.

Perjuangan bertahun-tahun untuk mempertahankan rumah dan hutan adat, akhirnya tak lagi bisa dilakukan di tengah tekanan para tentara. Maka, perlahan warga Punan pun pasrah diusir dari rumah sendiri, meninggalkan hutan sendiri yang selama berabad-abad telah menjadi sumber hidup. Di bawah berbagai ancaman pihak yang seharusnya melindungi, warga Punan pindah ke Sekatak Buji. Kami harus mendayung perahu dua hari lamanya untuk sampai di Sekatak Buji.

Masyarakat Punan dipaksa berpindah ke wilayah baru di Sekatak Buji seluas 4.800 meter persegi. Tak ada rumah di lahan itu. Hanya tanah kosong yang menyambut ketika datang ke tempat asing itu. Kami bergotong-royong, lalu membuat rumah-rumah darurat untuk ditinggali.

Bertahun-tahun hidup berkelompok di dalam hutan hanya di antara suku sendiri, menjadikan proses pemindahan dan beradaptasi menjadi begitu berat. Budaya, bahasa, dan cara hidup begitu berbeda dengan orang di desa. Di luar hutan, orang Punan menjadi seperti pendatang.

Orang-orang Punan tak lagi bisa dengan mudah menangkap ikan di sungai dan memakannya sehari-hari. Jika ingin ikan di Sekatak Buji, maka harus membelinya dengan uang. Jika ingin bekerja untuk mendapatkan uang, kami tak punya keterampilan yang bisa ditawarkan di jenis-jenis pekerjaan di desa tersebut.

Beberapa konflik terjadi dengan warga Sekatak Buji, Suku Tidung, yang sudah terlebih dahulu tinggal di situ. Umumnya, konflik itu tentang tanah yang ditempati oleh oleh Masyarakat Punan yang dianggap masih milik warga Desa Sekatak Buji.

Karena tak ada pilihan pekerjaan, beberapa warga Punan terpaksa berladang secara tetap dengan meminjam tanah milik warga Tidung yang sudah tidak subur lagi. Namun, beberapa tahun kemudian, sebagian dari kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke hulu sungai yang berjarak 50 kilometer jauhnya dari Desa Punan Dulau. Mereka diam-diam hidup di sana, meladang dan mencari ikan seperti dahulu.

Namun, bagi yang masih tetap tinggal di wilayah Sekatak Buji, gesekan-gesekan dengan warga Tidung kerap terjadi. Hingga tahun 2000, konflik terpendam itu pecah menjadi konflik terbuka. Warga Tidung menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan tempat permukiman warga Punan. Warga Punan Dulau meminta pemerintah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian, pemerintah membeli tanah tersebut seluas 1,7 hektar.

Konflik dan ketidaknyamanan itu harus dihadapi sambil berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Masyarakat Adat Punan Tugung tinggal berdampingan di Desa Punan Dulau seperti saat di hutan dulu. Kami tinggal berdekatan. Bertahun-tahun berlalu, Masyarakat Adat Punan pun mendirikan rumah-rumah kayu yang lebih permanen, namun masih berusaha setiap hari untuk beradaptasi dengan lingkungan modern.

Ayah harus menghadapi kegentingan masa itu tanpa orangtua. Kedua orangtua Ayah meninggal beberapa tahun setelah pengusiran terjadi. Untuk bertahan hidup, meski tak pernah mengenyam pendidikan, Ayah belajar sendiri untuk bisa Bahasa Indonesia sebagai bekal untuk berkomunikasi dengan penduduk desa-desa lain di sekitar Punan Dulau. Ayah juga belajar menulis sendiri. Sampai sekarang, saya masih sering terpukau karena tulisan Ayah begitu rapi dan indah. Entah dari mana dan bagaimana dia belajar menulis, saya tidak pernah sempat bertanya.

Semakin dewasa, saya semakin menyadari semua itu dilakukannya untuk bertahan hidup di dunia yang baru. Hingga akhir hayatnya, Ayah harus membuktikan pada dunia yang baru bahwa meski tak pernah sekolah, dia mampu bekerja dengan baik. Bagiku, Ayah mahir segalanya. Rumah tempat tinggal kami pun dibangunnya sendiri. Tangan dan kakinya cekatan mencipta dan melakukan berbagai hal.

Untuk menghidupi kami, Ayah melakukan sekurang-kurangnya lebih dari lima pekerjaan: berladang, berburu, mencari ikan, mencari madu, mencari rotan dan kayu gaharu di dalam hutan, dan menjadi tukang bangunan. Saya tak bisa membayangkan betapa lelah hidupnya.

Maka, mimpi Ayah agar saya bisa belajar hingga perguruan tinggi, adalah harapan dan doanya agar saya dan adik-adik saya tak perlu bekerja sekeras dia. Namun, meski makin banyak anak Punan yang bersekolah dan memiliki pendidikan tinggi, tak lantas menghapus sikap-sikap dan tatapan-tatapan diskriminatif yang warga Puan terkadang harus hadapi dalam kesehariannya.

Label “Punan” pun menjadi sering bermakna negatif dan digunakan oleh warga-warga di sekitar untuk menggambarkan seseorang yang berasal dari hutan, tidak berpendidikan dan pemalas. “Kau Punan, ya?” atau “Dasar orang Punan!” Begitu yang kerap dilekatkan pada kami sebagai Masyarakat Adat Punan.

Kata-kata itu sering kami dengar saat kami sedang berada di luar komunitas kami, seperti pasar, sekolah, atau berbagai pertemuan yang kami datangi. Seolah-olah menyindir kehidupan kami yang mereka anggap masih jauh dari perkembangan.

Banyak teman Punan yang saya temui, mengutarakan kalau itu menyakiti hati dan jantung terasa ditumbuk-tumbuk ketika mendengar kata-kata itu dilemparkan di depan kami.

Kami hanya bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk menahan diri dan bersabar. Saya terkadang berharap orang-orang yang memandang rendah kami, suatu ketika diberi kesempatan untuk memahami tentang tahun-tahun kisah perjalanan kami yang dicabut dari hutan, rumah, dan dipaksa hidup di tempat yang benar-benar asing bagi kami. Semoga cerita yang saya kisahkan di buku ini bisa membantu mereka memahaminya.



Para perempuan adat mengisi tanah yang sudah dicampur dengan pupuk alami ke dalam *polybag* sebagai media tanam.



Kehidupan di Dalam dan Luar Wilayah Adat

Saat di hutan dahulu, Masyarakat Adat Punan mungkin dipandang terbelakang dan miskin oleh pemerintah dan masyarakat di luar hutan. Namun, masa-masa itulah yang merupakan paling membahagiakan kami. Kami hidup harmonis dan damai di dalam hutan. Kekayaan hutan yang melimpah, dapat mencukupi kebutuhan. Dan kami mengambil secukupnya sesuai yang kami butuhkan.

Saat di hulu sungai, dulu kami dengan mudah bisa menemukan pohon damar yang getahnya bisa digunakan untuk membuat api dan penerangan. Ada daun *opow* yang bisa digunakan untuk membuat ketupat, *kedabang*, bahkan atap pondok rumah. Buah-buahan hutan berlimpah. Ada rotan *segah* untuk bahan anyaman bakul dan untuk mengikat kayu untuk membuat rumah dinding. Ada buah *avang* atau *tengkawang* yang bisa kami pungut dan jual ke desa. Madu hutan berlimpah dari pohon manggis. Selalu ada sumber protein cukup yang bisa kami dapatkan dari berburu babi hutan, rusa, pelanduk, payau, ayam hutan, dan ikan segar di sungai, seperti ikan *kalawor*, *tembaring*, *sopong*, *barob*, dan *pelian*.

Ketika pemerintah memaksa dan mengancam mereka untuk pindah dari rumah di hulu sungai, seolah-olah hidup kami sedang diperhatikan dan didorong agar lebih sejahtera. Nyatanya, yang dirasakan tidak demikian. Kehidupan setelah keluar dari hutan, sangatlah susah. Kakek Tawang berkata kalau kebingungan untuk menyambung hidup di tempat yang baru. Ketika menyekolahkan anak-anak agar memiliki hidup yang lebih baik, banyak yang akhirnya tak selesai bersekolah karena tak punya cukup uang untuk menutupi biaya. Jika ingin menyekolahkan anak, maka seringkali kami harus meninggalkan anak-anak di desa dan menitipkan anak-anak pada keluarga-keluarga di luar Komunitas Masyarakat Adat Puan, sememntara para orangtua pergi kembali ke daerah hulu sungai untuk berburu dan mencari apa-apa yang bisa dibawa ke desa untuk dijual.

“Sementara kami mencari nafkah, anak-anak kami lalu di-Islam-kan oleh mereka. Seperti anak saya juga begitu,” kata Kakek Tawang.

Banyak warga kami akhirnya terpaksa memeluk agama lain untuk melancarkan proses sekolah dan pekerjaan serta meninggalkan kepercayaan nenek moyang, yaitu *Aduk Lawang*.



Hutan

Kata Kakek Tawang, saat masih tinggal di hulu sungai, kami sering dikunjungi oleh Yaming, pedagang keturunan Tionghoa yang sering menawarkan dagangannya. Lewat Yaming, kami biasanya mendengarkan kabar dan kehidupan di luar hutan.

Kata Yaming, dalam perjalanannya berdagang, dia telah melihat banyak tempat kehilangan hutannya karena telah digarap perusahaan. Dia berkata, tidak menutup kemungkinan bahwa hutan kami akan bernasib serupa di beberapa tahun ke depan. Kakek Tawang dan masyarakat lain yang mendengarnya, tak percaya.

“Ah, bagaimana bisa habis, pohon di hutan besar-besar dan banyak sekali! Bagaimana mungkin perusahaan bisa menebangnya?” tanya Kakek Tawang saat itu.

Ada dari kami tidak percaya bahwa mesin-mesin akan menggerus hutan kami dan merebut rumah serta sumber hidup kami.

Hingga tahun 1988, wilayah adat kami secara resmi dimasukkan oleh Menteri Kehutanan kala itu menjadi wilayah konsesi perusahaan kayu di bawah kendali PT Intracawood Manufacturing (Intraca). Perusahaan kayu itu beroperasi dengan mengantongi izin hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 226.326 hektar untuk dieksploitasi selama 75 tahun.

Namun, pada 2003, izin tersebut dianulir Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan izin baru untuk 45 tahun melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 335/MENHUT-II/2004 dengan luas menjadi 195.110 hektar di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau di Kalimantan Timur.

Pada 2004, perusahaan tersebut mulai memasuki wilayah adat kami secara diam-diam. Akibatnya, kami mengalami kesulitan untuk membuka lahan baru untuk berkebun karena seluruh wilayah adat sudah dikuasai oleh pihak perusahaan.

Saat ini, kondisi hutan adat kami sudah rusak karena bekas operasi alat berat dari PT Intraca. Pohon-pohon besar sudah habis ditebang, kini yang tersisa tinggal pohon-pohon berdiameter kecil. Dulu, saat saya masih kecil dan pertama kali mengunjungi hutan adat kami di hulu sungai, saya kagum dengan keindahan pemandangan hutan. Sering saya temui rombongan kupu-kupu bersayap kuning yang menari-nari di antara tanaman-tanaman liar. Kini, pemandangan itu tak ada lagi.

Para tetua adat kami, di antaranya Kakek Tawang, Nenek Pimping, dan Nenek Inum, juga merasakan hal yang sama. Hutan adat yang begitu kami cintai dan rindukan, sudah jauh berbeda dari yang dulu. Banyak tumbuh-tumbuhan obat yang rusak.



Pembakaran untuk penyiapan ladang.

Perempuan Adat



Di tengah kehidupan baru yang asing dan penuh kerinduan untuk kembali pulang ke hutan, - rumah kami yang jauh - perempuan adat memegang peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya Punan.

Budaya berladang (*meladang*) tak akan berlanjut jika perempuan adat tak hadir di dalamnya. Saat berladang, perempuan adat yang paling tahu bibit apa yang sebaiknya ditabur pada musim apa dan bagaimana mengurus ladang hingga panen.

Pengetahuan tentang ramuan dan obat-obatan Masyarakat Adat Punan yang diturunkan sejak nenek moyang kami, tidak pernah dicatat. Ilmu obat-obatan tradisional itu diturunkan turun-temurun, terutama kepada perempuan adat agar kami dapat menggunakan tumbuh-tumbuhan di sekitar untuk mengobati diri dan keluarga.

Namun, kini generasi muda perempuan adat telah memulai perekaman ilmu yang berharga itu. Sebut saja salah satunya adalah Sri Tiawati yang ikut memperjuangkan dan mempertahankan wilayah adat dengan rutin menuliskan sejumlah tumbuhan hutan yang bisa diramu menjadi obat-obatan. Pencatatan yang dilakukannya tersebut dibantu oleh Nenek Inum.

Tanaman hutan yang kami sebut *puli nesom* biasa digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit diare, sakit perut, nyeri badan, dan keracunan. Akar, batang kayu, dan daunnya memiliki khasiatnya sendiri-sendiri. Tanaman tersebut biasa digunakan untuk mengobati luka di dalam tubuh, misalnya seperti ibu yang baru saja melahirkan. Selain *puli mayo*, ada juga *kiliu* yang bisa digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh dan pemulihan pasca-persalinan.

Masih banyak tanaman obat lain dan khasiatnya. Dan hanya para perempuan adat dari Masyarakat Adat Punan yang mengetahui tentang ilmu pengobatan tradisional itu. Kami yang paling sering menggunakannya untuk mengurus anggota keluarga yang sakit. Dengan dibantu oleh Nenek Inum dan banyak perempuan adat lain, Sri Tiawati mencatat jenis-jenis tanaman, khasiat, dan cara menggunakannya. Kini, generasi berikutnya akan memiliki catatan tentang tanaman obat. Sampai sekarang, Sri dan perempuan-perempuan adat lainnya masih terus mencatat.

Para remaja maupun pemuda adat juga banyak yang peduli pada tanah dan hutan yang telah diwarisi nenek moyang. Saya menyempatkan diri untuk mewawancarai Yenni dan Ayu, dua mahasiswi dari Punan Dulau yang sedang kuliah di Fakultas Hukum. Keduanya tengah bergelut dengan proposal skripsi. Yenni rencananya akan membahas tentang pemindahan Suku Punan Tugung pada 1972, sementara Ayu tentang hak ulayat dan pemanfaatan sumber daya alam Masyarakat Adat. Ketika saya ajak mengobrol, keduanya mengaku mengambil topik tersebut karena ingin mempelajari dan menggali lebih banyak tentang apa-apa saja yang terjadi di wilayah adat. Saya begitu senang berbicara dengan keduanya. Yenni dan Ayu masih muda dan tampak peduli dan ingin mengunjungi serta mengumpulkan lebih banyak informasi. Proposal penelitian Yenni dan Ayu pun mendapat dukungan dari dosen pembimbing yang saat ini juga sedang merevisi dan memperbaiki tulisan saya yang membahas tentang hukum adat di Masyarakat Adat Punan Tugung.

Perempuan adat dari Suku Punan Tugung juga berperan besar mengembalikan hutan ke tangan Masyarakat Adat. Saya termasuk salah satu yang ikut serta dalam perjuangan itu. Berbagai masalah muncul selama proses negosiasi, termasuk miskomunikasi di antara warga Suku Punan sendiri.

Tahun 2020, kami memberi izin PT Intraca untuk masuk ke wilayah adat kami. Pemberian izin kepada mereka dilakukan untuk memperoleh akses masuk ke dalam permukiman kami dan memperlancar rencana kembalinya kami ke daerah asal kami di hulu sungai. Kami melakukan musyawarah dengan PT Intraca di rumah adat di Desa Punan Dulau pada November 2019 setelah mencapai kesepakatan dan PT Intraca setuju dengan persyaratan-persyaratan yang kami ajukan.

Saya masih ingat saat saya, perempuan adat lain yang saya panggil Kak Nurharyati, dan beberapa perwakilan Masyarakat Adat mengunjungi PT Intraca untuk mendesak mereka segera merealisasikan janji-janji mereka, termasuk pembukaan jalan menuju hutan adat di hulu sungai dan pembinaan bagi Masyarakat Adat.

Berkali-kali kami harus datang dan bersitegang dengan perusahaan yang sepertinya ingin mengulur-ulur waktu. Pernah kami datang dengan truk saat hujan deras. Sering juga kami harus berjalan menerobos lumpur untuk bisa berdialog dengan mereka. Seringkali, Kak Nurharyati harus membawa dua anaknya yang masih kecil dalam perjalanan kami itu. Saya begitu salut padanya sebab ia begitu gigih berjuang dan mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Perempuan adat di Desa Punan Dulau sudah bergerak sejak kami mengenal AMAN. Bagi saya, peran dan kontribusi perempuan adat sangat besar. Kami bisa saling meningkatkan kapasitas kami. Sebagai perempuan adat, kami bisa melindungi diri kami, bersaing secara adil, dan tidak dianggap remeh oleh para lelaki.

Sangat penting bagi perempuan adat untuk menjadi pribadi yang cerdas dan perpengetahuan karena kami yang akan meneruskan ilmu pengetahuan tentang hidup Masyarakat Adat kami kepada anak dan cucu kami.

Kami juga perlu dibekali ilmu dan pengetahuan agar kami siap menghadapi permasalahan yang terjadi di desa, terutama jika terjadi konflik atau negosiasi dengan perusahaan seperti yang sedang kami alami.

Namun, kenyataannya selama ini peran perempuan adat dalam pengambilan keputusan masih nyaris tidak dilibatkan. Dalam tradisi kami yang masih kental dengan kultur patriarki, segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan selalu dilakoni oleh kaum laki-laki. Saya pikir ini perlu segera diubah. Laki-laki di komunitas kami pun perlahan-lahan mengakui peran kami dalam mempertahankan hutan adat kami. Semoga segera ada tokoh perempuan yang diikutsertakan dalam kepemimpinan lembaga-lembaga di desa kami.

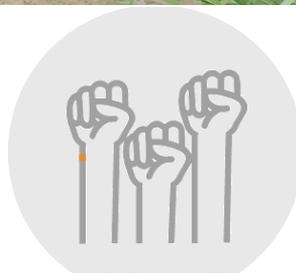
Perjuangan kami untuk mendorong pembukaan jalan akhirnya berbuah manis. Pada Agustus 2020, PT Intraca menepati janjinya atas desakan kami. Kami terus dorong mereka untuk semakin membenahi jalannya dan membuatnya menjadi lebih bagus dan aman. Bagi banyak generasi muda, pembukaan jalan itu juga adalah langkah pertama dalam hidup mereka untuk kembali terhubung dan menapaki hutan adat yang diwarisi oleh para leluhur. Banyak dari pemuda adat pun baru pertama kali mengunjungi hutan adat kami.

Sejak jalan dibuka tahun lalu, sekitar 80 persen warga telah kembali ke hutan di hulu sungai. Secara perlahan-lahan, kami membangun rumah di tempat dulu tinggal. Kini, Desa Punan Dulau semakin sepi, apalagi sejak pandemi Covid-19 menyerang, makin banyak warga yang meninggalkan desa dan menetap di hulu sungai.

Sebagian dari kami pergi ke sana bukan hanya karena alasan keamanan agar tak tertular Covid-19, tapi juga karena kami lebih menikmati hidup di hutan yang menyediakan kehidupan.



Aktivitas bertani sayur dan tanaman rempah.



Perjuangan Berikutnya

Maka, mengenang Ayah adalah mengenang sejarah Punan Tugung di Desa Punan Dulau. Sebelum Ayah meninggal, dia berharap kami bisa bersama-sama mengunjungi makam kakek dan nenek saya. Tapi, kala itu - sebelum jalan dibuka - Ayah telah pergi dahulu.

Semasa hidupnya, Ayah sering berkisah tentang kehidupannya saat di hulu sungai. Masa kecilnya dihabiskannya untuk berburu, mencari ikan di sungai, dan memanjat pohon untuk mencari madu.

Tahun lalu, ketika jalan itu dibuka, untuk pertama kali saya mengunjungi makam kakek dan nenek saya di hulu sungai, di hutan kami, di hutan tempat Ayah tumbuh dan menikmati masa kecilnya yang bahagia.

Saat berada di sana, saya begitu bahagia. Saya mengingat sosoknya: badannya yang tegap, wajah yang selalu tersenyum, matanya yang menenangkan, tangan yang tak pernah berhenti bekerja, dan hati yang tak berhenti mengasihi saya.

Saya membayangkan betapa bahagianya dia jika tahu bahwa kami berhasil membuka jalan menuju hutan adat kami. Saya membayangkan betapa bahagianya jika dia ada di situ bersama kami semua. Ayah begitu percaya pada saya dan menitipkan mimpinya pada saya. Saya rasa itu kekuatan yang mendorong saya untuk terus maju dalam perjuangan panjang ini.

Saat ini, yang sedang kami perjuangkan adalah peta wilayah adat kami. Kami punya harapan besar bahwa peta wilayah adat kami kelak bisa ditandatangani oleh pemerintah agar keberadaan kami sebagai Masyarakat Adat dan wilayah adat, termasuk di dalamnya hutan adat kami, diakui secara penuh. Sejak tahun 2016, kami mengusahakan hal tersebut, tapi belum juga terealisasi karena camat saat itu tidak mendukung usaha kami. Namun, kami punya harapan besar tahun ini dan kami kembali mengerjakannya. Beberapa proses telah kami lakukan dengan menyiapkan beberapa persyaratan dan lampiran pendukung, seperti peta wilayah adat yang dibantu juga penyusunannya oleh AMAN. Saat ini, saya juga telah menuliskan tentang hukum adat kami yang akan menjadi salah satu dokumen yang dilampirkan dalam proses pengakuan wilayah adat kami.

Saya merasa pengakuan atas Masyarakat Adat dan wilayah adatnya sangat penting. Dengan pengakuan tersebut, kami bisa mengelola hutan adat kami, terutama menjaganya dari pihak asing yang mau merusaknya. Kami bisa mengatur apa-apa saja yang baik bagi hutan kami dan kami. Kami sudah pernah melihat sendiri apa yang terjadi ketika kami membiarkan pemerintah yang mengelolanya. Kami sudah pernah terusir dari hutan adat kami dan kami sudah melihat kerusakan yang ditimbulkan dari penebangan hutan kami. Kami sudah cukup terluka dan belajar.

Kini, masih banyak yang harus kami perjuangkan. Tapi, kami sudah berhasil melangkah bersama sejauh ini. Sebagian besar dari kami telah kembali pulang ke rumah. Kali ini, kami tidak akan membiarkan diri kami terusir kembali. Hutan ini rumah kami sebagai Masyarakat Adat Punan Tugung.

* * *



30

Kisah dari Usal Ponto Ai Padeng: Menanam dan Terus Menanam Meski Pandemi

Oleh Susilawati bersama Fadia Alaidrus

Ketakutan Ibu Nurtini atas peristiwa yang terjadi sekitar enam tahun lalu, masih terus terbawa hingga hari ini. Ia sulit untuk merasa aman seperti sedia kala. Pada 2015, terdapat setidaknya 70 unit rumah yang dirusak dan dibakar di wilayah adat Usal Ponto Ai Padeng, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah tanaman yang setiap hari dia rawat bersama perempuan adat lain, termasuk ibu saya, turut dihancurkan.

“Dampak yang didapat oleh warga, yaitu trauma mendalam,” kisah Ibu Nurtini kepada saya pada Juli 2021 lalu. Ibu Nurtini mempertegas kembali luka yang tertinggal dari konflik tersebut, “Tanaman kami rusak dan kami trauma mendalam.”

Ibu Nurtini terus mengulang ceritanya mengenai kerusakan tanaman, ketakutan yang dibawanya ke keluarganya, dan kekhawatiran yang dibawa ke wilayah adatnya. Kata “trauma” terus dilontarkan secara berulang dalam percakapan kami. Bagi kami, untuk mengingat kembali konflik yang terjadi selepas kedatangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) ke kawasan Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng bukanlah sesuatu yang mudah.

Perkenalkan, saya Susilawati, atau akrab dipanggil Ucy. Saya terlahir dari rahim sosiologis Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng sekitar 19 tahun yang lalu. Dalam keseharian, saya aktif di lingkungan Masyarakat Adat ini untuk membantu mencari jalan keluar apa yang dihadapi selama ini, baik terkait dengan urusan konflik maupun pemberdayaan Masyarakat Adat secara umum dan perempuan adat secara khusus.

Sejak kecil, saya tidak ubahnya seperti anak-anak pada umumnya yang selalu bermain dengan sesama. Perbedaannya, saya terlahir dari lingkungan Masyarakat Adat. Saya juga memiliki bapak yang menjadi Kepala Suku Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng. Nama ayah saya, Bojong Dwi. Sejak kecil, saya telah menyadari bahwa saya tumbuh sebagai bagian dari Masyarakat Adat ini.

Seiring tumbuh dewasa, saya pun belajar mengenai nilai-nilai luhur yang ada di dalam Masyarakat Adat kami. Saya juga mulai memahami tentang apa yang diperjuangkan oleh Masyarakat Adat, termasuk para tetua adat, perempuan adat, dan pemuda adat, salah satunya adalah mempertahankan hak atas wilayah adat secara turun-temurun.



Sejarah

Apabila melihat sejarahnya, Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng sudah beberapa kali berpindah lokasi. Sejarah yang tercatat tentang kami, berawal dari perang yang terjadi antara beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, di antaranya Kerajaan Gowa, Banjar, dan Bone. Saat itu, Kerajaan Gowa dipimpin oleh Raja Pasase. Kemudian, Raja Pasase ini datang ke Sumbawa, menginjak wilayah Usal, Parenten, Lanang Nunuk, dan Katelap pada 1528 yang membentuk sebuah kelompok yang dihuni oleh sekitar 10-25 keluarga.

Memasuki tahun 1533, Pasase mendirikan sebuah kampung dengan nama Batu Beduk. Kala itu, Pasase pun diresmikan menjadi pemimpin adat. Sejak itu, mulai terbentuklah apa yang kini menjadi Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng. Saat ini, Batu Beduk berada dalam wilayah adat kami, khususnya di Desa Mama. Nama “Batu Beduk” berasal dari keberadaan batu dalam ukuran besar yang ditemukan oleh Pasase.

Pasase memegang tahta tahun 1533-1573. Dalam kurun waktu tersebut, ia terus memperluas wilayah kekuasaan hingga merangkul sekitar 200 keluarga. Peninggalan mereka masih ada hingga saat ini dalam bentuk 200 makam leluhur yang tersebar di wilayah adat kami.

Selain memperluas wilayah kekuasaan, Pasase juga merapikan perkampungan, membuat wilayah khusus persawahan, peternakan, hingga perkebunan. Wilayah-wilayah tersebut masih terus terjaga dan dapat kami nikmati, termasuk segala keragaman tanaman di kebun, seperti kemiri, bangsa, dan sebagainya.

Selepas Pasase meninggal, posisinya digantikan oleh Dea Patowari. Ia memimpin kekuasaan sejak tahun 1573 hingga 1622. Di bawah kuasa Dea Patowari, ia membangun banyak sistem adat, aturan-aturan adat, termasuk mewajibkan Masyarakat Adat untuk mendapatkan izin terlebih dahulu darinya sebelum melakukan aktivitas menanam. Pada masanya pula, Batu Beduk menjadi pusat wilayah pemerintahan dan digunakan untuk beberapa ritual, seperti menaruh sesajen dan tempat meminta hujan atau petunjuk.

Kemudian, pemerintahan berikutnya dipegang oleh Dea Moyang. Dalam 35 tahun kepemimpinannya, untuk pertama kalinya Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng berpindah dari Batu Beduk ke Kampung Sarero yang saat ini menjadi lokasi Bendungan Mama, Kecamatan Lopok, Sumbawa. Bendungan Mama mengairi sawah di beberapa desa.

Kekuasaan Dea Moyang digantikan oleh Dea Mi pada 1702-1742. Dea Mi sangat feodal. Ia mempertahankan sistem adat yang dibangun oleh leluhurnya dengan kuat. Dea Mi membangun hubungan antara kerajaannya, Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng, dan Kademangan Sumbawa yang berbentuk kesultanan. Namun, kala itu Sumbawa masih di bawah penjajahan Belanda. Selama di bawah Dea Mi, terjadi banyak perselisihan dengan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil dan kesultanan di Sumbawa.

Setelah Dea Mi turun dari jabatannya, terdapat beberapa pemimpin lainnya yang memimpin, mulai dari Kepala Madin, Dahiri, hingga Kepala Desa Sarero yang bernama Biola.



Makam leluhur Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng.

Kondisi Desa Sarero, lokasi Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng, berada dalam situasi yang cukup intens sejak 1702 hingga 1977. Kami berjuang habis-habisan melawan penjajah Belanda. Setelah lepas dari Belanda, tercipta suatu sistem adat yang baru dengan istilah *Gabung* di tingkat desa.

Namun, posisi kami menjadi tak stabil kembali di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah berencana membangun waduk dan memindahkan kami yang berada di Leweng dan Tabose. Rencana tersebut terealisasi pada 1988. Masyarakat Adat dipindahkan ke Tabose, yang kemudian menjadi pusat adat Ponto sejak sekitar 1993 hingga kini.

Perpindahan kami Sarero dan Leweng membawa konsekuensi. Di lokasi yang baru, kami harus mendirikan rumah baru. Pencarian wilayah baru yang strategis untuk mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu, perlu waktu yang tidak singkat. Segala proses tersebut dijalankan melalui sistem gotong royong.



Tanah Adat dan Konflik

Merunut berbagai peristiwa sejarah, kami banyak berpindah tempat. Darah leluhur kami pun merupakan campuran dari Sulawesi dan Sumbawa. Namun, kini, kami telah membentuk tradisi yang juga telah diturunkan selama beberapa generasi atau - disebut oleh salah satu tetua adat kami, M. Zain - “Sudah menjadi keluarga baru, ada percampuran tradisi.”

Dalam proses pertumbuhan saya dari anak-anak menjadi dewasa, saya menyaksikan bagaimana konflik telah merenggut kebahagiaan kami atas tanah adat kami: ada sisa kehancuran dan ketakutan dalam diri orang-orang di sekitar saya.

Di tengah situasi penuh ketidakpastian itu, saya juga melihat bagaimana orang-orang tetap memiliki ketahanan yang tinggi untuk tak henti memperjuangkan apa yang menjadi hak kami, yaitu tanah leluhur kami.

Kami tidak rela tanah leluhur kami dirampas secara paksa oleh pihak Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ropang, termasuk melalui bentuk-bentuk program pemerintah lainnya yang mengancam posisi kami. Salah satu program yang kami kritik, adalah skema Perhutanan Sosial (PS) dari KLHK karena berpotensi menjadi ancaman bagi wilayah adat kami.

Melihat kilas balik sebelum konflik memuncak, kami mulai merasakan adanya kejanggalan dan merasa tidak aman sejak 2013. Pak Jasardi Gunawan dari Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa mengisahkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa hutan adat termasuk hutan hak dan bukan hutan negara. Putusan tersebut terangkum dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

“AMAN memenangkan perkara ini bersama seluruh Masyarakat Adat, sehingga hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Adat. Nah, refleksi lahirnya putusan itu dilakukan oleh seluruh Masyarakat Adat di Indonesia, termasuk juga Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng,” jelas Jasardi.

Selepas adanya putusan tersebut, Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng melakukan pemetaan dan memasang plang sebagai pernyataan bahwa kawasan tersebut adalah wilayah adat, termasuk makam leluhur atau Batu Beduk. Namun, tak lama setelah itu, terdapat pihak yang merusak plang. Plang rumah adat pun turut dirusak. Kami melaporkannya ke pihak kepolisian, tetapi tak kunjung ada jawaban.

Permasalahan kembali memuncak pada 2015. Terdapat sekitar 70 rumah warga yang dibakar. Rumah-rumah tersebut belum lama dibangun dan dalam kondisi semi-permanen, namun siap untuk kami huni. Kami menduga pembakaran tersebut dilakukan oleh oknum pihak KPH. Kami lantas melaporkannya ke kepolisian setempat.

“Masih belum terjawab siapa sebenarnya otak dari pelaku yang merusak dan membakar rumah ini sampai sekarang. Belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, bahkan kepala adat sudah kami pertemukan dengan Kapolres untuk menyampaikan data aset Masyarakat Adat yang dirusak,” ungkap Jasardi.

Kejadian tersebut disusul dengan adanya penebangan liar yang terjadi di wilayah adat. Kepala Adat Usal Ponto Ai Padeng pun melaporkan kembali kejadian tersebut ke Polsek Lape. Kami membawa sejumlah bukti ke kantor polisi, termasuk enam batang pohon hasil pembalakan serta menunjukkan lokasi-lokasi penebangan liar.

Sebaliknya, KPH Ropang justru menuduh bahwa hal tersebut dilakukan oleh kami. Pihak Pemerintah Desa Mama juga menuduh kami melakukan pencurian kayu. Pasca-kejadian tersebut, muncul konflik antara Masyarakat Adat dan pihak pemerintah di desa. Salah satu dampaknya adalah dirusaknya rumah adat yang berada di tengah Kampung Leweng.



Rumah adat.

“Saya mengira konflik ini bermula dari situ dengan tuduhan bahwa Masyarakat Adat ini akan merusak hutan. Padahal, mereka bukan merusak, justru mereka merawat titipan leluhur mereka secara turun-temurun,” kata Jasardi.

Tahun 2014, Kepala Desa Brang Kolong, Pemasar, Simu, dan Muer serta Kepala Camat Maronge mengeluarkan surat yang meminta Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng untuk berhenti melakukan aktivitas adat, termasuk menanam tanaman di kawasan yang mereka anggap sebagai hutan lindung atau hutan tutupan. Sementara, bagi kami, kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah adat.

Pada akhir 2017, beberapa warga adat kembali mengalami guncangan. Kami terkejut saat mengetahui bahwa terdapat kriminalisasi terhadap tiga warga adat, yakni Syarifuddin, (almarhum) Ndung, dan A. Wahab (Meng). Mereka ditangkap saat sedang melakukan aktivitas menanam padi, jagung, dan cabai di wilayah adat.

Mereka ditangkap oleh pihak KPH dan Kepolisian Plampang. Ketiganya sempat ditahan satu hari satu malam dan diminta membuat keterangan. Dalam kurun waktu tersebut, ayah saya, selaku kepala adat, mendatangi pihak kepolisian untuk bernegosiasi hingga mereka dilepaskan.

Kriminalisasi tersebut hanyalah permulaan. Setelahnya, sejumlah kriminalisasi dengan alasan yang serupa, terjadi pada kami. Akhirnya, kami melakukan negosiasi dengan KPH. Saat itu, Pak Sanapiah, selaku wakil kepala adat, mewakili proses negosiasi pada September 2018.

Namun, pada November 2019, pihak KPH Ropang dan pihak pemerintah setempat datang untuk mengusir Masyarakat Adat yang sedang menanam padi dan jagung. Pengusiran tersebut kembali memunculkan pergesekan. Kemudian, KPH Ropang melakukan pemasangan pal atau tonggak batu di areal lahan masyarakat dan persawahan.

Konflik memuncak pada September 2019. Pagi itu, sekitar pukul 10, ayah saya sedang menanam padi dan jagung, tiba-tiba didatangi Kepala Desa Mama dan perwakilan dari Kepolisian Polsek Lape yang mengusirnya. Ia dituduh melakukan perusakan hutan dan penebangan liar, lantas berujung pada adu argumentasi, bahkan hampir terjadi adu fisik. Karena tak memiliki bukti, pihak kepolisian pun tak menangkap ayah saya.

Tuduhan tersebut tidak masuk akal. Kami memiliki nilai adat untuk menjaga alam, termasuk menjaga tanaman kami: kelapa, jeruk, kopi, mente, duren, rambutan, klengkeng, nangka, dan kemiri.

Pengakuan terhadap wilayah adat kami terus digerus. Di sisi lain, kini PT Sumbawa Juta Raya (SJR) dan KPH Ropang melakukan penanaman di wilayah kebun kopi kami. penanaman tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat.

Usaha terakhir yang kami lakukan, adalah menyurati Komnas HAM untuk permintaan mediasi. Namun, hingga tulisan ini ditulis, mediasi belum berjalan.

Perempuan Adat dalam Pusaran Konflik



Perempuan memiliki posisi penting bagi kami, terutama di ranah perkebunan. Perempuan adat banyak menghabiskan harinya di kebun.

Selama konflik berlangsung, para perempuan adat turut menjadi saksi penghancuran tanaman-tanaman yang kami jaga di perkebunan di dalam wilayah adat. Terdapat beberapa perempuan adat yang kini dihantui rasa takut untuk menjalani aktivitas, terutama aktivitas lapangan seperti berkebun. Ketakutan lain adalah kekhawatiran akan ditangkap oleh KPH, aparat, atau pemerintah. Terlebih dengan situasi yang tak menentu akibat pandemi Covid-19. Beberapa juga mengalami trauma selepas menyaksikan suami atau anak mereka dikriminalisasi.

Salah satu perempuan adat tangguh yang saya kenal, adalah Ibu Hatisa. Ia sempat melihat bagaimana suaminya berkelahi dengan pihak KPH serta hampir ditangkap. Namun, ia tetap bersikeras menjaga lahan adat.

“Kita dilarang untuk menggarap lahan, maka kebutuhan tidak akan terpenuhi. Makanya, kita tetap memperjuangkan untuk menggarap lahan agar kebutuhan bisa terpenuhi. Karena dari hasil tanaman tersebut, bisa menyekolahkan anak,” kisah Ibu Hatisa.



Warga sedang memanen padi.

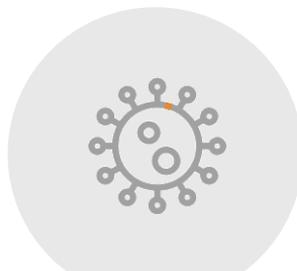
Ibu Hatisa berusia 58 tahun dan sehari-hari bertani dan mengurus rumah tangga. Ia memiliki dua anak: usia 23 tahun dan 25 tahun. Ibu Hatisa membesarkan kedua anaknya dari hasil bekerja di lahan adat.

“Saya tidak takut. Seandainya ada datang, ya, saya jawab dengan berani, karena ini wilayah Masyarakat Adat.”

Kami terus bertahan sebab belum melihat ada tanda bahwa konflik akan segera berakhir.

Saya tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan menyaksikan segala konflik yang menimpa orang-orang yang saya sayangi. Saya tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan mempelajari nilai-nilai penting oleh Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng. Kini, saya memahami bahwa sekali pun konflik tak kunjung berhenti, tetapi Masyarakat Adat tak pernah putus asa untuk terus mengembangkan diri dan menjaga nilai-nilai leluhur dan wilayah adat.

Perempuan Adat di Tengah Pandemi



Selain menjadi bagian dari Masyarakat Adat, saya juga bagian dari perempuan adat. Ibu saya, Nurtini, adalah Ketua Perempuan Adat Usal Ponto Ai Padeng. Ia dipilih melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh para perempuan adat. Kelompok Perempuan Adat terbentuk sejak 2018, terinspirasi dan melalui bantuan dari AMAN.

Ibu saya memiliki enam anak: lima perempuan dan satu laki-laki. Saya anak kelima. Anaknya yang pertama berumur 34 tahun, sementara anak yang terakhir, adik saya, berusia 11 tahun.

Ibu saya mengerjakan beberapa hal, mulai dari mengurus rumah tangga, mengurus kebun, hingga mengurus kelompok perempuan adat. Sejak pendiriannya, Kelompok Perempuan Adat Usal Ponto Ai Padeng banyak mencarikan solusi untuk masalah perkebunan dan konflik yang kami hadapi.

Sebagai perempuan adat, saya pun terlibat secara aktif dalam kelompok tersebut. Saya bertugas sebagai juru tulis, sehingga terbiasa mencatat sejumlah rapat. Catatan hasil rapat itulah yang jadi landasan untuk menjalankan sejumlah program atau kegiatan di komunitas adat. Saya juga mencatat proses berjalannya kegiatan perempuan adat. Contohnya, saya turut mengamati dan mencatat proses awal penanaman sayur, padi, palawija, dan sebagainya hingga membuahkan hasil.

Terdapat beberapa momen yang membuat saya merasa senang saat menjalankan tugas, salah satunya saat memasuki musim panen dan mencatat keberhasilan penanaman kebun. Belum lama ini, kami panen jagung, padi, cabai, dan pepaya di lahan adat.

Keberadaan kelompok perempuan adat juga membuka ruang politik bagi perempuan di Masyarakat Adat. Kami berlatih untuk menjadi lebih kreatif dan mampu mengorganisir sesama perempuan. Kami juga menjadi mampu untuk melakukan intervensi atas apa yang merugikan perempuan adat.

Kesadaran akan pentingnya posisi perempuan adat dalam berbagai aspek di Masyarakat Adat, terus tumbuh seiring dengan berkembangnya kelompok kami. Kami mulai terlibat dalam mengurai permasalahan ekonomi dan berpartisipasi dalam advokasi hak Masyarakat Adat, seperti melakukan aksi, menyusun rencana tata ruang wilayah adat, membuat draf Ranperda, dan mendorong kepala desa untuk berpihak pada Masyarakat Adat.

Perempuan Adat Menciptakan Kedaulatan Pangan



Salah satu program dari kelompok perempuan adat yang menguatkan Masyarakat Adat, adalah kedaulatan pangan. Sekali pun berkebun merupakan budaya yang dijalankan turun menurun, tetapi program kedaulatan pangan baru dibentuk pada 2020.

Kedaulatan pangan merupakan aktivitas bertanam di kebun oleh perempuan adat. Kedaulatan pangan dilakukan dengan cara mengelola wilayah adat secara berkelompok. Kami memanfaatkan lahan adat untuk menanam tanaman yang siap panen dalam waktu singkat atau sekitar tiga hingga empat bulan. Jenis tanaman yang ditanam, antara lain sayur, padi, jagung, dan cabai. Kami bekerja dengan cara melakukan pembagian tugas yang telah disepakati dalam komunitas kelompok perempuan adat.

Pengelolaan perkebunan itu membantu menopang ekonomi keluarga kami yang sebelumnya dianggap hanya ditopang laki-laki. Hal itu terjadi karena beberapa tahun lalu, tumbuh kesadaran bahwa perempuan adat juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.



Sejumlah perempuan adat menggunakan transportasi perahu menuju perkebunan di sisi Waduk Mamak.

Di tengah pandemi, program kedaulatan pangan menjadi salah satu tameng yang membantu kami untuk mempertahankan hidup, terutama saat pandemi memukul kami secara ekonomi.

Ibu Tia, salah satu perempuan yang terlibat dalam kelompok perempuan adat, merasakan adanya penurunan penghasilan di keluarganya selama pandemi. Ibu Tia pernah meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Tia memiliki dua anak yang sudah berkeluarga: berusia 28 dan 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, keluarganya terbantu melalui program kedaulatan pangan. Tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan, bahkan ia bisa menyisihkan sebagian dari hasil berkebunnya untuk dijual.

“Sudah pasti, iya, cukup membantu, yaitu dengan cara menjual sayur, cabai, dan semua hasil tanaman,” ungkapnya.

Sementara, salah satu permasalahan yang kerap kali dihadapi, adalah penyediaan bibit yang baik untuk bertanam. Penyediaan bibit pun kerap kali terbentur masalah ekonomi.

“Kendala di biaya, pupuk, dan bibit,” ungkap Ibu Tia.

Program kedaulatan pangan yang dijalankan kelompok perempuan adat juga menjadi upaya dalam mempertahankan lahan adat kami, terlebih dengan adanya konflik dan perampasan wilayah adat.

“Upaya yang kami lakukan untuk mempertahankan wilayah adat kami, yaitu dengan cara terus-menerus melakukan aktivitas di wilayah adat dan tetap melakukan penanaman,” tambah Ibu Tia.

Ia bilang bahwa biarpun tanaman kami dirusak dan rumah kami dibakar, kami akan tetap kembali untuk menanam. Itulah nilai ketahanan yang saya pelajari dari kelompok perempuan adat. Berkebun memiliki banyak nilai, mulai dari menjaga alam, mendorong aktivitas ekonomi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga membangun perlawanan.

Namun, sudah beberapa tahun berjalan, belum semua perempuan adat bergabung dalam kelompok. Alasannya pun beragam. Salah seorang yang belum bergabung adalah Supiati.

“Karena saya masih sibuk mengurus anak dan anak saya masih kecil,” ujar Supiati saat saya tanya mengapa dia belum tertarik untuk bergabung. Supiati memiliki empat anak: dua perempuan dan dua laki-laki. Anaknya yang paling besar berusia 13 tahun, kemudian dilanjutkan dengan anak yang berusia sembilan tahun, lima tahun, serta dua tahun.

Namun, sebagaimana perempuan adat lainnya, permasalahan yang Supiati hadapi pun serupa selama pandemi ini.

“Yang pasti masalah keuangan,” ungkapnya.

Supiati memiliki harapan agar kondisi kami bisa kembali aman dan jauh dari konflik. Saat ini, walau terus berada di bawah ancaman konflik dan kerap mendapatkan intimidasi, kami tetap melakukan aktivitas lapangan seperti biasa. Kami terus menanam sebagai praktik yang dilakukan secara turun-temurun di wilayah adat kami. Sekali pun masih banyak trauma yang tertinggal, kami tak lantas menyerah, apalagi pasrah.

Kami sudah menanam sejak dulu dan akan terus menanam ke depannya.

* * *

Kisah dari Kampung merupakan rangkaian buku seri berisi kumpulan kisah yang merekam pembelajaran gerakan Masyarakat Adat di tingkat kampung. "**Tangguh di Tengah Krisis**" menjadi tema besar pada seri perdana ini. *Kisah dari Kampung* ditulis secara kolaboratif dengan sudut pandang Masyarakat Adat oleh Kader AMAN (termasuk pemuda adat dan perempuan adat) bersama para jurnalis maupun penulis.

"Penyusunan buku *Kisah dari Kampung* ini berawal dari situasi, di mana Masyarakat Adat ingin menunjukkan dan menghadirkan wajah dan suara yang sesungguhnya dari realita kehidupan yang dipraktikkan oleh Masyarakat Adat, termasuk di masa pandemi. Hingga saat ini, masih banyak di antara kita sebagai Masyarakat Adat yang harus bergulat dengan *stereotype* dan stigma."

Rukka Sombolinggi
Sekjen AMAN

"AMAN hendak menegaskan partisipasi Masyarakat Adat dalam menuliskan kisah-kisah hidupnya, meliputi keterkaitan pada identitas serta serangkaian pengalaman, perasaan, dan gagasan yang personal dan politis. Maka, Buku Seri *Kisah dari Kampung* menitikberatkan pada pengetahuan yang diperoleh dari proses reflektif agar perspektif dan narasi dari Masyarakat Adat, tampil asli dan langsung sebagai subjek."

Evi Mariani & Nurdiyansah Dalidjo
Jurnalis/Koordinator

"Kolektivitas Masyarakat Adat menjaga alam dan lingkungannya, tidak lepas dari keseharian kami sejak dulu sebagai cara bertahan hidup."

Mika Ganobal
Komunitas Masyarakat Adat Fanugwa Loran,
Kepulauan Aru, Maluku

